



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

LAPORAN TAHUNAN 2024

*Annual
Report*



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

2024
LAPORAN TAHUNAN
Annual Report



BIG menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas dan fungsi strategisnya.

BIG upholds BerAKHLAK as its work culture, serving as the foundation for its strategic duties and functions.



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**





Fotografer | Photographer:

Misbachul Munir

Lokasi | Location:

**Gua Terawang, Blora,
Jawa Tengah**



DAFTAR ISI

Table of Contents



Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Kepala BIG	44
Report of the Head of BIG	



Profil Lembaga

Institution Profile

Sekilas BIG	62
A Glimpse of BIG	

Jejak Langkah	64
Company Milestones	

Visi, Misi, dan Budaya Instansi	66
Vision, Mission, and Institutional Culture	

Kegiatan Utama	69
Main Activities	

Produk dan Layanan BIG	70
BIG's Products and Services	

Struktur Organisasi	87
Organizational Structure	

Profil Kepala Lembaga	90
Profile of the Head	

Jajaran Manajemen	92
The Management	

Demografi Karyawan	99
Employee Demographics	

Keanggotaan Asosiasi	105
Association Membership	

Perubahan yang Bersifat Signifikan	107
Significant Changes	

Analisis dan Pembahasan Kinerja Lembaga

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan	110
Economic Review and Sustainable Development	

Tinjauan Kinerja BIG	113
BIG Performance Review	

Kilas Kinerja

Performance Overview

Ikhtisar Keuangan	10
Financial Performance	

Kilas Penting BIG 2024	11
Highlights of BIG in 2024	

Penghargaan BIG Sepanjang 2024	36
BIG's Awards in 2024	

Tinjauan Pengelolaan Keuangan	186
<i>Financial Management Review</i>	
Aspek Diseminasi Informasi dan Pemasaran	197
<i>Information Dissemination and Marketing Aspects</i>	



5

Tata Kelola Lembaga

Institutional Governance

Kinerja Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	204
<i>Performance in Governance and Bureaucratic Reform</i>	
Reformasi Birokrasi	204
<i>Bureaucratic Reform</i>	
Susunan Organisasi BIG	209
<i>BIG's Organizational Structure</i>	
Pengendalian Internal	219
<i>Internal Control</i>	
Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjutnya	219
<i>Audit Results From BPK and Their Follow-Up</i>	
Kinerja Bidang Hukum	221
<i>Legal Sector Performance</i>	
Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing	226
<i>Whistleblowing System</i>	
Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	227
<i>Gratification Control Policy</i>	
Zona Integritas	230
<i>Integrity Zone</i>	

Pedoman Perilaku dan Kode Etik	231
<i>Code of Conduct</i>	
Akses Informasi dan Data Lembaga	232
<i>Access to Institutional Information and Data</i>	

6

Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance

Komitmen Keberlanjutan	236
<i>Sustainability Commitment</i>	
Strategi Keberlanjutan	236
<i>Sustainability Strategy</i>	
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan	241
<i>Overview of Sustainability Performance</i>	
Kontribusi BIG untuk Keberlanjutan	242
<i>BIG's Contribution to Sustainability</i>	
Remunerasi dan Penghargaan Pegawai BIG	249
<i>BIG Employee Remuneration and Awards</i>	
Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	251
<i>Decent and Safe Working Environment</i>	
Pengembangan Kapasitas	251
<i>Capacity Development</i>	
Kontribusi untuk Masyarakat	254
<i>Contributions to Society</i>	
Kegiatan Sosial untuk Masyarakat	256
<i>Community Engagement Activities</i>	



DAFTAR ISI

Table of Contents

Fotografer | Photographer:
Joko Triyono
Lokasi | Location:
Gunung Merapi

01

KILAS KINERJA

*Performance
Overview*





Fotografer | Photographer:
Yudha Wicaksono
Lokasi | Location:
Ibu Kota Nusantara

Ikhtisar Keuangan

Financial Performance

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada Akhir Tahun
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

By the end of the year
(in Rupiah, unless otherwise stated)

URAIAN Description	2024 (audited)	2023	2022
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	22.098.365.451	21.604.793.271	29.068.321.002
Jumlah Aset Tetap Total Fixed Assets	546.746.637.694	550.673.553.316	494.131.120.692
Jumlah Piutang Jangka Panjang Total Long-Term Receivables	180.544.508	52.735.000	84.675.000
Jumlah Aset Lainnya Total Other Assets	698.322.086.961	370.825.807.809	566.217.396.936
Total Aset Total Assets	1.267.347.634.614	943.156.889.396	1.089.501.513.63
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	47.272.665.548	14.499.029.602	3.914.142.117
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	-	-	-
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	47.272.665.548	14.499.029.602	3.914.142.117
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.220.074.969.066	928.657.859.794	1.085.587.371.513
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.267.347.634.614	943.156.880.396	1.089.501.513.63



Kilas Penting Badan Informasi Geospasial (BIG) 2024

Highlights of Geospatial Information Agency (BIG) in 2024

Januari 2024 | January 2024



PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI, UPAYA BIG TINGKATKAN RB

Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BIG Tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan bukan hanya dalam rangka meningkatkan nilai RB, tapi juga untuk menentukan langkah strategis dalam upaya perbaikan. BIG telah menyerahkan data dukung RB 2023 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan saat ini tengah menunggu hasil penilaian. BIG menargetkan nilai RB pada 2023 sebesar 77 (sangat baik). BIG pada 2024 menargetkan nilai RB 80,01 (memuaskan). Berbagai rencana pun telah disusun untuk mencapai target itu, di antaranya adalah dengan melakukan revisi *roadmap* RB BIG, pendampingan intensif pada saat penyusunan rencana dan aksi, serta penetapan tim RB 2024.

MONITORING AND EVALUATION OF IMPLEMENTATION, BIG'S INITIATIVES TO ENHANCE BUREAUCRATIC REFORM

The Geospatial Information Agency (BIG) monitored and evaluated the implementation of its 2023 Bureaucratic Reform (RB) program. These efforts aimed to improve not only the agency's RB score but also identify strategic actions for further enhancement. BIG submitted the necessary supporting data for the 2023 RB evaluation to the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB) and is awaiting the assessment results. For 2023, BIG targeted an RB score of 77, classified as "Very Good," and aimed to achieve a score of 80.01, "Satisfactory," in 2024. Several initiatives were developed to reach this target, including revising its RB roadmap, providing intensive support for preparing plans and actions, and establishing the 2024 RB task force.

Januari 2024 | January 2024



12

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BIG TARGETKAN CETAK 'REKOR' PENYAMPAIAN LHKAN 100%

Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan langkah awal dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Pengisian LHKAN sangat penting sebagai deteksi dini pencegahan tindak pidana korupsi dan menjadikan tata kelola yang bersih, integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Inspektur Badan Informasi Geospasial (BIG) Habib Subagio saat Sosialisasi Pelaporan dan Kepatuhan LHKAN menjelaskan regulasi terkait pelaporan harta PNS ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Maka dari itu, seluruh pegawai BIG diimbau menyampaikan LHKAN sampai dengan 31 Maret 2024. Dipaparkan bahwa mulai 1 Januari 2023, KPK sudah menerapkan sistem pengecekan verifikasi secara otomatis. Apabila pegawai tidak langsung menerima tanda terima, berarti masih perlu ada data yang dilengkapi. Lebih lanjut Habib menjelaskan bahwa pimpinan mengarahkan agar BIG membuat 'rekor' penyampaian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKAN 100%.

BIG AIMED FOR 100% COMPLIANCE IN LHKAN

Completing the State Officials' Wealth Report (LHKAN) is the first step toward building a clean and transparent government. This process is crucial for the early detection of corruption and plays a key role in promoting integrity, accountability, and good governance. During a socialization event on LHKAN reporting and compliance, the Inspector of the Geospatial Information Agency (BIG), Habib Subagio, emphasized that the obligation to report civil servants' assets is governed by Government Regulation No. 94 of 2021 on Civil Servant Discipline. Accordingly, all BIG employees were urged to submit their LHKAN by March 31, 2024. It was noted that, starting January 1, 2023, the Corruption Eradication Commission (KPK) introduced an automatic verification system. If employees do not receive an immediate confirmation receipt, it indicates that some data still requires completion. Habib further shared that BIG's leadership has aimed for 100% compliance in both LHKPN.

Februari 2024 | February 2024

**BIG SERAHKAN HASIL KEGIATAN PEMETAAN
POTENSI KERUSAKAN GEOHERITAGE 2023**

Badan Informasi Geospasial (BIG) menyerahkan 'Hasil Kegiatan Pemetaan Potensi Kerusakan Geoheritage 2023' kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 15 Februari 2024 di Kompleks Kepatihan Danurejan, Yogyakarta. Acara tersebut merupakan wujud komitmen BIG untuk memberikan data geospasial yang dapat dilihat langsung, dilengkapi dengan analisis kerusakan lingkungan di kawasan *geoheritage*. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) BIG Lien Rosalina juga menyampaikan sejumlah catatan penting dari hasil analisis teknis. Di antaranya adanya potensi kerusakan *geoheritage* akibat meningkatnya populasi masyarakat yang berimplikasi terhadap pembangunan pemukiman dan bangunan lainnya. Ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah adanya aktivitas penambangan, pembukaan dan penggundulan area vegetasi, serta ancaman erupsi Gunung Merapi, sehingga kedepannya perlu dilakukan analisis nonteknis meliputi berbagai kajian mengenai kebijakan yang berkaitan dengan *geoheritage*.

**BIG SUBMITTED REPORT ON 2023 GEOHERITAGE
POTENTIAL DAMAGE MAPPING ACTIVITIES**

The Geospatial Information Agency (BIG) submitted Report on the 2023 Geoheritage Damage Potential Mapping Activity to the Government of the Special Region of Yogyakarta (DIY). The submission took place on February 15, 2024, at the Danurejan Kepatihan Complex in Yogyakarta. This activity demonstrates BIG's commitment to providing geospatial data that is directly observable and supported by an analysis of environmental damage in *geoheritage* areas. Lien Rosalina, Head of Center for Thematic Mapping and Integration (PPIT), presented some key findings from the technical analysis. Among the significant concerns is the increased risk of *geoheritage* damage driven by population growth, contributing to the expansion of residential areas and other infrastructure developments. Additional threats identified include mining activities, deforestation and land clearing, and the potential impact of Mount Merapi eruptions. Moving forward, incorporating non-technical analyses, including studies on relevant heritage-related policies, is needed.

Februari 2024 | February 2024



KONTRIBUSI GEOSPASIAL MENGATASI PERMASALAHAN JALUR ZONASI PPDB

Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), informasi terkait jalur zonasi selalu menjadi isu yang menarik perhatian. Jalur zona berkaitan erat dengan Informasi Geospasial (IG), beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan PPDB jalur zonasi, seperti memanfaatkan data titik koordinat sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan menggunakan fasilitas Application Programming Interface (API) Geocoding Google Maps untuk menerjemahkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) menjadi titik koordinat. Kendalanya, batas area itu diambil dari Google Maps, yang tidak memiliki aspek validasi dan legalitas. Menanggapi hal tersebut, Yogyrema Setyanto Putra dari Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) BIG dalam kunjungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) ke kantor BIG pada 27 Februari 2024, menawarkan menggunakan pendekatan persil bidang tanah seperti yang ada pada aplikasi BHUMI, sebagai solusi terkait PPDB melalui jalur zonasi. Adapun BHUMI.atrbpn adalah sebuah situs peta interaktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi spasial. Lebih lanjut, PPRT BIG juga memberikan rekomendasi kepada Disdik Jabar untuk berkoordinasi lintas sektor, salah satunya dengan Dinas Tata Ruang Kota Bandung, yang memiliki peta dasar pada skala 1:1.000. Peta tersebut bisa digunakan sebagai acuan untuk memverifikasi titik koordinat PPDB.

GEOSPATIAL CONTRIBUTIONS TO ADDRESSING CHALLENGES IN THE PPDB ZONING SYSTEM

Issues related to the zoning pathway consistently draw public attention in the lead-up to the new student admissions process (PPDB). The zoning system is closely tied to Geospatial Information (GI). Various efforts have been made to address its associated challenges. These include using school coordinate data from the Basic Education Data (Dapodik) system and the Google Maps Geocoding API (Application Programming Interface) to convert addresses from Family Cards (KK) into geospatial coordinates. However, a key concern lies in using Google Maps boundaries, which often lack official validation and legal standing. To address this issue, Yogyrema Setyanto Putra of BIG's Center for Topographic and Toponym Mapping (PPRT), during a visit from the West Java Provincial Education Office to the BIG office on February 27, 2024, proposed an alternative solution. He suggested adopting a land parcel-based approach, similar to that used in the BHUMI application, as a potential method to support the student admission process (PPDB) through the zoning system. BHUMI.atrbpn is an interactive mapping platform designed to disseminate spatial information. Additionally, BIG's PPRT provided formal recommendations to the West Java Provincial Education Office, encouraging interagency coordination. One suggested partnership is with the Bandung City Spatial Planning Office, which maintains a 1:1,000-scale base map that can serve as a reference for verifying PPDB's coordinate data.

Maret 2024 | March 2024



IG KELAUTAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SEBAGAI SOLUSI KRISIS GLOBAL

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyelenggara Informasi Geospasial (IG) nasional, berperan penting dalam pengelolaan IG Indonesia. "BIG perlu menciptakan lingkungan yang memungkinkan informasi geospasial berkembang dari titik produksi hingga penggunaan dalam kehidupan sehari-hari," ungkap Kepala BIG Muh Aris Marfai ketika membuka *The Sixth Expert Meeting of the Working Group on Marine Geospatial Information and International Seminar on United Nations Global Geospatial Information Management (UN-GGIM)* pada 4 Maret 2024 di Nusa Dua, Bali. Aris melanjutkan bahwa BIG harus memastikan bahwa data dan IG dapat dipercaya dan dimanfaatkan bagi semua orang. IG kelautan mencakup perairan pedalaman dan saluran air, zona pesisir, laut dan samudera berkontribusi terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi berbasis lokasi yang komprehensif untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan kebijakan, prioritas dan program, pengambilan keputusan, serta mengukur dan memantau kemajuan dan hasil. IG kelautan menjadi alat bantu pemerintah dalam mengambil kebijakan sekaligus membantu prioritas pembangunan, termasuk untuk menghadapi krisis iklim, dan meningkatkan ketahanan.

EFFECTIVE AND EFFICIENT MARINE GI AS A SOLUTION TO THE GLOBAL CRISIS

The Geospatial Information Agency (BIG), as the country's geospatial landscape organizer, is pivotal in managing Indonesia's geospatial information (GI). "BIG must foster an environment where geospatial information can evolve seamlessly from its production to its integration into daily life," stated his Head of BIG, Prof. Muh Aris Marfai, during the Sixth Expert Meeting of the Working Group on Marine Geospatial Information and the International Seminar on United Nations Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), held on March 4, 2024, in Nusa Dua, Bali. Prof. Aris continued that BIG must ensure that data and GI are reliable, accessible, and usable by all stakeholders. Marine Geospatial Information encompasses inland waters and waterways, coastal zones, and the open seas, contributing to the availability and accessibility of comprehensive location-based data to support the government in shaping policies, setting priorities, and designing programs. It also plays a crucial role in decision-making and tracking progress and outcomes. Marine GI serves as a government tool for policy formulation and supports national development priorities, including efforts to combat the climate crisis and enhance resilience.

Maret 2024 | March 2024



BIG KEJAR PENINGKATAN AKURASI MODEL GEOID INDONESIA

Kebutuhan akan peta dasar skala besar untuk wilayah Indonesia sudah sangat mendesak. Hingga 2023, ketersediaan peta dasar skala 1:5.000 baru mencapai 2,57% dari seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya percepatan yang dilakukan Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah menyelenggarakan survei dan pengukuran gaya berat relatif teristris, yang dilaksanakan oleh Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) pada 14–31 Maret 2024 di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Data yang dihasilkan pada survei ini akan dimanfaatkan sebagai data utama dalam pemodelan Geoid Indonesia. Model ini menjadi sistem referensi geospasial vertikal nasional yang bersifat tunggal (*single reference*) dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial. Pemodelan geoid sangat penting untuk meningkatkan akurasi peta dasar dan IG lainnya; mempermudah integrasi data geospasial dari berbagai sumber; serta mendukung berbagai aplikasi geospasial, seperti navigasi, sistem informasi geografis (SIG), dan penginderaan jauh. Hasil permodelan geoid lebih teliti karena ada densifikasi data gaya beratnya. Sementara Pulau Sulawesi sendiri dipilih menjadi fokus percepatan pemetaan skala besar, sesuai program prioritas pemerintah.

BIG PURSUES IMPROVED ACCURACY OF INDONESIA'S GEOID MODEL

The need for large-scale base maps in Indonesia is increasingly urgent. As of 2023, only 2.57% of Indonesia's territory is covered by basic maps at a scale of 1:5,000. To accelerate the development of these maps, the Geospatial Information Agency (BIG) undertook several initiatives, including a terrestrial relative gravity measurement and survey conducted by the Center for Geodesy and Geodynamics Control Network (PJKGG) from March 14 to 31, 2024, in Luwuk, Banggai Regency, Central Sulawesi. The data collected from this survey served as the primary input for developing the Indonesian Geoid model, which functions as a unified national vertical geospatial reference system. Geoid modeling is critical in enhancing the accuracy of basic maps and other geospatial information, enabling seamless data integration from multiple sources, and supporting a wide range of geospatial applications, such as navigation, geographic information systems (GIS), and remote sensing. The results of geoid models are accurate due to the densification of gravity data. Additionally, Sulawesi has been selected as the focus area for accelerating large-scale mapping, which aligns with the government's priority programs.

April 2024 | April 2024



BIG UNKAPKAN HASIL DAN IMPLEMENTASI PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA

Pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy. Mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dalam acara media gathering yang bertemakan Road to One Map Policy Summit 2024 yang digelar pada 2 April 2024, Kepala BIG selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu peta, Muh Aris Marfai, menyampaikan bahwa hasil dari KSP telah digunakan dalam berbagai isu strategis, diantaranya pengukuhan kawasan hutan, perizinan sawit, tambang dan kehutanan di Ibu Kota Nusantara; serta perizinan sawit, tambang dan Hak Guna Usaha dalam kawasan hutan; tata kelola sawit serta penyusunan tata ruang. Selain itu Kebijakan Satu Peta juga mendukung KPK dalam Stranas Pencegahan Korupsi. Hingga Maret 2024, seluruh IGT telah terkompilasi, kemudian sebanyak 141 IGT telah terintegrasi, sedangkan 16 IGT dalam proses verifikasi perbaikan, dan sebesar 86% Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT telah tersinkronisasi. Sebagai target penurunan ketidaksesuaian perizinan dan Hak atas Tanah hingga akhir 2024 yakni sebesar 9.264.325 hektare atau 8,6%.

BIG REVEALS RESULTS AND PROGRESS ON ONE MAP POLICY ACCELERATION

The government took strategic measures to advance the One Map Policy (OMP), as outlined in Presidential Regulation (Perpres) No. 23 of 2021 on the Amendment of Presidential Regulation No. 9 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of the One Map Policy at a Scale Map Accuracy Level of 1:50,000. At a media gathering event themed 2024 Road to One Map Policy Summit, held on April 2, 2024, Muh Aris Marfai, Head of the Geospatial Information Agency (BIG) and Chair of the One Map Policy Implementation Team, stated that the OMP results have been utilized to address various strategic issues. These include delineating forest areas and regulating palm oil, mining, and forestry permits within the area designated for the new capital city. Additionally, the OMP supports clarifying permits for palm oil, mining, and Cultivation Rights (HGU) in forest areas, palm oil governance, and spatial planning efforts. The One Map Policy also supports the KPK through the National Strategy for Corruption Prevention. As of March 2024, all IGTs were compiled, with 141 fully integrated IGTs, 16 undergoing verification and revision, and 86% of the Indicative Map of Overlapping IGTs synchronized to reduce discrepancies in permits and land rights, targeting 9,264,325 hectares, equivalent to 8.6% of the national land area, by the end of 2024.

April 2024 | April 2024



MENUJU RAKORNAS IG, BIG GELAR RAPAT KOORDINASI IG REGIONAL SUMATERA

BIG HELD A REGIONAL GI COORDINATION MEETING FOR SUMATRA TOWARDS THE GI NATIONAL COORDINATION MEETING

Pemanfaatan IG yang holistik, integratif, dan berkelanjutan dapat menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah (pemda). Melalui pemanfaatan teknologi geospasial, pemda dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan efektif. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut juga ditekankan pentingnya Satu Data Satu Peta yang memiliki peran dalam perencanaan pembangunan, termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penataan ruang kota dan manajemen pengurangan risiko bencana. Rakor IG Regional Sumatera dihadiri oleh 170 perwakilan pemda dan sembilan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) di Sumatera. Pada rangkaian acara dilaksanakan pula perpanjangan penandatanganan kerja sama antara BIG dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rakor dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu: diskusi panel dan coaching clinic. Diskusi panel membahas tentang penguatan tata kelola kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) bidang IG dalam menyongsong percepatan pemetaan skala besar, sementara coaching clinic diberikan terkait: konsultasi pemetaan tata ruang, konsultasi pemetaan batas wilayah dan toponimi, konsultasi geoportal/akun portal Kebijakan Satu Peta (KSP),

Holistic, integrated, and sustainable GI utilization can be a strategic instrument for local governments. By applying geospatial technology, the local governments can optimize decision-making processes, development planning, and natural resource management efficiently and effectively. The event also highlighted the importance of the One Data One Map initiative. This initiative plays a role in the development planning efforts, including sustainable natural resource management, urban spatial planning, and disaster risk reduction. This Regional GI Coordination Meeting for Sumatra was attended by 170 representatives from local governments and nine (9) people from the Center for Geospatial Information Infrastructure Development (PPIIG). As part of the event, the cooperation agreement was officially extended through a mutual signing between the Geospatial Information Agency (BIG) and the South Sumatra Provincial Government. The coordination meeting comprised two main activities, which were panel discussions and coaching clinics. The panel discussions focused on strengthening institutional governance and enhancing human resource capacity in the GI sector in anticipation of large-scale mapping acceleration. Concurrently, the coaching clinics provided consultations on spatial mapping, boundary and toponymy mapping, the geoportal/One Map Policy (OMP) user account, the Bhumandala Award/network node development,

konsultansi Bhumandala Award/pembangunan simpul jaringan, dan konsultansi pengembangan SDM IG (Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, Pelatihan dan Diklat Geospasial).

Rakornas sendiri digelar di lima kota yaitu Palembang (Regional Sumatera), Jayapura (Regional Maluku dan Papua), Bali (Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara), Balikpapan (Regional Kalimantan), dan Makassar (Regional Sulawesi).

and HR development in GI, particularly concerning the Functional Position of Mapping Surveyors and geospatial training and education programs.

The National Coordination Meeting was convened across five cities, namely Palembang (representing the Sumatra Region), Jayapura (Maluku and Papua Region), Bali (Java, Bali, and Nusa Tenggara Region), Balikpapan (Kalimantan Region), and Makassar (Sulawesi Region).

Mei 2024 | May 2024



SEMINAR NASIONAL GEOMATIKA VII, KUPAS TUNTAS PERAN IG UNTUK IKN

Badan Informasi Geospasial (BIG) menyediakan data dan Informasi Geospasial (IG) untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan Kepala BIG Muh Aris Marfai dalam Seminar Nasional Geomatika (SNG) VII, 7 Mei 2024. Aris menjelaskan terkait penyediaan data dasar wilayah IKN, BIG telah menyelesaikan penyediaan Jaring Kontrol Geodesi berupa pembangunan dan pengukuran titik 0 kilometer IKN, penyediaan titik kontrol geodesi, perekaman data pasang surut, pengukuran gaya berat, serta pembangunan Ina-CORS. BIG juga melaksanakan penyediaan Peta Dasar IKN skala 1:5.000 untuk wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. BIG juga berkolaborasi dengan Dinas Survei dan Pemotretan Udara (Dissurpotrud) TNI Angkatan Udara dalam proses pemotretan udara wilayah IKN. Segala Upaya tersebut dilakukan BIG untuk menyediakan data dan IG yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

VII NATIONAL GEOMATICS SEMINAR: IN-DEPTH DISCUSSION ON THE ROLE OF IG FOR IKN

The Geospatial Information Agency (BIG) provides data and geospatial information (GI) to support the planning, implementation, and monitoring of the development of Indonesia's new capital city (IKN). The Head of BIG, Muh Aris Marfai, conveyed this at the 7th National Geomatics Seminar (SNG) on May 7, 2024. Aris explained that BIG completed several key initiatives to provide foundational data for the IKN area. These include establishing and measuring the IKN's 0-kilometer point, developing a geodetic control network, installing geodetic control points, recording tidal data, measuring gravity, and constructing Ina-CORS stations. Additionally, BIG has produced a 1:5,000-scale basic map for the IKN covering the Kutai Kartanegara and Penajam Paser Utara regions. BIG also collaborated with the Indonesian Air Force's Aerial Photography and Survey Service (Dissurpotrud) to photograph the IKN area. These efforts were part of BIG's commitment to delivering high-quality, accurate, and accountable geospatial data and information.

Mei 2024 | May 2024



20

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

**BIG BERSAMA BADAN GEOLOGI MITIGASI
ANCAMAN LIKUEFAKSI**

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pembina penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Indonesia, berperan penting dalam upaya mitigasi bencana. Bersama dengan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merupakan walidata IGT kerentanan likuefaksi, BIG melaksanakan survei lapangan. Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka uji implementasi dokumen IGT kerentanan likuefaksi terstandar di Gorontalo pada 22-24 Mei 2024. Ginda Hasibuan, Penyelidik Bumi Madya dari Badan Geologi menjelaskan, survei kerentanan ini merupakan kelanjutan dari Atlas Zona Kerentanan Likuefaksi seluruh Indonesia skala 1:100.000 yang sudah diterbitkan pada 2019. Ia menambahkan, berkaca dari bencana likuefaksi di Palu pada 2018 dibutuhkan peta kerentanan likuefaksi dengan skala lebih tinggi. Untuk itulah Badan Geologi dengan didampingi BIG membuat standar pemetaannya agar menjadi SOP terstandar yang bisa dilaksanakan juga oleh pemerintah daerah.

**BIG TOGETHER WITH GEOLOGICAL AGENCY
MITIGATES LIQUEFACTION THREAT**

The Geospatial Information Agency (BIG) as the supervisor of the implementation of Thematic Geospatial Information (TGI) in Indonesia, play a vital role in mitigating disasters. In collaboration with the Geological Agency of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), which is the designated authority for TGI data on liquefaction vulnerability. BIG conducted a field survey in Gorontalo from May 22 to 24, 2024. The survey aimed to test the implementation of the standardized TGI document on liquefaction vulnerability. Ginda Hasibuan, a Mid-level Geologist from the Geological Agency, explained that the survey builds on the Atlas of Liquefaction Susceptibility Zones in Indonesia at a 1:100,000 scale, published in 2019. He noted that, reflecting on the liquefaction disaster in Palu in 2018, higher-resolution liquefaction vulnerability maps are needed. Therefore, with support from BIG, the Geological Agency developed mapping standards that are being formalized into an SOP to guide local governments' implementation.

Juni 2024 | June 2024



BIG PIMPIN PERTEMUAN JIMWG INDONESIA-PAPUA NUGINI

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Informasi Geospasial (IG) di Indonesia, Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki peranan vital dalam pemenuhan aspek teknis batas negara. BIG berperan sebagai ketua forum Joint Implementation Monitoring Working Group (JIMWG) dari Indonesia untuk membahas batas darat antara Indonesia dengan Papua Nugini pada 7 Juni 2024.

Pada pertemuan ini, disampaikan bahwa batas darat Indonesia dengan Papua Nugini berupa pilar yang biasa disebut *Meridian Monument* (MM) mulanya hanya ada di 52 titik. Batas darat antara Indonesia dengan Papua Nugini terpasang sepanjang 198 kilometer, dengan kondisi pilar yang berdiri tiap 10-60 kilometer, dirasa terlalu renggang sehingga perlu dilakukan densifikasi di seluruh segmen garis batas. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) BIG Astrit Rimayanti ini juga memaparkan bahwa saat ini telah terpasang 214 tapal batas di perbatasan bagian selatan sepanjang 198 kilometer dari total +/- 817 kilometer. BIG setiap tahunnya berprogres merapatkan pilar batas tersebut dan pilar densifikasi. Pada 2019, telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan Papua Nugini. Selanjutnya, pilar densifikasi yang dipasang dari 2020 sampai dengan 2023 menjadi target untuk

BIG LED INDONESIA-PAPUA NEW GUINEA JIMWG MEETING

As the institution responsible for managing Geospatial Information (GI) in Indonesia, the Geospatial Information Agency (BIG) plays a critical role in supporting the technical aspects of national boundary. On June 7, 2024, BIG led Indonesia's delegation as chair of the Joint Implementation Monitoring Working Group (JIMWG) forum to discuss land boundary issues between Indonesia and Papua New Guinea.

During the meeting, it was noted that the land border between the two countries is marked by a series of boundary pillars known as *Meridian Monuments* (MM). Initially, only 52 such markers had been established along a 198-kilometer stretch of the total +/- 817-kilometer land boundary, with intervals ranging from 10 to 60 kilometers, which was considered too wide to ensure precise demarcation. As such, densification of the boundary markers across all segments was deemed necessary. Astrit Rimayanti, Head of Center for Boundary Mapping (PPBW) at BIG, reported that 214 markers covering 198 kilometers were installed along the southern border segment. Each year, BIG consistently progresses in completing both primary and densification markers. In 2019, Indonesia and Papua New Guinea signed a Memorandum of Understanding (MoU) regarding border cooperation. After the MoU, densification

dapat di MoU kan bersama dengan Papua Nugini di tahun 2024. Pada 2022, telah dibangun 39 pilar antara MM11.4-MM11.6 dan MM13.3-MM14. Sedangkan pada 2023 terbangun 40 pilar di MM 11.2 – MM 11.5. Sejak 2020 Indonesia telah menggunakan *Real Time Precise Point Positioning* (RTPPP) dan menyarankan Papua Nugini juga mengimplementasikan metode yang sama. Jack Bakus, selaku Ketua Delegasi dari Papua Nugini, menyambut saran tersebut dan meminta untuk segera dituangkan dalam Standard Operating Procedures (SOP) densifikasi pada periode 2024–2029.

efforts continued from 2020 to 2023, with plans to formalize the newly installed markers through a bilateral agreement in 2024. In 2022, 39 boundary pillars were installed between MM 11.4–MM 11.6 and MM 13.3–MM 14. In 2023, 40 more pillars were constructed between MM 11.2–MM 11.5. Since 2020, Indonesia has adopted real-time precise point positioning (RTPPP) and recommended that Papua New Guinea implement the same method. Jack Bakus, Head of the Papua New Guinea Delegation, welcomed the recommendation and requested it to be formally integrated into the Standard Operating Procedures (SOP) for boundary densification between 2024 and 2029.

Juni 2024 | *June 2024*



34 NAMA RUPABUMI UNSUR BAWAH LAUT INDONESIA MENDAPAT PENGAKUAN INTERNASIONAL

Badan Informasi Geospasial (BIG) hadir dalam *37th Meeting of Sub-Committee On Undersea Feature Names* (SCUFN-37) yang diselenggarakan oleh *General Bathymetric Chart of The Oceans* (GEBCO) SCUFN di Jeju, Korea Selatan pada 24–28 Juni 2024. Pertemuan ini merupakan kedua kalinya diikuti oleh BIG bersama dengan Pusat Hidro-Oseanografi TNI-AL (Pushidrosal) sebagai perwakilan Indonesia. Pada SCUFN-37 ini telah terdata pada *Gazetteer* lebih dari 130 fitur bawah laut yang telah diterima dari berbagai negara seperti: Brazil, Canada, Chili, China, Kolombia, India, Indonesia, Japan, Palau, Filipina,

34 INDONESIAN UNDERSEA FEATURE NAMES OFFICIALLY RECOGNIZED INTERNATIONALLY

The Geospatial Information Agency (BIG) participated in the 37th Meeting of the Sub-Committee on Undersea Feature Names (SCUFN-37), organized by the General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) of SCUFN, in Jeju, South Korea, from June 24 to 28, 2024. This marked BIG's second participation in the forum alongside the Center for Hydro-Oceanographic of the Indonesian Navy (Pushidrosal) as part of Indonesia's official delegation. During SCUFN-37, over 130 undersea features submitted by many countries, including Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, India, Indonesia, Japan, Palau,

Portugal, Rusia, dan Amerika Serikat. Yorda Prita Utama, Koordinator Pemetaan Lingkungan Pantai, dari Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP) BIG menuturkan bahwa tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk submisi nama unsur rupabumi bawah laut yang diusulkan oleh Indonesia sebanyak 34 nama rupabumi unsur bawah laut, meliputi data dari BIG sejumlah 13 unsur, dan Pushidrosal sejumlah 21. Unsur-unsur ini telah melalui tahapan penelaahan nama rupabumi di tingkat nasional untuk dapat dibakukan pada GEBCO Gazetteer of Undersea Feature Names.

the Philippines, Portugal, Russia, and the United States, were recorded in the Gazetteer. Yorda Prita Utama, Coastal Environment Mapping Coordinator at BIG's Center for Marine and Coastal Environment Mapping (PKLP), explained that the primary objective in participating was to propose Indonesia's official naming of 34 undersea topographic features. Of these, thirteen (13) were submitted by BIG and 21 by Pushidrosal. All proposed names had previously undergone a national-level review to be listed in the international GEBCO Gazetteer of Undersea Feature Names.

Juli 2024 | July 2024



BIG DUKUNG PENYELESAIAN DAMPAK SOSIAL PASCAKESEPAKATAN BATAS INDONESIA-MALAYSIA

Badan Informasi Geospasial (BIG) menyatakan siap mendukung secara teknis penyelesaian *Outstanding Boundary Problems* (OBP) pasca pascapenandatanganan kesepakatan terkait penyelesaian batas darat Indonesia dan Malaysia segmen Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala BIG Muh Aris Marfai saat menghadiri Rapat Koordinasi tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) pada 2 Juli 2024. Lebih lanjut Aris menjelaskan masih ada beberapa bagian kecil

BIG SUPPORTS RESOLUTION OF SOCIAL IMPACTS FOLLOWING INDONESIA-MALAYSIA BORDER AGREEMENT

The Geospatial Information Agency (BIG) expressed its readiness to provide technical support in resolving Outstanding Boundary Problems (OBP) following the signing of the agreement on the settlement of land boundaries between Indonesia and Malaysia on Sebatik Island, Nunukan Regency, North Kalimantan. This commitment was conveyed by the Head of BIG, Muh Aris Marfai, during the Ministerial Coordination Meeting led by the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs (Menkopolhukam) on July 2, 2024. Aris further noted that several remaining segments of the land border between the Republic of

batas negara RI dengan negara tetangga yang harus diselesaikan, dirundingkan, dan disepakati kedua negara. Untuk menuju proses kesepakatan bersama, diperlukan kerja teknis seperti survei dan pengukuran bersama.

Indonesia and its neighboring countries still require resolution through bilateral negotiation and mutual agreement. Technical efforts, such as joint surveys and measurements, are essential to reaching a comprehensive agreement.

Agustus 2024 | August 2024



MASYARAKAT KINI BISA AKSES DATA GEOSPASIAL DI GEOPORTAL KSP 2.0

PUBLIC NOW HAS ACCESS TO GEOSPATIAL DATA VIA GEOPORTAL KSP 2.0

Masyarakat kini dapat mengakses dan mengunduh data geospasial (DG) yang tersedia sesuai ketentuan hak akses melalui Geoportal 2.0 yang merupakan bagian dari Kebijakan Satu Peta (KSP). Geoportal ini diharapkan dapat mendukung implementasi KSP dan membantu mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik di Indonesia. Pada acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 yang digelar pada 12 Juli 2024, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfa'i menjelaskan Geoportal KSP memberikan tools untuk mengunduh peta, metadata, serta melakukan analisis tumpang tindih yang sangat berguna untuk berbagai keperluan analisis tematik. Masyarakat dapat memilih beberapa Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang tersedia pada Geoportal KSP 2.0 untuk berbagai keperluan analisis tematik. Setiap IGT menampilkan informasi, seperti kementerian/ lembaga wali data, batas administrasi wilayah,

The public can now access and download available Geospatial Data (DG) through Geoportal 2.0, which operates under the One Map Policy (OMP), based on the access rights given. This platform is designed to support OMP implementation and contribute to improved development planning across Indonesia. At the 2024 One Map Policy (OMP) Summit, held on July 12, 2024, the Head of the Geospatial Information Agency (BIG), Muh Aris Marfa'i, stated that the Geoportal KSP offers a range of tools, including map and metadata downloads, as well as overlap analysis functions, which are highly beneficial for conducting various thematic analyses. The public can select from multiple Thematic Geospatial Information (TGI) layers available on Geoportal 2.0 for thematic analysis. Each TGI provides information, such as ministries or data custodians, administrative boundaries, and the year of publication. Public access to DG represents one of the significant

dan tahun pembuatan peta. Hak akses masyarakat terhadap DG merupakan salah satu pencapaian utama KSP. Pencapaian lainnya adalah memberikan kontribusi besar dalam berbagai isu strategis, seperti reforma agraria, food estate, tata kelola perizinan sawit, dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam pelaksanaan reforma agraria, data KSP digunakan untuk memastikan kepastian data subjek dan objek yang tepat. Data ini penting untuk audit pemenuhan kewajiban lahan alokasi 20% dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, sesuai amanat Perpres Nomor 62 Tahun 2023. Berbagai pencapaian tersebut menunjukkan KSP memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

milestones in the OMP implementation. Other key achievements include its substantial contributions to strategic issues, such as agrarian reform, food estates, palm oil licensing governance, and National Strategic Projects (PSN). In the context of agricultural reform, OMP data plays a critical role in ensuring the accuracy of subject and object data, which is vital for auditing compliance with land allocation obligations. This includes the mandated 20% allocation of released forest areas for plantations, as Presidential Decree No. 62 of 2023 stipulated. These accomplishments demonstrate OMP's significant potential to support more integrated and sustainable national development.

Agustus 2024 | August 2024



SAMBUT HARI KEMERDEKAAN RI, BIG BERKONTRIBUTSI DALAM PEMUSNAHAN LADANG GANJA

Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Contoh bentuk pembinaan IGT yang dirasakan manfaatnya adalah penggunaan Informasi Geospasial (IG) untuk pemusnahan ladang ganja. Pada 15 Agustus 2024 dilaksanakan pemusnahan ladang ganja di Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Badan Narkotika

IN COMMEMORATION OF INDEPENDENCE DAY, BIG CONTRIBUTES TO THE DESTRUCTION OF MARIJUANA FARMS

Guidance on the Thematic Geospatial Information (TGI) is one of the responsibilities of the Geospatial Information Agency (BIG). An example of TGI's practical benefits is using Geospatial Information (GI) to eradicate illegal marijuana plantations. On August 15, 2024, a coordinated operation to destroy marijuana fields was conducted in Aceh Besar Regency, Aceh. The operation was led by the National Narcotics Agency (BNN). It involved

Nasional (BNN) dengan melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk pihak Kepolisian, BIG, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Direktur Pemetaan Tematik BIG, Gatot Haryo Pramono menjelaskan peran BIG dalam kegiatan tersebut adalah menyediakan citra dan mengolahnya, serta mengidentifikasi lokasi mana yang berpotensi ada ladang Ganja. Setelah itu, baru dilakukan pengecekan lapangan. Lebih lanjut Gatot menambahkan bahwa sampai saat ini, belum terdapat peta lahan ganja yang memadai sehingga sulit untuk mendapatkan data mengenai lahan tanaman ganja di Indonesia. Data tentang lahan ganja dan dinamikanya dapat diketahui dari IG, termasuk pembaruan/pemutakhirannya.

multiple related institutions, including the National Police, BIG, the Indonesian National Armed Forces (TNI), and the National Research and Innovation Agency (BRIN). Director of Thematic Mapping at BIG, Gatot Haryo Pramono, explained that BIG's role in the operation was to provide satellite imagery, process the data, and identify areas with potential marijuana cultivation. These findings were then verified through field inspections. Gatot also noted that, to date, there has been no comprehensive map of marijuana plantations in Indonesia, which makes it difficult to obtain reliable data on their distribution. However, data on ganja farms and their dynamics, including their updates, can be detected from GI.

Agustus 2024 | August 2024



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, PILAR TRANSPARANSI DAN GOOD GOVERNANCE

Keterbukaan informasi publik adalah pilar dalam mewujudkan *good governance* dan *open government*. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha saat menjadi narasumber pada 'Workshop Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Teknis Keterbukaan Informasi Publik' di Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 21 Agustus 2024. Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Utama BIG Belinda Arunarwati Margono mengatakan bahwa publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akuntabel. Sementara itu Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BIG Suprajaka menjelaskan bahwa

PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE, A PILLAR OF TRANSPARENCY AND GOOD GOVERNANCE

Public information disclosure is fundamental to realizing good governance and open government. This principle was emphasized by the Deputy Chairman of the Central Information Commission (KIP), Arya Sandhiyudha, during his presentation at the Workshop on Enhancing Understanding and Technical Capacity in Public Information Disclosure, held at the Geospatial Information Agency (BIG) on August 21, 2024. Echoing this sentiment, BIG's Main Secretary, Belinda Arunarwati Margono, stated that the public has the right to access transparent and accountable information. In support of this, the Head of BIG's Bureau of Legal Affairs, Public

penerapan filosofi keterbukaan menjadi fokus utama dalam perjalanan BIG mewujudkan *open government*.

Tentunya upaya menjadi pemerintahan yang menekankan transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut membutuhkan kerja sama dari semua pihak.

Relations, and Cooperation, Suprajaka, highlighted that implementing openness is a key focus in BIG's ongoing efforts to foster open government.

Clearly, a transparent government that promotes public participation and collaborative decision-making requires the commitment and cooperation of all stakeholders.

September 2024 | September 2024



MENGUNGKAP 'CERITA LENSA GEOSPASIAL' DAN 'JULID NR'

Penjurian lomba foto yang diadakan Badan Informasi Geospasial (BIG) dilaksanakan pada 18 September 2024. Lomba foto yang mengusung tema 'Cerita Lensa Geospasial' ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran Informasi Geospasial (IG) dalam berbagai aspek kehidupan. Sebanyak 1.597 foto diterima panitia dari 486 peserta dari kategori umum, internal, dan media. Foto-foto kiriman peserta yang diikutsertakan memperlihatkan berbagai unsur rupabumi, survei lapangan, dan pemanfaatan IG. Proses penjurian menerapkan sistem penomoran rahasia pada setiap karya. Hal ini membuat dewan juri menilai karya tanpa mengetahui identitas pembuatnya, sehingga penilaian murni berdasarkan kualitas artistik dan teknis dari setiap karya. Selain itu lomba foto kali ini dibarengi dengan kompetisi 'Junjung dan Lindungi Nama Rupabumi' (Julid NR). Julid NR adalah upaya

UNCOVERING THE 'CERITA LENSA GEOSPASIAL' AND 'JULID NR'

The Geospatial Information Agency (BIG) judged its photo competition on September 18, 2024. Held under the theme "Cerita Lensa Geospasial (Geospatial Lens Stories)," the competition aimed to raise public awareness of the role of Geospatial Information (GI) across various aspects of life. The committee received 1,597 photo submissions from 486 participants, representing the public, BIG internal staff, and media professionals. The submitted works captured diverse elements, such as landforms, field surveys, and GI applications. To ensure objectivity, each photo was assigned a coded number, allowing the jury to evaluate the works anonymously, focusing solely on their artistic and technical merits. Besides that, BIG held the "Junjung dan Lindungi Nama Rupabumi (Uphold and Protect Feature Names)" (Julid NR) competition in conjunction with the photo competition. This

strategis dalam menjaga dan melindungi nama-nama rupabumi Indonesia. Kompetisi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga identitas geografis yang mencerminkan budaya, sejarah, dan kedaulatan negara. Ada 187 peserta mengikuti Julid NR yang dinilai berdasarkan ketepatan data, relevansi, serta kontribusi yang diberikan dalam melindungi dan melestarikan nama-nama rupabumi.

initiative was part of a strategic effort to preserve and protect Indonesia's feature names. This competition aimed to raise public awareness of the importance of preserving geographic identity which embodies the nation's cultural heritage, historical identity, and sovereignty. A total of 187 participants took part in the Julid NR competition and were judged based on data accuracy, relevance, and contribution to safeguarding feature names.

September 2024 | *September 2024*



BIG TURUT DORONG INTEGRASI STATISTIK DAN GEOSPASIAL DI FORUM GLOBAL

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai delegasi Indonesia hadir dalam *8th Meeting of the Expert Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information* jointly with the *7th meeting of the Working Group on Geospatial Information of the Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (IAEG-SDGS)* di Nairobi, Kenya. Pertemuan terkait integrasi data statistik dan Informasi Geospasial (IG) yang berlangsung pada 16-19 September 2024 ini diorganisir oleh The United Nations Statistics Division (UNSD), The United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), dan The United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). Direktur Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik BIG Lien Rosalina menjelaskan, pertemuan ini memiliki signifikansi yang tinggi untuk menyepakati pentingnya integrasi statistik dan geospasial untuk diimplementasikan

BIG PROMOTES INTEGRATION OF STATISTICS AND GEOSPATIAL INFORMATION AT GLOBAL FORUM

The Geospatial Information Agency (BIG), as the Indonesian delegation, attended the 8th Meeting of the Expert Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information jointly with the 7th meeting of the Working Group on Geospatial Information of the Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (IAEG-SDGS) in Nairobi, Kenya. The meeting related to the integration of statistical data and Geospatial Information (GI) took place on September 16-19, 2024 and was organized by the United Nations Statistics Division (UNSD), the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), and the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). BIG's Director of Integration and Synchronization of Thematic Geospatial Information, Lien Rosalina, explained that this meeting was significant in agreeing on the importance of statistical and geospatial integration

di berbagai negara di dunia. Sedangkan, Surveyor Pemetaan dari Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial BIG Diah Retno Minarni mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi anggota The Expert Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information (UN ISGI) sejak 2024. Diah menyampaikan, Indonesia dianggap melakukan lompatan besar dengan mengupayakan disagregasi penghitungan indikator SDGs hingga tingkat administrasi desa. Sebanyak 20 indikator SDGs dihitung di tingkat desa menggunakan Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ini merupakan capaian signifikan di antara negara-negara lain.

to be implemented in various countries worldwide. Meanwhile, Mapping Surveyor from the BIG's Directorate of Thematic Geospatial Information Integration and Synchronization, Diah Retno Minarni, said that Indonesia has become a member of the Expert Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information (UN ISGI) since 2024. Diah noted that Indonesia is considered to have made a big leap by trying to disaggregate the calculation of SDGs indicators to the village administration level. A total of 20 SDG indicators are calculated at the village level based on the Indonesian Family Database (BDKI) owned by the National Population and Family Planning Agency (BKKBN). This is a significant achievement compared to other countries.

Oktober 2024 | October 2024



SEMARAK HIG 2024 UNTUK RAYAKAN 55 TAHUN PERAN GEOSPASIAL DI INDONESIA

Puncak perayaan Hari Informasi Geospasial (HIG) 2024 digelar pada 22 Oktober 2024. HIG 2024 mengambil tema 'Informasi Geospasial Andal untuk Indonesia Emas'. Tema tersebut menegaskan peran penting data dan Informasi Geospasial (IG) yang akurat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Tito Setiawan, Kepala Biro Umum dan Keuangan BIG yang juga didapuk menjadi Ketua HIG 2024, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik hingga puncak peringatan. "17 Oktober dipilih

VIBRANT 2024 HIG MARKS 55 YEARS OF GEOSPATIAL CONTRIBUTIONS IN INDONESIA

The peak celebration of the 2024 Geospatial Information Day (HIG) was held on October 22, 2024, carrying the theme "Reliable Geospatial Information for a Golden Indonesia." This theme emphasized the vital role of accurate geospatial data in supporting the vision of a Golden Indonesia 2045. In his remarks, Tito Setiawan, BIG's Head of Bureau of the General Affairs and Finance and Chair of the 2024 HIG Committee, expressed his appreciation for the successful series of events leading up to the main celebration. "October 17 was chosen as Geospatial

sebagai peringatan Hari Informasi Geospasial karena pada tanggal tersebut di tahun 1969 dibentuk Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang menjadi cikal bakal BIG,” ujarnya. HIG 2024 sekaligus menjadi momentum penting untuk menyoroti peran data geospasial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di usianya yang kini menginjak 55 tahun, BIG terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan IG berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi energi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis geospasial. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu lomba foto, lomba gambar, seminar dan workshop terkait IG, open house untuk pelajar, upacara peringatan, jalan sehat, serta kompetisi olahraga antarpegawai.

Information Day to commemorate the establishment of the National Survey and Mapping Coordination Agency (Bakosurtanal) in 1969, which served as the precursor to BIG,” he explained. The 2024 HIG also served as an essential moment to reaffirm the significance of geospatial information in advancing sustainable development across Indonesia. As it marked its 55th anniversary, BIG continued to strengthen its commitment to delivering high-quality geospatial information. This aligned with the government’s commitment to accelerating the energy transition and enhancing geospatially based public services. Various activities were held during the 2024 HIG celebrations, including photo and drawing competitions, seminars, a workshop on geospatial information, a student open house, an official ceremony, a fun walk, and employee sports competitions.

Oktober 2024 | October 2024



DELAPAN NEGARA BERKOLABORASI UNTUK MEMAJUKAN TEKNOLOGI GNSS

Perwakilan pemerintah dari delapan negara berkumpul di Bangkok pada 30–31 Oktober 2024 untuk mengikuti lokakarya pengoperasian *Continuously Operating Reference Stations* (CORS). Acara yang didukung oleh *Geospatial Information Authority of Japan* (GSI) ini menjadi forum bagi para pakar *Global Navigation Satellite System* (GNSS) dan CORS untuk berbagi pengalaman dalam pembangunan,

EIGHT NATIONS COLLABORATE TO ADVANCE GNSS TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Government representatives from eight countries convened in Bangkok on October 30–31, 2024 to participate in a workshop on the operation of Continuously Operating Reference Stations (CORS). The event, which was supported by the Geospatial Information Authority of Japan (GSI), served as a platform for Global Navigation Satellite Systems (GNSS) and CORS experts to exchange knowledge

pemeliharaan, dan pemanfaatan sistem tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Sistem Referensi Geospasial (DSRG) BIG Bayu Triyogo Widyantoro yang hadir sebagai perwakilan Indonesia, memaparkan perkembangan signifikan yang telah dicapai BIG dalam pengembangan sistem referensi geospasial. Bayu menjelaskan Indonesia melalui BIG telah membangun Jaring Kontrol Geodesi yang mencakup 473 stasiun InaCORS dan 290 stasiun pasang surut (pasut) di berbagai wilayah. Hingga akhir 2024, cakupan CORS BIG telah mencapai 88% wilayah perkotaan di Indonesia dan dalam lima tahun ke depan, BIG berencana menambah 50 stasiun lagi untuk memperluas jangkauan hingga 98%.

and best practices in developing, maintaining, and utilizing these systems. Representing Indonesia at the workshop, BIG's Acting Director of the Geospatial Reference Systems (DSRG, Bayu Triyogo Widyantoro, highlighted BIG's significant advancements in geospatial reference systems. Bayu noted that BIG established a Geodetic Control Network consisting of 473 InaCORS stations and 290 tide gauge stations across the archipelago. By the end of 2024, CORS coverage in Indonesia reached 88% of urban areas. In the next five years, BIG plans to install 50 more CORS stations to expand its nationwide coverage to 98%.

November 2024 | November 2024



SATU DEKADE BHUMANDALA AWARD, MENDORONG TATA KELOLA DATA SPASIAL BERKUALITAS

Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar malam penganugerahan 'Bhumandala Award 2024' pada 4 November 2024. Dalam penyelenggaraan acara tersebut, BIG bekerja sama dengan Media Indonesia dan disiarkan secara nasional di Metro TV. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kementerian, pemerintah daerah, lembaga, serta perorangan yang telah berkontribusi signifikan dalam mengembangkan dan menerapkan tata kelola data dan Informasi Geospasial (IG) yang berkualitas demi mendukung pembangunan nasional berbasis

A DECADE OF BHUMANDALA AWARD, ENCOURAGING QUALITY SPATIAL DATA GOVERNANCE

The Geospatial Information Agency (BIG) held the 2024 Bhumandala Award ceremony on November 4, 2024. The event was organized in collaboration with Media Indonesia and was broadcast nationally on Metro TV. This prestigious award served as recognition for ministries, local governments, institutions, and individuals who significantly contributed to developing and implementing high-quality Geospatial Information (GI) data and governance supporting national development based on accurate and reliable data. The 2024 edition

data yang akurat dan terpercaya. Bhumandala Award 2024 menjadi momentum bersejarah, karena sekaligus sebagai peringatan `Satu Dekade Bhumandala Award`. Dalam perjalanan 10 tahun Bhumandala, penghargaan ini terus mengalami peningkatan partisipasi dan penambahan kategori penilaian. Ada empat kategori pada Bhumandala Award 2024, yaitu Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial, Bhumandala Nama Rupabumi, Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan, dan Bhumandala Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik. Peserta berlomba memperebutkan Bhumandala Kanaka (emas), Bhumandala Rajata (perak), Bhumandala Ariti (perunggu), serta Bhumandala Nawasena bagi pendatang baru terbaik.

marked a historic milestone, commemorating One Decade of the Bhumandala Award. Over the past ten years, the Bhumandala Award has seen growing participation and introduced additional assessment categories. This year's awards were presented in four categories. They are Bhumandala Geospatial Information Network Node Performance, Bhumandala Geographic Names, Bhumandala Geospatial Information for Village/Sub-district Boundaries, and Bhumandala Thematic Geospatial Information Implementation. The participants competed for four distinctions: Bhumandala Kanaka (Gold), Bhumandala Rajata (Silver), Bhumandala Ariti (Bronze), and Bhumandala Nawasena, which was awarded to the best newcomer.

November 2024 | November 2024



MERAWAT AKURASI, MENJAGA PESISIR

Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Direktorat Sistem Referensi Geospasial (DSRG) melaksanakan pemeliharaan rutin alat pengukur pasang surut (pasut) di Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kegiatan yang berlangsung pada 8-15 November 2024 ini dilaksanakan untuk menjaga kualitas data geospasial dan meningkatkan akurasi data pasang surut. Perawatan rutin ini sangat penting untuk memastikan data pasut yang dihasilkan tetap akurat dan *up-to-date*. Dengan data yang akurat, pemerintah dan masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi bencana, seperti tsunami,

PRESERVING ACCURACY, SAFEGUARDING THE COAST

The Geospatial Information Agency (BIG), through its Directorate of Geospatial Reference Systems (DSRG), conducted routine maintenance on tidal gauges located in Mamuju and Pasangkayu Regencies, West Sulawesi, from November 8 to 15, 2024. This activity was part of an effort to maintain the quality of geospatial data and accuracy of tidal information. This routine maintenance is essential to ensure accurate and up-to-date tidal data because this data enables the government and the public to better prepare to face potential disasters like tsunamis, tidal floods, and abrasion. Besides that, such data is critical

banjir rob, dan abrasi. Selain itu, data ini juga sangat berguna untuk perencanaan pembangunan infrastruktur pesisir yang berkelanjutan. Data pasut adalah informasi mengenai perubahan ketinggian permukaan air laut yang terjadi secara periodik. Perubahan ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan, matahari, serta faktor lainnya, seperti angin, suhu air, dan tekanan atmosfer. Perawatan stasiun pasut yang dilakukan mencakup berbagai kegiatan penting, yaitu pengukuran *leveling*, pengukuran GNSS (*Global Navigation Satellite System*), kalibrasi sensor radar, *wiring*, pemasangan sensor *pressure*, dan pengecekan sensor. Selain itu, juga dilakukan perawatan fisik, seperti perbaikan pipa *pressure* dan palem, serta pengecatan stasiun. Dengan perawatan yang tepat, diharapkan data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengelolaan wilayah pesisir.

in planning and developing sustainable coastal infrastructure. Tidal data reflect periodic changes in sea level influenced by gravitational forces from the Moon and Sun and environmental factors, such as wind, water temperature, and atmospheric pressure. Maintenance of tide gauge stations includes several key activities, namely levelling measurements, GNSS (Global Navigation Satellite System) monitoring, radar sensor calibration, wiring, pressure sensor installation, and sensor performance checks. In addition, physical maintenance is performed, including repairing pressure pipes and palms, and painting the station structures. Proper maintenance is expected to bear accurate tidal data, which in turn supports more effective decision-making in coastal management.

Desember 2024 | *December 2024*



ATLAS TAKTUAL BIG PERKUAT INKLUSIVITAS DI PUNCAK HDI 2024

Puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024 yang digelar di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada 3 Desember 2024 dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kementerian dan lembaga, organisasi disabilitas, komunitas masyarakat, serta pelaku usaha. Berbagai kegiatan digelar, mulai dari pameran hasil karya penyandang disabilitas, seminar inklusivitas, hingga

BIG'S TACTILE ATLAS ENHANCES INCLUSIVITY AT THE 2024 HDI SUMMIT

The peak event commemorating the 2024 International Day of Persons with Disabilities (IDPD) was held at Taman Ismail Marzuki, Jakarta, on December 3, 2024. Many stakeholders, including representatives from ministries and institutions, disability organizations, community groups, and business actors, attended the event. The event featured various activities, including exhibitions

pertunjukan seni budaya. Pada kesempatan ini, BIG turut memamerkan Atlas Taktual yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas netra. Produk ini merupakan kumpulan lembaran-lembaran peta timbul yang dilengkapi dengan narasi dalam huruf braille. Atlas Taktual memungkinkan penyandang disabilitas netra untuk mengenali bentuk wilayah, lokasi fasilitas umum, dan rute transportasi dengan sentuhan tangan. Produk ini adalah upaya BIG untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses informasi geospasial.

of works by persons with disabilities, seminars on inclusivity, and cultural performances. On this occasion, the Geospatial Information Agency (BIG) showcased the Tactile Atlas, designed for individuals with visual impairments. The atlas comprises a set of embossed maps accompanied by narration in Braille, allowing users to identify the shape of geographic areas, the locations of public facilities, and transportation routes through touch. The Tactile Atlas reflects BIG's effort to ensure equal access to geospatial information for all, including persons with disabilities.

Desember 2024 | *December 2024*



BIG DAN UN-GGCE BERSINERGI LESTARIKAN LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA

Pelestarian lingkungan, khususnya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut, menjadi fokus utama dalam kunjungan teknis peserta Workshop Internasional 'The Integration of Terrestrial, Maritime, Built and Cadastral Domains: Joining Land and Sea' pada 4 Desember 2024. Workshop ini digelar Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama United Nations Global Geodetic Center of Excellence (UN-GGCE). Kawasan mangrove dipilih sebagai Lokasi kunjungan karena mencerminkan dampak erosi dan sedimentasi berlebihan. Penanaman mangrove

BIG AND UN-GGCE COLLABORATE TO PRESERVE THE ENVIRONMENT AND MITIGATE DISASTERS

Environmental conservation, particularly in response to land subsidence and sea level rise, was the central focus of the technical visit conducted on December 4, 2024, as part of the international workshop titled "The Integration of Terrestrial, Maritime, Built, and Cadastral Domains: Joining Land and Sea." The Geospatial Information Agency (BIG) organized the workshop with the United Nations Global Geodetic Center of Excellence (UN-GGCE). The technical visit took place in a mangrove area, selected for its relevance in illustrating the impacts of coastal erosion and

dinilai penting untuk melindungi lingkungan, dengan harapan adanya komitmen kuat untuk mempertahankan keberadaannya. Selain itu, pemetaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung upaya proteksi lingkungan. Faktanya telah terjadi penurunan muka tanah hampir sekitar empat meter dari 1974, sehingga perlu dilakukan pencegahan masuknya air laut masuk ke darat melalui penanaman mangrove. Selain itu diperlukan integrasi data darat dan laut untuk mencari solusi melalui peta informasi geospasial yang memiliki satu sistem dan satu referensi.

excessive sedimentation. Mangrove restoration is critical to protect the environment and it is hoped for a strong commitment to preserving it. Besides that, mapping can be optimally used in protecting the environment. Since 1974, the region has experienced land subsidence of nearly four meters, increasing the risk of seawater intrusion. Moreover, integrating land and marine data is necessary to find solutions from geospatial information maps, applying a unified system and a single reference.



Fotografer | Photographer:

Bayu Triyogo

Lokasi | Location:

**Stasiun Pasang Surut Semarang,
Jawa Tengah**

Penghargaan BIG Sepanjang 2024

BIG's Awards in 2024



AKREDITASI LEMBAGA DAN PROGRAM OLEH LAN

Badan Informasi Geospasial (BIG), dalam hal ini unit PPKIG, meraih akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan predikat lembaga pelatihan Bintang 1 dan predikat program pelatihan Akreditasi B.

INSTITUTIONAL AND PROGRAM ACCREDITATION BY THE STATE ADMINISTRATION INSTITUTE (LAN)

BIG's Center for Geospatial Information Competency Development (PPKIG), received accreditation from the State Administration Institute (LAN) as a 1-Star Training Institution, while its training program received a "B" accreditation rating.



SERTIFIKAT AKREDITASI KEARSIPAN

Dalam rangkaian acara Peringatan Puncak Hari KORPRI dan Hari Ibu Tahun 2024 di Jakarta, Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyerahkan penghargaan berupa Sertifikat Akreditasi Kearsipan Kualifikasi AA (Istimewa) dengan nilai 96,96 kepada UK Badan Informasi Geospasial (BIG). Capaian ini bukti komitmen BIG untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung transparansi birokrasi dan akuntabilitas kerja.

CERTIFICATE OF ARCHIVAL ACCREDITATION

As part of the peak commemoration events for KORPRI Day and Mother's Day in 2024 in Jakarta, the Geospatial Information Agency (BIG) received an AA (Excellent) Archival Accreditation Certificate from the Center for Supervision and Accreditation of Archives of the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI). With an outstanding score of 96.96, this recognition reflects BIG's commitment to enhancing the quality of its archival management to support bureaucratic transparency and work accountability.





OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SUSTAINABILITY & GOVERNANCE

Badan Informasi Geospasial (BIG) berhasil meraih penghargaan *Outstanding Achievement in Sustainability & Governance* pada gelaran *Strategy into Performance Execution Excellence (SPEx2) Award 2024* di Jakarta. SPEx2 Award merupakan ajang tahunan yang memiliki misi untuk mengidentifikasi dan menghargai perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mampu menunjukkan keunggulan dalam memformulasi dan mengeksekusi strategi.

OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SUSTAINABILITY & GOVERNANCE

The Geospatial Information Agency (BIG) was honored with the *Outstanding Achievement in Sustainability & Governance* award at the 2024 *Strategy into Performance Execution Excellence (SPEx2) Award* in Jakarta. The SPEx2 Award is an annual event designed to recognize and celebrate companies in Indonesia that excel in both formulating and executing effective strategies.



HERUDI TECHNICAL COMMITTEE AWARD (HTCA) 2024

Badan Informasi Geospasial (BIG) mengukir prestasi membaggakan pada ajang *Herudi Technical Committee Award (HTCA) 2024* yang diselenggarakan Badan Standardisasi Nasional (BSN). BIG berhasil masuk dalam lima besar nomine kategori Komisi Teknis (Komtek) Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) Berkinerja Terbaik. Direktorat STIG BIG berhasil mengembangkan tata kelola standarisasi informasi geospasial, mendukung penuh pelaksanaan KSP dan SDI lewat program standar/spesifikasi data, serta berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar internasional, terutama ISO TC211.

THE 2024 HERUDI TECHNICAL COMMITTEE AWARD (HTCA)

The Geospatial Information Agency (BIG) achieved a significant milestone at the 2024 *Herudi Technical Committee Award (HTCA)*, organized by the National Standardization Agency (BSN). BIG was honored as one of the top five nominees in the *Best Performing Technical Committee (Komtek)* category for *Formulating Indonesian National Standards (SNI)*. The BIG's Directorate of Geospatial Information Technology Systems successfully developed geospatial information standardization governance, strong support for the implementation of the Sixth Spatial Planning System and SDI through data standards and specification programs and its active participation in the development of international standards, particularly in ISO TC211.



ANINDHITA WISTARA DATA 2024

Badan Informasi Geospasial (BIG) meraih predikat 'BAIK' dalam pagelaran penghargaan Anindhita Wistara Data 2024, yang merupakan pengakuan atas pencapaiannya dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPSS). Ajang yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan pengakuan atas komitmen lembaga dalam penyelenggaraan statistik sektorial.

THE 2024 ANINDHITA WISTARA DATA

The Geospatial Information Agency (BIG) was awarded the 'GOOD' predicate at the 2024 Anindhita Wistara Data award ceremony, which recognizes achievements in the Evaluation of Sectoral Statistics Implementation (EPSS). Organized by Statistics Indonesia (BPS), the event recognizes institutions' commitment to the implementation of sectoral statistics.



MATURITAS SPIP LEVEL 3

Inspektorat Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) level 3 (nilai 3,169), Kapabilitas APIP pada level 3 (nilai 3,12), Telaah Sejawat Ekstern Inspektorat BIG mendapat nilai 80,69% (Baik), dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun Pelaporan 2024 mencapai 100%.

SPIP MATURITY LEVEL 3

The Inspectorate of the Geospatial Information Agency (BIG) achieved SPIP (Government Internal Control System) Maturity Level 3, scoring 3.169. The APIP Capability also reached Level 3, with a score of 3.12. Additionally, the BIG Inspectorate's External Peer Review scored 80.69% (Good), and the State Officials' Wealth Report (LHKAN) for the 2024 reporting year was completed with a 100% compliance rate.





BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Badan Informasi Geospasial (BIG) menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2024 di Pekanbaru, Riau. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi aktif BIG dalam mendukung kampanye Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

NATIONAL NARCOTICS AGENCY

The Geospatial Information Agency (BIG) was honored with an award from the National Narcotics Agency (BNN) during the peak commemoration of the 2024 International Anti-Narcotics Day (HANI) in Pekanbaru, Riau. This recognition acknowledged BIG's active contribution to supporting the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) campaign.



PREDIKAT PELAYANAN PRIMA

Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial mendapatkan penghargaan sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan predikat "Pelayanan Prima" pada ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.

EXCELLENT SERVICE PREDICATE

The Geospatial Information Agency (BIG), through its Geospatial Products and Services Office, received recognition as a public service organization with the "Excellent Service" predicate at the 2024 Public Service Performance Monitoring and Evaluation.





PENERAPAN SISTEM MERIT SANGAT BAIK

Biro Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan (PSDMO) Badan Informasi Geospasial (BIG) mendapatkan penghargaan kategori sangat baik dalam penerapan sistem merit. Ini berarti BIG telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip meritokrasi secara efektif dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil dan wajar.

Selain itu, BIG juga menerima Piagam Penghargaan Menerapkan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan kualitas SANGAT BAIK.

"VERY GOOD" RATING IN MERIT SYSTEM IMPLEMENTATION

The Bureau of Planning, Control, and Reporting (PSDMO) of the Geospatial Information Agency (BIG) received an award in the "Very Good" category for its implementation of the merit system. This recognition reflects BIG's success in applying the principles of effective meritocracy in managing Government Civil Servants, based on objective qualifications, competencies, and performance.

In addition, BIG received a Certificate of Appreciation from the State Civil Service Commission (KASN) in recognition of its implementation of a merit-based system for appointment of high-level leadership positions in 2023, achieving a rating of "Very Good."



ANUGERAH PERKEBUNAN BUNEX 2024

Badan Informasi Geospasial (BIG) menerima penghargaan dalam Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten. Pada kesempatan ini, BIG adalah satu-satunya lembaga yang mendapat penghargaan kategori kementerian/lembaga (K/L) dengan sinergitas dan komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan perkebunan nasional.

THE 2024 BUNEX PLANTATION AWARD

The Geospatial Information Agency (BIG) was honored at the 2024 Indonesian Plantation Expo (Bunex), organized by the Ministry of Agriculture at the Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten. On this occasion, BIG stood out as the sole recipient of the award in the ministry/institution category, in recognition of its strong synergy and commitment in supporting the development of the national plantation sector.



ANUGERAH MEDIA HUMAS 2024

Badan Informasi Geospasial (BIG) berhasil meraih terbaik ketiga pada Anugerah Media Humas (AMH) 2024 kategori Media Audio Visual di kelompok untuk Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penghargaan tersebut diselenggarakan di Bandung pada 10 Oktober 2024 oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

2024 PUBLIC RELATIONS MEDIA AWARD

The Geospatial Information Agency (BIG) received third place in the 2024 Public Relations Media Award (AMH) in the Audio Visual Media category, within the group for Ministries/Institutions, State-Owned Enterprises (SOEs), and Regional-Owned Enterprises (BUMD). The award ceremony was held in Bandung on October 10, 2024, and organized by the Public Relations Coordinating Agency (Bakohumas) under the Ministry of Communication and Informatics (Kemkominfo).



PR INDONESIA AWARD 2024

Badan Informasi Geospasial (BIG) berhasil menorehkan prestasi dalam ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024 yang digelar di Denpasar pada 7 Maret 2024. BIG meraih bronze winner untuk sektor lembaga, kategori `owned media`, sub kategori media cetak – Majalah Geospasial Indonesia Vol. X No. 1 terbitan Januari – April 2023.

2024 PR INDONESIA AWARD

The Geospatial Information Agency (BIG) received a Bronze Award at the 2024 Public Relations Indonesia Awards (PRIA), held in Denpasar on March 7, 2024. BIG was recognized in the institutional sector, under the owned media category and print media subcategory, for Geospatial Indonesia Magazine Vol. X No. 1, published for the January–April 2023 period.



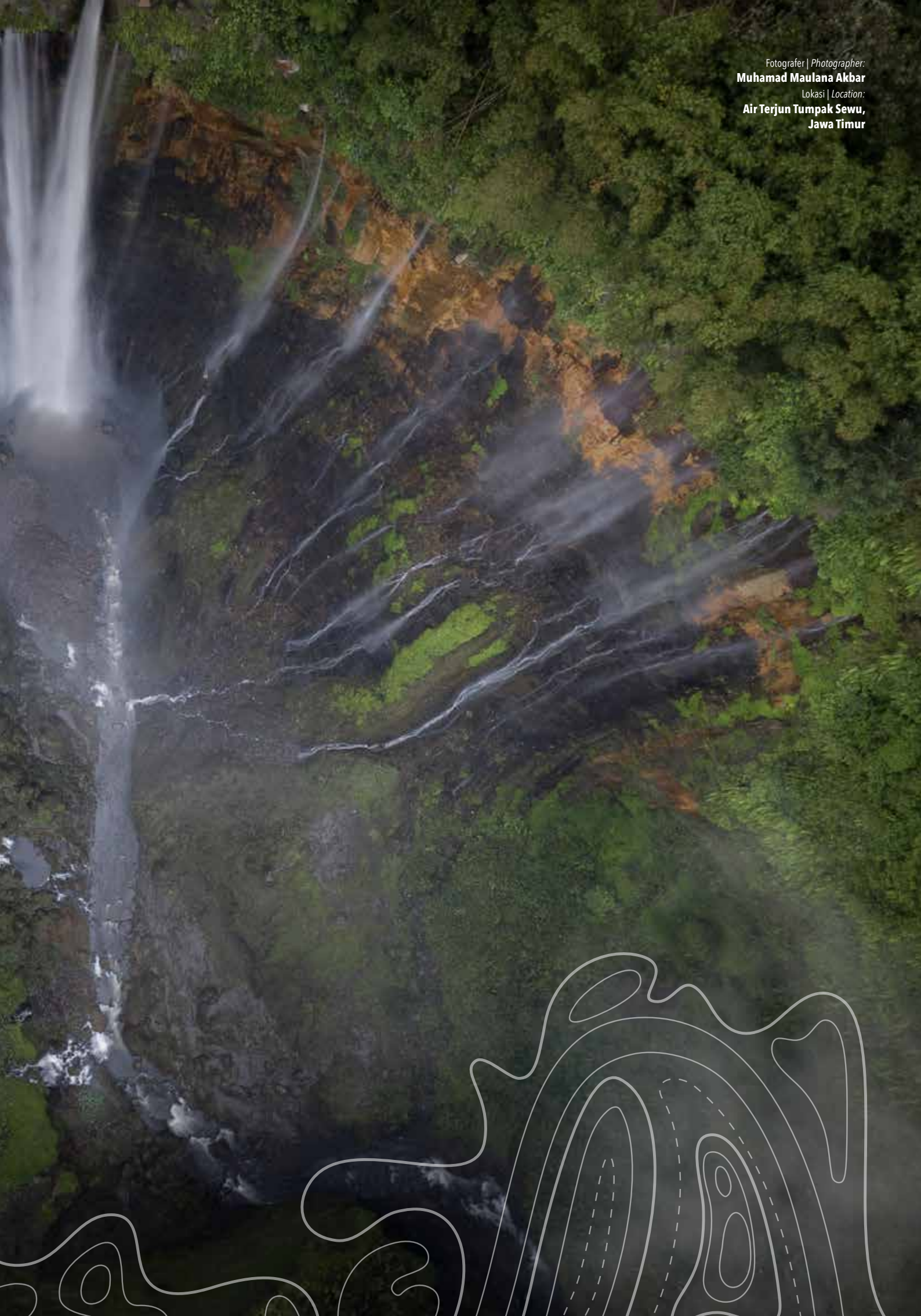
02

LAPORAN MANAJEMEN

*Management
Report*



Fotografer | *Photographer:*
Muhamad Maulana Akbar
Lokasi | *Location:*
**Air Terjun Tumpak Sewu,
Jawa Timur**



Laporan Kepala Badan Informasi Geospasial

Report of the Head of the Geospatial Information Agency



**Prof. Dr.rer.nat.
Muh Aris Marfai,
S.Si, M.Sc**

Kepala BIG
Head of BIG



PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Dengan penuh rasa syukur, izinkan kami menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat kinerja Badan Informasi Geospasial (BIG) sepanjang tahun 2024. Peran Informasi Geospasial (IG) kini menjadi salah satu pilar utama dalam perencanaan pembangunan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Menuju Indonesia Emas 2045, kami berkomitmen untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, memastikan pembangunan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

KETANGGUHAN EKONOMI NASIONAL 2024

Kita patut bersyukur mampu melewati tahun 2024 yang penuh tantangan. Dinamika ekonomi global yang masih diwarnai *scarring effect* akibat pandemi Covid-19 hingga ketidakpastian geopolitik, memberi tekanan besar pada banyak negara. Dana International Monetary Fund (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi global tercatat 3,2% mencerminkan upaya pemulihan ekonomi global yang belum merata. Sementara Laporan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2024 yang dirilis PBB mengungkapkan ketidakpastian mengenai pencapaian target SDGs 2030. Dari 169 target, lebih separuhnya mengalami kemajuan terbatas, jalan di tempat, atau bahkan mundur secara signifikan. Tanpa upaya percepatan, sekitar 590 juta orang masih akan terbelenggu dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

Di tengah kondisi global yang menantang, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pertumbuhan 5,03%, ditopang oleh sektor industri, infrastruktur, dan transformasi digital. Sementara capaian SDGs Indonesia mencapai 62,5% dari 222 indikator SDGs yang telah *on track*, berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Namun, tantangan tetap ada, termasuk ketimpangan yang semakin melebar, meskipun tingkat kemiskinan menurun.

DEAR ESTEEMED STAKEHOLDERS,

Please allow us to express our gratitude and submit the Annual Report documenting the Geospatial Information Agency (BIG) performance throughout 2024. Geospatial Information (GI) has become one of the main pillars of thematic, holistic, integrative, and spatial (THIS) development planning. Towards the 2045 Golden Indonesia, we are committed to providing accurate, up-to-date, and easily accessible data and ensuring more inclusive, efficient, and sustainable development.

THE 2024 NATIONAL ECONOMIC RESILIENCE

We should be grateful for having overcome the challenges of 2024. The dynamics of the global economy, with the scarring effects of the COVID-19 pandemic and geopolitical uncertainty, have put great pressure on many countries. The International Monetary Fund (IMF) stated that global economic growth was recorded at 3.2%, reflecting efforts to restore the uneven distribution of the global economy. Meanwhile, the 2024 Sustainable Development Goals (SDGs) Report released by the UN revealed uncertainty regarding the achievement of the 2030 SDGs targets. Of the 169 targets, more than half have shown limited progress, are stagnant, or have even regressed significantly. Without acceleration efforts, around 590 million people will still be trapped in extreme poverty in 2030.

Amid challenging global conditions, Indonesia's economic growth remains solid. The Coordinating Ministry for Economic Affairs recorded growth of 5.03%, supported by the industrial, infrastructure, and digital transformation sectors. Meanwhile, based on the Ministry of National Development Planning/Bappenas data, Indonesia's SDGs reached 62.5% of the on-track 222 SDG indicators. However, challenges persist, including widening inequality, even though poverty rates have decreased.



DUKUNGAN UNTUK PRIORITAS NASIONAL

Pada tataran global, telah dibangun kesepahaman bersama bahwa Informasi Geospasial (IG) menjadi salah satu kunci utama dalam pencapaian SDGs di hampir semua negara. BIG sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial secara khusus mendukung empat Prioritas Nasional (PN), meliputi:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN I);
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN II);
3. membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (PN IV); dan
4. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) serta transformasi pelayanan publik (PN IV).

Selain keempat prioritas nasional tersebut, penyediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar secara implisit akan bersentuhan dengan PN V, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI 2024

Sepanjang tahun 2024, kami menjalankan empat strategi guna memastikan berjalannya rencana strategis, sesuai Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BIG 2020 – 2024.

STRATEGI PERTAMA adalah percepatan penyediaan data dan Informasi Geospasial dasar yang lengkap dan akurat. BIG berupaya memastikan pendanaan yang cukup dalam penyediaan IGD untuk seluruh Indonesia.

SUPPORT FOR NATIONAL PRIORITIES

At the global level, there is an agreed shared understanding that Geospatial Information is one of the primary keys to achieving the SDGs in almost all countries. BIG, as a non-ministerial government institution performing government duties in the geospatial information sector, supports explicitly four (4) National Priorities (PN), including:

1. strengthening economic resilience for quality and equitable growth (PN I);
2. developing regions to reduce inequality and ensure equity (PN II),
3. building the environment and increasing disaster and climate change resilience (PN IV); and
4. strengthening political, legal, defense, and security stability and public service transformation (PN IV).

In addition to the four national priorities, providing large-scale Base Geospatial Information (BGI) will implicitly reflect PN V, namely strengthening infrastructure to support economic development and essential services.

2024 STRATEGY AND IMPLEMENTATION

Throughout 2024, we implemented four strategies to ensure the enactment of the strategic plan following Geospatial Information Agency Regulation No. 1 of 2021 concerning the 2020–2024 BIG's Strategic Plan.

THE FIRST STRATEGY was to accelerate the provision of complete and accurate base geospatial data and information. BIG sought to ensure sufficient funding to provide base geospatial information for Indonesia. We received an additional

Kami memperoleh tambahan alokasi anggaran pemerintah sebesar Rp400 miliar untuk penyediaan peta dasar skala besar. Selain itu, BIG mendapatkan pembiayaan dari World Bank sebesar 43.297.900.000 JPY (setara dengan Rp5,03 triliun) untuk menyelesaikan pemetaan dasar skala besar di seluruh wilayah darat Indonesia.

STRATEGI KEDUA adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT). BIG berperan sebagai pembina IG dengan melakukan pendampingan dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/P), serta pemangku kepentingan lainnya. Pembinaan terhadap penyelenggara IGT difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis dan standar penyelenggaraan data geospasial tematik. Sedangkan pembinaan dalam kerangka Kebijakan Satu Peta (KSP) ditujukan untuk memastikan sinkronisasi dan integrasi data spasial dari berbagai sektor agar tata kelola wilayah semakin efisien.

STRATEGI KETIGA adalah peningkatan penyediaan dan optimalisasi Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG). BIG terus berupaya meningkatkan dukungan kebijakan, penguatan kelembagaan, pengembangan standar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia IG Informasi Geospasial. Selain itu, BIG mengoptimalkan layanan teknologi untuk meningkatkan pengelolaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan IG, yang mencakup peningkatan kualitas layanan pusat data (*data center*), optimalisasi sistem pengelolaan data dan Informasi Geospasial, dan pengembangan teknologi pemanfaatan IG agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh berbagai pihak.

government budget allocation of IDR400 billion to provide large-scale base maps. Furthermore, BIG received a JPY43,297,900,000 (equivalent to IDR5.03 trillion) funding from the World Bank to complete large-scale base mapping throughout Indonesia's land area.

THE SECOND STRATEGY was to guide the Thematic Geospatial Information (TGI) implementation. BIG served as a mentor in GI, assisting and coordinating ministries, institutions, regional governments, and other stakeholders. Guidance for TGI organizers focused on increasing technical capacity and standards for implementing thematic geospatial data. Meanwhile, guidance within the One Map Policy aimed to ensure synchronization and integration of spatial data from various sectors, making regional governance more efficient.

THE THIRD STRATEGY was to improve the provision and optimization of Geospatial information infrastructure (GII). In this case, BIG continued to strive to strengthen policy support, institutional empowerment, standard development, and quality improvement of geospatial information human resources. In addition, BIG optimized technology services to improve the management, dissemination, and utilization of geospatial information, which includes improving the quality of data center services, optimizing geospatial data and information management systems, and developing utilization technology of geospatial information to give other parties easy access and utilization.



STRATEGI KEEMPAT adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis reformasi birokrasi. BIG menerapkan *Roadmap Reformasi Birokrasi (RB)* serta merinci langkah-langkah dalam Rencana Aksi Penyelenggaraan RB

PERANAN KEPALA BIG

Sepanjang 2024, Kepala BIG memainkan peran strategis dalam perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan implementasi strategi geospasial nasional, agar penyelenggaraan IG berjalan terarah, efisien, dan sesuai Rencana Strategis 2020–2024.

BIG menjadi penggerak utama dalam perumusan strategi percepatan penyediaan peta dasar skala besar. Salah satu langkah konkret ialah memprakarsai penyusunan Strategi Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Seluruh Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Kepala BIG Nomor 110.1 Tahun 2024. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi BIG dalam penyelenggaraan peta dasar skala besar periode 2024–2029. Dalam keputusan tersebut, Kepala BIG menetapkan sejumlah aspek strategis, antara lain:

- urgensi percepatan penyediaan peta dasar skala besar, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya;
- spesifikasi teknis data dan informasi geospasial dasar untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan nasional;
- optimalisasi penggunaan teknologi guna mencapai keseimbangan antara spesifikasi teknis, anggaran, dan waktu yang tersedia; dan
- proses pemutakhiran dan komersialisasi peta dasar, agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas oleh berbagai sektor.

THE FOURTH STRATEGY was governance with bureaucratic reform. BIG implemented the *Bureaucratic Reform (RB) Roadmap* and elaborated on the stages of the *Bureaucratic Reform Action Plan*.

ROLE OF THE HEAD OF BIG

Throughout 2024, the Head of BIG played a strategic role in policy formulation, cross-sector coordination, and supervision of the national geospatial strategy so that GI was implemented efficiently and in alignment with the 2020–2024 Strategic Plan.

BIG became the main driver in formulating strategies and policies for the provision of large-scale base maps. One definite step was to initiate the preparation of the *Acceleration Strategy for the Provision of Large-Scale Base Maps Throughout Indonesia*, which was then outlined in the *Decree of the Head of BIG No. 110.1 of 2024*. This document has become the primary reference for BIG in organizing large-scale base maps for the period 2024–2029. In this decree, the Head of BIG stipulated several strategic aspects, including:

- the urgency of accelerated provision of large-scale base maps, considering budget and resource constraints;
- technical specifications of base geospatial data and information to support various national development needs;
- technology optimization to balance technical specifications, budget, and allocated time; and
- the process of updating and commercializing base maps to enable various sectors to access and use them widely.

Kepala BIG juga berperan dalam koordinasi lintas sektor, khususnya dengan kementerian dan lembaga terkait, antara lain dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam perencanaan strategis pembangunan berbasis Informasi Geospasial; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pemanfaatan peta dasar dalam tata ruang dan pertanahan; serta Kementerian Dalam Negeri, dalam harmonisasi data geospasial dengan kebijakan daerah.

Kepala BIG juga melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2023 terkait pentingnya penyediaan Informasi Geospasial mendukung tata kelola pemerintahan, *monitoring* berbagai sektor pembangunan, serta tata kelola sumber daya alam dan mineral yang lebih baik. Dukungan KPK dalam advokasi peningkatan alokasi anggaran BIG pada APBN berkontribusi pada anggaran tambahan sebesar Rp400 miliar untuk penyediaan peta dasar skala besar di Sulawesi, yang mencakup luas 186.277 km².

Untuk memastikan kelancaran proses penyediaan peta dasar skala besar, Kepala BIG menunjuk Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi rutin, dengan kewajiban melaporkan perkembangan minimal satu kali dalam setahun.

Di samping itu, Kepala BIG turut memberikan solusi atas berbagai kendala dalam pelaksanaan penyediaan peta dasar skala besar, termasuk pengelolaan anggaran, pemilihan teknologi, dan mitigasi tantangan teknis serta birokrasi. Implementasi peta dasar skala besar telah dimulai dari Sulawesi, dan selanjutnya akan dilanjutkan menggunakan skema pembiayaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada periode 2025–2029.

The Head of BIG also plays a role in inter-sector coordination, especially with related ministries and institutions, including the Ministry of Finance on the budget allocation for the provision of large-scale base maps, the National Development Planning Agency/Bappenas on the development of strategic plans using geospatial information, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency on the utilization of base maps in spatial planning and land, and the Ministry of Home Affairs in aligning geospatial data with regional policies.

The Head of BIG has also coordinated with the Corruption Eradication Commission (KPK) since 2023 regarding the importance of Geospatial Information provision to support governance, supervision of various development sectors, and better management of natural and mineral resources. KPK's support in the advocacy for increasing the BIG budget allocation in the State Budget contributed to an additional budget of IDR400 billion to provide large-scale base maps in Sulawesi, covering an area of 186,277 km².

To ensure the smooth provision of the large-scale base maps, the Head of BIG appointed the Deputy of Base Geospatial Information as the department responsible for routine supervision and evaluation, with a compulsory progress report at least once a year.

Furthermore, the Head of BIG provided solutions to various obstacles in providing large-scale base maps, including budget management, technology selection, technical mitigation, and bureaucratic challenges. The provision of large-scale base maps began in Sulawesi using the Foreign Loan and/or Grant (PHLN) financing scheme from 2025 to 2029.



Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Kepala BIG juga memastikan kesiapan program dalam kerangka *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)*, yang bertujuan untuk mengintegrasikan administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang berbasis data geospasial.

Selain fokus pada penyediaan peta dasar, Kepala BIG juga berperan aktif dalam mendukung kebijakan nasional lainnya, seperti Kebijakan Satu Peta. Dalam hal ini, Kepala BIG memastikan agar peta dasar yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional.

CAPAIAN UTAMA

Melalui berbagai program strategis sebagai implementasi empat strategi utama, BIG berhasil memperluas cakupan peta dasar skala besar, memperkuat sistem referensi geospasial nasional, serta meningkatkan ketersediaan IGT guna mendukung berbagai sektor, mulai dari investasi, tata ruang, hingga mitigasi bencana.

Penyediaan peta dasar skala 1:5.000 Pulau Sulawesi mencakup luas 186.277 km² berhasil dilaksanakan sebagai bagian dari strategi Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 2024–2029. Upaya ini menggunakan kombinasi teknologi terkini, mulai dari kamera udara metrik, teknologi LiDAR, hingga pemanfaatan *Synthetic Aperture Radar (SAR)* dan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), disesuaikan dengan karakter wilayah pemetaan.

Selain itu, BIG juga telah memprioritaskan pemetaan garis pantai nasional, yang menjadi elemen penting dalam perencanaan tata ruang serta mitigasi bencana. Pada tahun 2024, pemetaan garis pantai telah difokuskan pada wilayah Kalimantan, dengan hasil yang melampaui target awal, yakni 6.751 km dari

As part of the long-term commitment, the Head of BIG also ensured the program's readiness within the framework of the Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), which aims to integrate land administration and spatial planning based on geospatial data.

In addition to focusing on providing base maps, the Head of BIG actively supported other national policies, such as the One Map Policy. In this case, the Head of BIG assured that the base maps provided can be integrated with national development policies.

KEY ACHIEVEMENTS

Through various strategic programs that implemented the four strategies, BIG successfully expanded the coverage of large-scale base maps, strengthened the national geospatial reference system, and increased TGI availability to support various sectors, from investment and spatial planning to disaster mitigation.

The provision of 1:5,000 scale base maps of Sulawesi Island, covering an area of 186,277 km², was successfully implemented as part of the Acceleration of the 2024–2029 Large-Scale Base Map Provision strategy. This effort used a combination of the latest technologies, ranging from metric aerial cameras and LiDAR technology to Synthetic Aperture Radar (SAR) and high-resolution satellite imagery, which was adjusted to the character of the mapping area.

In addition, BIG prioritized national coastline mapping, which is an important element in spatial planning and disaster mitigation. In 2024, the coastline mapping focused on Kalimantan, with the result exceeding the initial target of 6,751 km from the targeted 6,500 km. This information is not only for coastal resource governance purposes but

yang ditargetkan 6.500 km. Informasi ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan tata kelola sumber daya pesisir, tetapi juga menjadi referensi utama dalam penyusunan kebijakan batas wilayah dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Pembangunan infrastruktur geospasial juga menjadi prioritas dalam strategi BIG di tahun 2024. Pada tahun 2024 BIG membangun 41 stasiun Ina-CORS hingga menjadi 472 stasiun. BIG juga berhasil membangun 32 stasiun pasang surut (Pasut) hingga menjadi 290 stasiun. Stasiun-stasiun ini berperan penting dalam memastikan keakuratan posisi dan koordinat di seluruh wilayah Indonesia, terutama dalam mendukung berbagai proyek pembangunan nasional serta memperkuat kapasitas Indonesia dalam memantau perubahan elevasi permukaan laut dan potensi bencana pesisir.

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan pemanfaatan ruang eksisting. Hal ini akan mendorong efektivitas pengambilan keputusan berbasis spasial. Pelaksanaan percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) memberikan dampak antara lain perbaikan tata kelola data spasial, percepatan penetapan batas administrasi, peningkatan kualitas rencana tata ruang, hingga perbaikan tata kelola perizinan berbasis lahan. 150 Informasi Geospasial Tematik (IGT) telah terintegrasi dan sudah dipublikasi pada Geoportal KSP.

Isu utama dalam pemanfaatan data pada KSP adalah akses Geoportal KSP untuk

also as a primary reference in formulating regional boundary policies and mitigating the impacts of climate change.

Geospatial infrastructure development was a priority in BIG's 2024 strategy. In 2024, BIG constructed 41 new Ina-CORS stations, bringing the total to 472 nationwide. In addition, BIG built 32 new tide gauge stations, increasing the total number to 290. These stations are essential in ensuring the accuracy of positions and coordinates throughout Indonesia, especially in supporting various national development projects and strengthening Indonesia's capacity to monitor sea-level elevation changes and potential coastal disasters.

Presidential Regulation No. 23 of 2021, on the Amendment of Presidential Regulation No. 9 of 2016 on the Acceleration of the One Map Policy Implementation at a Map Scale of 1:50,000, reflects the government's commitment to providing legal certainty for investment and permission for spatial use that aligns with national development plans and existing spatial utilization. This will enhance the effectiveness of spatially-based decision-making. Implementing the accelerated One Map Policy (OMP) has had several positive impacts, including improved spatial data governance, faster determination of administrative boundaries, enhanced quality of spatial planning, and more efficient land-based licensing processes. As many as 150 Thematic Geospatial Information (TGI) layers have been integrated and published on the OMP Geoportal.

A key issue in using data under OMP was public access to the OMP Geoportal.



publik. Akses Geoportal KSP sebelumnya hanya diberikan untuk presiden, wakil presiden, menteri, kepala lembaga dan pimpinan daerah. Pada tahun 2023, BIG menginisiasi lahirnya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 yang membuka ruang untuk publik dalam mengakses hasil Kebijakan Satu Peta (KSP) dimana kewenangan aksesnya diatur dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan komitmen bersama antar kementerian/lembaga agar seluruh pihak, baik pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat dapat memanfaatkan berbagai produk KSP melalui perluasan akses Geoportal KSP kepada publik.

BIG juga terus memperluas ketersediaan IGT yang lebih lengkap, akurat, dan aplikatif di berbagai sektor. Salah satunya, Peta Reaksi Cepat Kebencanaan seluas 28 km², yang berfungsi sebagai alat bantu dalam tanggap darurat dan mitigasi bencana. Selain itu, BIG juga menyusun IGT Peringatan Dini Banjir dalam jangka waktu 2021 s.d. 2004 yang mencakup 14.205 km², guna meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir di berbagai wilayah rawan banjir baik banjir bandang maupun banjir luapan.

Di bidang statistik dan tata kelola sumber daya, BIG menghasilkan IGT Integrasi Spasial Statistik seluas 592.807 km², yang memungkinkan pemetaan berbagai indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebanyak 23 indikator sampai tingkat desa berbasis spasial. Untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan ekosistem, disusun Neraca Spasial Sumber Daya Alam (SDA) Lingkungan Hidup seluas 1.891.306 km², serta Neraca Spasial SDA Laut dan Pesisir dengan cakupan 23.321 km².

Previously, access to the OMP Geoportal was limited to the President, Vice President, Ministers, Heads of Agencies, and Regional Leaders. In 2023, BIG initiated the issuance of Presidential Decree No. 28 of 2023, which opened access to the results of the OMP to the public. Access rights are further regulated under the Geospatial Information Agency Regulation No. 3 of 2024. In 2024, a joint commitment was undertaken among ministries and agencies to ensure that all stakeholders, including government, institutions, businesses, and the public, can benefit from the various products of the OMP through expanded public access to the OMP Geoportal.

BIG continues to expand the availability of more comprehensive, accurate, and applicable TGI across various sectors. One example is the Disaster Rapid Response Map covering an area of 28 km², which serves as a support tool for emergency response and disaster mitigation efforts. In addition, BIG developed Flood Early Warning TGI covering 14,205 km² from 2021 to 2024, aimed at enhancing preparedness for flood risks, both flash and riverine flooding, in vulnerable areas.

BIG produced TGI for Spatial Integration of Statistics covering 592,807 km² in statistics and resource governance. This enables the spatial mapping of 23 Sustainable Development Goals (SDGs) indicators down to the village level. A Spatial Natural Resource (NR) and Environmental Balance Sheet covering 1,891,306 km² and a Spatial NR Balance Sheet for Marine and Coastal Areas covering 23,321 km² were also developed to support environmental and ecosystem management.

BIG juga mengembangkan Pemodelan Dinamika Spasial seluas 857 km², yang dapat digunakan untuk analisis perubahan lanskap dan tata ruang secara dinamis. Selain itu, guna memperkaya referensi Informasi Geospasial, BIG menerbitkan berbagai atlas tematik, antara lain Atlas Geospasial Indonesia dengan fokus pada keanekaragaman hayati, Atlas SDGs untuk memantau capaian SDGs secara spasial, Atlas Bentang Lahan Gunungapi, yang mendukung pemantauan kawasan rawan bencana geologi, Atlas Taktual Indonesia, yang menyajikan berbagai fenomena spasial terkini, serta Atlas Pariwisata sebagai referensi bagi pengembangan sektor pariwisata berbasis geospasial.

BIG juga terus memperkuat simpul jaringan geospasial nasional, dengan menyusun kebijakan pembinaan simpul jaringan agar terdapat standar yang sama dalam penyelenggaraan data geospasial; melakukan pendampingan dan optimalisasi simpul jaringan, agar data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan secara luas, monitoring dan evaluasi terhadap simpul jaringan daerah, serta memperkuat kelembagaan simpul jaringan di daerah, melalui program yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG). Hingga akhir 2024, 26 simpul jaringan telah memenuhi kriteria unggul, menunjukkan peningkatan signifikan dalam koordinasi data geospasial antar-instansi.

BIG melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial (PPKIG) terus memperkuat upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang geospasial. PPKIG meraih Akreditasi Lembaga Pelatihan predikat Bintang 1 dan Akreditasi Program Pelatihan predikat B dari Lembaga Akreditasi Negara (LAN).

BIG also developed Spatial Dynamic Modeling, covering an area of 857 km², which can be used to analyze landscape and spatial changes dynamically. In addition, to enrich geospatial information references, BIG published various thematic atlases, including the Indonesian Geospatial Atlas focusing on biodiversity, SDGs Atlas to monitor SDGs spatial achievements, the Volcanic Landscape Atlas to support area supervision prone to geological disasters, the Indonesian Tactile Atlas presenting various current spatial phenomena, and the Tourism Atlas as a reference for the development of the geospatial-based tourism sector.

Furthermore, BIG continuously strengthens national geospatial network nodes by formulating network node development policies to create standards in organizing geospatial data, providing assistance, and optimizing network nodes so that the data produced is more accurate and can be used widely for supervision and evaluation of regional network nodes and strengthen network node institutions in the regions through programs facilitated by Center for Geospatial Information Infrastructure Development (PPIIG). By the end of 2024, 26 network nodes met the exemplary criteria, showing a significant increase in inter-agency geospatial data coordination.

Through the Center for Geospatial Information Competence Development (PPKIG), BIG continues strengthening its efforts to enhance human resource capacity in the geospatial sector. PPKIG received a 1-Star Training Institution Accreditation and a Grade B Training Program Accreditation from the National Accreditation Agency (LAN).



Sejumlah capaian tersebut mencerminkan komitmen BIG dalam mendukung pembangunan nasional. Berbagai program prioritas yang dicanangkan telah berjalan sesuai dengan target, bahkan beberapa di antaranya melampaui ekspektasi awal. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dalam proses implementasi strategi ini, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Penghematan anggaran menjadi salah satu tantangan utama sehingga BIG melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan beberapa program. Selain itu, kompleksitas koordinasi lintas sektor juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Disisi lain, perubahan iklim juga membawa tantangan baru dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial. Peningkatan frekuensi bencana alam, perubahan pola garis pantai, serta pergeseran elevasi daratan akibat dinamika geologi menjadi faktor yang semakin memperkuat urgensi penyediaan data spasial yang akurat dan *real-time*.

TATA KELOLA

BIG terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola badan yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Upaya seluruh pegawai BIG menjalankan Rencana Aksi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi menghasilkan peningkatan signifikan dalam tata kelola organisasi, tercermin dalam nilai Reformasi Birokrasi BIG tahun 2023 sebesar 76,96, yang diterima pada tahun 2024. BIG juga telah menerapkan berbagai kebijakan terkait validasi dan pengelolaan data guna memastikan Informasi Geospasial yang dihasilkan memiliki standar tinggi. Salah satunya, BIG menetapkan Wali data Informasi Geospasial Tematik (IGT) sebagai penanggung jawab penyelenggaraan IGT di kementerian/ lembaga sesuai dengan tugas dan

These achievements reflect BIG's commitment to supporting national development. Various priority programs went as planned following the target. Some of which even exceeded initial expectations. However, it cannot be denied that there were several challenges to face during the implementation. Budget saving was one of the main challenges BIG responded to by adjusting several programs. In addition, the complexity of inter-sector coordination was a challenge in itself, especially in aligning policies between the central and regional governments.

On the other hand, climate change has brought new challenges in organizing Geospatial Information. The increasing frequency of natural disasters, changes in coastline patterns, and shifts in land elevation due to geological dynamics have become the factors that increasingly promote the urgency of providing accurate and real-time spatial data.

GOVERNANCE

BIG constantly commits to improving transparent and accountable governance, which is in line with the principles of good governance. All BIG employees' efforts to implement the Bureaucratic Reform Action Plan resulted in significant improvements in organizational governance, which is reflected in the 2023 BIG Bureaucratic Reform score of 76.96, which was evaluated in 2024. BIG has also implemented various policies related to data validation and management to ensure high-quality geospatial information. One of them was the appointment of the Thematic Geospatial Information (TGI) Data Authority as the entities responsible for organizing TGI in ministries/agencies in accordance with their duties and functions. This determination aims to prevent overlapping data, ensure

fungsinya. Penetapan ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih data, memastikan integrasi informasi, serta mewujudkan satu peta yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh kementerian/lembaga sesuai kebutuhan.

KINERJA KEBERLANJUTAN

Kegiatan BIG sebagai penyedia Informasi Geospasial turut berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara khusus, BIG juga turut mendukung upaya pencapaian SDGs melalui penyusunan Atlas SDGs yang dapat memberikan gambaran serta analisis spasial terkait capaian dan tantangan SDGs hingga tingkat desa (*by Name by Address*), termasuk ketimpangan ekonomi, akses layanan dasar, dan kesejahteraan sosial.

Pada aspek ekonomi, produk Informasi Geospasial mendukung efisiensi pembangunan dan investasi. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar dapat mempercepat perencanaan dan realisasi investasi sektor infrastruktur, energi, dan tata ruang. Sedangkan integrasi Informasi Geospasial dalam Kebijakan Satu Peta dapat mengurangi tumpang tindih penggunaan lahan serta mempercepat proses perizinan investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Selain itu, BIG juga mendukung pengembangan industri geospasial nasional, termasuk hilirisasi industri geospasial, guna meningkatkan pemanfaatan data spasial dalam sektor swasta dan memperkuat industri lokal berbasis geospasial. Pemetaan wilayah pesisir dan potensi kelautan dapat mendukung pemanfaatan sumber daya maritim secara lebih produktif dan berkelanjutan. Kami juga menyediakan layanan penjualan produk geospasial nol rupiah dengan kriteria tertentu.

Dalam aspek sosial, BIG berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan keadilan spasial melalui pemetaan wilayah rentan

information integration, and realize accessible One Map for use by all ministries/agencies as needed.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE

As a provider of Geospatial Information, BIG's activities have brought an impact on economic, social, and environmental aspects. Specifically, BIG supports efforts to achieve SDGs through the preparation of the SDGs Atlas, which can provide an overview and spatial analysis of SDGs achievements and challenges down to the village level (by Name by Address), including economic inequality, access to base services, and social welfare.

In the economic aspect, Geospatial Information products support development and investment efficiency. The provision of large-scale base maps can accelerate investment plans and realization in the infrastructure, energy, and spatial sectors. Meanwhile, the integration of Geospatial Information in the One Map Policy can reduce overlapping land use and accelerate the investment licensing process through the Online Single Submission (OSS) system.

In addition, BIG also supports the development of the national geospatial industry, including the downstream geospatial industry, to increase spatial data usage in the private sector and strengthen local geospatial-based industries. Moreover, coastal areas and marine potential mapping can support the use of more productive and sustainable maritime resources. In addition, we provide the sales of zero-rupiah geospatial products with certain criteria.

In the social aspect, BIG has contributed to equitable development and spatial justice by mapping disaster-prone areas,



bencana, penyediaan data geospasial untuk perencanaan wilayah tertinggal dan perbatasan, serta edukasi dan peningkatan kapasitas SDM di tingkat lokal untuk mendukung inklusivitas dalam pemanfaatan Informasi Geospasial. Kami juga menjalankan program-program tanggung jawab sosial untuk komunitas karyawan dan masyarakat di sekitar kantor.

Sedangkan pada aspek lingkungan, BIG turut berkontribusi dalam mengurangi risiko bencana, meningkatkan efisiensi pengelolaan ekosistem, serta mendukung kebijakan lingkungan yang lebih berbasis data. Stasiun Ina-CORS dan Stasiun Pasang Surut permanen bermanfaat untuk memonitor perubahan permukaan laut serta mendukung mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap risiko bencana pesisir. Pemetaan wilayah rawan bencana dan degradasi lingkungan, seperti deforestasi dan alih fungsi lahan, dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan perlindungan ekosistem. Selain itu, integrasi data geospasial dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam, dapat memastikan pemanfaatan lahan yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi konflik agraria. Kami juga menerapkan kesadaran lingkungan dalam beroperasi, dan terus berupa membangun budaya keberlanjutan pada pegawai.

PROSPEK 2025

Berbagai pencapaian yang telah diraih pada tahun 2024 merupakan landasan penting BIG dalam mewujudkan ekosistem geospasial yang terintegrasi, inovatif, dan berdaya saing global. Lima tahun ke depan (2025–2029) menjadi fase krusial dalam memperkuat infrastruktur geospasial dan memastikan integrasi data spasial dalam berbagai sektor pembangunan mendukung perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pada tahap berikutnya (2030–

providing geospatial data for planning underdeveloped and border areas, and providing education and capacity building of local human resources to support inclusivity in the use of Geospatial Information. We also implemented social responsibility programs for employee communities and surrounding local residents.

Meanwhile, in the environmental aspect, BIG has contributed to reducing disaster risks, increasing the efficiency of ecosystem management, and supporting more data-based ecological policies. Ina-CORS Stations and permanent Tidal Stations are useful for monitoring sea level changes and supporting climate change mitigation and adaptation to coastal disaster risks. Mapping of disaster-prone areas and environmental degradation, such as deforestation and land conversion, can be used to support ecosystem protection policies. In addition, the integration of geospatial data in spatial planning and natural resource management policies can ensure more environmentally friendly land use and reduce agrarian conflicts. We also implement environmental awareness in our operations and continue to grow a sustainable culture among employees.

THE 2025 PROSPECTS

The achievements in 2024 have become a vital foundation for BIG in realizing an integrated, innovative, and globally competitive geospatial ecosystem. The next five (5) years (2025–2029) will be a crucial period in strengthening geospatial infrastructure and ensuring spatial data integration in various development sectors to support Thematic, Holistic, Integrative, and Spatial (THIS) planning. In the next stage (2030–2034), the focus will be directed at the developing downstream

2034), fokus diarahkan pada hilirisasi industri geospasial serta penguatan konektivitas antar entitas, menjadikan data spasial sebagai akselerator utama pembangunan nasional. Ke depan, BIG juga akan mendorong globalisasi peran geospasial, termasuk kemudahan berbagi data, pengembangan kompetensi SDM berstandar internasional, serta kolaborasi teknologi lintas negara.

Untuk tahun 2025, BIG akan fokus pada penguatan peran geospasial sebagai landasan pembangunan nasional, baik dalam mendukung SDGs, pengembangan industri geospasial, maupun akselerasi transformasi digital. Sejauh ini, Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemanfaatan data geospasial dalam berbagai kebijakan nasional. Kebijakan Satu Data Indonesia yang menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 telah memperkuat sinergi antara data spasial, data statistik, dan data keuangan dalam proses perencanaan dan implementasi program pembangunan. Selain itu, keberhasilan Kebijakan Satu Peta dalam mengintegrasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga telah menjadi bukti nyata bahwa Informasi Geospasial memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi tata kelola lahan, mempercepat investasi, hingga mengurangi konflik agraria. Ke depan, Informasi Geospasial akan terus menjadi elemen krusial dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah. Pemanfaatan peta digital skala besar memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang menjadi dasar dalam pengelolaan wilayah dan investasi. RDTR juga mendukung percepatan investasi dengan mengintegrasikan data spasial ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS), mempermudah proses perizinan usaha dan menciptakan iklim investasi yang lebih transparan serta efisien.

geospatial industry, strengthening connectivity between entities, and making spatial data the main accelerator of national development. In the future, BIG will also encourage the globalization of geospatial roles, including ease of data sharing, competency development for international standards of human resources, and inter-country technology collaboration.

In 2025, BIG will focus on strengthening the role of geospatial as a foundation for national development, supporting the SDGs, developing the geospatial industry, and accelerating digital transformation. So far, the government has strongly committed to using geospatial data in various national policies. The One Data Indonesia Policy, which is mandated by the Presidential Regulation No. 39 of 2019, has strengthened the synergy between spatial data, statistical data, and financial data in the planning and implementation of development programs. In addition, the success of the One Map Policy in integrating 151 thematic maps from 23 ministries and institutions has become clear evidence that geospatial information plays a vital role in increasing the efficiency of land management, accelerating investment, and reducing agrarian conflicts. In the future, geospatial information will continue to be crucial in supporting various strategic government programs. Large-scale digital maps are essential in regional development planning, especially through the Detailed Spatial Plan (RDTR), the basis for regional management and investment. RDTR supports investment acceleration by integrating spatial data into the Online Single Submission (OSS) system, simplifying the business licensing process, and creating a more transparent and efficient investment climate.



Kami juga memandang, industri geospasial di Indonesia semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan berbagai sektor terhadap jasa Informasi Geospasial. Baik di pemerintahan maupun swasta, data spasial kini menjadi elemen krusial dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya. Kondisi ini membuka peluang besar bagi industri hilir geospasial, yang berperan dalam mengolah, menganalisis, dan menyajikan data spasial untuk berbagai keperluan.

Dengan implementasi Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia, industri hilir geospasial memiliki potensi besar untuk berkembang lebih luas. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal, penguatan industri geospasial dalam negeri menjadi hal yang mendesak. Indonesia perlu menumbuhkan lebih banyak industri hilir yang mampu mengolah dan mengelola data geospasial secara efisien, serta memastikan kapasitas industri yang ada cukup kuat untuk memenuhi permintaan pasar. Kami memandang perlunya program inkubasi dan peningkatan kapasitas industri geospasial guna mendorong lahirnya perusahaan berbasis geospasial yang inovatif serta meningkatkan daya saing industri lokal. Dengan strategi ini, industri hilir geospasial di Indonesia tidak hanya akan berkembang secara kuantitas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.

BIG juga terus mendorong transformasi digital berbasis geospasial. Kami berupaya memastikan penguatan kebijakan, kelembagaan, standar, dan teknologi, serta turut menyiapkan ekosistem industri geospasial yang mampu mengadopsi teknologi digital terkini untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu, BIG bertindak sebagai fasilitator dalam pengembangan SDM

We also see that the geospatial industry in Indonesia is growing along with the increasing needs of various sectors for geospatial information services. Both in the government and private sector, spatial data is now a crucial element in planning, decision-making, and resource management. This condition opens great opportunities for the downstream geospatial industry, which plays a role in processing, analyzing, and presenting spatial data for various purposes.

Through the implementation of the One Map and One Data Indonesia Policy, the downstream geospatial industry has great potential to grow bigger. However, strengthening the domestic geospatial industry is urgent to utilize this opportunity optimally. Indonesia needs to grow downstream industries that can process and manage geospatial data efficiently and ensure that the existing industrial capacity is strong enough to meet market demand. We see the need for an incubation program and capacity building for the geospatial industry to encourage the rise of innovative geospatial-based companies and increase competitiveness among local industries. With this strategy, Indonesia's downstream geospatial industry will grow in quantity and can compete at the national and global levels.

BIG also continues to encourage geospatial-based digital transformation. We strive to strengthen policies, institutions, standards, and technology and prepare a geospatial industry ecosystem that can adopt the latest digital technology to support national development. In addition, BIG is a facilitator in developing human resources and the geospatial industry through training and capacity

dan industri geospasial, melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas agar tenaga ahli di bidang ini semakin kompeten. Untuk mempercepat transformasi digital, BIG juga aktif membangun jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memperkuat ekosistem Informasi Geospasial yang terintegrasi dan inovatif.

Pada upaya pencapaian SDGs, BIG bersama-sama Sekretariat Nasional SDGs Indonesia akan menginisiasi *Voluntary National Report* (VNR) berbasis geospasial. Integrasi geospasial dengan geostatistik akan membuat laporan SDGs lebih akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat dalam perumusan kebijakan berbasis data.

APRESIASI

Sebagai penutup, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, kolaborasi, dan kepercayaan yang diberikan kepada BIG. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada jajaran manajemen, pejabat, serta seluruh pegawai BIG atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjaga kinerja lembaga ini. Kami optimis bahwa BIG akan terus berkembang dan beradaptasi menghadapi tantangan di masa depan dengan sinergi yang kuat. Semoga kehadiran BIG semakin memberikan dampak positif yang luas, khususnya dalam memperkuat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

building so that experts in this field become increasingly competent. To accelerate digital transformation, BIG also actively builds networks and collaborations with various stakeholders, both at the national and international levels, to strengthen an integrated and innovative geospatial information ecosystem.

BIG, along with the Indonesian SDGs National Secretariat, will initiate a geospatial-based Voluntary National Report (VNR) to achieve SDGs. Integrating geospatial with geostatistics will make the SDGs report more accurate, understandable, and useful in formulating data-based policies.

APPRECIATION

Lastly, we sincerely thank all stakeholders for their support, collaboration, and trust in BIG. Our highest appreciation is also extended to all BIG's management, officials, and employees for their dedication and hard work in keeping up this institution's performance. We are optimistic that BIG will continue to grow and adapt to future challenges with strong synergy. Hopefully, BIG's presence will increasingly provide a broad positive impact, especially in strengthening national development and improving the welfare of the Indonesian people. ↓

Jakarta, April 2025

Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc.

Kepala BIG
The Head of BIG

03

PROFIL LEMBAGA

*Institution
Profile*



Fotografer | Photographer:

Bayu Triyogo

Lokasi | Location:

**Stasiun Pasang Surut Eri,
Ambon, Maluku**



Identitas Instansi

Institution Profile



NAMA LEMBAGA

Institution Name

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Geospatial Information Agency



TANGGAL PENDIRIAN

Date of Establishment

Berdiri pada 17 Oktober 1969 dengan nama Bakosurtanal

Established on October 17, 1969, under the name Bakosurtanal.



DASAR PENDIRIAN

Legal Basis of Establishment

Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2011

Presidential Regulation No. 94 of 2011



ALAMAT DAN KONTAK

Address and Contact

Jalan Raya Bogor KM 46, Kawasan Sains dan Teknologi
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911
Telepon : 021-8752062 ext.3608/3611/3103
Fax : 021-87908988/8753155
E-mail : info@big.go.id
Website : big.go.id

Jalan Raya Bogor KM 46, Kawasan Sains dan Teknologi
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911
Telephone : 021-8752062 ext.3608/3611/3103
Fax : 021-87908988/8753155
E-mail : info@big.go.id
Website : big.go.id

Sekilas Badan Informasi Geospasial

A Glimpse of Geospatial Information Agency

Lahirnya Badan Informasi Geospasial (BIG) bermula dari sejumlah jawatan pengukuran zaman Hindia Belanda yang dilebur menjadi satu badan bernama *Permanente Kaarterings - Commissie* (Komisi Tetap untuk Pemetaan) pada 1938. Seiring berjalannya waktu, badan ini bertransformasi mengikuti perkembangan zaman guna memenuhi kebutuhan pembangunan.

Pada era Orde Baru, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) pada 17 Oktober 1969 untuk mendukung program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Tahun 2011, Bakosurtanal bertransformasi menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan kewenangan yang lebih luas. BIG kini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG), termasuk Informasi Geospasial Dasar (IGD), Informasi Geospasial Tematik (IGT), dan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG), yang berperan penting dalam pembangunan nasional.

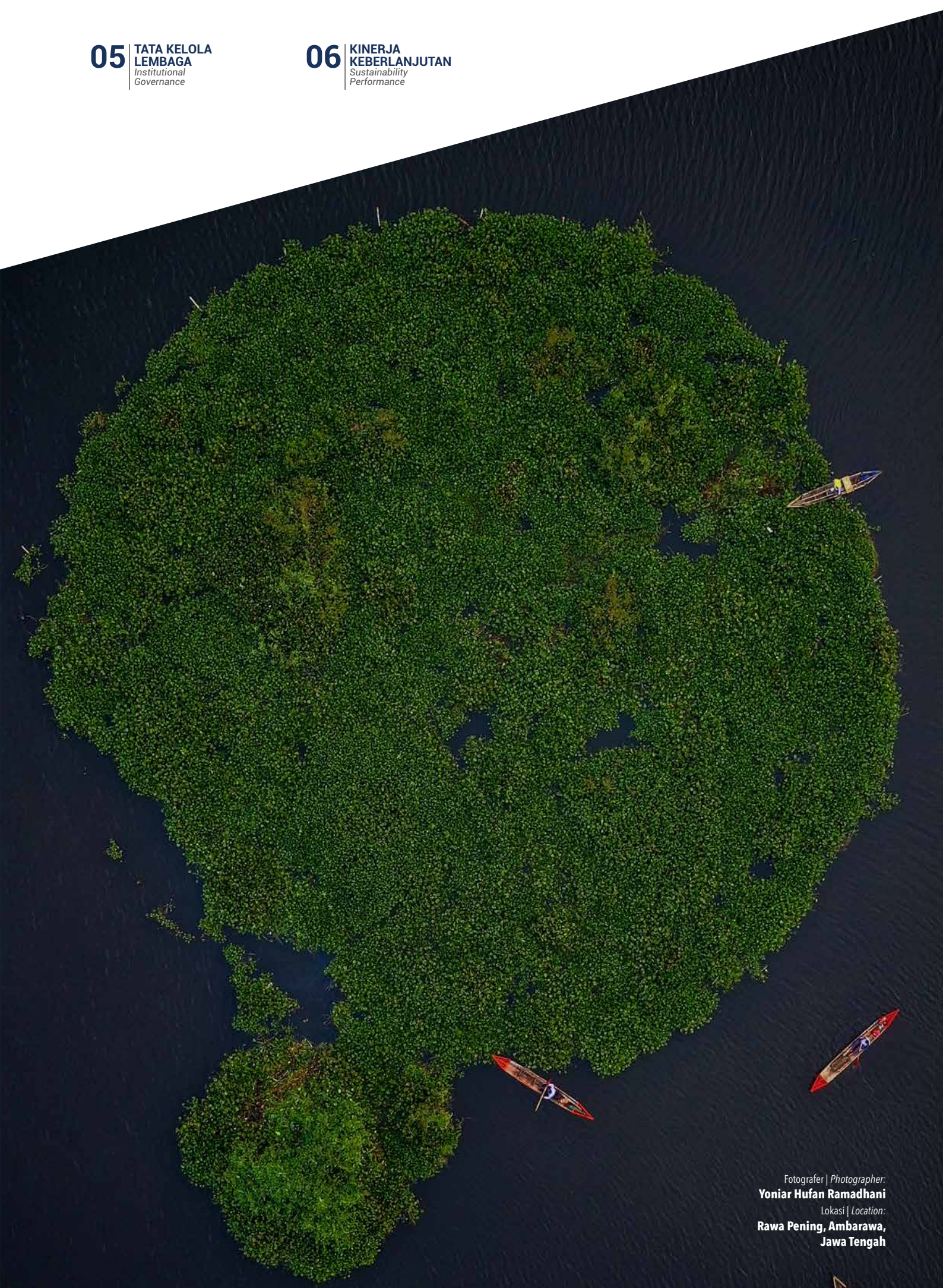
Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

The history of the Geospatial Information Agency dates back to 1938, when several measurement offices from the Dutch East Indies era were merged into one agency called *Permanente Kaarterings-Commissie* (Permanent Commission for Mapping). Over time, this agency has transformed to meet development needs in an ever-evolving era.

Furthermore, during the New Order period, the government established the National Survey and Mapping Coordinating Agency (Bakosurtanal) on October 17, 1969 to support development programs in the Five-Year Development Plan (Repelita).

In 2011, Bakosurtanal transformed into the Geospatial Information Agency (BIG), which has broader authority. BIG is now responsible for organizing geospatial information (GI), including Basic Geospatial Information (BGI), Thematic Geospatial Information (TGI), and Geospatial Information Infrastructure (GII), which plays an essential role in national development.

The Geospatial Information Agency is a non-ministerial government agency that is under and responsible to the President.



Fotografer | *Photographer:*
Yoniar Hufan Ramadhani
Lokasi | *Location:*
**Rawa Pening, Ambarawa,
Jawa Tengah**

01

KILAS
KINERJA
Performance
Overview

02

LAPORAN
MANAJEMEN
Management
Report

03

PROFIL
LEMBAGA
Institution
Profile

04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
KINERJA LEMBAGA
Management Discussion
and Analysis

1948

Raad de Directorium voor het Meet en Kaarteerwezen in Nederlands Indies (Dewan dan Direktorium untuk Pengukuran dan Pemetaan Hindia Belanda) terbentuk menggantikan *Permanente Kaarterings-Comissie* (Komisi Tetap untuk Pemetaan) di masa kolonialisme Hindia Belanda.

Raad de Directorium voor het Meet en Kaarteerwezen in Nederlands Indies (Council and Directorate for Surveying and Mapping of the Dutch East Indies) was formed to replace the *Permanente Kaarterings-Comissie* (Permanent Commission for Mapping) during the Dutch East Indies colonial era.

1949

Direktorium dengan nama asing itu pun kemudian berubah menjadi Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta.

The directorate, called under a foreign name, was renamed Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta (the Council and Directorate of Surveying and Mapping).

1964

Di luar Direktorium, Biro Ekonomi dan Keuangan menggagas adanya Panitia Pembuatan Atlas Sumber-Sumber Kemakmuran Indonesia. Panitia ini kemudian naik status menjadi Badan Atlas Nasional.

Outside the Directorate, the Bureau of Economics and Finance initiated the Committee for the Creation of the Indonesian Prosperity Resources Atlas. This committee's status was later elevated to become the National Atlas Agency.

1965

Dibentuklah Komando Survei dan Pemetaan Nasional (Kosurtanal), serta Dewan Survei dan Pemetaan Nasional (Desurtanal).

The National Survey and Mapping Command (Kosurtanal) and the National Survey and Mapping Council (Desurtanal) were established.

JEJAK LANGKAH

Company Milestones



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

1969

Pemerintah melebur tiga lembaga survei dan pemetaan yang ada menjadi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

The government merged three existing survey and mapping institutions into Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)/the National Survey and Mapping Coordination Agency).

2011

BIG menggantikan Bakosurtanal, hadir untuk menjawab kebutuhan akan pengoptimalan penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan IG dalam perencanaan pembangunan nasional.

BIG, replacing Bakosurtanal, was established to address the need to the provision of geospatial information, management, and utilization in national development planning.

2023

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial yang mulai diterapkan di tahun 2024.

Geospatial Information Agency Regulation No. 7 of 2023 concerning the Organization and Work Procedures of the Geospatial Information Agency, which was implemented in 2024.

Visi, Misi, dan Budaya Instansi

Vision, Mission, and Institutional Culture



VISI/VISION

Menjadi penggerak utama penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berhasil guna dan berdaya guna dalam mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

To become the leading force in providing successful and beneficial geospatial information services to realize a prosperous, sovereign, independent, and culturally distinct Indonesia with the spirit of cooperation.



MISI/MISSION

1. Meningkatkan ketersediaan Informasi Geospasial nasional yang lengkap dan akurat dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
2. Mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional yang berhasil guna dan berdaya guna melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
3. Mewujudkan Infrastruktur Informasi Geospasial nasional yang berkualitas mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, dan standar.
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional.

1. *To enhance the availability of comprehensive and accurate national geospatial information to support national development*
2. *To realize successful and effective national geospatial information services through coordination, integration, and synchronization*
3. *To establish a quality national geospatial information infrastructure covering the aspects of policy, institutional, human resources, technology, and standards*
4. *To implement clean, effective, and trustworthy governance to support national geospatial information service delivery*



BUDAYA INSTANSI

Sebagai lembaga pemerintahan nonkementerian, BIG menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas dan fungsi strategisnya. Dengan nilai-nilai BerAKHLAK, BIG terus bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya unggul dalam penyediaan Informasi Geospasial, tetapi juga berkontribusi besar pada pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai utama (*Core Values*) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK telah resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perwujudan Perilaku Insan Badan Kepegawaian Negara dengan *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK.

Aparatur Sipil Negara (ASN) kini memiliki *core values* untuk menjadi pendorong atau penyemangat bagi seluruh ASN baik di tingkat pusat hingga daerah agar terus memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas sebagai abdi negara, abdi pemerintah, maupun sebagai abdi masyarakat.

Nilai-nilai dasar atau yang dikenal sebagai *core values* ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dan diluncurkan dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia. Secara umum hal-hal penting yang menjadi akronim dari nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Berorientasi Pelayanan.** Seorang ASN dituntut memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selalu bersikap ramah kepada berbagai kalangan, dapat diandalkan, cekatan, serta dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat.
- 2. Akuntabel.** Dapat dipahami sebagai dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin, dan berintegritas tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan, ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
- 3. Kompeten.** Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, peningkatan kompetensi sangat penting untuk

INSTITUTIONAL CULTURE

As a non-ministerial government institution, BIG upholds BerAKHLAK as its work culture, serving as the foundation for its strategic duties and functions. By implementing BerAKHLAK as its values, BIG continues to transform into an institution that not only excels in providing geospatial information but also contributes greatly to national development and the welfare of the Indonesian people.

The Civil Servants' Core Values, called BerAKHLAK, were officially launched by President Joko Widodo on July 27, 2021. Following the Circular Letter of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No. 20 of 2021 concerning the Implementation of Core Values and Civil Servants' Employer Branding, it is necessary to stipulate a Circular Letter of the Head of the National Civil Service Agency concerning the Embodiment of BerAKHLAK as the Civil Servants' Core Values in the National Civil Service Agency's Personnel's Behavior.

Currently, civil servants have core values as a driver that encourages all civil servants at the national and regional levels to continuously have high enthusiasm and the ability to provide the best quality service as state, government, and public servants.

The civil servants' core values are called "BerAKHLAK," which is an acronym for Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Service-Oriented, Accountable, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) and was launched as standardized civil servants' core values in Indonesia. In general, each core value is described as follows.

- 1. Service-oriented.** *A civil servant is required to understand and fulfill the public's needs. Always be friendly to all stakeholders. Be reliable and agile, and be able to provide solutions to public problems.*
- 2. Accountable.** *This means that civil servants should perform their duties with an honest and responsible attitude, discipline and high integrity. In official duties, civil servants are obligated to use state-owned assets and goods responsibly, effectively, and efficiently.*
- 3. Competent.** *Improving competence is essential for civil servants in carrying out their duties and*

dilakukan. Dengan kompetensi yang semakin baik memungkinkan ASN untuk dapat memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4. Harmonis. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Kenyamanan dan keharmonisan lingkungan kerja mendorong atau memotivasi ASN untuk lebih produktif dalam bekerja.

5. Loyal. Dengan nilai dasar ini ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif. Nilai dasar adaptif dapat dilakukan dengan terus menerus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan namun harus responsif dengan berbagai masalah yang berkembang serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi.

7. Kolaboratif. Dengan nilai dasar ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diharapkan ASN mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur baik dalam maupun luar organisasi. Keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah, dan mempercepat pencapaian tujuan bersama.

functions. Higher competence enables civil servants to provide the best service following their primary responsibilities and functions.

4. Harmonious. Every civil servant needs to be able to create and build a conducive and harmonious work environment. A comfortable and harmonious work environment encourages or motivates civil servants to be more productive.

5. Loyal. With loyalty as their core value, civil servants must maintain the goodwill of their fellow civil servants, leaders, institutions, and the country. Consequently, they must always faithfully keep the secrets of their position and the government.

6. Adaptive. This core value can be implemented by continuously innovating and developing creativity. Every employee must always act proactively, must not sit back but remain responsive to different problems, and be able to be part of the solution in solving multiple issues the organization faces.

7. Collaborative. By embodying this core value in their duties and functions, civil servants can collaborate with various elements within and outside the organization. Openness to working together and seeking joint solutions will produce added value and accelerate the achievement of common goals.



Fotografer | Photographer:

Arif Widodo Al Azis

Lokasi | Location:

**Dataran tinggi Dieng,
Banjarnegara, Jawa Tengah**



HASIL SURVEI INDEKS BERAKHLAK

Berdasarkan Nota Dinas Nomor B-10/SETTAMA/OT.02/2024 tentang Pengisian Survei Indeks BerAKHLAK dan Survei Keterikatan Pegawai ASN, pegawai BIG telah melaksanakan pengisian sesuai dengan ketentuan dan sampel yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Total responden yang telah mengisi Survei Indeks BerAKHLAK di BIG adalah 373 orang. Hasil pengukuran Indeks BerAKHLAK Tahun 2024 BIG mendapatkan nilai Indeks BerAKHLAK sebesar 69,1%. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang mendapatkan nilai 53,3%.

BERAKHLAK INDEX SURVEY RESULTS

Based on the Official Memo No. B-10/SETTAMA/OT.02/2024 concerning Completion of the BerAKHLAK Index Survey and the Civil Servant Engagement Survey, BIG employees filled out the questionnaire using the provisions and samples from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB). The total number of BIG respondents who submitted the BerAKHLAK Index Survey is 373 people and BIG's 2024 BerAKHLAK Index is 69.1%. The score rose from its 2023 score of 53.3%.

Kegiatan Utama Main Activities

Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dipimpin oleh seorang Kepala.

Berikut ini ialah tugas dan fungsi BIG berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial.

TUGAS:

Badan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial, meliputi informasi geospasial dasar, informasi geospasial tematik dan infrastruktur informasi geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres Nomor 128 Tahun 2022, BIG menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;

The Geospatial Information Agency (BIG) is a Non-Ministerial Government Institution under and responsible to the President. The Head of BIG leads this institution in performing its duties and functions.

The following are BIG duties and functions based on Presidential Regulation No. 128 of 2022 concerning the Geospatial Information Agency.

DUTY:

The Geospatial Information Agency must perform government duties in the geospatial information field, including basic geospatial information, thematic geospatial information, and geospatial information infrastructure, following the law and regulation provisions.

FUNCTION:

To fulfill the duties as referred to in Article 4 of Presidential Decree No. 128 of 2022, BIG performs the following functions.

1. Formulation, stipulation, and control of technical policies in the geospatial information sector
2. Implementation of technical policies in the geospatial information sector

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi geospasial;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi geospasial;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BIG;
6. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG; dan
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BIG.

3. Preparation of norms, standards, procedures, and criteria in the geospatial information sector
4. Provision of technical guidance and supervision in the geospatial information sector
5. Management of state-owned assets under BIG
6. Coordination in performing duties, guidance, and provision of administrative support to all elements of the organization within BIG
7. Substantive support for all aspects of the organization within BIG
8. Supervision of duty performance within BIG.

Produk dan Layanan BIG

BIG's Products and Services



Ina-Geoportal / Ina-Geoportal

Geoportal nasional yang menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, provinsi, dan daerah yang menjadi mitra penghubung simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Pengguna Ina-Geoportal dapat menikmati fitur analisis data, *geoprocessing*, *geotagging*, *drag and drop data file* dengan teknologi *mapviewer* berbasis *open source*.

It is a national geoportal connecting various ministries, institutions, provinces, and regions, which are BIG's partners in connecting the National Geospatial Information Network (JIGN) nodes. With open-source-based map viewer technology, ina-Geoportal users can enjoy data analysis, geoprocessing, geotagging, and drag-and-drop data file features.



SRGI / SRGI

Sistem Referensi Geospasial adalah suatu sistem referensi yang digunakan dalam pendefinisian dan penentuan posisi suatu entitas geospasial yang mencakup posisi horizontal, posisi vertikal, dan nilai gayaberat berikut perubahannya sebagai fungsi waktu.

Sistem Referensi Geospasial (SRGI/the Geospatial Reference System) is a reference system for defining and determining the position of geospatial entities, including their horizontal and vertical positions, gravity values, and changes over time.

Lebih lanjut, Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang disingkat SRGI adalah Sistem Referensi Geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Adapun produk dan layanan BIG yang terkait dengan SRGI adalah sebagai berikut:

The Indonesian Geospatial Reference System or SRGI, is a nationally adopted and consistently applied geospatial reference system used across all regions of Indonesia. It is fully compatible with the global geospatial reference framework. The following are products and services provided by BIG related to SRGI.

a. InaCORS

InaCORS adalah sistem CORS (*Continuously Operating Reference Station*) yang dikelola oleh BIG sebagai stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu yang beroperasi

a. InaCORS

InaCORS is a CORS (Continuously Operating Reference Station) system managed by BIG as a fixed/continuous geodetic observation station that operates continuously 24 hours a day, 7 days a

secara terus-menerus selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, untuk merekam data satelit GNSS (*Global Navigation Satellite System*). Pengembangan CORS di Indonesia merupakan upaya BIG untuk menyediakan referensi geospasial yang menjadi acuan dalam survei, pemetaan, dan penyelenggaraan informasi geospasial lainnya. Teknologi ini juga mendukung mitigasi bencana, termasuk peringatan dini tsunami. Hingga 2024, terdapat 472 stasiun InaCORS di Indonesia, dan semua koordinatnya menggunakan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI2013).

b. Geoid Indonesia

BIG memiliki produk Geoid Indonesia yang merupakan bidang ekuipotensial medan gaya berat bumi yang berimpit dengan muka laut rata-rata global yang digunakan sebagai bidang acuan untuk penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu titik di permukaan bumi. Berdasarkan Peraturan Kepala BIG No 15 tahun 2013 tentang SRGI 2013 pasal 10 menyebutkan bahwa Geoid adalah sistem referensi vertikal nasional. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh kegiatan pembangunan nasional yang menggunakan data ketinggian harus mengacu ke Geoid. Geoid sendiri diturunkan melalui survei gaya berat yang terikat ke Jaring Kontrol Gaya berat Nasional (JKGN). JKGN direalisasikan melalui titik gaya berat utama (GBU) yang berada di lokasi-lokasi terpilih yang terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia. Nilai gaya berat absolut yang tersedia akan digunakan sebagai referensi pada pekerjaan survei dan pengukuran gaya berat teristis serta gaya berat *airborne*.

week to record GNSS (*Global Navigation Satellite System*) satellite data.

The development of CORS in Indonesia is BIG's effort to provide geospatial references in surveys, mapping, and organizing other geospatial information. This technology also supports disaster mitigation, including tsunami early warning. By 2024, there were 472 InaCORS stations in Indonesia and all coordinates used the 2013 Indonesian Geospatial Reference System (SRGI2013).

b. Geoid Indonesia

BIG has a Geoid Indonesia product, which is an equipotential plane of the Earth's gravity field that coincides with the global mean sea level, which is used as a reference plane for determining the vertical position or height of a point on the Earth's surface. Based on the Regulation of the Head of BIG No. 15 of 2013 concerning the 2013 Indonesian Geospatial Reference System (SRGI 2013) article 10, the Geoid is a national vertical reference system. Based on this, all national development activities that use elevation data must refer to the Geoid. The Geoid is derived through a gravity survey tied to the Managed National Gravity Control Network (JKGN). JKGN is realized through the main gravity points in selected locations distributed throughout Indonesia. The available absolute gravity values will be referenced in survey work, terrestrial and airborne gravity measurements.



DEMNAS / DEMNAS

BIG memiliki Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) yang dibangun dari beberapa sumber data meliputi data IFSAR (resolusi 5m), TERRASAR-X (resolusi 5m) dan ALOS PALSAR (resolusi 11,25m), dengan menambahkan data Masspoint hasil *stereo-plotting*. Resolusi spasial DEMNAS adalah 0.27-arc-second, dengan menggunakan datum vertikal EGM2008. Selain itu, BIG juga memiliki produk Batimetri Nasional (BATNAS) yang dibentuk dari hasil inversi data *gravity anomaly* hasil pengolahan data altimetri dengan menambahkan data pemeruman (*sounding*) yang dilakukan oleh BIG dan lembaga terkait lainnya dengan survei *single* maupun *multibeam*. Resolusi spasial data BATNAS adalah 6arc-second dengan menggunakan datum MSL.

BIG has a National DEM built from several data sources, including IFSAR data (5m resolution), TERRASAR-X (5m resolution), and ALOS PALSAR (11.25m resolution) by adding Masspoint data from stereo-plotting. The spatial resolution of DEMNAS is 0.27-arcsecond, using the EGM2008 vertical datum. In addition, BIG also has a National Bathymetry product (BATNAS) formed from the results of gravity anomaly data inversion from altimetry data processing by adding sounding data collected by BIG and other institutions with single and multibeam surveys. The spatial resolution of BATNAS data is 6arc-second using the MSL datum. The gridded BATimetry NATional data is from 90 to 150BT and 20LS to 20LU. This bathymetric data has advantages in coastal areas and shallow waters, as

Data *gridded* BATimetri NASional dari 90 sampai 150BT dan dari 20LS sampai 20LU. Data batimetri ini mempunyai keunggulan di daerah pesisir dan perairan dangkal dengan menggunakan survei dari Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai (DPRWLP) BIG.

shown by surveys from BIG's Directorate of Marine and Coastal Topographic Mapping.



PetaKita / PetaKita

BIG mengembangkan aplikasi yang mendukung pelibatan masyarakat dalam pemetaan partisipatif, yaitu Aplikasi Petakita. Aplikasi ini dapat diakses melalui <https://petakitav3.big.go.id/> dan untuk versi mobile bisa diunduh melalui Google Playstore dengan nama PetaKita. Selain dapat digunakan untuk memperoleh Informasi Geospasial, aplikasi juga dilengkapi dengan pilihan *base map* dalam berbagai sumber, termasuk RBI dan CSRT BIG.

BIG developed an application called Aplikasi Petakita, which supports the public's involvement in participatory mapping. This application can be accessed on <https://petakitav3.big.go.id/>. and the mobile version of PetaKita can be downloaded on Google Playstore. In addition to providing geospatial information, the application also offers a selection of basic maps from various sources, including RBI and CSRT BIG.



E-Atlas / e-atlas

E-Atlas merupakan atlas digital nasional yang digunakan untuk mengenalkan dan menginformasikan profil wilayah Indonesia secara interaktif kepada publik. Selain dapat menampilkan peta dalam berbagai tema, e-atlas juga memiliki *story map* pariwisata, bencana, dan sosial budaya; serta buku digital yang dapat diunduh masyarakat.

e-atlas is a national digital atlas in order to introduce and inform the public about the profile of the Indonesian region interactively. In addition to offering maps on various themes, e-atlas features story maps on tourism, disasters, and socio-cultural topics and downloadable digital books for public access.



SINAR / SINAR

Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BIG untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia.

Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR)/the Geographic Names Information System (GNIS) is an application that BIG developed to facilitate the Board on Geographic Names in Indonesia.



Geoportal Kebijakan Satu Peta / Geoportal One Map Policy

Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) ini dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Geoportal KSP dibangun menggunakan platform *opensource* sebagai gerbang akses dan berbagi data IG Tematik yang terdapat pada kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah terkait sebagai acuan bagi perencanaan pembangunan nasional berbasis

The One Map Policy (OMP) Geoportal was developed by the Geospatial Information Agency (BIG) and supported by the Coordinating Ministry for Economic Affairs. The OMP Geoportal was created using an open-source platform as a gateway for accessing and sharing Thematic Geospatial Information (TGI) data from related ministries/institutions/regional governments, used as a reference for spatial-based national development planning. This portal is the

spasial. Portal ini merupakan amanat pelaksanaan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

realization of Presidential Regulation No. 9 of 2016 concerning Accelerating the One Map Policy at the Scale Map Accuracy Level of 1:50,000.



Atlas Taktual / *Tactile Atlas*

BIG telah membuat dan menerbitkan Atlas Taktual dengan berbagai tema, di antaranya administrasi wilayah, sumber daya alam abiotik dan transportasi di Indonesia. Atlas Taktual merupakan kumpulan Informasi Geospasial yang disajikan dalam bentuk buku atlas yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas netra.

BIG has created and published various Tactile Map themes, including regional administration, abiotic natural resources, and transportation in Indonesia. Tactile Atlas is a geospatial information collection presented as an atlas book for people with visual impairment.

Layanan Services

LAYANAN PENJUALAN PRODUK GEOSPASIAL

Layanan Penjualan Produk Geospasial bertujuan untuk menyediakan data dan Informasi Geospasial yang dihasilkan oleh BIG. Layanan ini bisa didapatkan secara berbayar atau Rp0,00 (nol rupiah), sesuai dengan kriteria pihak tertentu. BIG sebagai satu-satunya lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai penyelenggara IG Dasar di Indonesia memiliki tugas yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan dan penggunaan informasi, serta penyebarluasan informasi di bidang IG. Untuk menjalankan tugas tersebut, BIG menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi geospasial dasar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi geospasial;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BIG;
- f. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG; dan
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BIG.

GEOSPATIAL PRODUCT SALES

Geospatial Product Sales aims to make BIG's geospatial data and information available. This service is available for a fee and even IDR0.00 (zero rupiah), based on a particular party's criteria. As the only non-ministerial government institution in charge of organizing basic GI in Indonesia, BIG has several duties, including data collection and processing and information storage, usage, and dissemination in the GI sector. To fulfil these duties, BIG performs the following functions.

- a. Formulation, determination, and control of technical policies in the geospatial information sector
- b. Implementation of technical policies in the geospatial information sector
- c. Preparation of norms, standards, procedures, and criteria in the basic geospatial information sector
- d. Provision of technical guidance and supervision in the geospatial information sector
- e. Management of state-owned assets under BIG
- f. Coordination in performing duties, guidance, and provision of administrative support to all elements of the organization within BIG
- g. Substantive support for all aspects of the organization within BIG
- h. Supervision of duties performance within BIG

Salah satu unit pelaksana pelayanan publik bidang geospasial adalah Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, yang merupakan unit pelaksana teknis pelayanan publik, dan mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa dan produk geospasial kepada masyarakat. Layanan penjualan produk geospasial adalah penjualan produk yang diselenggarakan oleh BIG kepada masyarakat, berupa Peta Rupabumi Indonesia cetak, Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), data pasang surut dan lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BIG. Sedangkan layanan permintaan data geospasial seperti data Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CTSRT), data Titik Kontrol Tanah (*Ground Control Points* - GCP), *Continuously Operating Reference Station* (CORS) dan lain-lain, yang dimintakan atau dimohon oleh penerima layanan sesuai dengan kriteria pihak tertentu yang diatur di dalam Peraturan BIG tentang pelaksanaan dari PP Nomor 49 Tahun 2019. Layanan Jasa Konsultasi Geospasial adalah layanan jasa konsultasi yang dilakukan baik secara langsung tatap muka di ruang Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial atau melalui daring dengan media zoom atau lainnya, yang membahas tentang penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Berdasarkan Peraturan BIG Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan jasa dan produk geospasial;
- b. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas di bidang pelayanan jasa dan produk;
- c. pelaksanaan pelayanan jasa dan produk geospasial;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Balai; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Balai.

Informasi mengenai produk dan layanan BIG selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

One of the public service units in the geospatial sector is the Geospatial Products and Services Office, a technical implementing unit for public services that provides geospatial services and products to the public. Geospatial product sales that BIG delivers to the public are printed Indonesian Topographic Map, Map of the Republic of Indonesia, tidal data, and others, as regulated in Government Regulation No. 49 of 2019 concerning Types and Tariffs for Types of Non-tax Revenue applicable to BIG. Meanwhile, geospatial data and information request services are organizing geospatial data and information, such as Very High-Resolution (VHR) Satellite Imagery data, Ground Control Points (GCP) data, and Continuously Operating Reference Station (CORS), requested by service recipients following the criteria of certain parties regulated in the BIG Regulation concerning the implementation of Government Regulation No. 49 of 2019. Geospatial Consulting Services are consultation services provided to discuss the organization of geospatial information either face-to-face in the Geospatial Information Integrated Service room or online via Zoom or other video conferencing services.

Based on BIG Regulation No. 2 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Center for Geospatial Products and Services Office, it performs the following functions.

- a. *Preparing plans and programs related to geospatial services and products;*
- b. *Coordinating functional activities for the implementation of tasks in the field of geospatial services and products;*
- c. *Delivering geospatial services and products;*
- d. *Monitoring, evaluating, and reporting the office activities; and*
- e. *Managing the office administration*

For more detailed information on BIG's products and services, please refer to the table below.

JENIS LAYANAN BIG TAHUN 2024

TYPES OF BIG'S SERVICES IN 2024

No	Unit Kerja Work Unit	Jenis Layanan Type of Service	Kategori Category	Tarif Rate
Sekretariat Utama / Principal Secretariat				
1	Biro Umum dan Keuangan Bureau of General Affairs and Finance			
	Biro Umum dan Layanan Pengadaan Bureau of General Affairs and Procurement Services	1. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Procurement of Goods/ Services	Jasa Services	Tidak bertarif No rate
2	Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama Bureau of Legal Affairs, Public Relations, and Cooperation	1. Layanan Kunjungan BIG BIG Visit Services 2. Layanan Kerja Sama Collaboration Services	Poin 2 termasuk pada kategori jasa, sedangkan poin 1 adalah kategori administrasi Point 2 is classified under the service category, whereas point 1 is placed under the administration category.	Tidak bertarif No rate
3	Inspektorat Inspectorate	1. Layanan Whistleblowing System Whistleblowing System Services	Jasa Services	Tidak bertarif No rate



No	Unit Kerja Work Unit	Jenis Layanan Type of Service	Kategori Category	Tarif Rate
4	Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial Center for Geospatial Competence Development	1. Layanan Mes/ Penginapan BIG <i>BIG Lodging Services</i> 2. Layanan Perpustakaan BIG <i>BIG Library Services</i> 3. Layanan Pelatihan BIG <i>BIG Training Services</i>	Jasa Services	Poin 1 dan 3 bertarif, sedangkan poin 2 tidak bertarif <i>Points 1 and 3 are subject to a rate, while point 2 has no rate.</i>

Kedeputan Informasi Geospasial Dasar / Office of the Deputy for Base Geospatial Information

1	Direktorat Sistem Referensi Geospasial Directorate of Geospatial Reference Systems	1. Deskripsi Jaring Kontrol Geodesi (JKG) <i>Description of Geodetic Control Network (JKG)</i> 2. Data Receiver Independent Exchange Format (RINEX) Continuously Operating Reference Stations (CORS) Interval 30 detik <i>Data Receiver Independent Exchange Format (RINEX) Continuously Operating Reference Stations (CORS) Interval 30 seconds</i> 3. Koreksi Real Time Kinematic (RTK) CORS <i>Real Time Kinematic (RTK) CORS Correction</i> 4. Transformasi dan Konversi Koordinat <i>Coordinate Transformation and Conversion</i> 5. Online Post Processing GNSS <i>Online GNSS Post-Processing</i> 6. Real Time GNSS <i>Real-time GNSS</i> 7. Data Pengamatan Pasang Surut Laut Tervalidasi <i>Validated Tidal Observation Data</i> 8. Data Prediksi Pasang Surut Laut <i>Tide Prediction Data</i> 9. Konstanta Harmonik Pasang Surut Laut <i>Tidal Harmonic Constants</i>	Poin 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 termasuk pada kategori barang (produk). Sedangkan poin 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 termasuk pada kategori jasa. <i>Points 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 18 are classified under the category of goods (products), whereas points 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 20, and 21 are placed under the service category.</i>	Poin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 bertarif. Sedangkan poin 6, 10, 11, 12, 13, 18 tidak bertarif. <i>Points 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, and 21 are subject to a rate, while point 2 has no rate.</i>
---	--	--	---	---



No	Unit Kerja Work Unit	Jenis Layanan Type of Service	Kategori Category	Tarif Rate
----	-------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------

10. Datum Pasang Surut Laut
Tidal Datum
11. Model Deformasi
Deformation Model
12. Model Pasang Surut Laut
Tidal Model
13. Model Geoid
Geoid Model
14. Pengumpulan Data GNSS
GNSS Data Collection
15. Pengolahan Data Hasil Survei GNSS
GNSS Survey Data Processing
16. Pengumpulan Data Pasang Surut Laut
Tidal Data Collection
17. Pengolahan Hasil Survei Pasang Surut Laut
Tidal Survey Data Processing
18. Data Anomali Gayaberat
Gravity Anomaly Data
19. Pengumpulan Data Gayaberat Terestris Relatif
Relative Terrestrial Gravity Data Collection
20. Pengumpulan Data Survei Sipat Datar Teliti
Precise Geodetic Leveling Survey Data Collection
21. Pengumpulan Data Survei Sipat Datar
Geodetic Leveling Survey Data Collection



2	Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat <i>Directorate of Land Topographic Mapping</i>	1. Pengolahan citra tegak resolusi tinggi <i>High-resolution Vertical Image Processing</i> 2. Pengolahan citra tegak resolusi menengah <i>Medium Resolution Vertical Image Processing</i> 3. Pengolahan citra tegak resolusi rendah <i>Low-resolution Vertical Image Processing</i>	Poin 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 termasuk pada kategori jasa. Sedangkan poin 4 dan 5 termasuk kategori produk. <i>Points 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13 are classified under the service category, whereas points 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 20, and 21 are placed under the category of product.</i>	Bertarif <i>Rate applicable</i>
---	---	---	--	---



No	Unit Kerja Work Unit	Jenis Layanan Type of Service	Kategori Category	Tarif Rate
		4. Digital Elevation Model (DEM Digital Elevation Model (DEM)) 5. Peta RBI Digital Jenis Vektor Hipsografi skala 1:1000, skala 1:5000, dan skala 1:10000 RBI Digital Map Vector Type Hypsography Scale 1:1000, Scale 1:5000, and scale 1:10000 6. Basemap service: citra tegak resolusi tinggi Basemap Service: High- Resolution Vertical Image 7. Basemap service: Digital Surface Model (DSM) Basemap service: Digital Surface Model (DSM) 8. Basemap service: Digital Terrain Model (DTM) Basemap Service: Digital Terrain Model (DTM) 9. Basemap service: Peta Statis Basemap Service: Static Map 10. Basemap service: Peta Dinamis Basemap Service: Dynamic Map 11. Layanan Basemap Service Peta Dasar 3D Basemap service 3D Base Map Service 12. Analisis Pencarian Rute Route Search Analysis 13. Pencarian Lokasi Location Search		
3	Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai Directorate of Marine and Coastal Topographic Mapping	1. Layanan Konsultasi Teknis Garis Pantai Coastline Technical Consultation Services 2. Layanan Konsultasi Teknis Pelaksanaan Survei Garis Pantai Technical Consultation Services of Coastline Survey Implementation	Poin 1, 2, 3, 4, 6, 7 termasuk pada kategori jasa. Sedangkan poin 5 termasuk pada kategori barang (produk). Points 1, 2, 3, 4, 6, and 7 are classified under the service category, whereas point 5 is placed under the category of goods (product).	Poin 1, 2, 3, 4 bertarif, sedangkan poin 5, 6, 7 tidak bertarif. Points 1, 2, 3, and 4 are subject to a rate, while points 5, 6, and 7 have no rate.

No	Unit Kerja Work Unit	Jenis Layanan Type of Service	Kategori Category	Tarif Rate
		3. Layanan Konsultasi Nama Rupabumi Wilayah Laut <i>Consultation Services of Marine Geographic Name</i> 4. Layanan Konsultasi Hipsografi Laut <i>Marine Hypsography Consultation Services</i> 5. Peta LPI Digital Jenis Vektor Hipsografi Skala 1:10000 <i>Digital LPI Map Vector Type Hypsography Scale 1:10000</i> 6. Survei Batimetri Single Beam <i>Single-Beam Bathymetric Survey</i> 7. Survei Batimetri Multi Beam <i>Multi-Beam Bathymetric Survey</i>		

4	Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi Directorate of Boundary Mapping and Geographical Names	1. Layanan Konsultasi Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah <i>Consultation Services for Determination and Confirmation of Regional Boundaries</i> 2. Layanan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PNR) kepada kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah provinsi <i>Technical Guidance Services for the Implementation of Geographic Naming (PNR) to Ministries/Institutions and Provincial Governments</i> 3. Layanan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PNR) kepada Pihak Lain, Kelompok Masyarakat/Organisasi dan Komunitas <i>Technical Guidance Services for the Implementation of Geographic Naming (PNR) to Other Parties, Community Groups/Organizations, and Communities</i>		
---	--	---	--	--



No	Unit Kerja Work Unit	Jenis Layanan Type of Service	Kategori Category	Tarif Rate
----	-------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------

Kedeputan Informasi Geospasial Tematik / Office of the Deputy for Thematic Geospatial Information

1	Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Directorate of Thematic Geospatial Information Integration and Synchronization	- Layanan Penyelesaian Tumpang Tindih IGT <i>Overlap Resolution Services for Geospatial Information (TGI)</i> - Layanan Pembinaan Integrasi IG dan Statistik <i>Coaching Services for the Integration and Statistical Analysis of Geospatial Information (TGI)</i> - Layanan Integrasi dan Sinkronisasi IG <i>Integration and Synchronization Services for Geospatial Information (TGI)</i>	Jasa Services	Tidak bertarif No rate
2	Direktorat Pemetaan Tematik Directorate of Thematic Mapping	- Layanan Pembinaan Penyelenggaraan IGT <i>TGI Development Services</i> - Layanan Pemetaan Tematik <i>Thematic Mapping Support Services</i> - Layanan Data Tematik <i>Thematic Data Management Services</i>	Poin 1 dan 2 termasuk kategori jasa, sedangkan poin 3 termasuk kategori barang (produk) <i>Points 1 and 2 are classified under the service category, whereas point 3 is placed under the category of goods (product).</i>	Tidak bertarif No rate
3	Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial Directorate of Atlas and Utilization of Geospatial Information	- Layanan Konsultasi Teknis Pemanfaatan Informasi Geospasial Dasar dan Tematik <i>Technical Consulting Services for the Utilization of Basic and Thematic Geospatial Information</i> - Layanan Konsultasi Teknis Penyusunan Atlas <i>Technical Consulting Services for Atlas Compilation</i>	Poin 1 dan 2 termasuk kategori jasa, sedangkan poin 3 dan 4 termasuk kategori barang (produk) <i>Points 1 and 2 are classified under the service category, whereas points 3 and 4 are placed under the category of goods (product).</i>	Poin 1, 2, 3 bertarif, sedangkan poin 4 tidak bertarif <i>Points 1, 2, and 3 are subject to a rate, while point 4 has no rate.</i>

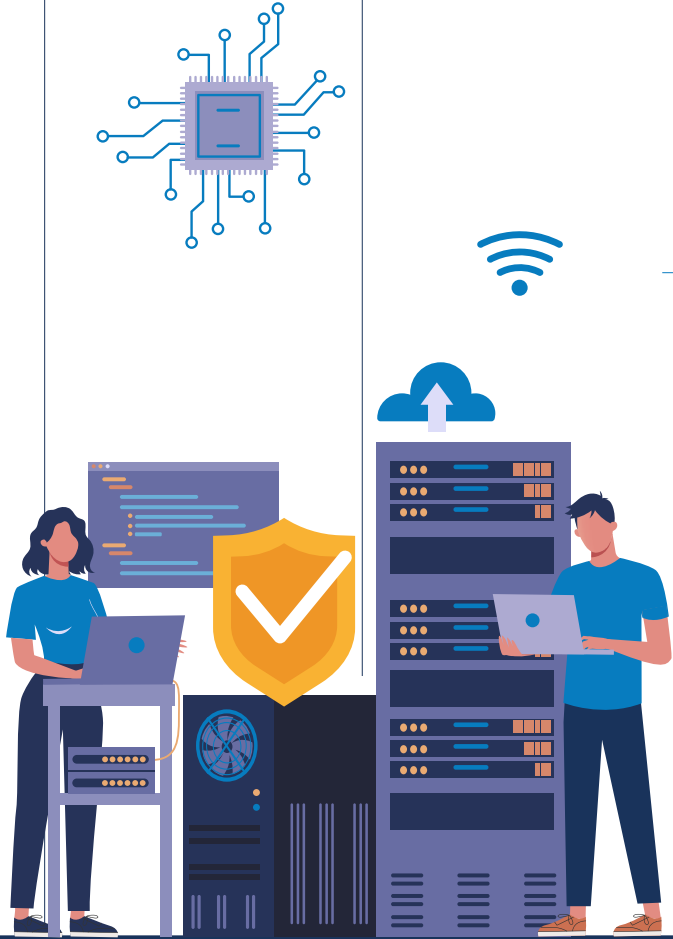
No	Unit Kerja Work Unit	Jenis Layanan Type of Service	Kategori Category	Tarif Rate
		3. Layanan Produk Atlas Atlas Product Services		
		4. Buku Atlas Sumber Daya dan Lingkungan Resources and Environment Atlas		
4	Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial Geospatial Products and Services Office	1. Layanan Penjualan Produk Geospasial Geospatial Product Sales Services 2. Layanan Permintaan Data dan Informasi Geospasial Geospatial Data and Information Request Services 3. Layanan Jasa Konsultasi Geospasial Geospatial Consulting Services	Jasa Services	Poin 1 bertarif, sedangkan poin 2 dan 3 tidak bertarif Point 1 is subject to a rate, while points 2 and 3 have no rate.
5	Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir Coastal and Sand Dune Geospatial Office	Layanan Kunjungan di Parangtritis Geomaritime Science Park On-site Services at Parangtritis Geomaritime Science Park	Jasa Services	Tidak bertarif No rate

Kedeputan Infrastruktur Informasi Geospasial / Office of the Deputy for Geospatial Information Infrastructure

1	Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial Directorate of Geospatial Information Human Resources	1. Layanan Registrasi Sertifikat Tenaga Profesional dan Penyedia Jasa Bidang Informasi Geospasial Registration Services for Professional Certificates and Geospatial Information Service Providers 2. Layanan Konsultasi Pembinaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Consulting Services for the Development of Functional Roles for Mapping Surveyors	Poin 1 termasuk kategori administrasi, sedangkan poin 2 termasuk pada kategori jasa. Point 1 is classified under the administrative category, whereas point 2 is placed under the service category.	Tidak bertarif No rate
---	---	--	--	-------------------------------

No	Unit Kerja Work Unit	Jenis Layanan Type of Service	Kategori Category	Tarif Rate
2	Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial <i>Directorate of Geospatial Information Institutional Affairs and Networks</i>	- Layanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG dan IG <i>Socialization and Consultation Services for DG and IG Management</i> - Layanan Pengelolaan KUGI di website KUGI <i>Services for Indonesia's GI Collection Management via the KUGI Website</i> - Layanan Instalasi Palapa <i>Palapa Installation Services</i> - Layanan Bimbingan Teknis Palapa <i>Technical Guidance Services for Palapa Installation</i> - Layanan Konektivitas Simpul Jaringan dengan Ina-Geoportal <i>Network Node Connectivity Services with Ina-Geoportal</i> - Layanan Serah Terima Akun Geoportal Kebijakan Satu Peta <i>Geoportal Account Handover Services for the One Map Policy</i> - Layanan Pembinaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial <i>Geospatial Information Network Node Development Services</i> - Layanan Konsultasi Kelembagaan Bidang Informasi Geospasial <i>Institutional Geospatial Information Networks</i>	Jasa Services	Tidak bertarif No rate



No	Unit Kerja Work Unit	Jenis Layanan Type of Service	Kategori Category	Tarif Rate
3	Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial <i>Directorate of Standardization Geospatial Information Standards and Technology</i>	- Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Palapa <i>Incident Handling Service for the Palapa Application</i> - Layanan Penanganan Insiden Aplikasi Penghubung Simpul Jaringan Informasi Geospasial (InaGeoportal) <i>Incident Handling Service for the Geospatial Node Connecting Application (InaGeoportal)</i> - Layanan Konsultasi Penggunaan Aplikasi PetaKita <i>Consultation Service for the Use of PetaKita Application</i> - Layanan Konsultasi Geoportal Kebijakan Satu Peta <i>Consultation Service for the One Map Policy Geoportal</i> - Layanan Pendampingan Standarisasi Informasi Geospasial <i>Assistance Service for Geospatial Information Standardization</i> - Layanan Konsultasi Teknologi Penyelenggaraan IG <i>Consultation Service on GI Implementation Technology</i> - Colocation Rack <i>Colocation Rack Service</i> - Bandwidth Internet <i>Internet Bandwidth Provision</i> - VPN-IP <i>VPN-IP Service</i> - VPN Metro-e <i>Metro-e VPN Service</i> - Storage on Demand <i>On-demand Data Storage</i> - Virtual Private Server <i>Virtual Private Server Service</i> - Managed Services <i>Managed Services</i>	Jasa <i>Services</i> 	Poin 1 sampai 6 tidak bertarif, sedangkan poin 7 sampai 13 bertarif. <i>Points 1–6 have no rate, while points 7–13 are subject to a rate.</i>



Fotografer | Photographer:
Herald Galingga
Lokasi | Location:
**Bukit Merese,
Lombok Tengah, NTB**

LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BIG memiliki Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial (PPKIG) sebagai unit yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi Informasi Geospasial dan salah satu pelaksanaannya melalui penyelenggaraan fungsi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi Informasi Geospasial. Fungsi tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengembangan kompetensi, di antaranya melalui kegiatan pelatihan.

Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPKIG mengacu pada Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Uraian Fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama Badan Informasi Geospasial.

Capaian kegiatan atas peran tersebut terukur melalui indikator keluaran kinerja berupa jumlah layanan Pengembangan Kompetensi IG dan/atau jumlah SDM terdidik/terlatih. Capaian tersebut diukur dari jumlah peserta pelatihan dengan *outcome* persentase (tingkat kelulusan) peserta yang lulus pelatihan.

Capaian penyelenggaraan diklat pada tahun 2024 sebanyak 26 kelas terdiri dari 8 kelas dengan anggaran rupiah murni dan 18 kelas dari anggaran penerimaan negara bukan pajak. Adapun jumlah peserta keseluruhan sebanyak 384 orang, dengan rincian sebanyak 150 peserta dari internal BIG dan 234 peserta berasal dari instansi/lembaga daerah. Keseluruhan pengajar sebanyak 49 pengajar, terdiri dari 9 widyaiswara BIG, 27 fasilitator dari unit kerja di BIG dan 13 pengajar dari eksternal BIG. Jumlah total keseluruhan jam pelajaran yaitu sebanyak 2.280 jam pelajaran. PPKIG telah memberikan peningkatan kompetensi kepada SDM kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Total keseluruhan adalah 36 instansi pemerintahan yang terdiri dari 6 kementerian/lembaga dan 30 pemerintah daerah.

Pada tahun 2024 PPKIG telah menyelenggarakan 8 pelatihan pengembangan kompetensi SDM BIG, meliputi 150 layanan yang telah diberikan kepada 132 ASN di BIG. Jumlah tersebut mencakup 17% dari jumlah SDM di BIG di seluruh unit kerja. Target jumlah peserta pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 150 orang dengan rencana penyelenggaraan sebanyak 15 pelatihan. Dalam pelaksanaannya, progres capaian hingga 2024 ini tercapai 100% (150 peserta) melalui 8 pelatihan (53% dari rencana 15 kali pelatihan). Dengan

EDUCATION AND TRAINING SERVICES

BIG has a Center for Geospatial Information Competence Development (PPKIG) as a unit entrusted with formulating and implementing technical policies in the competency development of geospatial information. One of its implementations is through technical policy functions in the competency development of geospatial information. This function is completed through competency development, including training sessions.

Activities to fulfil PPKIG's duties and functions refer to the Regulation of the Geospatial Information Agency No. 7 of 2023 concerning the Description of the Work Unit Functions of the Senior Primary Leadership of the Geospatial Information Agency.

The function achievement is measured through performance output indicators, namely the number of IG Competency Development services and/or the number of trained human resources. The achievement is measured by the graduation rate based on the percentage of participants passing the training programs.

The number of training programs held in 2024 was 26 classes with eight (8) classes financed from the rupiah budget and 18 classes from the non-tax revenue budget. Moreover, the total number of participants was 384 people, with 150 participants from internal BIG and 234 from regional agencies/institutions. Those programs involved 49 teachers, namely nine (9) BIG instructors, 27 facilitators from BIG work units, and 13 external teachers, with a total of 2,280 training hours. PPKIG provided competency improvement to human resources in ministries, institutions, and local governments, with 36 participating government agencies, comprising six (6) ministries/institutions and 30 local governments.

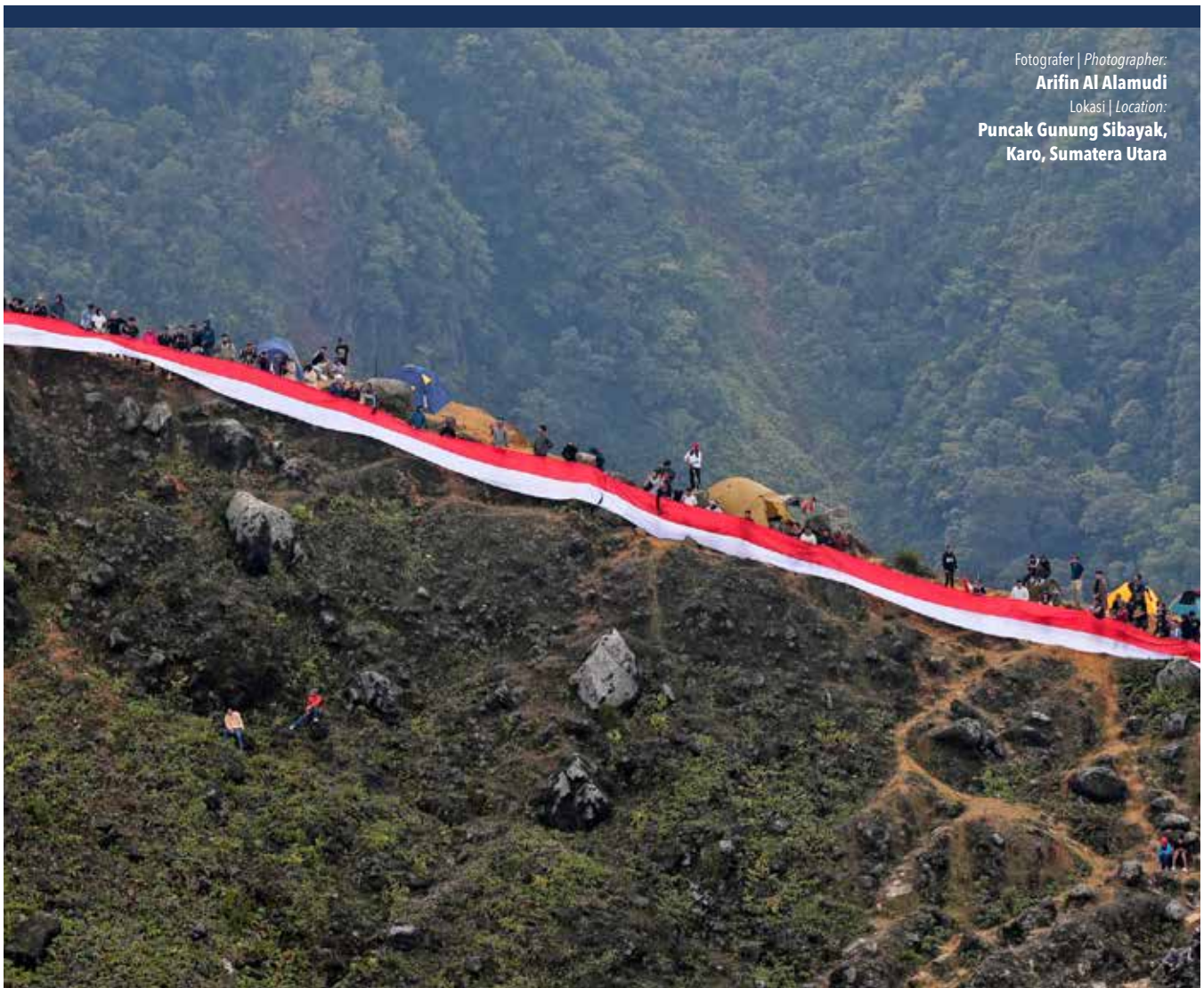
In 2024, PPKIG held eight (8) competency development training sessions for 132 BIG's civil servants, covering 150 services. This number covers 17% of BIG's human resources in all work units. The target participants in the 2024 fiscal year were 150 human resources with a plan of fifteen (15) training sessions. In its implementation, the targeted participants achieved 100% (150 participants) through eight (8) training sessions (53% of targeted training sessions) in 2024. With a target of 150 people, PPKIG's training sessions

target 150 orang per tahun, maka angka layanan pelatihan yang dilaksanakan PPKIG baru memenuhi 1/5 (19,5%) dari jumlah pegawai per tahunnya. Artinya diperlukan optimalisasi agar layanan yang dapat dilaksanakan lebih luas cakupannya dengan menambah target jumlah peserta untuk setiap pelatihan yang dilaksanakan.

Sedangkan pelatihan eksternal telah terlaksana sebanyak 18 program dengan total 234 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Program ini mencakup beragam topik penting, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar, SIG Tingkat Lanjut, Operator SIG, Penginderaan Jauh Tingkat Dasar, Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang, Desktop GIS *Open Source*, hingga Penataan Batas Wilayah. Program SIG Tingkat Dasar dan Desktop GIS *Open Source* dirancang khusus untuk memberikan pengenalan komprehensif tentang pengelolaan SIG. Pelatihan ini menjadi kebutuhan esensial bagi instansi yang menangani data geospasial, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis, memvisualisasikan, dan mengelola data spasial.

meet only 1/5 (19.5%) of the employees yearly. This means that optimization is needed, so that training can have a broader scope by increasing the target number of participants for each training session.

Meanwhile, 18 external training programs were held with 234 participants from various ministries, institutions, and regional governments. This program covered various important topics, including Basic Geographic Information Systems (GIS), Advanced GIS, GIS Operator, Basic Remote Sensing, Spatial Planning Map Preparation, GIS Open Source Desktop, and Regional Boundary Arrangement. The Basic GIS and GIS Open Source Desktop programs were designed to provide a comprehensive introduction to GIS management. This training was essential for agencies managing geospatial data to improve their ability to analyze, visualize, and manage spatial data.



Fotografer | Photographer:
Arifin Al Alamudi
Lokasi | Location:
**Puncak Gunung Sibayak,
Karo, Sumatera Utara**

Struktur Organisasi

Organizational Structure



Kepala BIG
Head of Geospatial
Information Agency



Sekretariat Utama
Principal Secretariat

Inspektorat
Inspectorate



Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial
The Center for Geospatial Information Competence Development



Biro Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Bureau of Planning, Human Resources, and Organization



Biro Umum dan Keuangan
Bureau of General Affairs and Finance



Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
Bureau of Legal Affairs, Public Relations, and Cooperation

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan
Division of General Affairs and Procurement Services



Bagian Tata Usaha dan Protokol
Division of Administration Management and Protocol



Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama
Subdivision of Principal Secretariat Administration Management



Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar
Subdivision of Deputy of Base Geospatial Information Administration Management



Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik
Subdivision of Deputy of Thematic Geospatial Information Administration Management



Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Subdivision of Deputy of Geospatial Infrastructure Information Administration Management

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar
Deputy of Base Geospatial Information



Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Deputy of Thematic Geospatial Information



Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Deputy of Geospatial Information Infrastructure



Direktorat Sistem Referensi Geospasial
Directorate of Geospatial Reference Systems



Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat
Directorate of Land Topographic Mapping



Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai
Directorate of Marine and Coastal Topographic Mapping



Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi
Directorate of Boundary Mapping and Geographical Names



Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik
Directorate of Thematic Geospatial Information Integration and Synchronization



Direktorat Pemetaan Tematik
Directorate of Thematic Mapping



Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial
Directorate of Atlas and Utilization of Geospatial Information



Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial
Directorate of Geospatial Information Human Resources



Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi
Directorate of Geospatial Information Institutional Affairs and Networks



Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial
Directorate of Geospatial Information Standards and Technology

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial
Geospatial Products and Services Office



Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir
Coastal and Sand Dune Geospatial Office



SUCCESS IS THE HARD WORK

“Sukses adalah hasil dari kerja keras dan semangat tim”



RESULT OF AND TEAM SPIRIT”



Profil Kepala Lembaga

Profile of the Head



**Prof. Dr.rer.nat.
Muh Aris Marfai,
S.Si, M.Sc**

Kepala BIG
Head of Geospatial Information Agency

49 tahun
49 years old

Muh Aris Marfai, lahir di Klaten, 13 Januari 1976. Beliau menyelesaikan sarjana (S.Si.) di Jurusan Geografi Fisik, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (1994–1998), Master of Science (M.Sc.) di ITC (International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation), Univ. Twente, Enschede, Belanda (2001–2003), Doktor dalam bidang Geografi dan Bencana Alam (Dr.rer.nat) di Justus-Liebig-Universitat, Giessen, Jerman (2005–2008), dan memperoleh gelar Guru Besar/Profesor dalam bidang Geomorfologi Bencana pada September 2013, di usia 37 tahun.

Beliau aktif dalam CNRD (Center for Natural Resources and Development), jejaring internasional yang berfokus pada isu pemanfaatan serta manajemen sumber daya alam terkait pembangunan berkelanjutan. Disamping itu, ia juga aktif dalam Delta Alliance, jaringan internasional dengan fokus pesisir dan kepesisiran, serta terlibat dalam Erasmus Mundus Programme on Lean CC, Linking European African and Asia Academic Networks on Climate Change. Sejak tahun 1999, Aris, demikian ia biasa disapa, aktif menjadi staf pengajar di Fakultas Geografi dan sempat menjabat sebagai Ketua Program S-2 MPPDAS (2008–2016), Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Fakultas Geografi UGM (2012–2016), serta Dekan Fakultas Geografi periode 2016–2021.

Hingga tahun 2020, beliau memiliki 180 jurnal dan publikasi internasional dan nasional. Salah satu bukunya yang telah terbit, yaitu *Moralitas Lingkungan* (2005). Beliau turut serta sebagai tim penulis buku *Potensi dan Permasalahan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Wilayah Pesisir* (Studi Kasus di Wilayah Pekalongan (2011); *Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang Air Laut di Kota Pekalongan* (2011); *Connecting Delta Cities* (2010); *Multirisk Assessment of Disasters in Parangtritis Coastal Area* (2010); *Pengantar Pemodelan Geografi* (2012); *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal* (2012); *Bencana Banjir Rob Studi Pendahuluan Banjir Pesisir Jakarta* (2013); *Geomorfologi dan Dinamika Pesisir Jepara* (2014); *Banjir Pesisir Kajian Dinamika Pesisir Semarang* (2014); *Peran Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan Pesisir* (2015); dan *Analisis Bencana Menunjang Pembangunan Daerah* (2016).

Muh. Aris Marfai was born in Klaten on January 13, 1976. He completed his Bachelor's degree (S.Sc.) in the Department of Physical Geography, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada (1994–1998), Master of Science (M.Sc.) at ITC (International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation), University of Twente, Enschede, the Netherlands (2001–2003), Doctorate in Geography and Natural Disasters (Dr.rer.nat) at Justus-Liebig-Universitaet, Giessen, Germany (2005–2008). He obtained the title of Professor in the field of Disaster Geomorphology in September 2013 at the age of 37 years.

He is active in CNRD (Center for Natural Resources and Development), an international network focusing on utilizing and managing natural resources following sustainable development. In addition, he is also active in the Delta Alliance, a global network focusing on coasts and coastal areas. He is involved in the Erasmus Mundus Programme on Lean CC, Linking European African and Asia Academic Networks on Climate Change. Since 1999, Muh. Aris Marfai has been active as a teaching staff member at the Faculty of Geography. He served as Head of the MPPDAS Master's Program (2008–2016), Bureau Head of International Cooperation at the Faculty of Geography in UGM (2012–2016), and Dean of the Faculty of Geography from 2016–2021.

As of 2020, he wrote 180 international and national journals and publications. One of his books is *"Environmental Morality"* (2005). He became a collaborative author of books entitled *"Potential and Environmental Problems in River Basins and Coastal Areas (Case Study in Pekalongan Region)"* (2011), *"Community Adaptation Strategy in Facing Coastal Flood in Pekalongan City"* (2011); *"Connecting Delta Cities"* (2010), *"Multi Risk Assessment of Disasters in Parangtritis Coastal Area"* (2010), *"Introduction to Geographic Modeling"* (2012), *"Introduction to Environmental Ethics and Local Wisdom"* (2012), *"Coastal Flood: Preliminary Study of Coastal Floods in Jakarta"* (2013), *"Geomorphology and Coastal Dynamics of Jepara"* (2014); *Coastal Flood Study of Coastal Dynamics in Semarang* (2014), *"The Role of Local Wisdom and Social Capital in Disaster Risk Reduction and Coastal Development"* (2015), and *"Disaster Analysis to Support Regional Development"* (2016).

Jajaran Manajemen

The Management



**Dr. Ir. RA Belinda
Arunarwati Margono, M.Sc**

Sekretaris Utama
Principal Secretary

56 tahun
56 years old

Lahir pada 1 November 1968, beliau meraih gelar Sarjana Manajemen Hutan di Universitas Gadjah Mada, lalu melanjutkan pendidikan dengan mengambil program studi Natural Resource Management di University of Twente. Selain ilmu kehutanan dan sumber daya alam, beliau melanjutkan pendidikan Doktoral dengan program studi Geospatial Science di University of Maryland (UMD) College Park USA. Selama berkarir, ia sempat untuk menduduki berbagai jabatan di struktur organisasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2001, ia sempat menjabat Kepala Sub Bidang Citra Satelit dan pada tahun 2005 ia menjabat Kepala Sub Bidang Penginderaan Jauh Tingkat Nasional dan Wilayah dan dilanjutkan menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Makro pada Bidang Penyusunan Rencana umum Kehutanan. Selain jabatan tersebut, pada tahun 2015 ia menduduki Jabatan Kepala Sub Direktorat Monitoring Pelaporan Verifikasi dan Registrasi Aksi Mitigasi Berbasis Lahan dan dilanjutkan menduduki Jabatan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Informasi Geospasial, ia ditugaskan menjadi Sekretaris Utama BIG sampai dengan saat ini.

Born on November 1, 1968, she earned a Bachelor's degree in Forest Management at Gadjah Mada University. She then pursued higher education in Natural Resource Management at the University of Twente. In addition to forestry and natural resources, she completed her doctoral program in Geospatial Science at the University of Maryland (UMD) College Park, the U.S. During her career, she had the opportunity to hold various positions at the Ministry of Environment and Forestry. In 2001, she served as Subdivision Head of Satellite Imagery and Subdivision Head of National and Regional Remote Sensing in 2005. Then, she became Subdivision Head of Macro Plan Preparation in the Forestry General Plan Preparation Sector. In 2015, she served as the Subdirector Head of Monitoring, Reporting, Verification, and Registration of Land-Based Mitigation Actions. She became Director of Forest Resource Inventory and Monitoring in 2018. Based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 161/TPA of 2023 concerning Dismissal from and Appointment in Senior Official Positions within the Geospatial Information Agency, she has been assigned to be the Principal Secretary of BIG.



Lahir di Bandung pada 1 Oktober 1967, beliau menempuh pendidikan Teknik Geodesi di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar insinyur pada tahun 1991, kemudian mendapatkan gelar Master of Engineering Science di The University of New South Wales pada tahun 2000. Memulai karirnya di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebagai Staf Bidang Pemetaan Dasar Matra Laut (1992–2000). Arief pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Simpul dan Jaringan (2008–2012), Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Geospasial (2012–2013), Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (2013–2014), juga Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi (2014–2015). Pada 2015 Arief beralih menjadi pejabat fungsional dengan jabatan Analis Geodesi sebelum pada 2017 dilantik sebagai Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar.

Arief was born in Bandung on October 1, 1967. He studied Geodetic Engineering at the Bandung Institute of Technology, earned his engineering degree in 1991, and obtained a Master of Engineering Science at the University of New South Wales in 2000. He started his career at the National Survey and Mapping Coordination Agency as staff for the Seabed Mapping Division (1992–2000). Arief served as Head of Division of the Node and Network Development (2008–2012), Division Head of the Geospatial Information and Communication Technology (2012–2013), Head of Center for Geodetic Control Network and Geodynamics (2013–2014), and Head of Center for the Topographic Mapping and Toponymy (2014–2015). In 2015, Arief switched his career to a functional official position as a Geodetic Analyst before being appointed Deputy of Base Geospatial Information in 2017.

**Ir. Mohamad Arief
Syafi'i, M.Eng.Sc**

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar
Deputy of Base Geospatial Information

57 tahun
57 years old



Lahir di Yogyakarta pada 9 Januari 1972. Ia meraih gelar Sarjana dan Doktornya di University of Tasmania, Australia pada tahun 1996 dan 2000. Selama berkarir di, ia sempat dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan di struktur organisasi Badan Informasi Geospasial. Pada Februari 2014 ia dilantik menjadi Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, jabatan ini ia emban selama 1 tahun sampai dengan 2015. Pada tahun yang sama ia dilantik menjadi Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika sampai dengan bulan Juni 2019. Kemudian ia dilantik menjadi Deputy Informasi Geospasial Tematik sampai saat ini.

Antonius, who was born in Yogyakarta on January 9, 1972, earned his Bachelor's and Doctoral degrees at the University of Tasmania, Australia, in 1996 and 2000. During his career, he was appointed to various positions in the Geospatial Information Agency. In February 2014, he was entrusted with the position of Head of Center for Geospatial Information Management and Dissemination for a year until 2015. The same year, he was appointed Center Head for Geodesy and Geodynamics Control Network until June 2019. Then, he was assigned as Deputy of Thematic Geospatial Information.

Dr. Antonius Bambang Wijanarto

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Deputy of Thematic Geospatial Information

53 tahun
53 years old



Lahir di Jember pada 15 April 1973. Lulusan University of Tokyo Jurusan Civil Engineering ini meraih gelar masternya dari Kobe University jurusan Ocean Electro Mechanical Engineering. Sedangkan, gelar doktor diraihnya untuk jurusan Maritime Sciences pada universitas yang sama. Pria yang akrab disapa Ibnu ini aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dengan bergabung bersama PPI Korda Kanto pada 1994–1995 sebagai Kepala Bidang Pendidikan. Sebelum menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum, ia pernah didaulat sebagai Kepala Bidang Medan Gaya Berat dan Pasang Surut pada 2012–2016. Ia juga pernah menjadi Kepala Bidang Penelitian dan Kepala Bidang Pemetaan Kelautan. Penghargaan yang pernah diraihnya, yaitu Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Penghargaan dari Presiden ini ia terima dua kali, pada 2004 dan 2012.

Ibnu was born in Jember on April 15, 1973 and is a graduate of the University of Tokyo, majoring in Civil Engineering. He earned his master's degree at Kobe University, majoring in Ocean Electro-Mechanical Engineering. Furthermore, he obtained his doctorate in Maritime Sciences at the same university. Ibnu, that's what he's called, is active in social community activities. He joined the Indonesian Student Association, Kanto Coordinating Region in 1994–1995, serving as Head of Education. Before performing as Head of Bureau of Planning, Human Resources, and Legal, he was appointed as Head of Division of Gravity and Tidal from 2012 to 2016. He also once served as Head of Division of Research and Head of Division of Marine Mapping. He was awarded the 10-year Satya Lencana Karya Satya by the President twice, in 2004 and 2012.

Dr. Ibnu Sofian, M.Eng

Deputi Bidang Infrastruktur
Informasi Geospasial
Deputy of Geospatial Information Infrastructure

49 tahun
49 years old



**Dr. Habib Subagio,
S.Si., M.Si**

Inspektur
Inspector



**Dr. Ratna Sari Dewi,
M.Sc.**

Plt. Kepala Pusat Pengembangan
Kompetensi Informasi
Geospasial
*Acting Head of Center for Geospatial
Information Competence Development*



**Akhmad Yulianto
Basuki, S.Kom., M.T**

Kepala Biro Perencanaan,
Sumber Daya Manusia,
dan Organisasi
*Head of Bureau of Planning,
Human Resources, and Organization*



**Drs. Tito Setiawan,
M.M**

Kepala Biro Umum
dan Keuangan
*Head of Bureau of General Affairs
and Finance*



**Bayu Triyogo
Widyantoro, S.T., M.Si.**

Plt. Direktur Sistem
Referensi Geospasial
*Acting Director of Geospatial
Reference System*



**Dr. Ade Komara
Mulyana**

Direktur Pemetaan Rupabumi
Wilayah Darat
Director of Land Topographic Mapping



**Astrit Rimayanti, ST.,
M.Sc**

Direktur Pemetaan Rupabumi
Wilayah Laut dan Pantai
*Director of Marine and Coastal
Topographic Mapping*



Dr.-Ing Khafid

Direktur Pemetaan Batas Wilayah
dan Nama Rupabumi
*Director of Boundary Mapping and
Geographical Names*



**Mone Iye Cornelia
Marschiavelli, S.Pi,
M.Si, M.Sc**

Plt. Kepala Biro Hukum, Humas
dan Kerjasama
*Acting Head of Bureau of Legal Affairs,
Public Relations, and Cooperation*



**Dra. Lien Rosalina,
M.M**

Direktur Integrasi dan
Sinkronisasi Informasi
Geospasial Tematik
*Director of Thematic Geospatial
Information Integration and
Synchronization*



**Dr. Gatot Haryo
Pramono, B.Sc.,
M.App.Sc**

Direktur Pemetaan Tematik
Director of Thematic Mapping



**Dr. Dheny Trie
Wahyu Sampurno
S.Si., M.Eng**

Plt. Direktur Atlas dan
Penggunaan Informasi
Geospasial
*Acting Director of Atlas and Utilization
of Geospatial Information*



**Dr. rer. nat.
Sumaryono, M.Sc**

Direktur Sumber Daya Manusia
Informasi Geospasial
*Director of Geospatial Information
Human Resources*



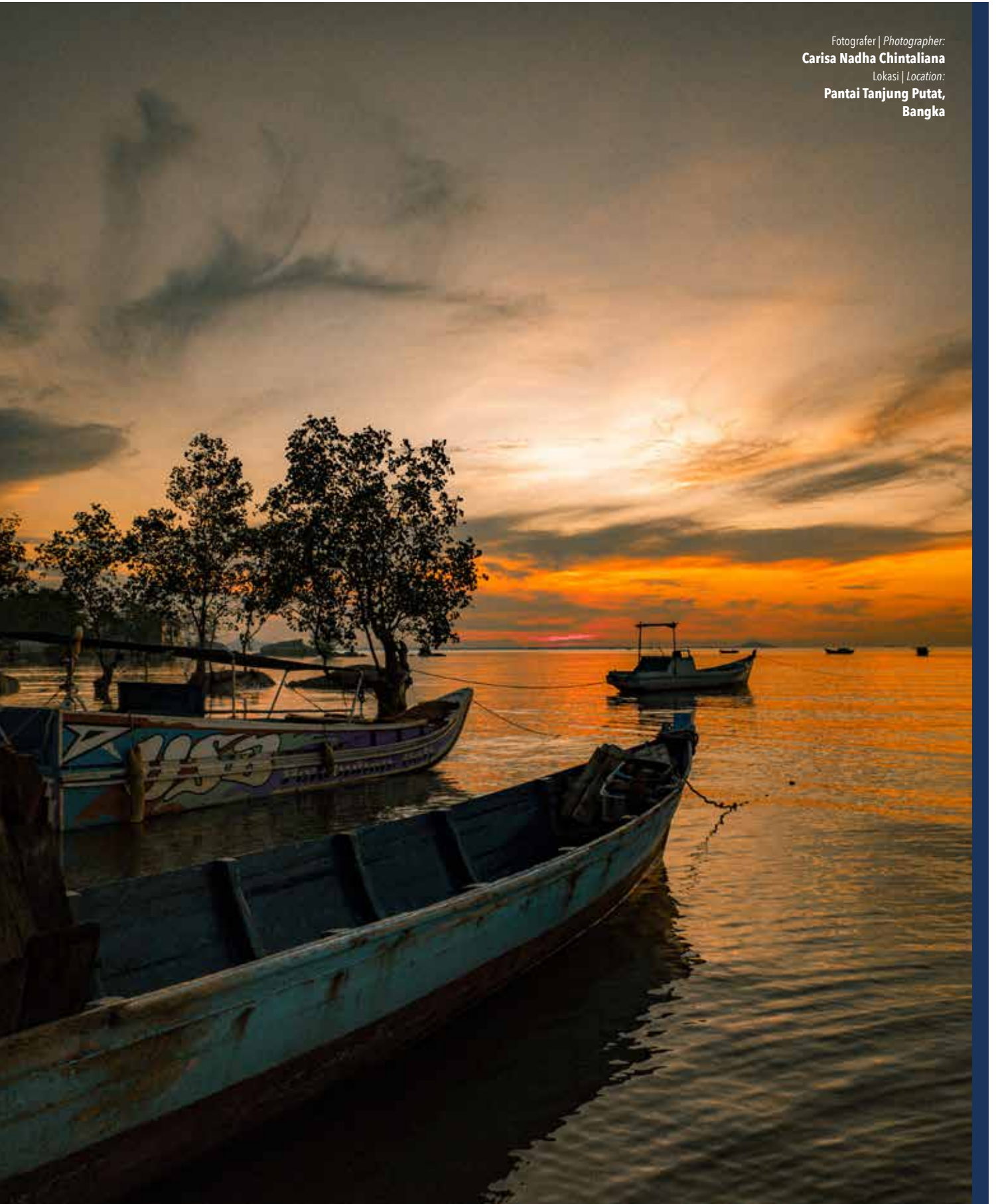
**Rachman Rifai, S.Si.,
M.Si., M.Sc**

Direktur Kelembagaan dan
Jaringan Informasi Geospasial
*Director of Geospatial Information
Institutional Affairs and Networks*



**Iyan Supriyana, S.T.,
M.T.I**

Plt. Direktur Standar dan
Teknologi Informasi Geospasial
*Acting Director of Geospatial
Information Standards and Technology*



Fotografer | *Photographer:*
Carisa Nadha Chintaliana
Lokasi | *Location:*
**Pantai Tanjung Putat,
Bangka**



Demografi Karyawan

Employee Demographics

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BIG didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BIG diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) golongan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

In performing its duties and functions, BIG is supported by competent human resources (HR) in their fields. BIG's Civil Servants (ASN) are classified into 2 (two) groups, namely Civil Servants (PNS) and Civil Servants with Employment Agreement (PPPK).

Jumlah pegawai ASN BIG sampai akhir tahun 2024 adalah

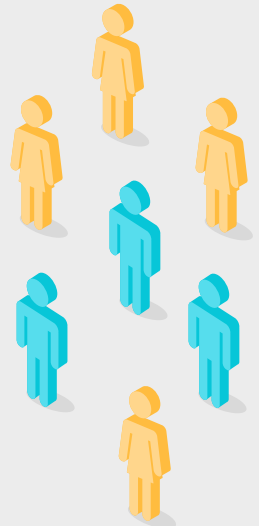
The number of BIG's employees by 2024 was

741 orang/people

dengan rincian

630 PNS dan 111 PPPK.

consisting of 630 PNS and 111 PPPK.

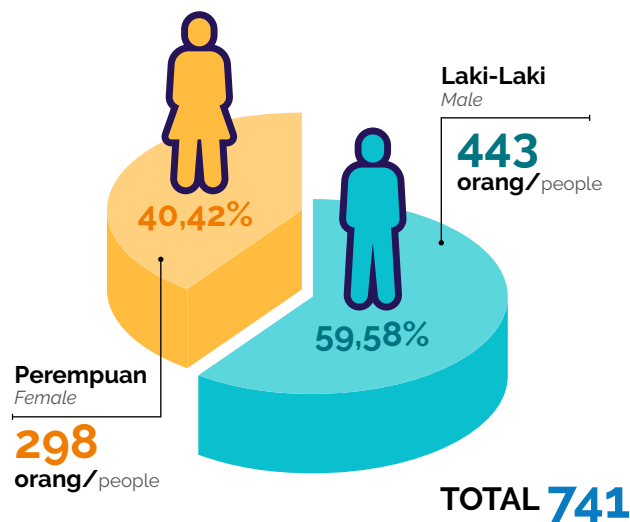


JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI

NUMBER AND COMPOSITION OF EMPLOYEES

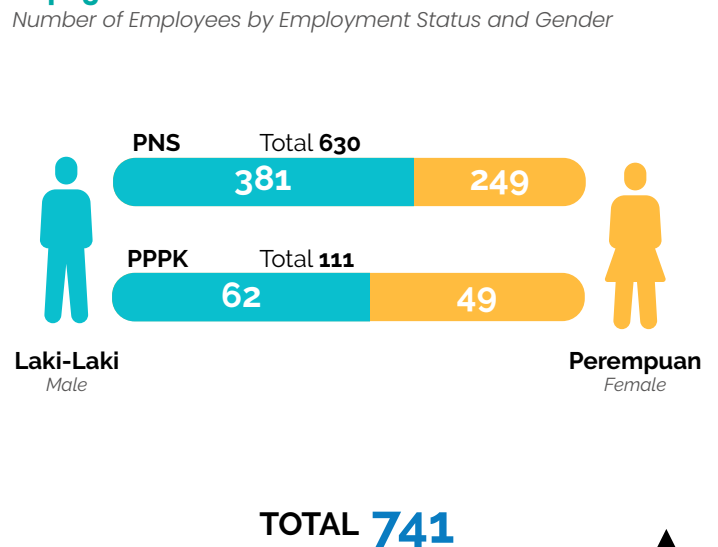
Pegawai berdasarkan Gender

Employees by Gender



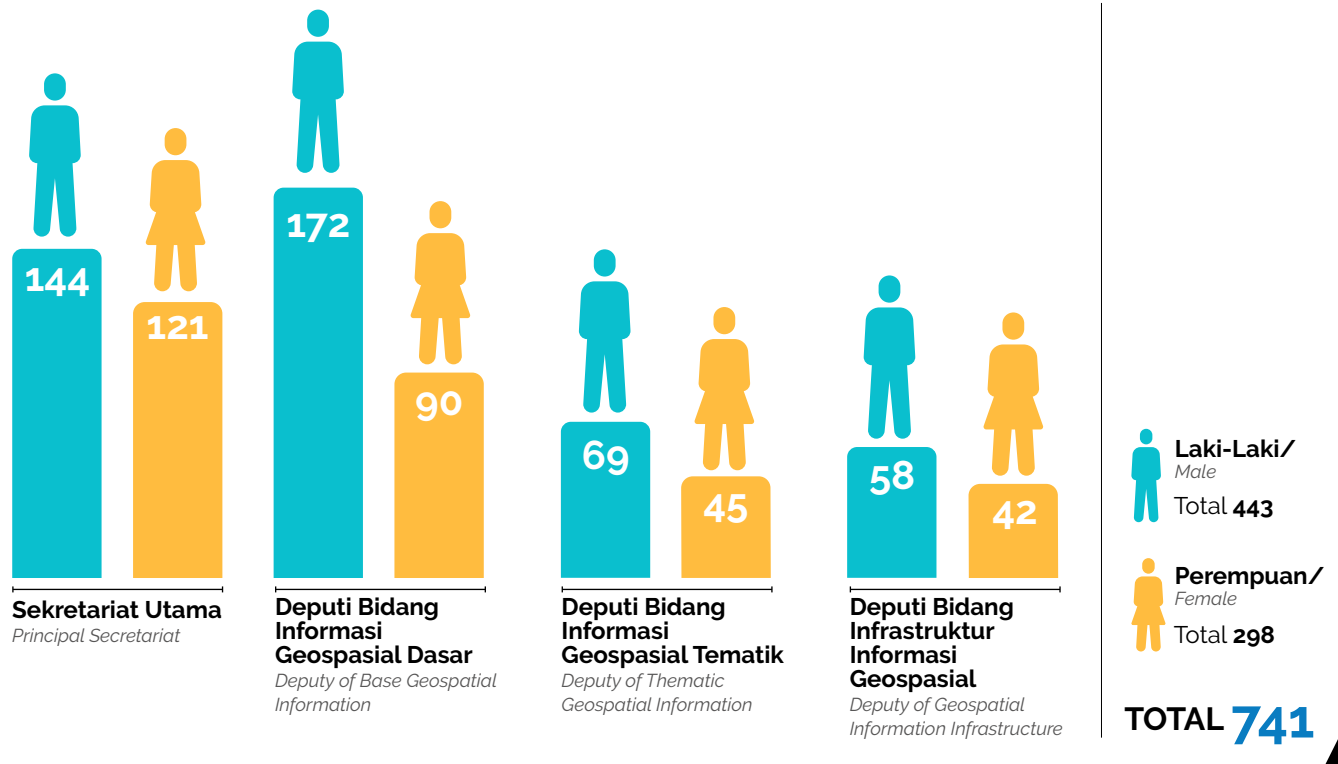
Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian dan Gender

Number of Employees by Employment Status and Gender



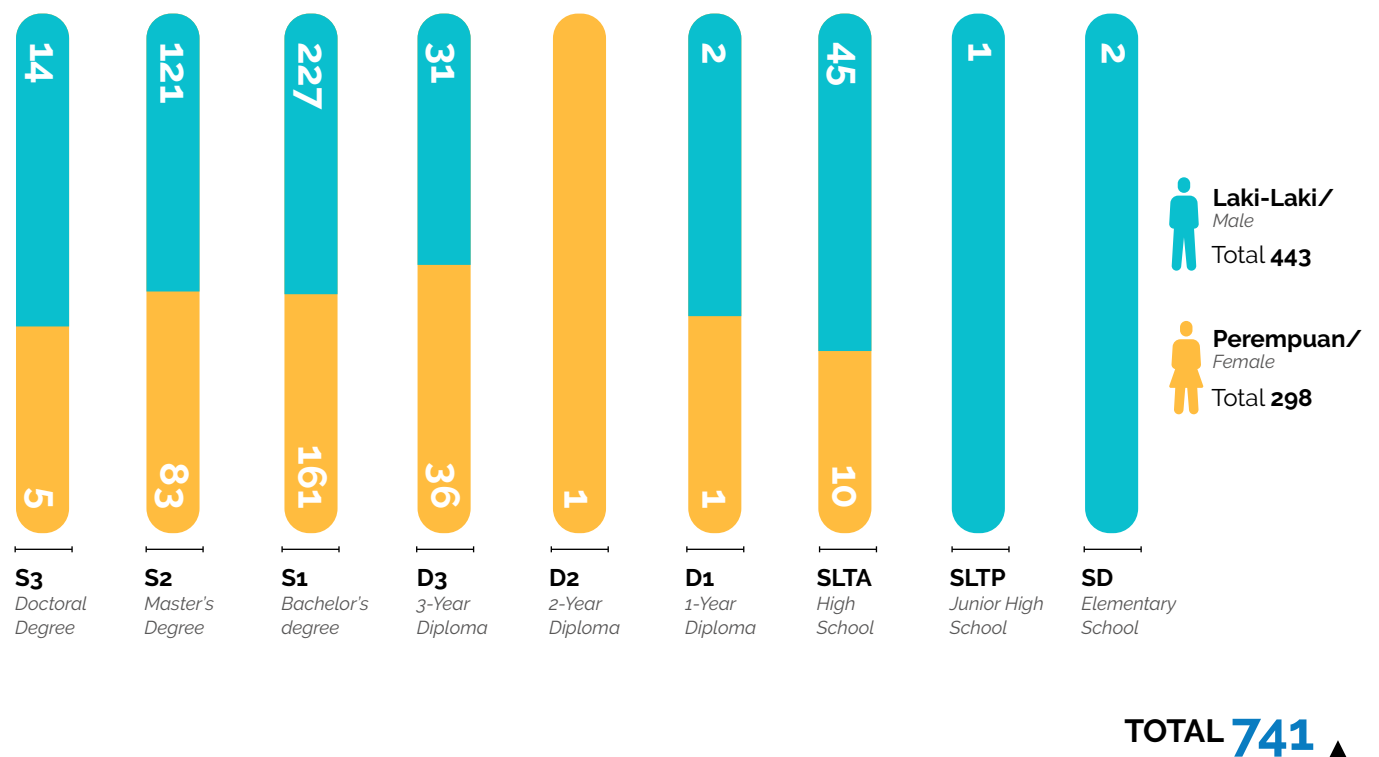
Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja dan Gender

Number of Employees by Work Unit and Gender



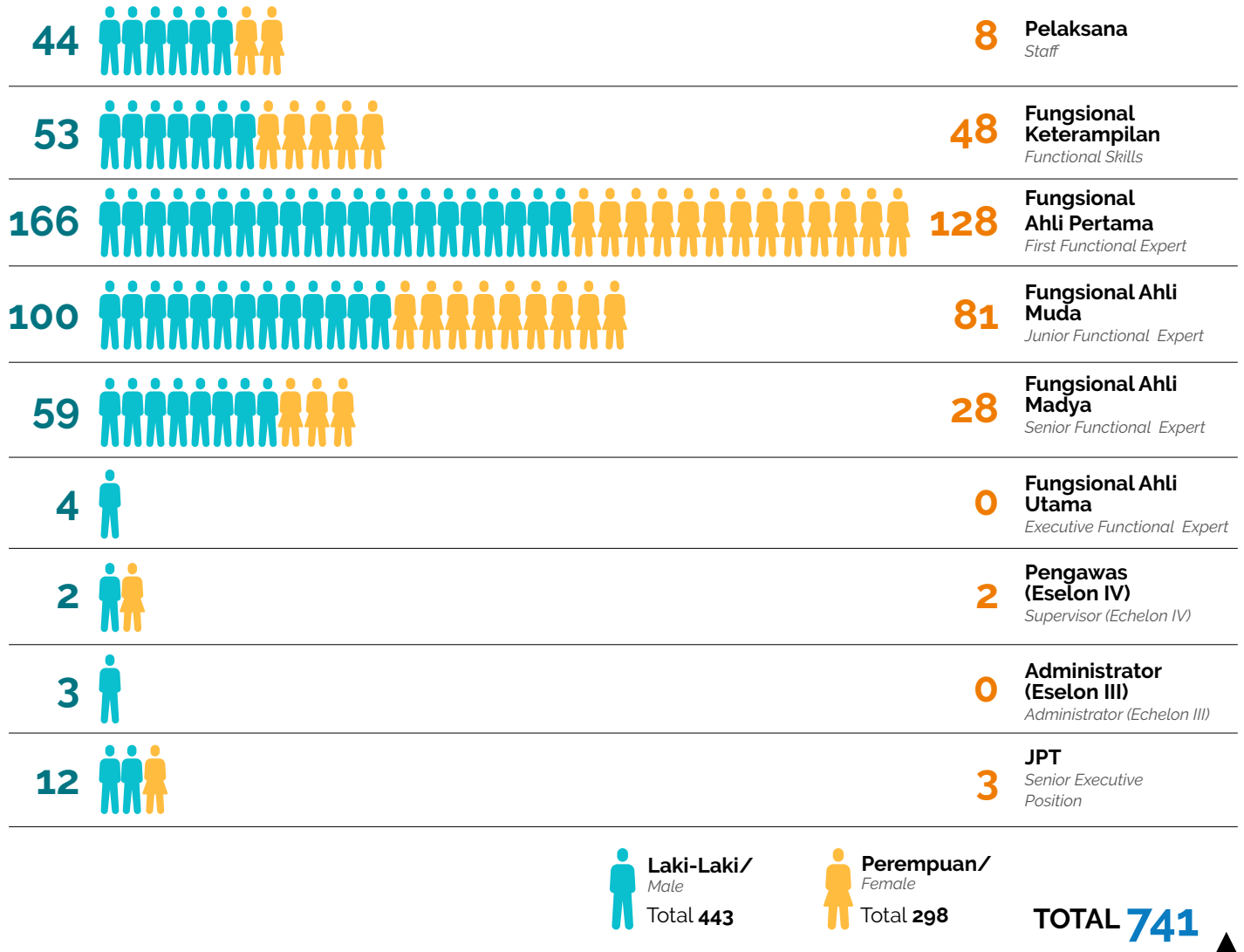
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan, dan Gender

Number of Employees by Education Level and Gender



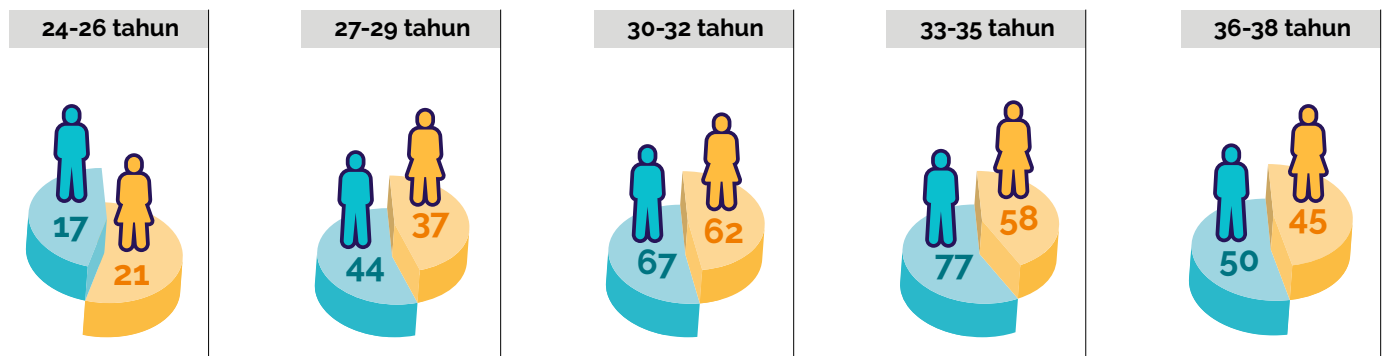
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Gender

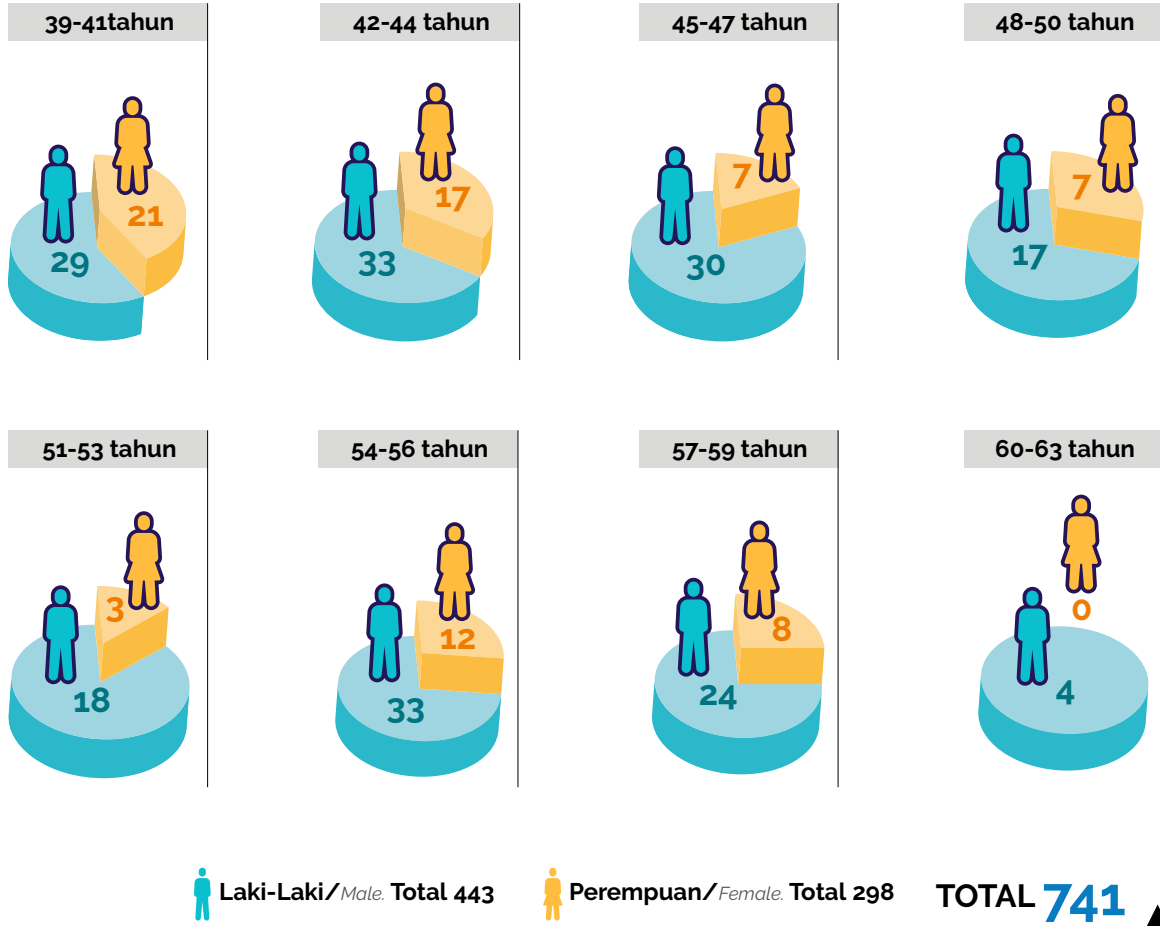
Number of Employees Based on Position Level and Gender



Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia dan Gender

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia dan Gender





Kantor Operasional

Operations Office Buildings

1. Kantor Pusat Badan Informasi Geospasial (BIG) berlokasi di Jl. Raya Jakarta - Bogor KM. 46 Cibinong 16911, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
2. Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (BGPGP), berada di bawah Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial, berlokasi di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
1. The Head Office of the Geospatial Information Agency (BIG) is located on Jl. Raya Jakarta - Bogor KM. 46 Cibinong 16911, Bogor Regency, West Java Province.
2. Coastal and Sand Dune Geospatial Office (BGPGP), under the Directorate of Atlas and Utilization of Geospatial Information, is located in Kretek District, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta Province.



Fotografer | Photographer:
Wahyu Januandrias
Lokasi | Location:
**Desa Damarkasiyan,
Kecamatan Kertek,
Wonosobo, Jawa Tengah**



Fotografer | *Photographer:*
Hafiz Fauzan Fetra

Lokasi | *Location:*
**Pantai Baron, Gunung Kidul,
D.I. Yogyakarta**

Keanggotaan Asosiasi

Association Membership

BIG menjadi bagian dari asosiasi internasional yaitu:

1. INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION (ICA), yang merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kartografi dan Informasi Geospasial. Misi ICA adalah untuk mempromosikan disiplin ilmu dan profesi terkait kartografi dan keilmuan terkait GIS.

2. UNITED NATIONS GLOBAL GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (UN-GGIM) atau Komite Ahli Manajemen Informasi Geospasial Global, sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang membawahi badan/ lembaga geospasial negara-negara di seluruh dunia. Saat ini Presiden UN-GGIM-AP (United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific) berasal dari BIG, yaitu Deputi Bidang IGT.

3. INTERNATIONAL UNION OF GEODESY AND GEOPHYSICS (IUGG), yang merupakan organisasi nonpemerintah internasional yang didedikasikan untuk studi ilmiah tentang bumi dan lingkungan luar angkasa menggunakan teknik geofisika dan geodesi. IUGG adalah anggota Dewan Sains Internasional (ISC), yang terdiri dari lembaga ilmiah dan ilmiah internasional serta akademi sains nasional.

4. THE UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES

The United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) merupakan salah satu dari sembilan kelompok pakar di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United Nations Economic and Social Council/ECOSOC) yang menangani standarisasi nama geografis di tingkat nasional dan internasional. UNGEGN mengadakan konferensi setiap lima tahun sekali dan menerbitkan pedoman internasional terkait.

Tujuan utama UNGEGN ialah menekankan pentingnya standarisasi nama geografis di tingkat nasional maupun internasional, menjelaskan manfaat dari standarisasi tersebut, serta membantu negara-negara

BIG becomes part of an international association, namely:

1. INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION (ICA), which is an international organization engaged in the field of cartography and geospatial information. ICA's mission is to promote the disciplines and professions in cartography and GIS-related sciences.

2. UNITED NATIONS GLOBAL GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (UN-GGIM), a body under the United Nations (UN) that oversees geospatial agencies/institutions of countries around the world. Currently, the President of UN-GGIM-AP (United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific) is a representative from BIG, specifically the Deputy of Thematic Geospatial Information Administration Management.

3. UNION OF GEODESY AND GEOPHYSICS (IUGG), which is an international non-governmental organization dedicated to the scientific study of the Earth and outer space using geophysical and geodetic techniques. IUGG is a member of the International Science Council (ISC), which consists of scientific and international scientific institutions and national science academies.

4. THE UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES

The United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) is one of the nine expert groups of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) and deals with the national and international standardization of geographical names. Every five years it holds the UNGEGN conference. The UNGEGN also publishes international guidelines.

UNGEGN aims to emphasize the importance of standardizing geographical names at the national and international levels, to show the benefits of such standardization, and to assist countries where standardization is lacking.

yang belum memiliki sistem standarisasi nama geografis. Selain itu, UNGEGN memfasilitasi dan mendorong diskusi terkait hasil-hasil kerja dalam standarisasi nasional, isu-isu yang muncul, penyebaran praktik terbaik, serta peningkatan kesadaran di kalangan pengguna luas terhadap nama-nama geografis resmi dari tiap-tiap negara.

5. UNITED NATIONS GLOBAL GEODETIC CENTRE OF EXCELLENCE

United Nations Global Geodetic Centre of Excellence (UN-GGCE) memiliki tujuan utama membantu negara-negara anggota dan organisasi geodesi dalam berkoordinasi dan berkolaborasi guna menjaga, meningkatkan, mengakses, dan memanfaatkan Kerangka Referensi Geodetik Global (The Global Geodetic Reference Frame/GGRF) yang akurat, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk mendukung ilmu pengetahuan, masyarakat, serta pembangunan global.

UN-GGCE bertujuan mendukung (sesuai dengan sumber daya yang tersedia) implementasi Resolusi Majelis Umum PBB 69/266 melalui penguatan dan pengembangan: kerja sama dan koordinasi geodesi global; infrastruktur geodesi internasional; standar dan kebijakan; pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas; serta komunikasi dan peningkatan kesadaran.

Furthermore, UNGEGN facilitates and encourages the discussion of national standardization efforts and related issues, the sharing of best practices, and broader public awareness of nationally authorized geographical names.

5. UNITED NATIONS GLOBAL GEOSPATIAL KNOWLEDGE AND INNOVATION CENTRE (UN-GGCE)

UN-GGCE's overarching goal is to assist Member States and geodetic organizations in coordinating and collaborating to sustain, enhance, access, and utilize an accurate, accessible, and sustainable GGRF to support science, society, and global development.

The objective is to support, within available resources, the implementation of General Assembly resolution 69/266 by strengthening and advancing: global geodetic cooperation and coordination; improving worldwide geodetic infrastructure, standards, and policies; and enhancing education, training and capacity development; and promoting communication and awareness.



Perubahan yang Bersifat Signifikan

Significant Changes

BIG terus bertransformasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan Informasi Geospasial (IG) yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BIG memperkenalkan struktur organisasi baru yang lebih efektif dan efisien, diatur dalam Peraturan BIG No. 7 Tahun 2023. Perubahan ini mencakup penambahan unit kerja eselon di Sekretariat Utama, Deputy Bidang IG Dasar, Deputy Bidang IG Tematik dan Infrastruktur IG, serta pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi IG di bawah Kepala BIG. BIG juga mengusulkan dua Unit Pelaksana Teknis (UPT): Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial serta Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir. Dengan struktur baru ini, BIG siap memberikan layanan geospasial yang lebih baik dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif.

BIG continues to transform to meet the challenges and needs of increasingly complex and dynamic Geospatial Information (IG). With the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, BIG introduced a new organizational structure, which is more effective and efficient, regulated in BIG Regulation No. 7 of 2023. These changes include the addition of echelon work units in the Principal Secretariat, Deputy of BGI, Deputy of TGI, and Deputy of GII and the establishment of the Center for Geospatial Information Competence Development under the Head of BIG. BIG also proposed two Technical Implementation Units (UPT), namely the Geospatial Products and Services Office and the Coastal and Sand Dune Geospatial Office. With this new structure, BIG is ready to provide better geospatial services and meet the community's needs more effectively. ↓



04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN KINERJA LEMBAGA

*Management Discussion
and Analysis*



Fotografer | Photographer:

Fitra Yogi

Lokasi | Location:

**Tanah Datar,
Sumatera Barat**



Tinjauan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

Economic Review and Sustainable Development

Tahun 2024 berlangsung di tengah lanskap global yang penuh dinamika dan ketidakpastian. Perang dagang yang terus berlanjut, konflik geopolitik yang meluas, disrupsi rantai pasok, serta dampak jangka panjang dari pandemi Covid-19 masih membayangi kestabilan ekonomi dunia. Selain itu, pelaksanaan pemilihan umum di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, turut mendorong pelaku usaha lebih bersikap hati-hati, menunggu kejelasan arah kebijakan baru yang akan diambil.

Tak hanya itu, kebijakan moneter ketat diterapkan sejumlah bank sentral di dunia guna menahan laju inflasi. Suku bunga yang tinggi menyebabkan biaya pinjaman meningkat, sehingga menghambat laju investasi di berbagai sektor strategis. Kondisi ini berimbas pada upaya pemulihan ekonomi yang berjalan lambat dan belum merata di banyak negara.

Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2% pada tahun 2024. Meski menunjukkan sedikit perbaikan dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan pra-pandemi. Proyeksi ini menandakan bahwa ekonomi dunia masih rentan terhadap tekanan eksternal dan belum sepenuhnya pulih.

Kondisi ekonomi global yang menantang ini turut berdampak pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Laporan SDGs 2024 yang dirilis oleh PBB menunjukkan bahwa dari 169 target, lebih dari setengah mengalami kemajuan yang lambat, stagnan, atau bahkan mengalami kemunduran signifikan. Tanpa upaya percepatan yang berarti, diperkirakan 590 juta orang di dunia masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

Menantanginya kondisi global turut berimbas pada perekonomian Indonesia yang sedikit melambat, dari 5,05% pada 2023 menjadi 5,03%

Throughout 2024, the global landscape remained marked by volatility and uncertainty. Ongoing trade tensions, widespread geopolitical conflicts, persistent supply chain disruptions, and the lasting effects of the COVID-19 pandemic continued to weigh on global economic stability. Additionally, general elections held in several countries, including the United States and Indonesia, prompted many businesses to adopt a cautious stance, awaiting greater clarity on future policy directions.

In addition, several central banks worldwide adopted tighter monetary policies to curb inflation. Elevated interest rates have increased borrowing costs, slowing investment across various strategic sectors. These conditions have posed further challenges to global economic recovery, which remains uneven and sluggish in many countries.

The International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth to reach 3.2% in 2024. While this reflected a slight improvement over the previous year, it remained below the pre-pandemic average. The projection indicated the continued vulnerability of the global economy to external pressures and highlighted that a full recovery was yet to be achieved.

These challenging global economic conditions have also affected progress toward achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). According to the United Nations' 2024 SDG Report, of the 169 targets, more than half have seen slow progress, stagnation, or significant setbacks. Without substantial acceleration efforts, it is estimated that approximately 590 million people will remain in extreme poverty by 2030.

Challenging global conditions have also affected the Indonesian economy, which experienced a slight slowdown, with growth easing from 5.05% in 2023 to

pada 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan itu terutama ditopang oleh sektor industri, pembangunan infrastruktur, serta transformasi digital. Berdasarkan dari komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi 54,04%, meskipun pertumbuhannya relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut relevan dengan laporan BPS sebelumnya terkait penurunan jumlah penduduk kelas menengah yang menggeser prioritas konsumsi. Sejak pandemi Covid-19, jumlah penduduk kelas menengah berkurang secara bertahap dari 57,33 juta orang menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Sementara jumlah penduduk kelas atas juga turun dari 1,26 juta orang di 2023 menjadi 1,07 juta orang pada 2024. Sedangkan jumlah masyarakat rentan miskin ikut meningkat dari 54,97 juta orang pada 2019 atau 20,56%, menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk pada 2024. Kelompok ini rentan dari kondisi eksternal seperti bencana alam, kecelakaan, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Kerentanan ini juga tercermin dari sisi capaian SDGs di Indonesia, meskipun kemajuan secara keseluruhan sudah relatif baik. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, sebanyak 62,5% dari 222 indikator SDGs telah berada pada jalur yang sesuai (*on track*). Tingkat kemiskinan secara umum mengalami penurunan, namun ketimpangan sosial dan ekonomi cenderung melebar. Rasio gini sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan justru naik dari 0,379 pada Maret jadi 0,381 pada September. Meski terlihat kecil, angka ini mencerminkan dinamika ekonomi yang lebih kompleks. Di samping itu, ancaman krisis iklim dan degradasi lingkungan menuntut sistem perencanaan pembangunan yang lebih tangguh, terukur, dan berbasis data.

Dalam konteks inilah, kebutuhan akan Informasi Geospasial yang akurat dan terintegrasi menjadi semakin mendesak. Informasi Geospasial tidak hanya menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan yang lebih presisi dan adil, tetapi juga berperan penting dalam mempercepat pencapaian SDGs, memperkuat tata kelola ruang, serta mendukung pengambilan keputusan yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

5.03% in 2024. According to Statistics Indonesia (BPS) data, this growth was primarily driven by the industrial sector, infrastructure development, and digital transformation. On the expenditure side, household consumption remained the backbone of national economic growth, contributing 54.04%. However, its growth was relatively stagnant compared to the previous year.

This condition aligns with the latest report from Statistics Indonesia (BPS), highlighting a shift in consumption priorities among the middle class. Since the onset of the COVID-19 pandemic, the size of the middle-class population gradually declined from 57.33 million individuals to 47.85 million in 2024. Similarly, the upper-class population decreased from 1.26 million in 2023 to 1.07 million in 2024. In contrast, the economically vulnerable groups rose significantly from 54.97 million (20.56% of the population) in 2019 to 67.69 million (24.23%) in 2024. This population segment remains highly susceptible to external shocks such as natural disasters, accidents, and mass layoffs.

This vulnerability is also reflected in Indonesia's progress toward achieving the SDGs, which, while generally positive, still present key challenges. According to data from the Ministry of National Development Planning (Bappenas), 62.5% of the 222 SDG indicators are currently on track. Although the national poverty rate has continued to decline, socioeconomic inequality shows signs of increasing. The Gini ratio, a key measure of income distribution, rose from 0.379 in March to 0.381 in September. While the change appears modest, it signals underlying complexities in the economic landscape. Furthermore, the threat of the climate crisis and environmental degradation underscores the need for a more resilient, data-driven, and measurable approach to development planning.

In this context, the need for accurate and integrated geospatial information is becoming increasingly urgent. Geospatial information is not only a critical foundation for formulating more precise and equitable development policies, but also plays an essential role in accelerating progress toward the SDGs, enhancing spatial governance, and enabling decision-making responsive to social, economic, and environmental dynamics.

DUKUNGAN BIG UNTUK PRIORITAS NASIONAL

BIG mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023. Kontribusi BIG difokuskan pada empat PN yaitu:

- **PN I**
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- **PN II**
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan;
- **PN VI**
Membangun lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan
- **PN VII**
Memperkuat stabilitas pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Untuk itu, BIG melaksanakan kegiatan Penyediaan Garis Pantai Prioritas dengan target 6.500 km². Kegiatan ini difokuskan di wilayah Kalimantan dan berhasil melampaui target sepanjang 6.751 km dari target awal 6.500 km, atau mencapai 100% realisasi.

Kegiatan ini mendukung kebutuhan informasi garis pantai yang menjadi dasar penting untuk penyusunan tata ruang, baik di wilayah darat maupun laut. Di wilayah laut, informasi garis pantai digunakan dalam penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Sementara itu, untuk wilayah darat, data garis pantai menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.

Selain itu, informasi garis pantai juga dapat digunakan untuk penentuan batas wilayah laut suatu daerah, batas antar negara, penentuan wilayah pengelolaan sumber daya wilayah pesisir, dan sebagai data rencana pemasangan peralatan peringatan dini bencana tsunami pada daerah ramai penduduk.

Informasi garis pantai yang dihasilkan tidak hanya penting untuk mendukung penyusunan rencana

BIG'S SUPPORT FOR NATIONAL PRIORITIES

The Geospatial Information Agency (BIG) actively supports the achievement of National Priorities as outlined in the 2024 Government Work Plan (RKP), following Presidential Regulation No. 52 of 2023. BIG's contributions are focused on four key National Priorities, namely:

- **PN I**
strengthening economic resilience to support quality and sustainable growth;
- **PN II**
advancing regional development to reduce disparities and promote equity;
- **PN VI**
enhancing environmental sustainability and strengthening resilience to disasters and climate change; and
- **PN VII**
promoting political, legal, defense, and security stability alongside transforming public services.

To support these priorities, BIG implemented the Priority Coastline Mapping initiative, with a target coverage area of 6,500 km². This activity focused on Kalimantan and successfully exceeded its target, achieving 6,751 km or 100% realization.

This activity supported the growing need for accurate coastline information, which is a critical foundation for spatial planning in terrestrial and marine areas. Marine zones use coastline data to prepare the Zoning Plan for National Strategic Areas (RZ KSN) and the Coastal and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K). Meanwhile, on land, coastline data is a key reference in developing the Detailed Spatial Plans (RDTR), the Provincial Spatial Plan (RTRW), and the Regency/City Spatial Plan.

In addition, coastline data can be utilized to delineate maritime boundaries and international borders, identify coastal resource management zones, and support the planning of tsunami early warning system installations in densely populated areas.

The resulting coastline information is essential not only for supporting zoning and spatial planning,

Fotografer | Photographer:
Deden Iman Wauntara
Lokasi | Location:
**Kawah Kramikan Suoh,
Lampung**

zonasi dan tata ruang wilayah, tetapi juga memainkan peran kunci dalam penguatan pengelolaan wilayah pesisir, perlindungan sumber daya kelautan, serta peningkatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana.

but also for enhancing coastal area management, safeguarding marine resources, and strengthening regional resilience to disaster risks.

Tinjauan Kinerja BIG

BIG Performance Review

Sebagai lembaga penyelenggara Informasi Geospasial nasional, BIG berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Di tengah upaya pemerintah memperkuat transformasi digital, mendorong investasi, dan meningkatkan kualitas belanja pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, data spasial yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang krusial.

As the national geospatial information agency, BIG strategically supports inclusive, efficient, and sustainable national development. In line with the government's efforts to accelerate digital transformation, attract investment, and enhance the quality of development spending in pursuit of Indonesia Emas 2045 (Golden Indonesia 2045), accurate and integrated spatial data is a critical foundation for effective development planning.

Mandat BIG sebagai penyedia Informasi Geospasial Dasar (IGD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, yang menempatkan BIG sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam penyediaan peta dasar nasional. Fungsi ini diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022, yang menempatkan BIG di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, menandakan bahwa pemanfaatan Informasi Geospasial merupakan elemen fundamental dalam perencanaan pembangunan nasional.

Sejalan dengan itu, BIG juga mengemban peran penting dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP), sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 dan diperkuat oleh Perpres Nomor 23 Tahun 2021. KSP hadir untuk mengatasi tumpang tindih peta sektoral dan mendukung keterpaduan perencanaan ruang. Dalam kerangka ini, BIG ditugaskan untuk mempercepat penyediaan peta dasar skala 1:50.000 di seluruh wilayah Indonesia pada periode 2020–2024. Dalam hal ini, peran BIG tidak terbatas pada aspek teknis penyediaan data, tetapi juga bersifat strategis dan struktural. BIG merupakan tulang punggung pelaksanaan Kebijakan Satu Data dan Satu Peta, serta mendukung prioritas nasional di bidang tata ruang, infrastruktur, lingkungan hidup, mitigasi bencana, hingga pelayanan publik berbasis spasial.

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL BIG

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, penyelenggaraan Informasi Geospasial oleh BIG diarahkan pada tiga fokus utama:

BIG's mandate as the provider of base geospatial information (BGI) is established under Law No. 4 of 2011, which designates BIG as the sole institution authorized to produce national base maps. This role is further reinforced by Presidential Regulation No. 128 of 2022, which places BIG under the coordination of the Ministry of National Development Planning (PPN/Bappenas), underscoring the critical role of geospatial information as a foundational element in national development planning.

In line with this mandate, BIG is vital in accelerating the One Map Policy (OMP), as outlined in Presidential Regulation No. 9 of 2016 and reinforced by Presidential Regulation No. 23 of 2021. The OMP aims to resolve overlapping sectoral maps and support integrated spatial planning. Within this framework, BIG is tasked with expediting the production of 1:50,000 scale base maps across Indonesia for 2020–2024. BIG's role extends beyond the technical provision of data. It is both strategic and structural. As the backbone of the One Data and One Map Policy implementation, BIG supports national priorities in spatial planning, infrastructure development, environment, disaster mitigation, and spatially-based public services.

POLICY DIRECTION AND STRATEGIC TARGETS FOR BIG'S GEOSPASIAL INFORMATION IMPLEMENTATION

Aligned with the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), BIG's geospatial information implementation is focused on three (3) main priorities.



1

Penyediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar

Provision of fundamental large-scale base geospatial information

2

Pembinaan peta tematik prioritas, khususnya skala detail di bidang kewilayahan

Development of priority thematic maps, with a particular emphasis on detailed regional scales

3

Optimalisasi Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) Nasional melalui integrasi data dalam kerangka Satu Data Indonesia

Optimization of the national geospatial information infrastructure through data integration within the One Data Indonesia framework

Dalam mewujudkan fokus tersebut, BIG merumuskan 4 sasaran strategis yang capaiannya diukur melalui 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), sebagaimana tercantum dalam Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis BIG 2020 – 2024.

SASARAN STRATEGIS 1

“Tersedianya IG dasar yang lengkap dan akurat”. Sasaran ini diukur dengan IKSS 1.1 “Persentase (%) ketersediaan IGD yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional.”

Sasaran ini merepresentasikan kontribusi BIG terhadap pembangunan nasional dan kepada masyarakat. Sebab ketersediaan Informasi Geospasial yang andal menjadi fondasi untuk pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta mendorong investasi dan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui strategi percepatan penyediaan data dan IGD yang lengkap dan akurat.

SASARAN STRATEGIS 2

“Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang berkualitas sesuai kebutuhan nasional”. Sasaran ini diukur dengan IKSS 2.1 “Persentase (%) ketersediaan IGT yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional.”

Peningkatan ketersediaan IGT merepresentasikan kemampuan produksi IGT nasional yang diselenggarakan oleh penyelenggara IGT, penyelenggaraan fungsi kontrol kualitas IGT, dan peran BIG sebagai *quality advisor* bagi penyelenggara IGT nasional. Untuk itu, BIG melakukan pembinaan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyusunan Informasi Geospasial tematik (IGT), khususnya untuk peta rencana tata ruang (RTRW dan RDTR) sesuai standar ketelitian peta. Langkah ini bertujuan mendukung percepatan penyelesaian tata ruang wilayah dan memenuhi kebutuhan peta tematik prioritas pembangunan nasional.

SASARAN STRATEGIS 3

“Terselenggaranya IIG yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses dan pemanfaatan IG nasional”. Sasaran ini diukur dengan IKSS 3.1 “Indeks IIG yang berkualitas.”

To support this focus, BIG has established four (4) strategic targets, with progress measured through four (4) Strategic Target Performance Indicators (IKSS), as outlined in BIG Regulation No. 1 of 2021 on the 2020–2024 BIG Strategic Plan.

STRATEGIC TARGET 1

Is “Availability of complete and accurate base geospatial information.” This target is measured by IKSS 1.1, defined as the “Percentage of available quality and ready-to-use BGI across all regions of Indonesia in accordance with national development needs.”

This target reflects BIG’s contribution to national development and public welfare. The availability of reliable geospatial information is a foundation for equitable growth, reducing regional disparities, fostering investment, and delivering public services across Indonesia. This objective is pursued through a strategic approach to accelerating the provision of complete and accurate base geospatial data and information.

STRATEGIC TARGET 2

Is to “Enhance the availability of quality Thematic Geospatial Information (TGI) in line with national needs.” This target is measured by IKSS 2.1, which is defined as the “Percentage of available quality TGI in accordance with national development priorities.”

The increased TGI availability reflects the national capacity for its production authorized institutions, the implementation of TGI quality control functions, and BIG’s role as a quality advisor to national TGI producers. To support this, BIG guides ministries, government agencies, and local governments in preparing thematic geospatial information (TGI), particularly for Spatial Planning and Detailed Spatial Plans (RTRW and RDTR), per established map accuracy standards. This effort aims to accelerate the completion of regional spatial plans and fulfill the demand for thematic maps aligned with national development priorities.

STRATEGIC TARGET 3

the “Provision of quality GI infrastructure to support the availability, accessibility, and utilization of national geospatial information.” This target is measured by IKSS 3.1, which is represented by the “GI Infrastructure Quality Index.”

Oleh karena itu, BIG berfokus untuk meningkatkan efektivitas IIG dalam menyediakan kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar dan SDM yang dapat memberikan dampak positif terhadap ketersediaan, akses dan pemanfaatan IG nasional.

Accordingly, BIG is focused on enhancing the effectiveness of geospatial information infrastructure by strengthening policies, institutional frameworks, technology, standards, and human resources. These efforts are intended to positively impact the availability, accessibility, and utilization of national geospatial information.

SASARAN STRATEGIS 4

"Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan terpercaya". Sasaran ini diukur dengan IKSS 4.1 "Nilai Reformasi Birokrasi BIG."

Sasaran ini merepresentasikan kontribusi BIG dalam mewujudkan perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia (*good governance*). Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya dan *tools* untuk akselerasi capaian pembangunan nasional. Saat ini, kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi menjadi dua yaitu reformasi birokrasi generik untuk menyelesaikan isu hulu berupa masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, dan reformasi birokrasi tematik yang berfokus pada penyelesaian isu hilir berupa masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional.

STRATEGIC TARGET 4

"Establishment of a clean, effective, and trustworthy bureaucracy." This target is measured by IKSS 4.1, which is represented by the "BIG Bureaucratic Reform Index."

This target reflects BIG's contribution to advancing a paradigm shift toward good governance within the Indonesian government. Bureaucratic reform serves as a key instrument in accelerating the achievement of national development goals. Currently, the implementation of bureaucratic reform is structured into two approaches: generic bureaucratic reform, which addresses upstream challenges related to internal governance within the public institution, and thematic bureaucratic reform, which focuses on downstream issues that affect society and are directly linked to national development priorities.



Fotografer | Photographer:
Anggriawan Dwi Sartono
Lokasi | Location:
**Desa Wae Rebo,
Manggarai, NTT**

Berdasarkan keempat sasaran dan indikator di atas, kontribusi BIG terhadap pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Based on the four (4) strategic targets and their corresponding performance indicators, BIG's contribution to national development is illustrated in the following figure.

			
PRIORITAS NASIONAL 01 NATIONAL PRIORITY 01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan <i>Strengthening Economic Resilience for Quality and Equitable Growth</i>	PRIORITAS NASIONAL 02 NATIONAL PRIORITY 02 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan <i>Advancing Regional Development to Reduce Disparities and Promote Equity</i>	PRIORITAS NASIONAL 06 NATIONAL PRIORITY 06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim <i>Enhancing Environmental Sustainability and Strengthening Resilience to Disasters and Climate Change</i>	PRIORITAS NASIONAL 07 NATIONAL PRIORITY 07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik <i>Promoting Political, Legal, Defense, and Security Stability Alongside Transforming Public Services</i>
KONTRIBUSI BIG BIG CONTRIBUTION			
• Pemetaan batimetri prioritas skala 1:50.000 • Pemetaan garis pantai prioritas • <i>Mapping of priority bathymetric at a 1:50,000 scale</i> • <i>Mapping of priority coastline</i>	Penyediaan lembar peta dasar skala 1:5.000; DGD skala 1:5.000 (km²); Data IGD skala 1:5.000; Kesepakatan teknis batas wilayah administratif desa/kelurahan; pemetaan RBI dan toponim skala 1:5.000 <i>Provision of base map sheets at a scale of 1:5,000; base geospatial data covering areas at a 1:5,000 scale; BGI data at a scale of 1:5,000; technical agreements on administrative boundaries of villages/ sub-districts; Indonesian topographic maps and toponym mapping at a scale of 1:5,000.</i>	• Pembangunan stasiun InaCORS • Pembangunan stasiun Pasang Surut Permanen • Pengelolaan titik pantau geodinamika • <i>Construction of InaCORS station</i> • <i>Construction of permanent tide gauge stations</i> • <i>Management of geodynamic monitoring points</i>	Peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara • Tanda batas negara • Peta batas negara • Kesepakatan teknis batas laut • Kesepakatan teknis batas darat <i>Enhancement and intensification of the effectiveness of border resolution and acceleration of state border mapping</i> • <i>State boundary markers</i> • <i>State boundary maps</i> • <i>Technical agreement on maritime boundaries</i> • <i>Technical agreement on land boundaries</i>
PENYEDIAAN IG GI PROVISION	PENYEDIAAN IG GI PROVISION	PENYEDIAAN IG GI PROVISION	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN IG GI PROVISION AND UTILIZATION

Sebagai upaya mencapai empat sasaran strategis tersebut, BIG menjalankan delapan program strategis tahun 2024, mencakup: Penyediaan Sistem Referensi Geospasial Indonesia; Penyediaan Peta Dasar; Pembinaan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial ; Penyediaan Infrastruktur dan Penyebarluasan Informasi Geospasial ; Penyelenggaraan Jasa dan Produk Bidang Informasi Geospasial ; Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara; Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk; dan Penyelenggaraan Kesekretariatan.

Dalam menjalankan program-program tersebut, BIG menghadapi sejumlah tantangan sehingga memengaruhi capaian kinerja. Selain itu, hambatan teknis seperti keterlambatan pengadaan barang dan jasa serta koordinasi yang belum optimal dengan sejumlah pemangku kepentingan turut menjadi kendala.

Tantangan juga muncul dalam upaya memperkuat ekosistem industri hilir Informasi Geospasial. Beberapa isu krusial meliputi terbatasnya anggaran, kurangnya data nilai dan potensi pasar industri IG hilir, rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku industri terhadap manfaat IG, serta belum memadainya regulasi dan kelembagaan yang mendukung. Keterbatasan infrastruktur, kompetensi SDM, akses terhadap data IG yang berkualitas, dan minimnya kegiatan kolaboratif juga turut membatasi pengembangan industri hilir IG secara menyeluruh.

Berikut ini tinjauan kinerja lembaga berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun penjelasan mengenai kinerja BIG mencapai sasaran strategis 4 “Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan terpercaya”, dapat dilihat pada bab Tata Kelola di dalam laporan ini.

SASARAN STRATEGIS 1

Peningkatan Penyediaan Informasi Geospasial Dasar yang Lengkap dan Akurat

Penyediaan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI)

SRGI adalah sistem acuan nasional yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi, baik secara horizontal (lintang-bujur) maupun vertikal (ketinggian). SRGI juga mencakup data perubahan posisi dari waktu ke waktu, misalnya disebabkan pergeseran lempeng bumi.

To achieve the four (4) strategic targets, BIG implemented eight (8) strategic programs in 2024. These include the provision of the Indonesian Geospatial Reference System; the provision of base maps; the guidance and implementation of geospatial information; the development of infrastructure and dissemination of geospatial information; the delivery of geospatial information services and products; the supervision of government civil servant management; the implementation of research, promotion, cooperation, and service delivery; and the provision of secretariat services.

In implementing these programs, BIG faced several challenges that affected performance outcomes. In addition, technical obstacles, such as delays in the procurement of goods and services and suboptimal coordination with various stakeholders, also hindered progress.

Challenges also arose in efforts to strengthen the downstream geospatial information (GI) industry ecosystem. Several key issues include limited budget allocation, insufficient valuation data and unclear market potential of the downstream GI industry, low public and industry awareness of GI benefits, as well as inadequate regulations and supporting institutions. Additionally, limited infrastructure, gaps in HR competencies, restricted access to high-quality GI, and a lack of collaborative initiatives, further hindered the overall development of the downstream GI industry.

The following section reviews the institution's performance based on the strategic targets set for achievement. An explanation of BIG's performance in achieving Strategic Target 4, “Establishment of a clean, effective, and trustworthy bureaucracy,” is presented in the Institutional Governance chapter of this report.

STRATEGIC TARGET 1

Availability of complete and accurate base geospatial information

Provision of the Indonesian Geospatial Reference System (SRGI)

The Indonesian Geospatial Reference System (SRGI) serves as the national framework for accurately determining the position of any point on the Earth's surface, both horizontally (latitude and longitude) and vertically (altitude). In addition, the SRGI incorporates data on positional changes over time, such as those caused by tectonic plate movements.

SRGI menjadi dasar utama dalam kegiatan pemetaan dan penyusunan Informasi Geospasial di seluruh wilayah Indonesia. Sistem ini digunakan agar semua data spasial—baik dari pemerintah, swasta, maupun akademisi—menggunakan referensi yang sama dan konsisten, serta terhubung dengan sistem global. Dengan adanya SRGI yang akurat dan mutakhir, pembangunan nasional dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efisien, terutama dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana, hingga pengambilan kebijakan berbasis spasial/wilayah.

Sepanjang tahun 2024, BIG terus memperkuat ketersediaan SRGI, baik secara horizontal maupun vertikal, meningkatkan penggunaan SRGI, serta memperluas cakupan layanan jaringan Ina-CORS (Indonesia-Continuously Operating Reference Stations). Untuk mendukung terselenggaranya SRGI yang mutakhir di Indonesia, diperlukan penyediaan data koordinat horizontal dari stasiun Indonesia *Continuously Operating Reference Station* (Ina-CORS), data pasang surut permukaan air laut, serta model geoid (Ina-GEOID).

Pembangunan dan Pemeliharaan Ina-CORS

Indonesia-Continuously Operating Reference Station merupakan jaringan stasiun permanen GNSS (*Global Navigation Satellite System*) yang memberikan data posisi secara kontinu, presisi, dan berbasis *real-time*. Data yang dihasilkan digunakan untuk memperkuat kerangka referensi geospasial, baik dalam aspek horizontal maupun vertikal, yang menjadi fondasi seluruh kegiatan pemetaan dan pemanfaatan Informasi Geospasial. Data Ina-CORS turut mendukung pemetaan skala besar, geodinamika, serta sistem peringatan dini bencana seperti Ina-TEWS (*Tsunami Early Warning System*).

Pada tahun 2024, BIG membangun 41 stasiun Ina-CORS, mencakup 32 stasiun mendukung SRGI dan 9 stasiun mendukung Ina-TEWS. Dengan demikian, total stasiun Ina-CORS yang terbangun menjadi 472 stasiun, atau sekitar 80,82% dari target total 584 stasiun untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan estimasi jangkauan layanan 50 km dari tiap stasiun, cakupan nasional jaringan Ina-CORS telah mencapai 759.314 km², dari target total 930.255 km². Artinya, sekitar 81,62% wilayah darat Indonesia yang masuk dalam kategori urban dan rural kini telah tercakup dalam sistem referensi horizontal berbasis *real-time* GNSS. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyediaan referensi posisi yang stabil, presisi, dan kompatibel dengan sistem global.

The SRGI serves as the fundamental framework for all mapping activities and the compilation of geospatial information across Indonesia. It ensures that spatial data from government agencies, the private sector, and academia are referenced consistently and aligned with the global geospatial system. By providing accurate and up-to-date SRGI, national development can be carried out more focused and efficiently, especially in spatial planning, infrastructure development, disaster mitigation, and spatial/region-based policy making.

Throughout 2024, BIG continued to enhance the availability of the SRGI both horizontally and vertically, promote its wider use, and expand the coverage of the Ina-CORS (Indonesia Continuously Operating Reference Stations) network services. To support the implementation of the latest SRGI across Indonesia, accurate horizontal coordinate data from Ina-CORS, sea level tidal information, and geoid models (Ina-GEOID) are essential.

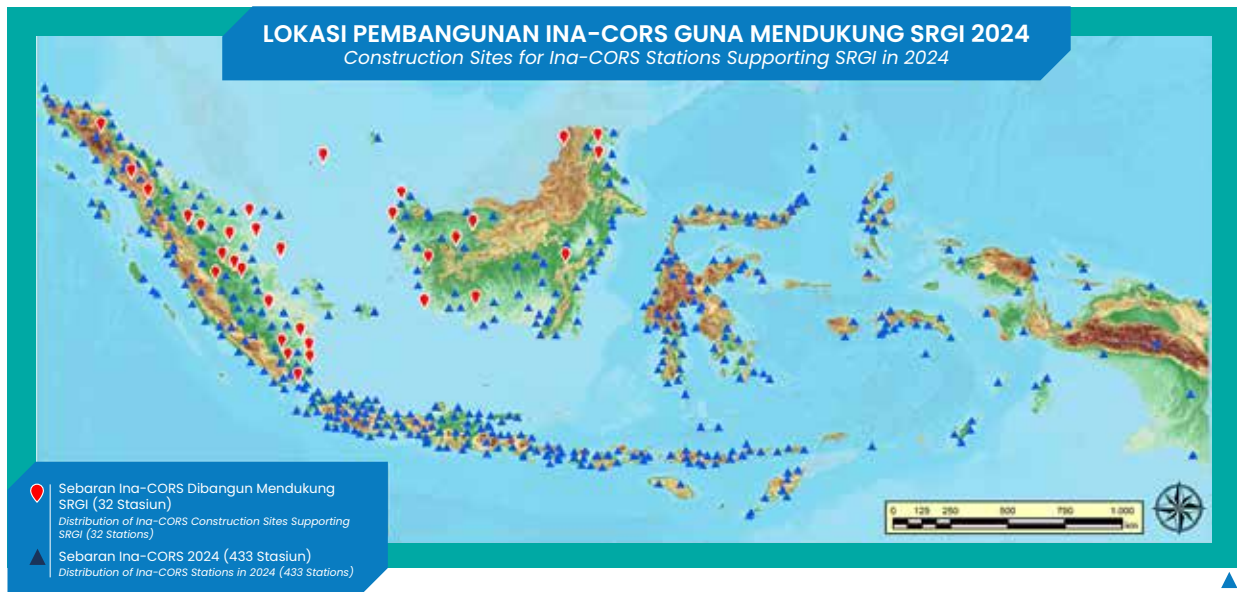
Development and Maintenance of Ina-CORS

Ina-CORS (*Indonesia Continuously Operating Reference Stations*) is a permanent GNSS (*Global Navigation Satellite System*) station network that provides continuous, precise, and *real-time* positioning data. This data enhances the horizontal and vertical geospatial reference framework, serving as the foundation for all mapping activities and the utilization of geospatial information. Ina-CORS data also supports large-scale mapping efforts, geodynamic studies, and disaster early warning systems, including the Ina-TEWS (*Tsunami Early Warning System*).

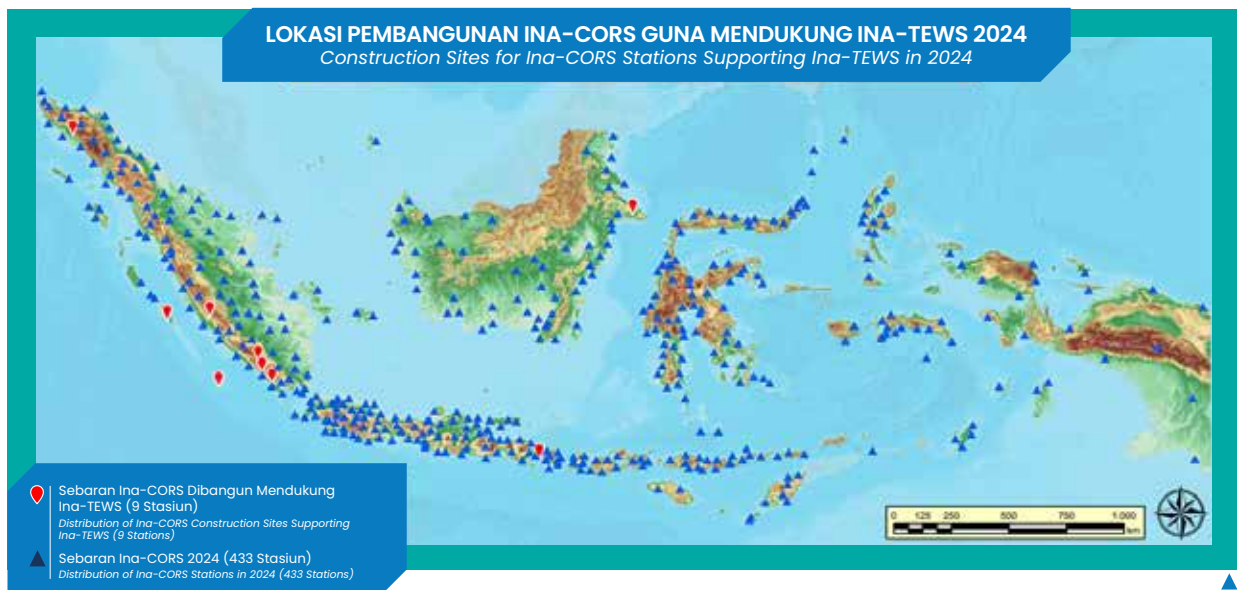
*In 2024, BIG established 41 new Ina-CORS stations, comprising 32 stations supporting the SRGI and nine stations supporting Ina-TEWS. This brings the total number of Ina-CORS stations to 472, achieving approximately 80.82% of the overall target of 584 stations for the entire Indonesian territory. With an estimated service radius of 50 km per station, the Ina-CORS network now covers 759,314 km² out of the 930,255 km² target area. This means that the GNSS *real-time* horizontal reference system currently covers about 81.62% of Indonesia's land, including urban and rural areas. This progress represents a significant advancement in providing stable, precise, and globally compatible positioning references.*

Pembangunan Ina-CORS mencakup pembangunan fisik pilar dan instalasi perangkat Ina-CORS. Stasiun Ina-CORS yang mendukung SRGI tersebar di sejumlah wilayah di pulau Sumatera dan Kalimantan. Sementara stasiun Ina-CORS yang mendukung sistem peringatan dini tsunami antara lain berada di Aceh, Bali, Jambi, serta Kalimantan Timur.

Ina-CORS station development involves pillar construction and installation of GNSS equipment. Ina-CORS stations supporting the SRGI are distributed across various regions on the islands of Sumatra and Kalimantan. Meanwhile, stations supporting the tsunami early warning system are in Aceh, Bali, Jambi, and East Kalimantan.



Sebaran lokasi pembangunan 32 Ina-CORS Guna Mendukung SRGI 2024
Distribution of Construction Sites for 32 Ina-CORS Stations Supporting SRGI in 2024



Sebaran lokasi pembangunan 9 Ina-CORS mendukung Ina-TEWS 2024
Distribution of Construction Sites for 9 Ina-CORS Stations Supporting Ina-TEWS in 2024

Pembangunan dan Pemeliharaan Stasiun Pasang Surut (Pasut)

SRGI tidak hanya mencakup koordinat horizontal (lintang dan bujur), tetapi juga posisi vertikal (ketinggian) suatu titik di permukaan bumi. Untuk itu, dibutuhkan stasiun pasang surut yang secara kontinu memantau dan merekam ketinggian muka laut di lokasi tertentu selama 24 jam penuh setiap hari. Data ini menjadi dasar dalam menentukan tinggi referensi rata-rata laut (*mean sea level*), yang digunakan sebagai acuan untuk perhitungan elevasi atau ketinggian geospasial di seluruh Indonesia.

Ketersediaan dan keandalan data dari stasiun pasut sangat penting untuk menentukan sistem ketinggian nasional yang konsisten, pemodelan geoid dan konversi data GNSS, pemantauan perubahan muka laut dan peringatan dini tsunami, serta pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir.

Hingga akhir tahun 2024, BIG telah mengelola 290 stasiun pasang surut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan 32 diantaranya merupakan stasiun yang dibangun dan mulai beroperasi pada 2024 sesuai target. Pembangunan stasiun pasang surut dilakukan tersebar di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Jawa, Bali, dan Papua.

Sebagian besar peralatan stasiun dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sebagian lainnya berasal dari kerja sama internasional antara lain dengan University of Hawaii Sea Level Center (UHSLC), Amerika Serikat, dan GeoForschungsZentrum (GFZ), Jerman. Kedua lembaga tersebut berkontribusi pada sistem peringatan dini tsunami dan pemetaan wilayah pesisir.

Seluruh stasiun dikelola melalui empat kegiatan utama, yaitu pemantauan ketersediaan data pasut, pemeliharaan stasiun pasut, validasi data, serta pelayanan data pasut. Sepanjang tahun 2024, tercatat sejumlah kendala, antara lain Stasiun Carik di Nusa Tenggara Barat rusak akibat badai pada Januari 2024, serta Stasiun Breueh di Aceh mengalami gangguan komunikasi sehingga tidak dapat mengirim data ke server pusat BIG. Adapun Stasiun Sapodi (Jawa Timur) dan Kaledupa (Sulawesi Tenggara) mengalami pembongkaran (*dismantled*) pada Maret 2024.

Development and Maintenance of Tide Gauge Stations

The SRGI encompasses both horizontal coordinates (latitude and longitude) and vertical positioning (altitude) of points on the Earth's surface. Therefore, tide gauge stations must continuously monitor and record sea level data at specific locations 24 hours a day. The data collected is the foundation for establishing the mean sea level reference, the national standard for elevation and geospatial height measurements across Indonesia.

The availability and reliability of data from tide gauge stations are critical for supporting a consistent national elevation reference system, geoid modeling, GNSS data conversion, monitoring sea level changes, tsunami early warning systems, and infrastructure development in coastal areas.

By the end of 2024, BIG successfully operated 290 tide gauge stations across Indonesia, including 32 newly constructed stations that became operational in 2024 under the established target. These tide gauge stations were developed across several islands, including Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Java, Bali, and Papua.

Most of the equipment at the tide gauge stations is funded through the State Budget, with additional support provided through international cooperation, including the University of Hawaii Sea Level Center (UHSLC) in the United States and the GeoForschungsZentrum (GFZ) in Germany. These institutions contribute significantly to developing the tsunami early warning system and coastal mapping initiatives.

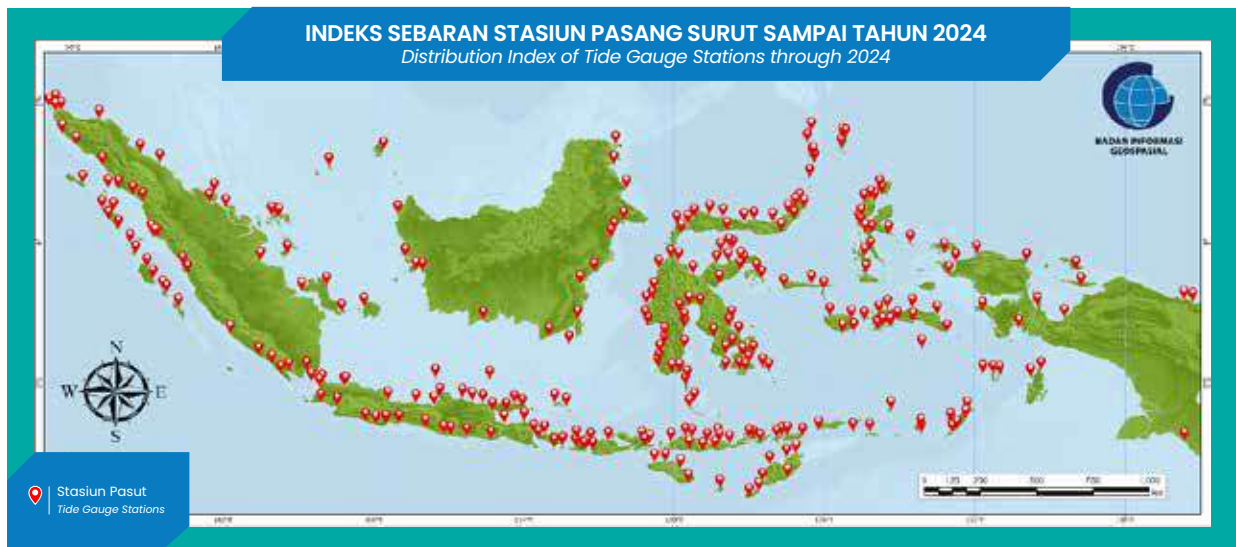
All stations are managed through four key activities key activities, namely monitoring tidal data availability, conducting tide gauge station maintenance, performing data validation, and providing tidal data services. Throughout 2024, several challenges were encountered. Carik Station in West Nusa Tenggara sustained damage from a storm in January 2024, while Breueh Station in Aceh experienced communication disruptions that prevented data transmission to BIG's central server. In addition, Sapodi Station (East Java) and

Meskipun demikian, data pasut di Kaledupa masih dapat direkam dengan perangkat portabel.

Pada tahun 2024, BIG juga melakukan pemeliharaan 110 stasiun pasut khusus untuk mendukung datum pasang surut dan mitigasi bencana tsunami Ina-TEWS.

Kaledupa Station (Southeast Sulawesi) were also dismantled in March 2024. However, tidal data in Kaledupa continues to be recorded using portable equipment.

In 2024, BIG also maintained 110 specialized tide gauge stations to support the establishment of tidal datums and enhance tsunami disaster mitigation efforts as part of the InaTEWS.



Sebaran Stasiun Pasut di Indonesia
Distribution of Tide Gauge Stations in Indonesia

Pemutakhiran Ina-GEOID

Hingga 31 Desember 2024, BIG telah membangun model geoid nasional untuk seluruh wilayah Indonesia dengan ketelitian bervariasi, yaitu ketelitian 21-29 cm untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan, ketelitian 11-20 cm untuk wilayah Jawa dan ketelitian 5-10 cm untuk wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Ina-GEOID Update

As of December 31, 2024, BIG developed a national geoid model covering the entire territory of Indonesia. The model demonstrates varying levels of accuracy range from 21–29 cm in Sulawesi and Kalimantan, 11–20 cm in Java, and 5–10 cm in West and East Kalimantan.

Pertumbuhan Pemanfaatan SRGI dalam Pembangunan Nasional

Selain dari sisi infrastruktur, pertumbuhan penggunaan SRGI oleh berbagai pemangku kepentingan juga menunjukkan tren yang positif. Kinerja jaringan Ina-CORS pada 2024 mencatat ketersediaan data real-time (SLA) rata-rata sebesar 96,02%, melampaui target minimal sebesar 95%.

Growth of SRGI Utilization in National Development

Beyond infrastructure development, the utilization of SRGI by various stakeholders has continued to show a positive trend. In 2024, the Ina-CORS network recorded an average real-time data availability (SLA) of 96.02%, surpassing the minimum target of 95%.

Data dan layanan SRGI digunakan secara luas untuk keperluan koreksi posisi real-time untuk survei dan pemetaan GNSS,

SRGI data and services are widely utilized for real-time position correction in GNSS-based surveying and mapping, geodetic

pemodelan deformasi geodetik, pemantauan geodinamika dan mitigasi bencana, serta integrasi dengan sistem tata ruang, pertanahan, dan infrastruktur digital lainnya.

Penyediaan Peta Dasar

Selama tahun 2024, BIG terus mendorong peningkatan ketersediaan peta dasar yang berkualitas dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Upaya ini mencakup penyediaan dan pemutakhiran Informasi Geospasial unsur batas wilayah, baik di darat maupun laut, melalui kegiatan perundingan teknis dan pemasangan pilar batas negara. Di wilayah pesisir dan laut, BIG menyediakan data dan IGD seperti garis pantai dan batimetri, guna mendukung pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan. Sementara itu, di wilayah darat, BIG melaksanakan pemetaan skala besar dan menengah untuk penyusunan peta dasar yang akurat dan terkini. Keseluruhan kegiatan ini bertujuan menjamin ketersediaan data geospasial yang andal sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan nasional.

Penyediaan Informasi Geospasial Unsur Peta Dasar Batas Wilayah

BIG melalui Direktorat Pemetaan Batas Wilayah melaksanakan kegiatan penyediaan Informasi Geospasial unsur batas wilayah sebagai bagian dari peta dasar nasional. Kegiatan ini mencakup perundingan batas darat antar negara, serta pemasangan pilar batas sebagai penegasan batas wilayah secara fisik. Proses dilakukan melalui kerja sama teknis bilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga, seperti Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia. Hasil dari kegiatan ini menjadi dasar penting dalam pemetaan wilayah kedaulatan Indonesia dan mendukung kepastian hukum batas administrasi serta pengelolaan wilayah perbatasan.

1. Penetapan Batas Wilayah Darat Republik Indonesia - Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL)

BIG melaksanakan sejumlah kegiatan teknis dalam rangka mendukung proses penyelesaian batas negara darat RI-RDTL. Batas ini terbagi dalam dua sektor: Sektor Timur (Kabupaten Belu-Distrik Covalima) dan Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara-Distrik Oecussi), dengan total panjang batas ±283,7 km. Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan

deformation modeling, geodynamic monitoring, and disaster mitigation. They also support integration with spatial information systems, land use planning, and other digital infrastructure initiatives.

Provision of Base Maps

Throughout 2024, BIG continued to promote the availability of high-quality, ready-to-use base maps to support national development. This included providing and updating geospatial information related to boundary features, both terrestrial and maritime, through technical negotiations and the installation of national boundary markers. In coastal and marine areas, BIG provided base geospatial data, such as coastline delineation and bathymetry to support the sustainable management of marine spaces. Meanwhile, on land, BIG held large- and medium-scale mapping to produce accurate and up-to-date base maps. These efforts aim to ensure the availability of reliable geospatial data, which is a foundation for effective national planning and policymaking.

Provision of Geospatial Information on Base Map Elements of Regional Boundaries

Through the Directorate of Boundary Mapping, BIG conducts activities to provide geospatial information on regional boundary elements as part of the national base map. These activities include negotiations concerning land boundaries between countries and the installation of boundary pillars to physically mark the borders. This process is carried out through bilateral technical cooperation between Indonesia and its neighboring countries, including Timor Leste, Papua New Guinea, and Malaysia. The outcomes serve as a critical foundation for mapping Indonesia's sovereign territory, supporting the legal certainty of administrative boundaries, and effectively managing border areas.

1. Determination of Land Boundaries between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste (RI-RDTL)

BIG has undertaken a series of technical activities to support the resolution of land boundaries between Indonesia and Timor Leste. The border is divided into two sectors, namely the East Sector (Belu Regency-Covalima District) and the West Sector (Kupang Regency and North Central Timor-Oecussi District), spanning approximately

lima forum strategis yang mendukung proses delimitasi dan demarkasi batas, antara lain:

- Special Meeting of TSC-BDR (Bogor): Penyelesaian segmen Noel Besi/Citrana dan Haumeniana/Passabe serta penyusunan peta lampiran.
- Senior Officials Consultation (Jakarta): Penandatanganan MOU dan *addendum* Provisional Agreement (PA).
- Joint Field Survey (NTT): Pengumpulan data pendukung posisi batas sebagai dasar argumen teknis dalam perundingan.
- Joint GNSS Processing (Bali): Pengolahan dan verifikasi data koordinat pilar batas hasil survei bersama.
- GNSS Calibration Meeting (Bandung): Kalibrasi perangkat GNSS untuk persiapan Joint Field Survey 2025.

Keseluruhan rangkaian tersebut menghasilkan satu Kesepakatan Teknis. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari hasil forum TSC-BDR ke-29 (Bali, 2022), telah dilakukan pemasangan 32 pilar batas negara pada wilayah perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. Kegiatan pemasangan dilaksanakan secara bilateral dengan proporsi pekerjaan dan pendanaan yang ditanggung masing-masing negara. Penempatan pilar dilakukan berdasarkan titik koordinat hasil Joint Field Survey yang telah disepakati bersama.

Dengan capaian satu Kesepakatan Teknis dan selesainya pemasangan 32 pilar batas, proses penetapan batas RI-RDTL sektor barat telah memasuki tahap lanjutan menuju penandatanganan final MOU untuk segmen Noel Besi/Citrana dan Haumeniana/Passabe. Forum TSC-BDR ke-30 yang semula direncanakan di Timor Leste mengalami penundaan oleh pihak RDTL, namun tidak menghambat progres substansial yang telah dicapai dalam forum sebelumnya.

283.7 km. Throughout 2024, five strategic forums were held to advance the delimitation and demarcation process, including:

- Special Meeting of TSC-BDR (Bogor): Finalization of the Noel Besi/Citrana and Haumeniana/Passabe segments, including the preparation of corresponding annex maps,
- Senior Officials Consultation (Jakarta): Signing of the Memorandum of Understanding (MoU) and an addendum to the Provisional Agreement (PA),
- Joint Field Survey (NTT): Collection of supporting data to determine boundary positions, serving as the technical basis for ongoing negotiations.
- Joint GNSS Processing (Bali): Processing and verification of boundary pillar coordinate data obtained from the joint survey.
- GNSS Calibration Meeting (Bandung): Calibration of GNSS equipment in preparation for the 2025 Joint Field Survey.

The entire series of activities culminated in the signing of a Technical Agreement. In addition, as a follow-up to the outcomes of the 29th TSC-BDR Forum held in Bali in 2022, 32 state boundary pillars were installed in the border area of North Central Timor Regency, East Nusa Tenggara. The installation was conducted bilaterally, with each country sharing responsibilities for implementation and funding. The placement of the pillars was based on coordinate points established through the mutually agreed results of the Joint Field Survey.

With the successful conclusion of a Technical Agreement and the installation of 32 boundary pillars, the process of finalizing the Indonesia-Timor-Leste (RI-RDTL) western sector boundary has progressed to an advanced stage. The signing of a final MoU concerning the Noel Besi/Citrana and Haumeniana/Passabe segments is approaching. Although the 30th TSC-BDR Forum, originally scheduled to take place in Timor-Leste, was postponed at the request RDTL, however, this did not impede the substantial progress achieved during the previous forum.

Penyelesaian batas RI–RDTL merupakan hasil diplomasi teknis jangka panjang yang melibatkan pemetaan historis berdasarkan Traktat 1904 dan PCA 1914, diselaraskan dengan kondisi aktual masyarakat perbatasan. BIG, sebagai sekretariat teknis TSC–BDR, terus memfasilitasi proses demarkasi melalui koordinasi teknis lintas K/L dan mitra luar negeri, guna memastikan kejelasan batas yurisdiksi nasional secara sah dan terukur.

2. Penetapan Batas Wilayah Darat Republik Indonesia – Papua Nugini

Penetapan batas negara darat antara Republik Indonesia dan Papua Nugini mengacu pada perjanjian Indonesia–Australia yang ditandatangani pada 12 Februari 1973, serta deklarasi bersama RI–PNG tahun 1989–1994. Garis batas tersebut sebagian besar merupakan batas buatan (artificial boundary) dan sebagian mengikuti batas alami Sungai Fly (thalweg).

Proses demarkasi batas RI–PNG telah berlangsung sejak 1966, ditandai dengan pemasangan pilar batas utama yang disebut Meridian Monument (MM). Hingga 2021, telah terpasang 187 pilar di sepanjang batas. Pada 2024, BIG melaksanakan pemasangan 40 pilar tambahan (densifikasi) di antara segmen MM 11.1 hingga MM 11.3. Kegiatan ini bertujuan mengurangi jarak antar pilar utama yang sebelumnya sekitar 20–30 km, agar batas negara lebih mudah dikenali dan diawasi, serta memperkuat pemahaman masyarakat sekitar terhadap lokasi batas resmi. Seluruh pilar yang dipasang telah terverifikasi dan terdokumentasi sesuai posisi di lapangan, dan akan digunakan sebagai bahan pendukung dalam forum perundingan bilateral.

Sebagai bagian dari Rencana Operasional Kesepakatan Teknis sepanjang 2024 dilaksanakan empat forum utama dalam proses perundingan teknis RI–PNG, yaitu:

1. JIMWG (Jakarta): Penyampaian hasil survei densifikasi dan penyusunan draft MOU.
2. Joint Data Exchange (Jayapura): Pertukaran data hasil pengukuran pilar batas.

The settlement of the RI–RDTL boundary results from long-term technical diplomacy, grounded in historical cartographic references under the 1904 Treaty and the 1914 PCA, while considering the actual conditions of border communities. As the technical secretariat of the TSC–BDR, BIG continues to facilitate the demarcation process through coordinated technical efforts involving relevant ministries, agencies, and international partners. These efforts aim to ensure legal and measurable clarity for national jurisdictional boundaries.

2. Determination of Land Boundaries between the Republic of Indonesia and Papua New Guinea

The delineation of land boundaries between the Republic of Indonesia and Papua New Guinea is based on the Indonesia–Australia agreement signed on February 12, 1973 and the RI–PNG Joint Declaration spanning the period of 1989 to 1994. The boundary line primarily consists of artificial demarcations, with specific segments following natural features, notably the thalweg of the Fly River.

The demarcation of the RI–PNG land boundary has been ongoing since 1966, beginning with the installation of primary boundary markers known as Meridian Monuments (MM). As of 2021, 187 pillars were installed along the border. In 2024, the BIG installed 40 additional pillars to densify the boundary line, specifically between segments MM 11.1 and MM 11.3. This densification initiative was intended to reduce the distance between primary markers, which previously ranged from 20 to 30 kilometers, in order to enhance the visibility and monitoring of the border while also strengthening community awareness of the official boundary location. All installed pillars have been verified and geospatially documented based on their positions in the field and will serve as reference material in future bilateral negotiation forums.

As part of the Technical Agreement Operational Plan throughout 2024, four (4) key forums were held as part of the RI–PNG technical negotiation process.

1. JIMWG (Jakarta): Presentation of densification survey results and preparation of an MoU draft;
2. Joint Data Exchange (Jayapura): Boundary pillar measurement data exchange between both parties;

3. JTSC-SDM (Jakarta): Pelaporan dan pembahasan hasil densifikasi, serta isu teknis perbatasan.
4. Joint Border Committee (Jakarta): Pengesahan hasil perundingan, khususnya terkait pemetaan dan demarkasi.

Rangkaian forum ini menghasilkan satu dokumen Kesepakatan Teknis sebagai capaian tahun 2024, khususnya untuk segmen di selatan Sungai Fly. Capaian tersebut menandai kemajuan signifikan dalam penyelesaian densifikasi batas RI-PNG. Saat ini proses telah mencapai tahapan penyiapan peta lampiran untuk MOU, dan pemerintah Indonesia berkomitmen melanjutkan tahapan-tahapan perundingan hingga penandatanganan MOU dapat disahkan pada forum JBC selanjutnya.

3. Penetapan Batas Wilayah Darat Republik Indonesia – Malaysia

Penyelesaian batas darat Indonesia-Malaysia dilaksanakan melalui berbagai forum bilateral, termasuk Joint Border Committee (JBC), Joint Commission Meeting (JCM), serta Joint Indonesia-Malaysia Boundaries Committee on the Demarcation and Survey (JIM) yang membawahi beberapa sub komite teknis. Dalam struktur ini, BIG berperan aktif sebagai ketua Joint Working Group (JWG) untuk proyek Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) dan Joint Border Mapping (JBM).

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan serangkaian perundingan di Indonesia dan Malaysia yang mencakup: pembahasan MoU OBP Sungai Sinapad dan Pulau Sebatik, pertukaran dan pengolahan data GNSS, serta penyusunan SOP teknis. Hasilnya, dua kesepakatan teknis dicapai, yaitu untuk penyelesaian OBP segmen Sinapad-Sebatik dan pembangunan pilar segmen New West Pilar (NWP)–AA2.

3. JTSC-SDM (Jakarta): Reporting and discussion of densification outcomes and other technical issues related to the land boundary;
4. Joint Border Committee (Jakarta): Ratification of negotiation outcomes, particularly concerning boundary mapping and demarcation

This series of forums resulted in a Technical Agreement document as an achievement in 2024, especially for the segment south of the Fly River. This achievement marks significant progress in completing the densification of the RI-PNG boundary. Currently, the process has reached the stage of preparing an attachment map for the MOU. The Indonesian government is committed to continuing the negotiation stages until the signing of the MOU is ratified at the next JBC forum.

3. Determination of Land Boundaries Between the Republic of Indonesia and Malaysia

The resolution of land boundary issues between Indonesia and Malaysia is pursued through various bilateral forums, including the Joint Border Committee (JBC), the Joint Commission Meeting (JCM), and the Joint Indonesia-Malaysia Boundaries Committee on Demarcation and Survey (JIM), which is supported by several technical sub-committees. Within this framework, BIG plays an active role as chair of the Joint Working Group (JWG) for the Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) and the Joint Border Mapping (JBM) initiatives.

Throughout 2024, a series of negotiations were held in both Indonesia and Malaysia, covering key agenda items such as the draft MoU concerning OBP in the Sinapad River and Sebatik Island areas, the exchange and processing of GNSS data, and the development of technical SOPs. As a result of these efforts, two technical agreements were successfully concluded. They were concerning the resolution of the OBP in Sinapad-Sebatik and the construction of a boundary pillar for the New West Pilar (NWP)–AA2 segment.

Sebagai bentuk dukungan teknis, BIG membangun 10 pilar batas, terdiri dari 5 *Auxiliary Reference Marker* (ARM) dan 5 *Boundary Reference Marker* (BRM). Posisi pilar ditentukan melalui *desktop study* berbasis hasil pengolahan data GNSS yang telah disepakati kedua negara. Hasil teknis ini menjadi dasar penting dalam tahapan selanjutnya menuju penandatanganan MOU dan pemasangan pilar batas permanen oleh otoritas masing-masing negara.

BIG melalui Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi berperan sebagai Ketua *Technical Working Group* (TWG) dalam forum perundingan teknis batas maritim antara Indonesia dan negara-negara tetangga. Forum ini berada di bawah koordinasi *Technical Meeting* (TM) bilateral, dan bertujuan untuk melakukan delimitasi batas maritim guna menjamin kepastian yurisdiksi, mendukung penegakan hukum, serta pemanfaatan sumber daya kelautan secara efektif.

Selama tahun 2024, BIG terlibat aktif dalam empat pertemuan teknis batas maritim yang melibatkan dua negara, yaitu Malaysia dan Vietnam.

INDONESIA–MALAYSIA:

- Pertemuan Teknis ke-42 (Penang, 6–7 Mei 2024): Membahas prinsip delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi, termasuk Laut Teritorial, Zona Tambahan, dan Landas Kontinen.
- Pertemuan Khusus ke-4 (Penang, 8–9 Mei 2024): Menyasar finalisasi segmen intertidal antara East Pillar Pulau Sebatik dan Titik M. Karena belum ada kesepakatan, kedua pihak sepakat membentuk tim kecil untuk pembahasan informal lanjutan.

INDONESIA–VIETNAM:

- Pertemuan Teknis ke-3 (Ha Noi, 22–26 April 2024): Mencapai titik temu terkait pengaturan aktivitas perikanan dan manajemen landas kontinen.
- Pertemuan Teknis ke-3 (Bali, 11–15 November 2024): Memfokuskan pembahasan pada isu-isu lintas sektor yang relevan dalam *Implementing Arrangement*.

As part of its technical support, BIG constructed 10 boundary pillars, comprising 5 Auxiliary Reference Markers (ARMs) and 5 Boundary Reference Markers (BRMs). The locations of these pillars were determined through a desktop study based on GNSS data processing results that had been jointly agreed upon by both countries. These technical outcomes serve as a critical foundation for the subsequent phase, which includes signing the MoU and installing permanent boundary pillars by the respective national authorities.

Through the Directorate of Boundary Mapping and Geographical Names, BIG chairs the Technical Working Group (TWG) in the maritime boundary technical negotiation forum between Indonesia and neighboring countries. This forum operates under the coordination of the bilateral Technical Meeting (TM) and aims to delimit maritime boundaries in order to ensure jurisdictional clarity, support law enforcement, and enable the effective management and utilization of marine resources.

In 2024, BIG actively participated in four maritime boundary technical meetings involving two neighboring countries, namely Malaysia and Vietnam.

INDONESIA–MALAYSIA:

- The 42nd Technical Meeting (Penang, May 6–7, 2024): Addressed the principles of maritime boundary delimitation in the Sulawesi Sea, covering the Territorial Sea, Contiguous Zone, and Continental Shelf.
- The Fourth Special Meeting (Penang, May 8–9, 2024): Focused on finalizing the intertidal segment between the East Pillar of Sebatik Island and Point M. As no agreement was reached, both parties agreed to establish a small team to continue informal discussions.

INDONESIA–VIETNAM:

- The Third Technical Meeting (Ha Noi, April 22–26, 2024): Reached a common understanding of the regulation of fisheries activities and the management of the continental shelf.
- The Third Technical Meeting (Bali, November 11–15, 2024): Focused on cross-sectoral issues related to the *Implementing Arrangement*.



Fotografer | Photographer:

Rahmad Hidayat

Judul | Title:

Penelitian untuk mengetahui
Dinamika Kadar Air Tanah pada Musim Kemarau
di Berbagai Kemiringan Lahan

Peran BIG dalam mendukung perundingan teknis tersebut meliputi penyediaan data dan Informasi Geospasial maritim yang akurat serta penyusunan dokumen teknis batas maritim berdasarkan hasil survei dan analisis spasial. Hal ini menunjukkan kontribusi BIG dalam proses delimitasi batas maritim nasional yang strategis.

Selain kegiatan tersebut di atas, BIG menjadi tuan rumah Joint Meetings of the 15th MSDIWG (Marine Spatial Data Infrastructure Working Group) sebagai bagian dari mandat UN-GGIM (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management). Pertemuan ini menegaskan posisi BIG sebagai pemimpin regional dalam penyelenggaraan data geospasial kelautan.

BIG melalui DPRWLP juga berperan aktif dalam Sub-Committee On Undersea Feature Names (SCUFN) ke-37 yang diselenggarakan di Korea Selatan. Dari total 34 fitur bawah laut yang disubmisi Indonesia, 13 diantaranya berasal dari BIG. Fitur-fitur ini berpotensi masuk dalam GEBCO Gazetteer, sebagai basis resmi penamaan unsur bawah laut global yang digunakan dalam peta laut dunia.

BIG supports technical negotiations by providing accurate maritime geospatial data and information and preparing technical documents on maritime boundaries derived from survey results and spatial analysis. This indicates BIG's contribution to the strategic national process of maritime boundary delimitation.

In addition to the activities mentioned above, BIG hosted the Joint Meetings of the 15th Marine Spatial Data Infrastructure Working Group (MSDIWG) as part of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) mandate. This event reaffirmed BIG's role as a regional leader in managing and coordinating marine geospatial data.

BIG, through the Directorate of Topographic Mapping for Marine and Coastal Areas, also played an active role in the 37th Session of the Sub-Committee on Undersea Feature Names (SCUFN) held in South Korea. Of the 34 undersea features proposed by Indonesia, 13 were submitted by BIG. These features have the potential to be included in the GEBCO Gazetteer, the official global reference for naming underwater features used in international nautical charts.

Penyediaan Data Geospasial Dasar Wilayah Laut dan Pantai

Survei Batimetri Taman Nasional Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah

BIG melakukan survei batimetri di perairan Taman Nasional Kepulauan Togean seluas ± 1.000 km² untuk menghasilkan data kedalaman laut yang akurat. Survei ini bertujuan mendukung penyediaan data geospasial kelautan sebagai dasar perencanaan konservasi, pengelolaan sumber daya pesisir, dan mitigasi risiko bencana.

Provision of Base Geospatial Data for Marine and Coastal Areas

Bathymetric Survey of the Togean Islands National Park, Central Sulawesi

BIG conducted a bathymetric survey in the waters of the Togean Islands National Park, covering an area of approximately 1,000 km², to generate accurate sea depth data. The survey supports the provision of marine geospatial information as a foundation for conservation planning, coastal resource management, and disaster risk mitigation.

PETA RENCANA SURVEI BATIMETRI TAMAN NASIONAL TOGEAN

PLAN MAP Bathymetric Survey Togean Islands National Park



DIREKTORAT PEMETAAN RUPA
BUMI WILAYAH LAUT DAN PANTAI

Directorate of
Marine and Coastal
Topographic Mapping

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Geospatial Information
Agency (BIG)

Area Survei di Taman Nasional Kepulauan Togean

Kegiatan survei dilakukan selama 104 hari, dimulai dari 6 Mei hingga 17 Agustus 2024 dengan metode pemeruman Multibeam Echosounder (MBES) dan Single Beam Echosounder (SBES). Metode MBES ditujukan untuk mendapatkan profil kedalaman dengan resolusi spasial yang lebih detail terutama di wilayah perairan sekitar Pulau. Sedangkan SBES dilakukan untuk pengukuran yang lebih cepat dan efisien, menggunakan peralatan SBES yang baru dimiliki BIG pada tahun 2024. Berikut ini ialah hasil kegiatan survei batimetri di Taman Nasional Togean.

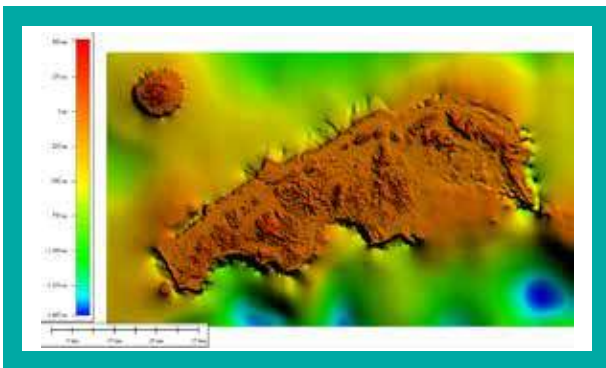
Survey Coverage in the Togean Islands National Park

The survey was conducted over 104 days, from May 6 to August 17, 2024, utilizing both Multibeam Echosounder (MBES) and Single Beam Echosounder (SBES) methods. The MBES method obtained high-resolution depth profiles, particularly in the waters surrounding the islands, providing detailed spatial data. Meanwhile, the SBES method allowed quicker and more efficient measurements, which was made possible by the new SBES equipment acquired by BIG in 2024. The following section presents the results of the bathymetric survey carried out in the Togean National Park.

Tahapan Stage	Volume Capaian Volume Achievement	Keterangan Description
 Pemeruman Hydrographic surveying	1.038,52 km² 1,038.52 km ²	Metode Multibeam Echosounder (MBES) dan Single Beam Echosounder (SBES). Multibeam Echosounder (MBES) and Single Beam Echosounder (SBES) methods
 Pengamatan Pasang Surut Tidal Observation	5 Stasiun 5 Stations	3 Stasiun Pasut Permanen BIG 2 Stasiun Pasut Temporal 3 BIG Permanent Tide Gauge Stations 2 Temporary Tide Gauge Stations
 Pengukuran Titik Kontrol Establishment of Control Points	2 Titik 2 Points	Titik kontrol diukur sebagai referensi untuk pengikatan ke stasiun pasut temporal di Lebiti dan Bomba Control points were measured to serve as reference stations for coordinating with the temporary tide gauge stations at Lebiti and Bomba.
 Pengukuran Sipat Datar Geodetic Leveling Measurement	2 Titik 2 Points	Levelling dari titik BM ke nol palem pasut temporer yang ada di Lebiti dan Bomba Leveling from Benchmark points to temporary tidal flats (zero level) at Lebiti and Bomba

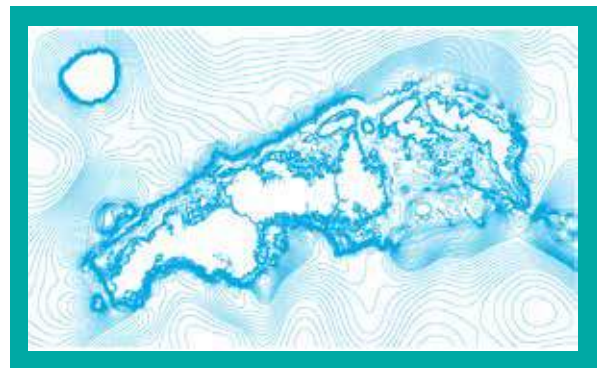
Total cakupan pemeruman telah melampaui target yang ditetapkan, dengan data MBES dan SBES telah memenuhi standar akurasi internasional. Selanjutnya, data darat dari DEMNAS, data *Satellite Derived Bathymetry* (SDB), data MBES, dan data SBES diolah menjadi Model Elevasi Digital (DEM) dan kontur kedalaman laut (hipsografi). Seluruh hasil survei ini telah disebarluaskan secara langsung ke pemerintah daerah terkait di Sulawesi Tengah dan Taman Nasional Kepulauan Togean, sekaligus memperkaya basis data geospasial kelautan nasional. Selain itu hasil dari survei dan pemetaan ini juga dipublikasikan secara digital melalui situs web sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

The total hydrographic surveying coverage surpassed the target, with both MBES and SBES data meeting international accuracy standards. In addition, land data from the National Digital Elevation Model (DEMNAS), *Satellite-Derived Bathymetry* (SDB), MBES, and SBES were integrated to produce a Digital Elevation Model (DEM) and sea depth contours (*hipsography*). The survey results were directly shared with relevant local governments in Central Sulawesi and the Togean Islands National Park while contributing to the national marine geospatial database. Furthermore, the findings have been published digitally on the official website to facilitate wider public utilization.



Hasil Pembentukan DEM Integrasi

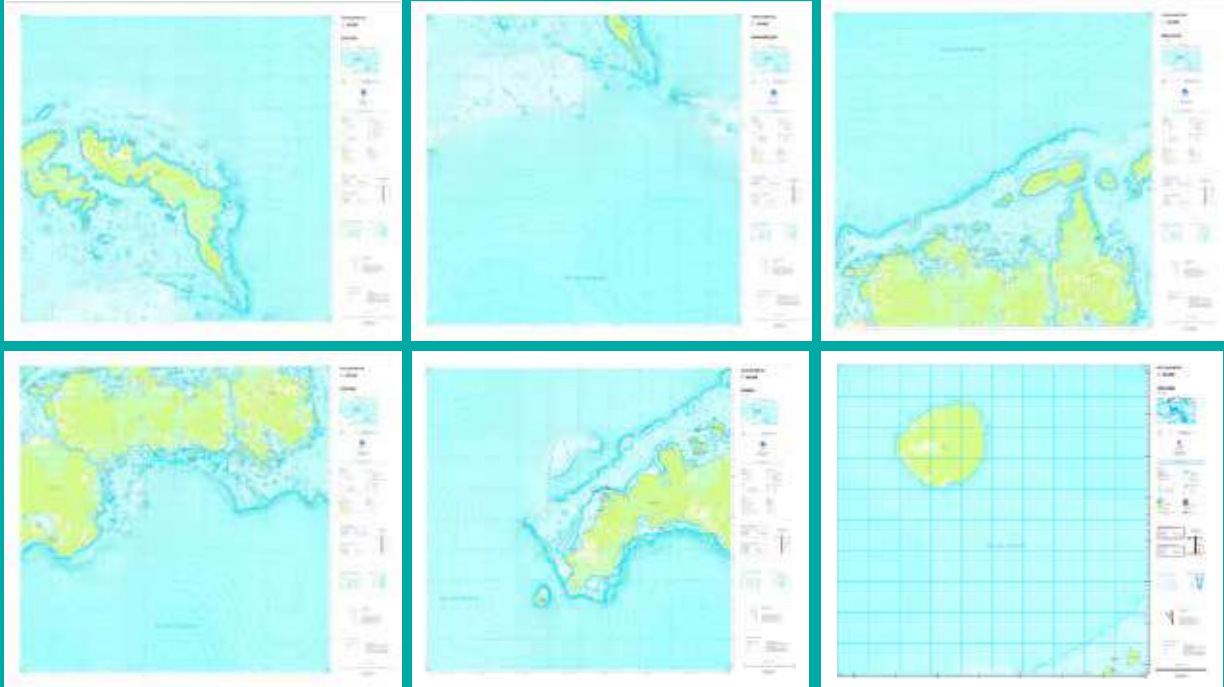
Outcome of the Integrated DEM Generation



Hasil Pembentukan Kontur Kedalaman Laut

Outcome of Ocean Depth Contour Generation

PETA BATIMETRI 6 NLP SKALA 1:50.000
BATHYMETRIC MAP OF 6 NLP, SCALE 1:50,000



Penyediaan Data Garis Pantai Prioritas

Data garis pantai merupakan elemen penting dalam pembuatan berbagai jenis peta, terutama yang berkaitan dengan wilayah pesisir. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, BIG melalui Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai (DPRWLP) melakukan pemetaan garis pantai prioritas di sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi.

Provision of Priority Coastline Data

Coastline data is vital for producing a wide range of maps, particularly those focused on coastal regions. BIG, through the Directorate of Marine and Coastal Topographic Mapping, is actively mapping priority coastlines across several areas in Kalimantan and Sulawesi to meet this demand.



Hasil Ekstraksi Garis Pantai
dengan metode SDB

Coastline Extraction Results
Using the SDB Method

Pemetaan dilakukan dengan teknologi modern seperti Satellite Derived Bathymetry (SDB), SBES, dan Structure from Motion (SfM), yang memanfaatkan wahana tanpa awak seperti Unmanned Surface Vehicle (USV) dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV).

Kegiatan tersebut dijalankan secara swakelola di beberapa lokasi prioritas, meliputi Berau (Kalimantan Timur), Pulau Laut (Kalimantan Selatan), Bombana-Wakatobi, Kolaka-Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara), serta Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, dan Parigi Moutong (Sulawesi Tengah).

The mapping was conducted using advanced technologies, including Satellite-Derived Bathymetry (SDB), SBES, and Structure from Motion (SfM). These methods employ unmanned platforms such as Unmanned Surface Vehicles (USVs) and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs).

The activities were conducted independently across several priority locations, including Berau (East Kalimantan), Laut Island (South Kalimantan), Bombana-Wakatobi and Kolaka-North Kolaka (Southeast Sulawesi), Banggai Laut, Banggai Islands, Tojo Una-Una, and Parigi Moutong (Central Sulawesi).



Penyediaan Data Geospasial Dasar Wilayah Darat

Penyediaan dan Pemutakhiran Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST)

Sebagai bagian dari upaya mempercepat tersedianya data spasial yang akurat dan mutakhir, BIG terus mengembangkan dan memperbaharui Data Geospasial Dasar (DGD) wilayah darat. Salah satu sumber utama dalam kegiatan ini adalah Citra Satelit Tegak

Provision of Base Geospatial Data for Land Areas

Provision and Updating of Very High-Resolution (VHR) Satellite Imagery

BIG continues to develop and update Base Geospatial Data for land areas to ensure the timely availability of accurate and current spatial information. A key component of this effort is using geometrically corrected Very High-Resolution (VHR) Satellite Imagery. This

Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) yang telah dikoreksi secara geometris. Citra ini menjadi fondasi penting dalam pembuatan peta dasar yang presisi dan siap pakai, mendukung berbagai kebutuhan pembangunan nasional.

Dalam hal ini, BIG merupakan pelaksana mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh. BIG bertanggung jawab mengolah citra satelit mentah menjadi citra tegak yang telah dikoreksi secara geometris (orthorektifikasi). Proses ini penting untuk menghilangkan distorsi akibat sudut pengambilan gambar atau variasi tinggi permukaan bumi, sehingga menghasilkan data spasial yang lebih akurat. Untuk mendukung proses koreksi tersebut, diperlukan Titik Kontrol Tanah (*Ground Control Point/GCP*) dan Titik Uji Independen (*Independent Check Point/ICP*) sebagai acuan validasi akurasi hasil koreksi.

Pada tahun 2024, kegiatan penyediaan CSTRST dilakukan di wilayah yang belum tersedia DGD-nya, yakni di Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan total cakupan 49.273 km².

Sementara itu, pemutakhiran CSTRST dilakukan di wilayah yang telah memiliki DGD selama lebih dari 5 tahun tanpa pembaruan, mencakup Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Bali dengan total cakupan 69.070 km². Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung penyediaan data spasial berkualitas tinggi untuk perencanaan dan pembangunan nasional berbasis geospasial.

Verifikasi Data Geospasial Dasar

Selain dilakukan secara swakelola, penyediaan dan pemutakhiran CSTRST oleh BIG juga dilakukan melalui kegiatan verifikasi Data Geospasial (DG) Dasar. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh penyelenggara IGT selain BIG, telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan untuk Data Geospasial Dasar (DGD) dan IGD.

imagery is vital in producing precise, ready-to-use base maps that support a wide range of national development priorities.

By Government Regulation Number 11 of 2018 on the Implementation of Remote Sensing Activities, BIG is mandated to process satellite imagery. As part of this mandate, BIG processes raw satellite data into geometrically corrected vertical imagery through orthorectification. This correction is crucial for eliminating distortions caused by sensor angles or variations in terrain elevation, thereby producing more accurate spatial data. To support this process, Ground Control Points (GCPs) and Independent Check Points (ICPs) are utilized as reference points to validate the accuracy of the results.

In 2024, VHR Satellite Imagery was undertaken in regions where Base Geospatial Data had not been available, specifically in Southwest Papua, Central Papua, and South Kalimantan, covering a total area of 49,273 km².

Meanwhile, updates to VHR Satellite Imagery were conducted in areas where Base Geospatial Data had not been updated for more than five years. These areas include East Nusa Tenggara, the Special Region of Yogyakarta, West Nusa Tenggara, Bangka Belitung, and Bali, with a total coverage of 69,070 km². This activity is a key component in ensuring the availability of high-quality spatial data to support geospatial-based national planning and development.

Base Geospatial Data Verification

In addition to its independent efforts, BIG provides and updates VHR Satellite Imagery through base geospatial data verification. This verification is intended to ensure that data produced by thematic geospatial information providers outside of BIG complies with the technical specifications established for both base geospatial data and base geospatial information.

Melalui proses validasi ini, BIG mengecek kesesuaian data yang diserahkan oleh pihak penyelenggara IGT, yang sebelumnya menggunakan data tersebut untuk keperluan internal mereka. Pelibatan pihak lain ini merupakan bagian dari upaya percepatan ketersediaan data geospasial dasar yang mutakhir guna mendukung pembangunan nasional.

Hasil verifikasi selama tahun 2024 menunjukkan bahwa penyediaan CSTRST dari verifikasi DG Dasar mencapai 1.929 km² dan pemutakhiran CSTRST yang diverifikasi mencapai 17.383 km².

Langkah ini memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mempercepat pembaruan data spasial nasional yang berkualitas.

Penyediaan IGD Wilayah Darat

Penyediaan IGD Wilayah Darat salah satunya melakukan verifikasi unsur peta dasar skala besar (1:5.000) dilakukan untuk memastikan bahwa data unsur rupa bumi yang disusun oleh penyelenggara IGT sudah sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan untuk IGD. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penyediaan IGD yang mutakhir dan dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Jika IGD belum tersedia, penyelenggara IGT dapat menggunakan data IGD yang pernah mereka susun untuk keperluan internal, atau bekerja sama dengan BIG untuk menyusun IGD sesuai spesifikasi teknis yang berlaku.

Sebelum digunakan secara resmi, data IGD dari penyelenggara IGT harus melalui proses penelaahan dan mendapat persetujuan dari BIG. Selama proses penyusunan IGD, BIG memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan supervisi.

Setelah IGD selesai dibuat, penyelenggara IGT wajib menyerahkan salinan data kepada BIG. Data tersebut akan diverifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan

Through this validation process, BIG assesses the conformity of data submitted by TGI providers, which was previously used for internal purposes. The involvement of external parties is part of a broader effort to accelerate the availability of up-to-date base geospatial data in support of national development.

The 2024 verification indicated that the provision of VHR Satellite Imagery through base geospatial data verification covered an area of 1,929 km², while the verified updates of VHR Satellite Imagery reached 17,383 km².

This effort reinforced stakeholder collaboration in accelerating the update of high-quality national spatial data.

Provision of BGI for Land Areas

The provision of BGI for land areas includes the verification of large-scale base map elements (1:5,000), aimed at ensuring that the topographic data compiled by TGI providers complies with the technical standards established for BGI. This activity is part of ongoing efforts to accelerate the availability of updated BGI to support national development.

In cases where BGI is not yet available, TGI providers may utilize BGI data they have compiled for internal use or collaborate with BIG to develop BGI following the applicable technical specifications.

Before being officially adopted, BGI data from TGI providers must undergo a review process and receive BIG's approval. Throughout the BGI preparation process, BIG provides technical guidance and supervision.

Upon completing the BGI, TGI providers must submit a copy of the data to BIG. The data will then be verified to ensure compliance with applicable technical specifications

spesifikasi teknis yang berlaku, sebelum digunakan lebih lanjut dalam sistem Informasi Geospasial nasional.

Selain itu juga dilakukan pemutakhiran unsur rupa bumi skala menengah merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PPKSP). Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan pembaruan data penutup lahan pada skala 1:50.000 setiap tahun sebagai bagian dari upaya menghadirkan data yang akurat dan mutakhir, sebagaimana prinsip dalam kebijakan Satu Data Indonesia.

Karena unsur penutup lahan merupakan bagian dominan dari peta dasar, maka pemutakhiran ini mencakup hampir seluruh unsur peta dasar lainnya. Dengan demikian, kegiatan ini pada dasarnya merupakan pemutakhiran menyeluruh terhadap peta dasar skala menengah.

Pada tahun 2024, pemutakhiran dilakukan oleh Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat secara swakelola, mencakup Pulau Jawa seluas 132.591 km² (skala 1:25.000), serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara seluas 71.735 km² (skala 1:25.000).

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menyediakan Informasi Geospasial terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional yang berbasis data spasial yang terpercaya.

Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi Darat dan Laut

Sepanjang tahun 2024, BIG melalui Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi telah melaksanakan sejumlah kegiatan strategis dalam rangka penyelenggaraan nama rupabumi, sebagai mandat dari PP Nomor 2 Tahun 2021. Fokus kegiatan mencakup pembakuan nama rupabumi, koordinasi lintas sektor, serta publikasi Gazeter Republik Indonesia (GRI).

Dalam mendukung pembakuan nama unsur rupabumi, BIG melaksanakan koordinasi aktif dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya

before being utilized in the national geospatial information system.

In addition, updating medium-scale topographic features is undertaken to implement Presidential Regulation No. 23 of 2021 on the Acceleration of the One Map Policy (OMP). This regulation mandates the annual updating of 1:50,000-scale land cover data to ensure the availability of accurate and up-to-date information, which aligns with the principles of the One Data Indonesia policy.

Since land cover features constitute a significant portion of a base map, their update effectively encompasses most other base map elements. As a result, this activity represents a comprehensive update of the medium-scale base map.

In 2024, the Directorate of Land Topographic Mapping independently updated Java Island, which has an area of 132,591 km², as well as Bali and the Nusa Tenggara Islands, which have a combined area of 71,735 km², both at a scale of 1:25,000.

This activity is vital in providing up-to-date geospatial information to support national development planning based on accurate and reliable spatial data.

Land and Undersea Feature Naming

Throughout 2024, BIG, through the Directorate of Boundary Mapping and Geographic Names, took a series of strategic activities to name topographic features, as mandated by Government Regulation No. 2 of 2021. These activities focused on standardizing feature names, cross-sectoral coordination, and publishing the Gazetteer of the Republic of Indonesia (GRI).

To support the standardization of topographic feature names, BIG actively coordinates with ministries and agencies, local governments, and other stakeholders through technical guidance,

melalui bimbingan teknis, konsultasi, serta forum diskusi tematik. Dua FGD diselenggarakan untuk menyusun standar dan prosedur penamaan dalam sektor pariwisata dan infrastruktur, guna meningkatkan konsistensi dan relevansi penamaan di kedua bidang tersebut.

Puncak dari kegiatan pembakuan nama rupabumi ditandai dengan penetapan Nama Rupabumi Baku (NRB) melalui Keputusan Kepala BIG, yang kemudian dihimpun dalam GRI Edisi 2024.

Tahun 2024, GRI diterbitkan dalam dua versi, yakni versi umum dan versi khusus pulau, yang mencakup data NRB dari tahun 2021 hingga 2024. Dokumen ini tidak hanya menjadi referensi nasional, tetapi juga dilaporkan pada forum internasional UNGEGN sebagai kontribusi Indonesia dalam pembakuan nama geografis secara global.

Penyediaan Peta Dasar Skala Besar

Sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional, penyediaan peta dasar skala besar merupakan salah satu program strategis yang dijalankan BIG secara berkelanjutan. Tahun 2024 menjadi titik awal dari rencana besar penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk seluruh wilayah Indonesia, yang dirancang berlangsung selama 6 tahun ke depan.

Pada tahun pertama pelaksanaan, BIG memfokuskan kegiatan pemetaan di wilayah darat Pulau Sulawesi dengan total target seluas 186.277 km². Proyek ini merupakan bagian dari rencana Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar, yang akan melayani kebutuhan lintas sektor dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, investasi, layanan publik, serta mitigasi bencana.

Penyediaan peta dasar di Sulawesi pada 2024 dibiayai melalui APBN Rupiah Murni sebesar Rp400 miliar. Untuk wilayah darat lainnya, BIG telah mengusulkan pembiayaan melalui skema Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) bersama Kementerian ATR/BPN dalam proyek *Integrated Land Administration, Spatial Planning, and Provision of Large-Scale Base Map (ILASP)*, dengan nilai usulan sebesar 43,3 miliar JPY (setara ±Rp5 triliun), yang dijadwalkan rampung pada tahun 2029.

Pelaksanaan pemetaan di Sulawesi menerapkan

consultations, and thematic discussion forums. Two FGDs were conducted to develop naming standards and procedures for the tourism and infrastructure sectors, aiming to enhance the consistency and relevance of names within these areas.

The highlight of the feature name standardization in 2024 was the formal adoption of National Standard for Geographical Names through a Head of BIG's decree, which was subsequently incorporated into the 2024 GRI.

In 2024, the GRI was published in two editions, a general version and an island-specific version, both incorporating the National Standard for Geographical Names data from 2021 to 2024. This publication not only serves as a national reference but is also presented at the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) forum as Indonesia's contribution to global standardization of naming.

Provision of Large-Scale Base Maps

As a key foundation for organizing national geospatial information, providing large-scale base maps remains one of BIG's strategic, ongoing programs. The year 2024 marks the launch of an ambitious six-year initiative to develop 1:5,000 scale base maps covering the entire territory of Indonesia, with completion targeted for the next six years.

In the first year of implementation, BIG concentrated its mapping efforts on the land area of Sulawesi Island, targeting a total area of 186,277 km². This initiative forms part of the Large-Scale Base Map Provision Acceleration Plan, which supports cross-sectoral needs in spatial planning, infrastructure development, investment, public service delivery, and disaster mitigation.

The provision of base maps in Sulawesi in 2024 is funded through the Pure Rupiah State Budget, with an allocation of IDR400 billion. For other land areas, BIG has proposed financing under the foreign loan and/or grant scheme in collaboration with the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). This proposal is part of the Integrated Land Administration, Spatial Planning, and Provision of Large-Scale Base Map (ILASP) project, with a total proposed value of JPY43.3 billion (approximately IDR5 trillion), targeted for completion by 2029.

pendekatan berbeda sesuai karakteristik wilayahnya:

- Wilayah urban seluas 760 km² dipetakan dengan kamera udara metrik dan teknologi LiDAR.
- Wilayah rural seluas 94.409 km² dipetakan menggunakan Airborne Synthetic Aperture Radar (SAR) dan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT).
- Wilayah hutan seluas 91.108 km² juga menggunakan kombinasi SAR dan CSRT untuk akuisisi data.

Selain penyediaan peta daratan, capaian penting lainnya pada 2024 adalah penyediaan Peta Garis Pantai Prioritas sebagai bentuk dukungan untuk Prioritas Nasional. Informasi ini krusial untuk tata kelola ruang laut, penentuan batas kewenangan, pengelolaan sumber daya pesisir, dan kebutuhan strategis lainnya, termasuk mitigasi bencana. Kegiatan ini difokuskan di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, yang berada di sepanjang Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Dari target 6.500 km, BIG berhasil memetakan 6.751 km garis pantai, yang mencakup tiga jenis garis pantai teknis:

1. Mean High Water Spring (MHWS) – garis pasang tertinggi,
2. Mean Sea Level (MSL) – garis pasang rata-rata,
3. Lowest Astronomical Tide (LAT) – garis surut terendah.

The implementation of mapping activities in Sulawesi applied different technical approaches tailored to the characteristics of each area.

- Urban areas covering 760 km² were mapped using metric aerial cameras and LiDAR technology.
- Rural areas spanning 94,409 km² were mapped using a combination of Airborne Synthetic Aperture Radar (SAR) and High-Resolution (HR) Satellite Imagery.
- Forest areas totaling 91,108 km² were also mapped using a combination of SAR and HR Satellite Imagery for data acquisition.

In addition to land mapping, a notable achievement in 2024 was the provision of Priority Coastline Maps to support National Priority Programs. This geospatial information is critical in marine spatial governance, delineation of administrative boundaries, coastal resource management, and other strategic functions, including disaster mitigation. The mapping activities focused on the coastal regions of North Kalimantan, East Kalimantan, and South Kalimantan along the Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) II. From a target of 6,500 km, BIG successfully mapped 6,751 km of coastline, encompassing three types of technical coastline classifications.

1. Mean High Water Spring (MHWS) – the highest high tide line,
2. Mean Sea Level (MSL) – the average sea line,
3. Lowest Astronomical Tide (LAT) – the lowest low tide line.

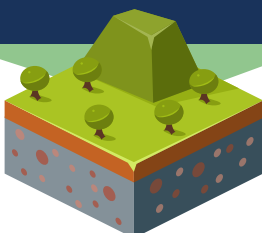
CAPAIAN UTAMA PENYEDIAAN PETA DASAR

Key Achievements of Base Map Provision

01

Peta dasar wilayah darat dengan ketersediaan **41,06%**, diverifikasi pada **223** area (AOI).

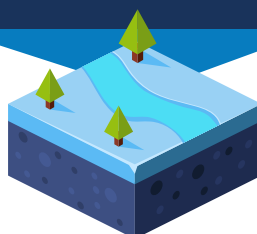
Land area base maps with 41.06% coverage, verified across 223 Areas of Interest (AOIs).



02

Peta dasar wilayah laut dan pantai dengan ketersediaan **38%**, serta verifikasi terhadap **32** AOI garis pantai prioritas.

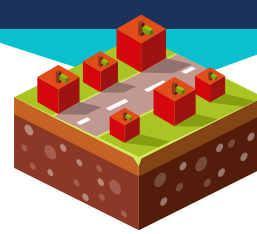
Sea and coastal base maps with 38% coverage, verified for 32 priority coastline AOIs.



03

Peta batas wilayah administratif dan nama rupabumi, yang esensial untuk mendukung **RDTR** dan **OSS**.

Administrative boundary maps and geographic names are essential to support Detailed Spatial Plans and OSS.



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya ketersediaan IGT yang berkualitas sesuai kebutuhan nasional

Upaya meningkatkan ketersediaan IGT dijalankan melalui Pembinaan penyelenggaraan IGT dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Pasal 57 ayat (1) menetapkan bahwa BIG bertugas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan IGT, yang mencakup pemaknaan, pengarahan, perencanaan, dan evaluasi. Sedangkan ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa bentuk pembinaan tersebut meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan.

Pembinaan ini diberikan oleh BIG kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/P) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai penyelenggara IGT. Aspek pembinaan mencakup kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Di lingkungan BIG, pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Direktorat Pemetaan Tematik (DPT). Pembinaan ini ditujukan untuk memastikan bahwa walidata IGT memiliki kapasitas dan standar yang memadai agar data yang dihasilkan dapat dibagi pakaikan lintas sektor. Bentuk kegiatan pembinaan meliputi koordinasi, penyusunan standar/NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) uji coba metodologi, bimbingan teknis, bantuan teknis, serta supervisi.

Pembinaan dilakukan secara menyeluruh, sesuai dengan penyelenggaraan IGT yang mencakup seluruh proses bisnis, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, penyimpanan dan pengamanan, hingga penyebarluasan dan pemanfaatan. Secara keseluruhan, pembinaan IGT merupakan bagian penting dari upaya percepatan pemenuhan kebutuhan IGT guna mendukung pembangunan nasional yang berbasis data dan berkelanjutan.

Selama tahun 2024, BIG melaksanakan pembinaan terhadap tujuh K/L penyelenggara IGT yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),

STRATEGIC TARGET 2

Increasing the availability of quality Thematic Geospatial Information (TGI) following national needs

Efforts to enhance the availability of TGI are carried out through guidance on TGI implementation, in line with the mandate of Law Number 4 of 2011 concerning Geospatial Information. Article 57, paragraph (1) assigns BIG the responsibility for the guidance of TGI implementation, including interpretation, direction, planning, and evaluation. Meanwhile, paragraph (2), letter b, specifies that guidance includes providing supervision, education, and training.

BIG provides this guidance to ministries, institutions, and regional governments by their respective duties and functions as TGI organizers. The scope of guidance covers policies, institutional frameworks, technology, standards, and human resources. Within BIG, this function is administered by the Directorate of Thematic Mapping. The guidance aims to ensure that TGI data custodians have sufficient capacity and adhere to applicable standards, enabling the produced data to be shared effectively across sectors. Guidance activities include coordination, development of norms, standards, procedures, and criteria; methodology trials; technical guidance; technical assistance; and supervision.

The guidance is implemented comprehensively through the execution of TGI, encompassing the entire business process, from data collection and processing to storage, security, dissemination, and utilization. Overall, TGI guidance is critical in accelerating the provision of thematic geospatial information to support data-driven and sustainable national development.

In 2024, BIG provided guidance to seven (7) Ministries/ Institutions responsible for TGI, namely the National Narcotics Agency (BNN), the Ministry of Agriculture, the Ministry of Finance, the Ministry of Trade, the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR), the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Sepanjang tahun 2024, BIG telah membina 13 tema IGT dari target pembinaan sejumlah 12 tema IGT.

(BMKG), the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), and the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). By the end of 2024, BIG provided guidance for 13 TGI themes, exceeding the initial target of 12.

No	Nama IGT TGI Name	K/L Penyelenggara IGT TGI Organizing Ministry/Institution
1	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Ganja Terbina <i>Recommendation for the Implementation of TGI Under Guidance for Cannabis Land</i>	Badan Narkotika Nasional <i>National Narcotics Agency</i>
2	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Peternakan Terbina <i>Recommendation for the Implementation of TGI Under Guidance for Livestock Areas</i>	Kementerian Pertanian <i>Ministry of Agriculture</i>
3	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Objek Pajak Terbina <i>Recommendation for the Implementation of TGI Under Guidance for Tax Objects</i>	Kementerian Keuangan <i>Ministry of Finance</i>
4	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kawasan Berikat dan Kawasan Lainnya di Bawah Pengawasan Pabean Terbina <i>Recommendations for the Implementation of TGI Under Guidance for Bonded Zones and Other Customs-Supervised Areas</i>	Kementerian Keuangan <i>Ministry of Finance</i>
5	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Pertanian Tanaman Pangan Terbina <i>Recommendations for the Implementation of TGI Under Guidance for Food Crop Agricultural Land</i>	Kementerian Pertanian <i>Ministry of Agriculture</i>
6	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Pertanian Hortikultura Terbina <i>Recommendations for the Implementation of TGI Under Guidance for Horticultural Agricultural Land</i>	Kementerian Pertanian <i>Ministry of Agriculture</i>
7	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Sebaran Gudang dan Pusat Distribusi Terbina <i>Recommendation for the Implementation of TGI Under Guidance for the Distribution of Warehouses and Distribution Centers</i>	Kementerian Perdagangan <i>Ministry of Trade</i>
8	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kerentanan Likuifaksi Terbina <i>Recommendations for the Implementation of TGI Under Guidance for Liquefaction Vulnerability</i>	Kementerian ESDM <i>Ministry of Energy and Mineral Resources</i>
9	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kekeringan Terbina <i>Recommendations for the Implementation of TGI Under Guidance for Drought</i>	BMKG <i>the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency</i>
10	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik BUMN Terbina <i>Recommendations for the Implementation of TGI Under Guidance for SOE-Owned Land, Buildings, and Structures</i>	Kementerian BUMN <i>Ministry of SOEs</i>
11	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kawasan Gudang Milik BUMN Terstandar <i>Recommendations for Implementing TGI in Standardized SOE-Owned Warehouse Areas</i>	Kementerian BUMN <i>Ministry of SOEs</i>
12	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Penggunaan Tanah Terbina <i>Recommendations for the Implementation of TGI Under Guidance for Land</i>	Kementerian ATR/BPN <i>Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency</i>
13	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kerentanan Penurunan Muka Tanah Terbina <i>Recommendations for the Implementation of TGI Under Guidance for Land Subsidence Susceptibility</i>	Kementerian ESDM <i>MEMR</i>

Kegiatan pembinaan penyelenggaraan IGT dilakukan secara swakelola dengan melibatkan walidata IGT, pakar dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing penyelenggara IGT.

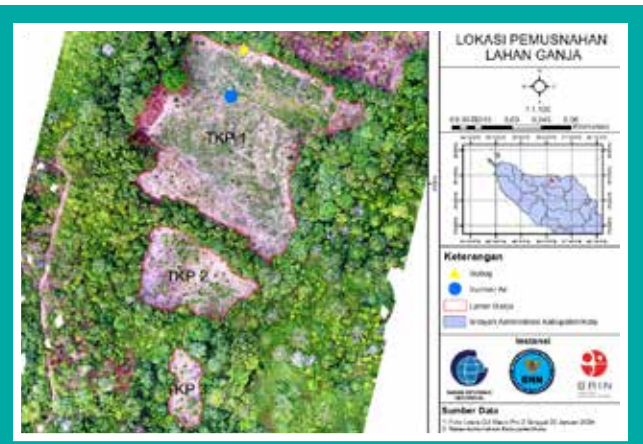
Adapun ruang lingkup dan tahapan pembinaan meliputi: persiapan dan koordinasi, penyusunan standar produk dan petunjuk teknis produksi data, bimbingan teknis, implementasi standar, supervisi pelaksanaan IGT, serta penyusunan dokumen kontrol kualitas oleh K/L. Tahapan lainnya mencakup bimbingan teknis untuk penjaminan kualitas dan berbagi pakai data, penyusunan metadata, hingga finalisasi standar produk IGT. Seluruh tahapan ini dilaksanakan melalui forum teknis, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta lokakarya yang melibatkan walidata atau produsen data, baik secara daring maupun luring.

Bentuk pembinaan terhadap penyelenggara IGT juga dilakukan dalam koridor KSP melalui penyelarasan IGT yang diselenggarakan oleh walidata dengan IGD, pengecekan struktur data dan metadata IGT serta pengecekan dengan dokumen status penetapan IGT. Pada tahun 2024 BIG telah menyelesaikan proses integrasi untuk 15 IGT dari target 15 IGT, sehingga capaian pembinaan IGT sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 148 IGT dari total 158 IGT.

Guidance activities for implementing TGI were conducted independently and involved TGI data custodians, experts from relevant ministries and institutions, universities, and various stakeholders. The implementation was tailored to the specific needs and conditions of each TGI organizer.

The scope and stages of guidance included preparation and coordination; development of product standards and technical instructions for data production; technical guidance; implementation of standards; supervision of TGI implementation; and the preparation of quality control documents by ministries and agencies. Additional stages included technical guidance on quality assurance and data sharing, metadata preparation, and the finalization of TGI product standards. These stages were undertaken through technical forums, focus group discussions (FGDs), and workshops, conducted both online and in person, with the participation of data custodians or data producers.

Guidance for TGI organizers is also conducted within OMP by aligning the TGI managed by data custodians with the Integrated Geospatial Data (IGD), verifying the data structure and metadata of the TGI, and reviewing the official TGI designation documents. In 2024, BIG completed the integration process for 15 TGIs, meeting its target. As a result, the cumulative achievement of TGI guidance by Presidential Regulation Number 23 of 2021 reached 148 TGIs out of 158 by the end of 2024.



Salah satu bentuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan IGT Lahan Ganja.
Kiri : Pemusnahan lahan ganja di Kabupaten Aceh Besar. Kanan : Peta lokasi pemusnahan lahan ganja

One of the Guidance Activities for the Implementation of TGI on Marijuana Land
Left: Destruction of marijuana cultivation in Aceh Besar Regency. Right: Map indicating the locations of marijuana land destruction



Survei uji implementasi IGT Kerentanan Penurunan Muka Tanah di Sukabumi

Test Survey for the TGI Implementation on Land Subsidence Vulnerability in Sukabumi



Penyerahan dokumen rekomendasi IGT

Submission of TGI recommendation documents



Kumpulan beberapa dokumen rekomendasi kebijakan yang diterbitkan oleh BIG.

A collection of documents of policy recommendations issued by BIG



Validasi data IGT Kekeringan di NTB

TGI Validation Data on Drought in West Nusa Tenggara (NTB)

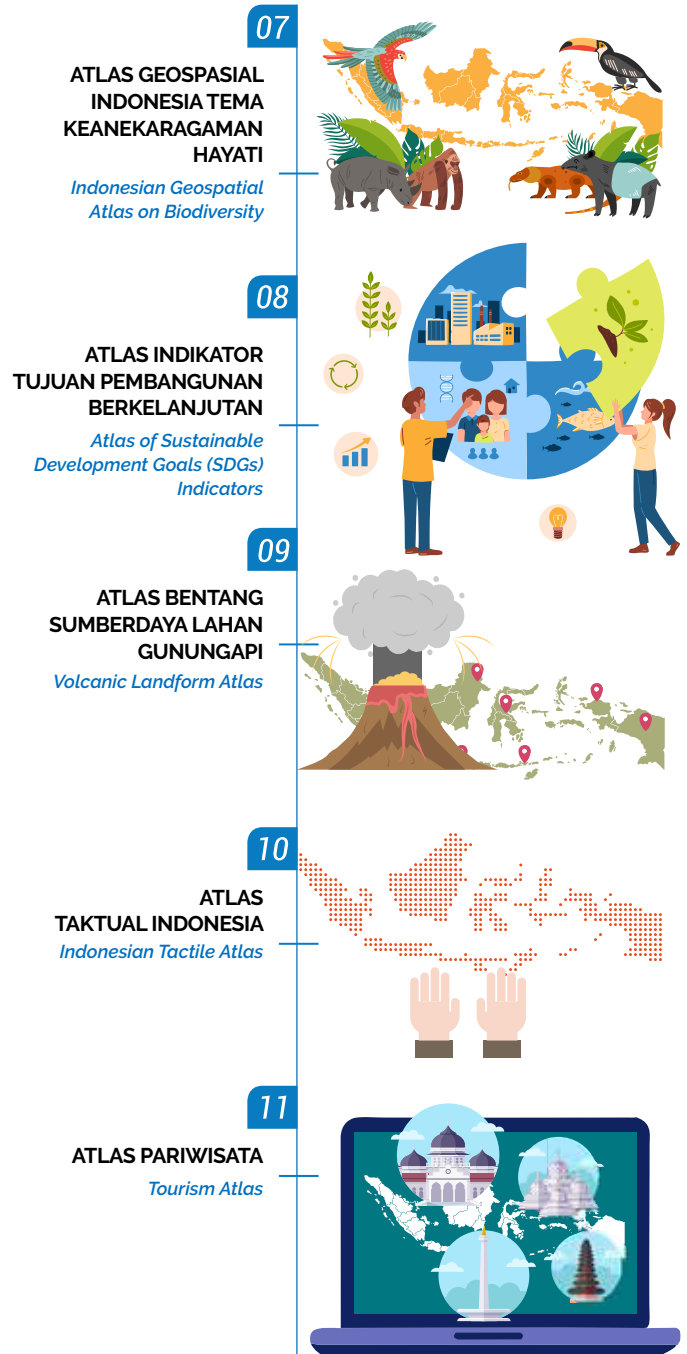
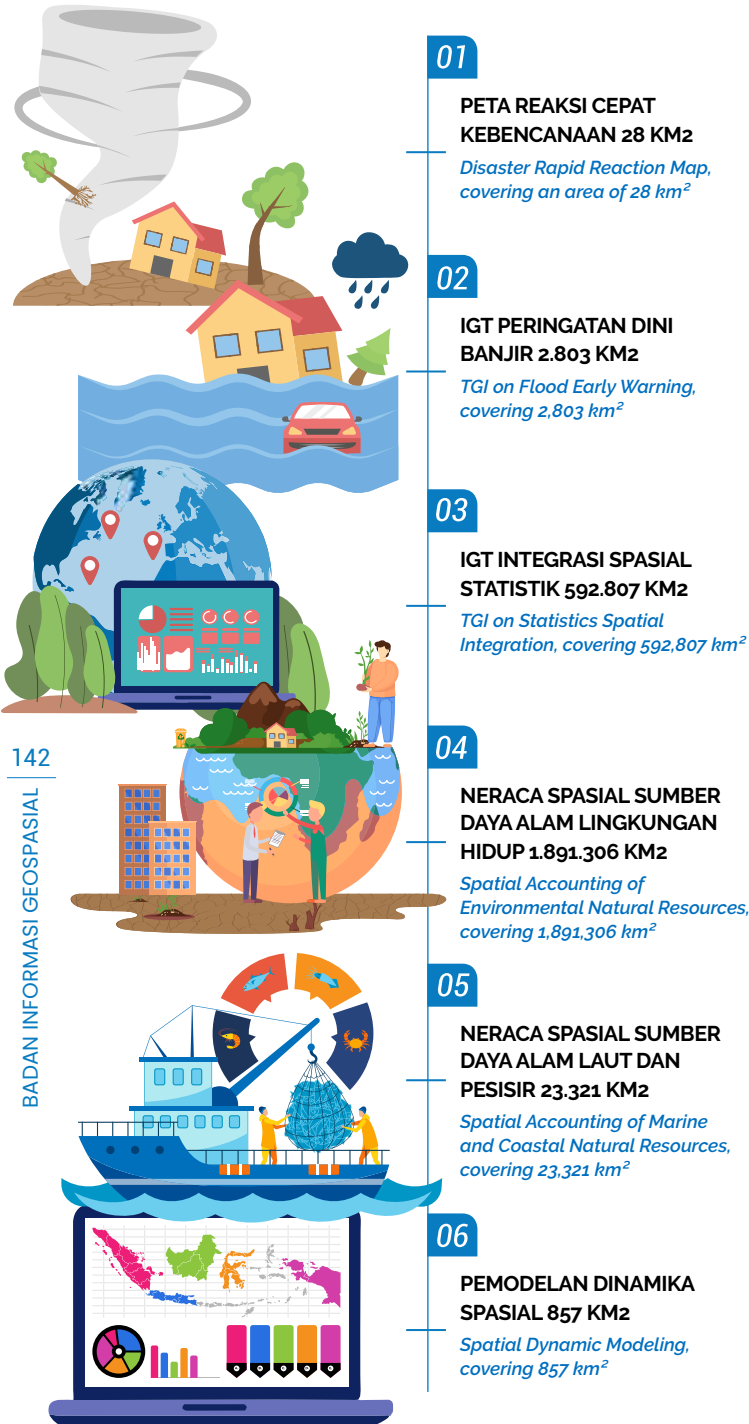


Workshop penjaminan kualitas dan berbagi pakai IGT Aset Tanah, Gedung, dan Bangunan Milik BUMN

Workshop on Quality Assurance and Data Sharing of TGI for SOE-owned Land, Building, and Structure Assets

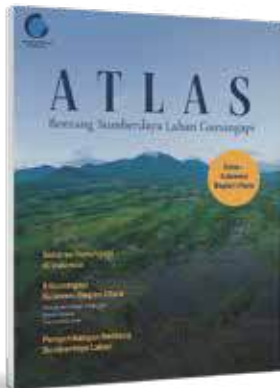
Adapun penyelenggaraan IGT yang dilaksanakan oleh BIG pada tahun 2024 adalah:

The TGI implementation activities carried out by BIG in 2024 are:



Sebagai pembina nasional, BIG telah membina 15% IGT yang diselenggarakan oleh K/L/P, mengintegrasikan 93% IGT yang telah terselenggara, mendorong pemanfaatan IGT strategis hingga 90% oleh K/L, serta membina daerah (kabupaten/kota) hingga mencapai 43% dari total target. Hal ini menunjukkan peran aktif BIG dalam membangun kesatuan data spasial di seluruh Indonesia.

As the national mentor, BIG guided 15% of TGIs organized by ministries, institutions, and local governments. Additionally, 93% of organized TGIs were integrated. BIG also promoted the use of strategic TGI by ministries and institutions, reaching a utilization rate of 90%, and supported regional governments (regencies/cities), achieving 43% of the total regional mentoring target. These accomplishments highlight BIG's active role in strengthening geospatial data integration across Indonesia.



ATLAS BENTANG SUMBERDAYA LAHAN GUNUNGAPI – SULAWESI UTARA

*Atlas of Volcanic Land Resources
Landscape – North Sulawesi*



Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi wilayah Sulawesi Utara menyajikan informasi mengenai kondisi dan pemanfaatan lahan di sekitar sembilan gunungapi aktif (tipe A) di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, seperti Gunung Ambang, Mahawu, Lokon, Tangkoko, Soputan, Karangetang, Awu, Ruang, dan Colo.

Atlas ini merupakan kelanjutan dari seri sebelumnya di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Di dalamnya termuat gambaran menyeluruh tentang sumber daya fisik dan budaya, termasuk cara masyarakat memanfaatkan lahan di kawasan gunung api untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Informasi disajikan secara komprehensif melalui citra satelit, foto, narasi, dan infografis yang menggambarkan morfologi wilayah puncak, lereng, dan kaki gunungapi, serta titik-titik lokasi penting (*point of interest*) yang telah dipilih. Atlas ini diharapkan menjadi referensi strategis untuk perencanaan tata ruang, pengelolaan risiko bencana, dan pengembangan wilayah berbasis potensi lokal.

The Atlas of Volcanic Land Resources Landscape for North Sulawesi presents information on the condition and land use nine active volcanoes (Type A) in North Sulawesi and Central Sulawesi. These volcanoes include Mount Ambang, Mahawu, Lokon, Tangkoko, Soputan, Karangetang, Awu, Ruang, and Colo.

The atlas continues the previous series covering Sumatra, Java, Bali, and Nusa Tenggara. It offers a comprehensive overview of physical and cultural resources, including how local communities utilize land in volcanic areas to support sustainable development.

The information is presented comprehensively through satellite imagery, photographs, narratives, and infographics that illustrate the morphology of volcanic peaks, slopes, and bases, along with chosen key points of interest. This atlas is expected to serve as a strategic reference for spatial planning, disaster risk management, and regional development that leverages local potential.



ATLAS GEOSPASIAL INDONESIA – KEANEKARAGAMAN HAYATI

*Indonesian Geospatial Atlas on
Biodiversity*

Sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, Indonesia memiliki hutan tropis dan lautan luas yang menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna. Untuk mendukung pelestarian kekayaan alam ini, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyusun *Atlas Geospasial Indonesia* bertema Keanekaragaman Hayati, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023.

Atlas ini memuat informasi penting, seperti persebaran keanekaragaman hayati, klasifikasi ekosistem, jenis-jenis tumbuhan dan satwa langka, serta ancaman dan upaya perlindungannya. Penyusunannya dilakukan melalui pengumpulan data, survei lapangan, dan analisis spasial.

Sebagai bagian dari Rencana Strategis BIG 2020–2024, atlas ini bertujuan mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis data geospasial. Selain menjadi referensi kebijakan, atlas ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sebagai aset nasional.

As the country with the highest level of biodiversity in the world, Indonesia boasts tropical forests and vast oceans as home to a diverse array of flora and fauna. To support the preservation of this natural wealth, the Geospatial Information Agency (BIG) has compiled the Indonesian Geospatial Atlas on Biodiversity, under the mandate of Presidential Instruction Number 1 of 2023.

This atlas contains essential information, including biodiversity distribution, ecosystem classifications, rare plant and animal species, as well as threats to biodiversity and conservation efforts. Its preparation involved data collection, field surveys, and spatial analysis.

As part of 2020–2024 BIG's Strategic Plan, the atlas aims to support sustainable development policies grounded in geospatial data. Beyond serving as a policy reference, the atlas also serves as a public education tool to raise awareness about preserving biodiversity as a vital national asset.



ATLAS INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) WILAYAH MALUKU-PAPUA

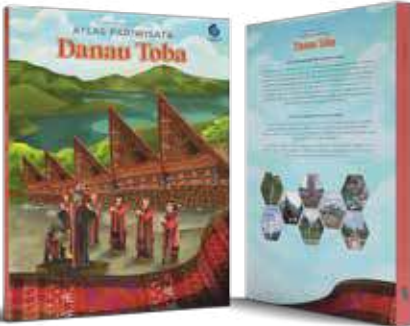
*Atlas of Sustainable Development
Goals (SDGs) Indicators for the
Maluku-Papua Region*

Untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tahun 2030, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyusun *Atlas Indikator TPB* sebagai bentuk kontribusi penyediaan Informasi Geospasial (IG) yang menggambarkan capaian TPB secara keruangan. Selama ini, data TPB umumnya berbentuk statistik atau naratif, sehingga belum cukup menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Atlas ini melengkapi kebutuhan tersebut dengan memvisualisasikan indikator capaian TPB hingga ke wilayah-wilayah tertentu.

Pada tahun 2024, BIG melalui Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial menyusun *Atlas Indikator TPB* dalam enam volume, masing-masing membahas wilayah berbeda. Volume kedua secara khusus menyajikan capaian, analisis kesenjangan (gap), dan proyeksi indikator TPB di wilayah Maluku dan Papua. Atlas ini disusun dengan data multisektor dari kementerian/lembaga terkait dan diharapkan menjadi referensi penting dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.

To support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, the Geospatial Information Agency (BIG) has compiled the *Atlas of SDG Indicators* as a contribution to providing geospatial information (GI) that spatially depicts SDG progress. Until now, SDG data has primarily been presented as statistics or narratives, which do not fully capture the real conditions on the ground. This atlas addresses this gap by visualizing SDG achievement indicators specific to the Maluku-Papua region.

In 2024, BIG, through the Directorate of Atlas and Utilization of Geospatial Information, compiled the *Atlas of SDG Indicators* in six volumes, each focusing on a different region. The second volume presents explicitly achievements, gap analyses, and projections of SDG indicators for the Maluku and Papua regions. This atlas was developed using multi-sector data from relevant ministries and institutions. It is expected to be a key reference for evaluating and planning sustainable development in eastern Indonesia.



ATLAS PARIWISATA WILAYAH DANAU TOBA

Lake Toba Tourism Atlas



Danau Toba di Sumatera Utara merupakan danau vulkanik terbesar di dunia, terbentuk dari letusan supervulkanik Gunung Toba sekitar 74.000 tahun lalu. Keunikan geologinya, termasuk keberadaan Pulau Samosir di tengah danau, menjadikannya laboratorium alam yang diakui dunia. Karena nilai penting tersebut, Danau Toba ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark.

Sejak tahun 2019, Danau Toba juga ditetapkan sebagai salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh pemerintah. Penetapan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan promosi wisata. Kawasan ini menawarkan kekayaan alam, budaya Batak yang otentik, serta berbagai atraksi seperti Pulau Samosir, Air Terjun Sipiso-piso, dan pertunjukan tari Sigale-gale.

Sebagai upaya mendukung promosi dan perencanaan pariwisata, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyusun *Atlas Pariwisata Danau Toba*. Atlas ini menyajikan data spasial dan narasi kepariwisataan dalam lima bab utama, mencakup sejarah, destinasi wisata, ekonomi kreatif, konektivitas, serta perkembangan dan tantangan kawasan. Untuk menjangkau lebih luas, informasi juga tersedia dalam bentuk *pocket map* dan E-Atlas digital yang menampilkan peta tematik dan *story map* destinasi unggulan.

Lake Toba in North Sumatra is the largest volcanic lake in the world, formed by the supervolcanic eruption of Mount Toba approximately 74,000 years ago. Its unique geological features, including the presence of Samosir Island at its center, make it an internationally recognized natural laboratory. Due to its significance, Lake Toba has been designated part of the UNESCO Global Geopark network.

Since 2019, the government has designated Lake Toba as one of the five Super Priority Tourism Destinations. This designation aims to stimulate economic growth through infrastructure development and tourism promotion. The region is rich in natural beauty and cultural heritage, offering attractions such as Samosir Island, the Sipiso-piso Waterfall, and traditional Sigale-gale dance performances that showcase the authentic Batak culture.

To support tourism promotion and development planning, the Geospatial Information Agency (BIG) has compiled the Lake Toba Tourism Atlas. The atlas presents spatial data and narrative insights across five chapters covering history, tourist destinations, the creative economy, connectivity, and regional developments and challenges. To reach a broader audience, the information is also provided in pocket maps and digital e-atlases, featuring thematic maps and story maps of key tourism sites.

Atlas Taktual adalah peta timbul tiga dimensi yang dirancang khusus untuk membantu penyandang disabilitas netra mengenali Informasi Geospasial. Peta ini dicetak pada media khusus seperti brailon dan menyajikan informasi dalam bentuk tekstur timbul serta huruf braille.

Pada tahun 2024, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyusun *Atlas Taktual Indonesia* untuk wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara hingga tingkat kabupaten/kota. Proses penyusunan dimulai dari pengumpulan data peta awas, yang kemudian diubah menjadi peta braille. Peta tersebut diuji keterbacaannya oleh siswa dan guru tunanetra di SLB-A YAPENTRA, dengan dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Umpan balik dari uji ini digunakan untuk menyempurnakan peta sebelum dipublikasikan.

Sebagai bagian dari upaya inklusif, BIG juga memperkenalkan atlas ini dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, BIG menyerahkan Atlas Taktual secara simbolis kepada Menteri Sosial dan memberikan layanan literasi geospasial bagi penyandang disabilitas netra.

Atlas ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran dan literasi spasial yang inklusif serta memperluas akses Informasi Geospasial bagi masyarakat penyandang disabilitas, melalui kerja sama yang terus dibangun antara BIG dan lembaga-lembaga terkait.



ATLAS TAKTUAL INDONESIA – SUMATERA UTARA

Indonesia Tactile Atlas – North Sumatra

The Tactile Atlas is a three-dimensional relief map designed to help individuals with visual impairments access to understand geospatial information through touch. Printed on specialized materials, it features raised textures and braille labels to present information.

In 2024, the Geospatial Information Agency (BIG) compiled the Indonesian Tactile Atlas for the administrative areas of North Sumatra Province at the district and city levels. The process began with collecting data for making usual map then converted into braille format. With support from the North Sumatra Provincial Education Office, visually impaired students and teachers from SLB-A YAPENTRA tested the maps for readability test. Their feedback was instrumental in refining the maps before publication.

As part of its commitment to inclusivity, BIG introduced the atlas to commemorate the International Day of Persons with Disabilities in Jakarta. At the event, BIG symbolically handed over the Tactile Atlas to the Minister of Social Affairs and provided geospatial literacy services for individuals with visual impairments.

This atlas is expected to be a means of inclusive spatial learning and literacy and to expand access to geospatial information for people with disabilities through ongoing collaboration between BIG and related institutions.

Rekomendasi IGT Terintegrasi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Target pelaksanaan rencana aksi Kebijakan Satu Peta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permenko No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP. Terdapat 5 (lima) kegiatan besar yang terdapat dalam rencana aksi KSP, yaitu (1) penetapan mekanisme dan tata kerja pelaksanaan Percepatan KSP; (2) perwujudan dan pemutakhiran IGD; (3) perwujudan dan pemutakhiran IGT; (4) infrastruktur geospasial; dan (5) sinkronisasi antar IGT.

Dengan terbitnya Undang Undang Cipta Kerja dan perubahan struktur pada beberapa kementerian/ lembaga maka terdapat perubahan target Renaksi Kebijakan Satu Peta yang semula 158 IGT menjadi 151 IGT. Capaian kompilasi saat ini sudah 100% dimana seluruh 151 IGT sudah terkumpul. Terdapat 5 (lima) kriteria standar kompilasi yaitu data spasial, struktur data, dokumen mekanisme, metadata dan dokumen penetapan. Sementara itu hingga akhir tahun 2024 capaian IGT yang telah terintegrasi sebanyak 150 dari 151 IGT atau 99%.

IGT Peringatan Dini Banjir

IGT Peringatan Dini Banjir merupakan implementasi dari analisis hasil pengamatan bencana banjir yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam menyebarkan informasi. Dengan adanya IGT Peringatan Dini Banjir diharapkan pemangku kebijakan dan masyarakat dapat melakukan respon berupa persiapan ataupun pencegahan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana.

Penyusunan IGT Peringatan Dini Banjir pada tahun 2024 dilaksanakan pada 4 wilayah yaitu Batang, Kendal, Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Kegiatan IGT Peringatan Dini Banjir pada tahun 2024 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan. Dalam rangka pencapaian indikator keluaran penyusunan IGT Peringatan Dini Banjir Tahun 2024, maka dilakukan beberapa tahapan-tahapan pelaksanaan. Tahapan ini merupakan rencana kegiatan tahun berjalan yang dibagi ke dalam bulan sehingga memudahkan dalam pelaporan setiap triwulannya. Secara garis besar tahapan kegiatan terdiri dari 3 tahapan yaitu (1) Persiapan, (2) Penyusunan dan Uji Model, dan (3) Finalisasi dan Sosialisasi Model.

Integrated TGI Recommendations for Accelerating the Implementation of the One Map Policy

The target for implementing the One Map Policy action plan is governed by the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 3 of 2024, which amends Regulation No. 6 of 2021 concerning the Action Plan for Accelerating the Implementation of the One Map Policy (OMP). The action plan consists of 5 (five) major activities, namely: (1) determination of the mechanism and work procedures for accelerating the OMP implementation; (2) development and update of BGI; (3) development and update of TGI; (4) geospatial infrastructure; and (5) TGI synchronization.

With the issuance of the Job Creation Law and structural changes in several ministries and institutions, the target of the One Map Policy Action Plan was revised from 158 TGIs to 151 TGIs. Compilation achievement reached 100%, with all 151 TGIs collected. The compilation process follows five (5) standard criteria, namely spatial data, data structure, mechanism documents, metadata, and determination documents. By the end of 2024, the integration achievement was expected to reach 150 out of 151 TGIs, or approximately 99%.

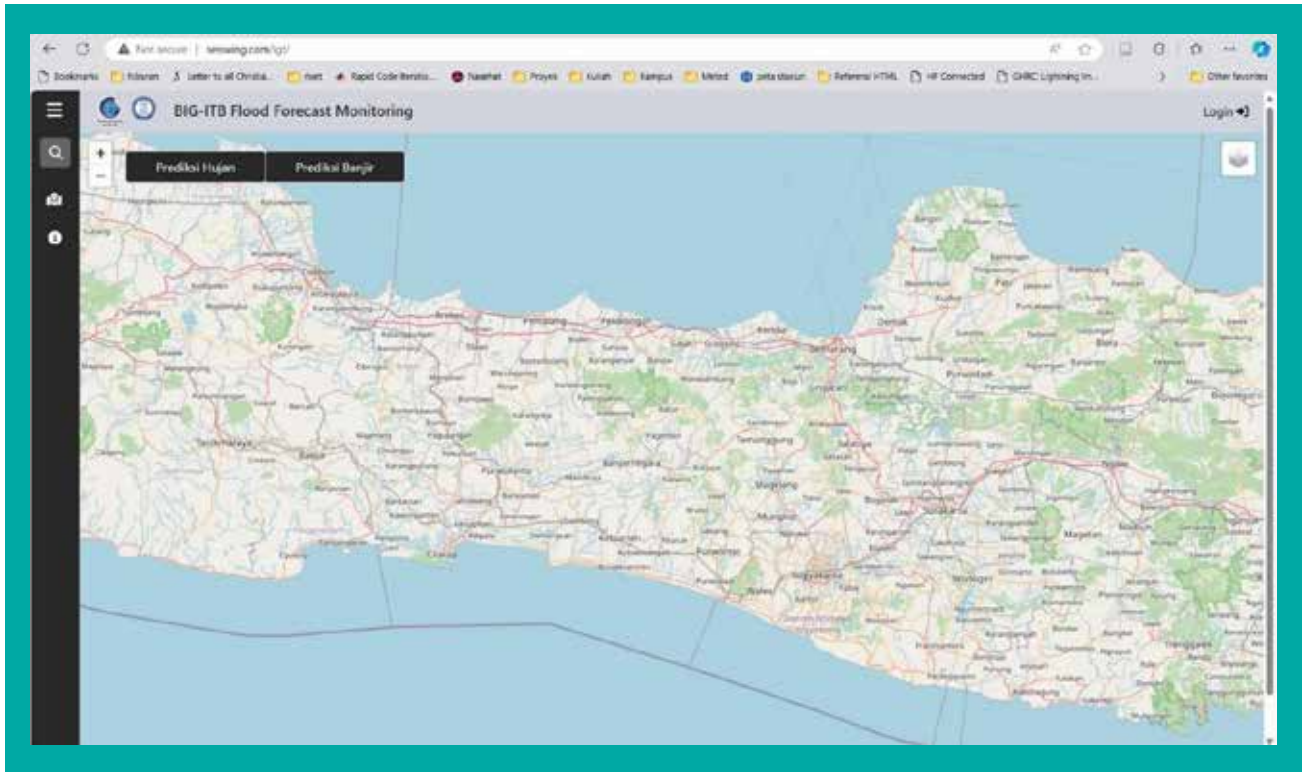
TGI for Flood Early Warning

TGI for flood early warning utilizes the analysis of flood disaster observations as the basis for disseminating information. This enables policymakers and communities to respond proactively through preparedness and prevention measures, helping to avoid casualties and minimize the impact of floods.

In 2024, the TGI for Flood Early Warning was developed for four (4) regions, namely Batang, Kendal, Pekalongan, and Pekalongan City. The flood early warning system activities were carried out over 12 months. Several implementation stages were undertaken to achieve the output indicators for preparing the TGI for flood early warning in 2024. This annual activity plan is organized by month to facilitate quarterly reporting. Overall, the process consists of three main stages, namely (1) preparation, (2) model preparation and testing, and (3) model finalization and socialization.

Hasil dari IGT Peringatan Dini Banjir disajikan pada dashboard seiswing.com/igt

The results of the TGI for Flood Early Warning are presented on the dashboard at seiswing.com/igt.



Peta Reaksi Cepat Kebencanaan

Pemetaan cepat kebencanaan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data geospasial secara cepat sehingga kebutuhan informasi terhadap suatu peristiwa kebencanaan dapat dipenuhi sesuai standar yang berlaku. Instrumen yang saat ini sesuai dengan kebutuhan pemetaan cepat adalah menggunakan perangkat udara nirawak. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana adalah tingkat risiko terdampak suatu wilayah bila salah satu atau lebih bencana terjadi. Berikut adalah realisasi pemetaan cepat kebencanaan tahun 2024:

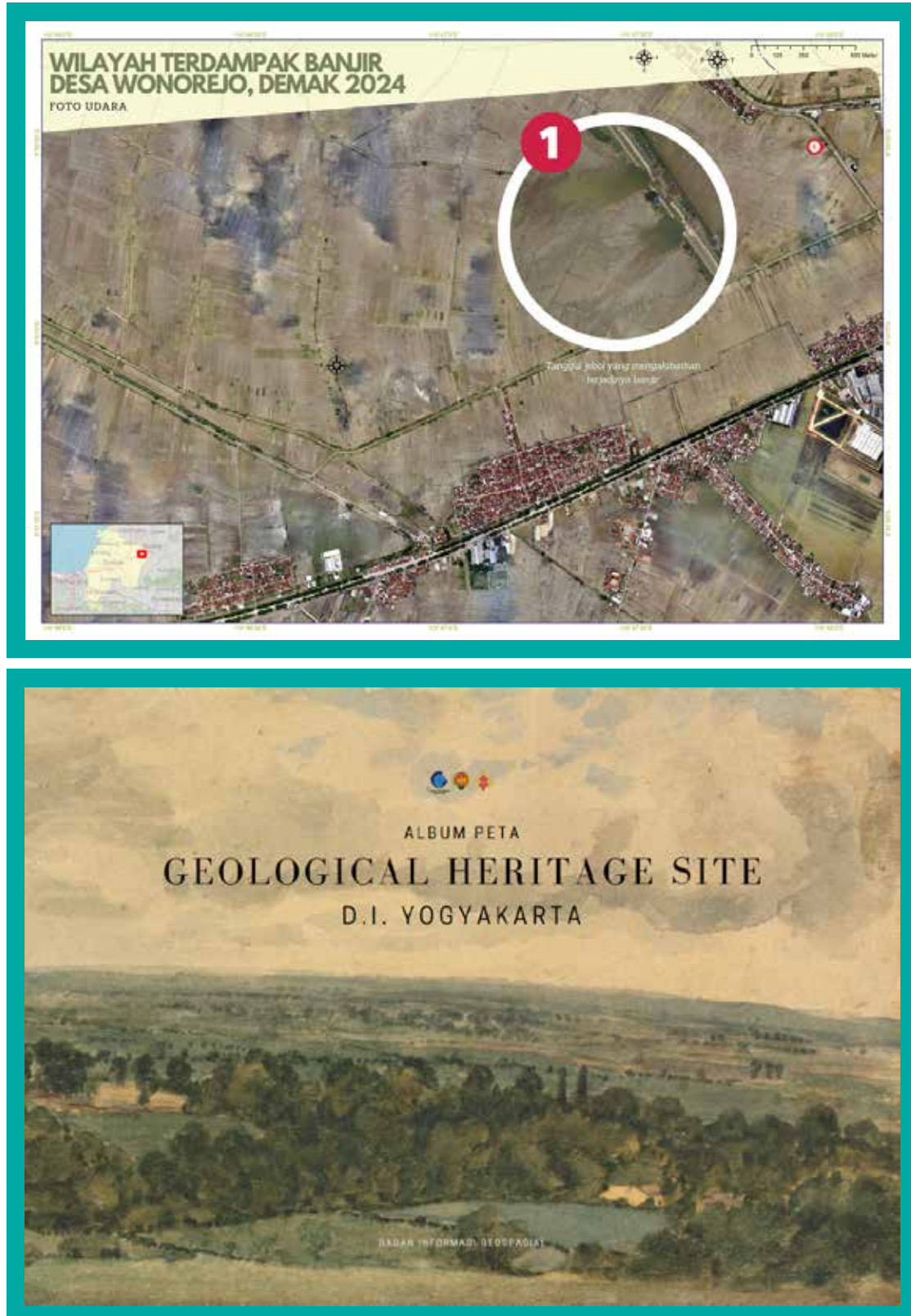
Disaster Rapid Reaction Map

Rapid disaster mapping involves swiftly collecting, processing, and visualizing geospatial data to provide timely and accurate information in response to disaster by applicable standards. Currently, unmanned aerial vehicles (UAVs) are the tools used to support rapid mapping efforts. The data and information required in disaster management include the risk level of an area affected in the event of one or more disasters. The following presents the realization of rapid disaster mapping activities in 2024:

No	Nama Kegiatan Activity	Realisasi Cakupan Realization Coverage
1	Pemetaan Cepat Kerusakan Ekosistem Geo Heritage di Yogyakarta <i>Rapid Mapping of Geoheritage Ecosystem Damage in Yogyakarta</i>	22 km²
2	Pemetaan Cepat Wilayah Terdampak Bencana Banjir di Jawa Tengah <i>Rapid Mapping of Flood-Affected Areas in Central Java</i>	6 km²
Total Luasan <i>Total Coverage</i>		28 km²

Output yang dihasil dari kegiatan diatas antara lain peta wilayah terdampak banjir di Desa Wonorejo, Album Peta Geoheritage, dan Buku Khazanah Geoheritage D.I. Yogyakarta.

The outputs resulting from the above activities include a flood-affected area map of Wonorejo Village, a Geoheritage Map Album, and the Geoheritage Treasure Book of the Special Region of Yogyakarta.





Neraca Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut di Kapoposang dan Laut Sawu

Pada tahun 2024, BIG melalui Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik (DISIGT) menyusun *Neraca Spasial Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut* di dua kawasan konservasi perairan nasional: Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Kapoposang di Sulawesi Selatan dan Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program *Ocean Account* yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama sejumlah lembaga, termasuk BIG, BPS, Kementerian Keuangan, dan BRIN.

TWP Kepulauan Kapoposang

Terletak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, kawasan konservasi ini memiliki luas sekitar 49.924 hektar. Neraca spasial disusun untuk periode 2017–2023 dan menunjukkan:

- Terumbu karang mengalami peningkatan dari 23.653 hektar (2017) menjadi 23.668 hektar (2023), mengindikasikan pemulihan alami.
- Padang lamun juga meningkat dari 229 hektar menjadi 262 hektar, didominasi oleh spesies *Thalassia hemprichii* dan *Enhalus acoroides*.
- Mangrove tidak ditemukan dalam jumlah signifikan sehingga tidak masuk dalam peta analisis.

Coastal and Marine Natural Resources Balance in Kapoposang and the Sawu Sea

In 2024, BIG, through the Directorate of Thematic Geospatial Information Integration and Synchronization, compiled a *Spatial Balance of Coastal and Marine Natural Resources* in two national marine conservation areas, namely the Kapoposang Islands Marine Tourism Park in South Sulawesi and the Sawu Sea Marine National Park in East Nusa Tenggara. This initiative forms part of the *Ocean Account* program, coordinated by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in collaboration with BIG, Statistics Indonesia, the Ministry of Finance, and the National Research and Innovation Agency (BRIN).

Kapoposang Islands Marine Tourism Park

Located in Pangkajene and Islands Regency, South Sulawesi, this marine conservation area covers approximately 49,924 hectares. The spatial balance was compiled from 2017–2023 and revealed the following.

- Coral reefs increased slightly from 23,653 hectares in 2017 to 23,668 hectares in 2023, indicating natural recovery.
- Seagrass beds expanded from 229 to 262 hectares, predominantly consisting of *Thalassia hemprichii* and *Enhalus acoroides* species.
- Mangroves were absent in significant numbers and excluded from the analysis map.

TNP Laut Sawu

TNP Laut Sawu mencakup wilayah seluas 3,36 juta hektar dan merupakan salah satu kawasan konservasi laut terbesar di Indonesia. Neraca spasial 2017–2023 menunjukkan:

- Terumbu karang bertambah dari 15.130 hektar menjadi 15.158 hektar. Sebagian besar area tetap stabil.
- Padang lamun luasnya hampir tidak berubah, yaitu sekitar 15.122 hektar pada 2023, dan terus berfungsi sebagai penyerap karbon biru.
- Mangrove mengalami peningkatan signifikan dari 528 hektar menjadi 5.847 hektar, mencerminkan upaya konservasi yang berhasil.

Penyusunan neraca ini memberikan gambaran perubahan ekosistem laut secara spasial dan menjadi dasar penting untuk pengambilan kebijakan berbasis data, terutama dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Sawu Sea National Park

The Sawu Sea National Park spans approximately 3.36 million hectares, making it one of Indonesia's largest marine conservation areas. The spatial balance compiled from 2017–2023 revealed the following.

- *Coral reefs increased slightly from 15,130 ha to 15,158 ha, with most areas remaining stable.*
- *Seagrass beds remained nearly unchanged at 15,122 ha in 2023 and continue to serve as a blue carbon sink.*
- *Mangroves expanded significantly from 528 to 5,847 ha, reflecting successful conservation efforts.*

Preparing this spatial balance provides an overview of changes in marine ecosystems. It serves as a critical foundation for data-driven policymaking, particularly in managing conservation areas and the sustainable use of aquatic resources.



Neraca Spasial Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

BIG melalui Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik (DISIGT) menyusun *Neraca Spasial Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup* secara swakelola. Kegiatan ini mendukung publikasi *Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia (Sisnerling) 2019–2023* yang disusun oleh BPS. Hasil utamanya berupa peta penutup lahan nasional selama periode 2019–2023 dengan klasifikasi berbasis *Systems of Environmental-Economic Accounting (SEEA)*.

Spatial Balance of Natural Resources and Environment

BIG independently compiles the *Spatial Balance of Natural Resources and Environment* through the Directorate of Thematic Geospatial Information Integration and Synchronization. Integration and Synchronization. This activity supports the publication of *Indonesia's Integrated Environmental and Economic Accounting System (Sisnerling)* for 2019–2023, prepared by Statistics Indonesia. The primary output is a national land cover map for 2019–2023, classified according to the *System of Environmental-Economic Accounting (SEEA)* framework.

Peta disusun melalui pengolahan citra satelit dan kompilasi berbagai peta tematik, menggunakan metode hybrid berbasis kecerdasan buatan (Google Earth Engine) yang dikombinasikan dengan analisis visual. Survei lapangan juga dilakukan untuk menguji akurasi hasil interpretasi di sejumlah provinsi.

Secara nasional, penutup lahan yang paling dominan adalah *tree-covered areas* atau kawasan berhutan, mencakup hampir separuh wilayah Indonesia. Sementara itu, lahan kosong (*terrestrial barren land*) merupakan kelas dengan luas terkecil.

Selama periode 2019–2023, lahan pertanian kayu (*woody crops*) menunjukkan pertumbuhan paling signifikan dengan peningkatan luas sebesar 23,44%. Permukaan buatan seperti kawasan perkotaan juga mengalami perluasan sebesar 692.750 hektare. Sebaliknya, vegetasi alami jarang (*sparsely natural vegetated areas*) dan semak belukar mengalami penurunan tajam, masing-masing turun sebesar -50,08% dan -23,38%.

Analisis perubahan penutup lahan menunjukkan bahwa sebagian besar *multiple or layered crops* berubah menjadi *woody crops* (2,7 juta hektare), dan sebagian besar *shrub-covered areas* berubah menjadi *tree-covered areas*. Perubahan pada kelas lain, seperti lahan kosong menjadi padang rumput, terjadi dalam skala kecil.

Hasil ini memberikan gambaran penting bagi pemantauan kondisi lingkungan dan mendukung pengambilan kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis data spasial.

Integrasi Spasial dan Statistik di Sulawesi dan Papua

Pada tahun 2024, BIG melaksanakan kegiatan penyusunan IGT Integrasi spasial-statistik untuk wilayah Sulawesi dan Papua. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan pengukuran beberapa indikator TPB/SDGs pada unit wilayah administrasi desa/kelurahan. Pengukuran pada unit wilayah yang lebih detail ini sejalan dengan prinsip *Leave No One Behind* (LNOB) pada pelaksanaan TPB/SDGs.

Data yang digunakan untuk melakukan pengukuran indikator TPB/SDGs tersebut adalah data Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 (PK-2023) yang dilaksanakan oleh BKKBN. Terdapat 20 indikator TPB/SDGs yang dapat diukur menggunakan data Pemutakhiran PK-2023. Sebagian indikator

The map was compiled using satellite imagery processing and the integration of thematic maps, employing a hybrid method that combines artificial intelligence (Google Earth Engine) with visual analysis. Field surveys were also conducted in several provinces to validate the accuracy of the interpretation results.

Nationally, the most dominant land cover is tree-covered or forested areas, which account for nearly half of Indonesia's territory. In contrast, terrestrial barren land represents the smallest land cover class.

Between 2019 and 2023, woody crops experienced the most significant growth, with a 23.44% increase in area. Artificial surfaces, including urban and built-up areas, expanded by approximately 692,750 hectares. In contrast, sparsely vegetated areas and shrublands saw substantial declines, decreasing by 50.08% and 23.38%, respectively.

Land cover change analysis indicates that the most significant transition occurred from mixed cropping to woody crops, covering approximately 2.7 million hectares. Additionally, large portions of shrub-covered areas were converted into tree-covered areas. Other transitions, such as from terrestrial barren land to grassland, occurred on a smaller scale.

These results offer essential insights for monitoring environmental conditions and serve as a critical foundation for sustainable development policy-making based on spatial data.

Spatial and Statistical Integration in Sulawesi and Papua

In 2024, BIG developed TGI for spatial and statistical integration in the Sulawesi and Papua regions. This initiative aimed to support the measurement of selected SDG indicators at the village or sub-district level. Conducting measurements at more granular administrative units aligned with the Leave No One Behind (LNOB) principle in SDG implementation.

The data used to measure the SDG indicators was sourced from the 2023 Family Data Update conducted (PK-2023) by the National Population and Family Planning Agency (BKKBN). The PK-2023 data could measure a total of 20 SDG indicators. Some indicators were calculated following the

dapat dihitung sesuai dengan metodologi resmi Bappenas, sementara sisanya bersifat proksi karena keterbatasan data.

Selain ke-20 indikator TPB/SGs yang dihitung menggunakan data PK-2023, dilakukan juga pengukuran dua indikator TPB/SDGs lainnya yang juga melibatkan data statistik dan data spasial yaitu rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap pertumbuhan penduduk (Indikator 11.3.1.a) dan proporsi penduduk yang memiliki akses nyaman ke transportasi publik (Indikator 11.2.1.a).

Perhitungan Indikator 11.3.1 tahun 2020–2023 yang dilakukan dengan menggunakan data penutup lahan KLHK dan data statistik jumlah penduduk BPS menghasilkan angka rasio yang sangat tinggi yaitu 4,68. Namun demikian, hasil ini perlu diverifikasi kembali karena ditemukan beberapa data penutup lahan yang tidak akurat.

Sementara itu, pengukuran Indikator 11.2.1.a dilakukan dengan menggunakan data trayek angkutan umum atau tempat pemberhentian khusus yang diperoleh dari Dinas Perhubungan daerah setempat dan data populasi penduduk dalam bentuk *grid*. Hasil pengukuran menunjukkan variasi yang cukup besar antar kota di Sulawesi dan Papua, dengan cakupan antara 41,17% hingga 92,17%.

Upaya integrasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan data pembangunan lebih inklusif, akurat, dan relevan bagi pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

SASARAN STRATEGIS 3

Terselenggaranya Infrastruktur IG yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses dan pemanfaatan IG nasional

Untuk mencapai sasaran strategis ini, BIG berfokus pada peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan data, termasuk pusat data (*data center*), layanan *cloud*, sistem pemetaan daring, serta portal-portal berbasis spasial. Di sisi lain, penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai kanal layanan publik, integrasi antar platform nasional (seperti Geoportal Satu Peta), hingga kerja sama antar lembaga dan inovasi teknologi.

Dengan infrastruktur yang terstandar dan sistem penyebaran data yang terbuka serta bertanggung

official methodology issued by Bappenas, while others were estimated using proxy indicators due to data limitations.

In addition to the 20 SDG indicators calculated using PK-2023 data, measurements were also conducted for two additional SDG indicators that integrate statistical and spatial data, namely the ratio of the rate of built-up land expansion to population growth (Indicator 11.3.1.a) and the proportion of the population with convenient access to public transportation (Indicator 11.2.1.a).

The calculation of Indicator 11.3.1 for 2020–2023, based on the Ministry of Environment and Forestry's land cover data and population statistics from Statistics Indonesia, yielded a notably high ratio of 4.68. However, this result requires re-verification to detect inaccuracies in the land cover data.

Meanwhile, the measurement of Indicator 11.2.1.a was conducted using public transportation route data or designated stops obtained from local Transportation Agencies, combined with population data presented in grid format. The results revealed significant variations in coverage across cities in Sulawesi and Papua, ranging from 41.17% to 92.17%.

This integration effort represents a strategic step toward ensuring more inclusive, accurate, and relevant development data for local policymaking.

STRATEGIC TARGET 3

Provision of quality GI infrastructure to support national GI availability, access, and utilization

To achieve this strategic target, BIG focuses on enhancing the quality and capacity of data management infrastructure, including data centers, cloud services, online mapping systems, and spatial-based portals. Information dissemination is also done through various public service channels, integration across national platforms (such as the One Map Geoportal), inter-institutional cooperation, and technological innovation.

With standardized infrastructure and an open accountable data distribution system, BIG is committed

jawab, BIG berkomitmen memastikan bahwa Informasi Geospasial dapat dimanfaatkan secara luas untuk memperkuat perencanaan pembangunan, pelayanan publik, mitigasi bencana, hingga pengambilan keputusan berbasis wilayah. Program ini sekaligus menjadi bagian integral dari visi menuju ekosistem geospasial nasional yang modern dan berkelanjutan.

to ensuring that geospatial information is widely accessible and utilized to enhance development planning, public services, disaster mitigation, and region-based decision-making. This program is also fundamental to the vision for a modern and sustainable national geospatial ecosystem.



Fotografer | Photographer:

Priyombodo

Lokasi | Location:

**Gorowong, Parung Panjang,
Kab. Bogor, Jawa Barat**

Perbandingan target dan kinerja penyediaan infrastruktur dan penyebaran Informasi Geospasial

Comparison of targets and performance in geospatial information infrastructure provision and dissemination

Indikator Kinerja Program (IKP) Program Performance Indicator (PPI)	Target IKP PPI Target	Realisasi IKP PPI Realization	Sasaran Kegiatan Activity Target	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Activity Performance Indicator (API)	Target IKK API Target	Realisasi IKK API Realization
Indeks Kualitas Dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG Quality Index of GI Policy Support, Institutional, Standard, and Human Resources	8.6	8.98	Meningkatnya Simpul Jaringan yang optimal Increase in Optimal Network Nodes	Indeks Kelembagaan Simpul Jaringan yang optimal Institutional Index of Optimal Network Nodes	7.4	7.428
				Jumlah Simpul Jaringan IG yang naik kriteria IG Network Nodes Meeting Higher Effectiveness Criteria	5	5
				Indeks Efektivitas Kebijakan Penyelenggaraan IG Nasional Effectiveness Index of National IG Policy	10	10
			Terpenuhinya standar teknis penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk mendukung pembangunan nasional Fulfillment of technical standards for geospatial information implementation to support national development	Indeks Ketersediaan Standar Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang dibutuhkan dalam Pembangunan Nasional Index of Availability of Geospatial Information Implementation Standards Required for National Development	9	9.50
			Terpenuhinya regulasi Sumber Daya Manusia dan Industri IG Fulfillment of Regulations for Human Resources and the Geospatial Information (GI) Industry	Indeks ketersediaan SDM dan Industri IG yang berkompeten Index of Availability of Competent Human Resources and Geospatial Information (GI) Industry	9	9.67
				Jumlah SDM IG yang terbiasa (orang) Number of Trained Geospatial Information (GI) Human Resources (persons)	70	132
Indeks Kualitas Layanan Teknologi untuk mendukung Pengelolaan, Penyebarluasan dan Pemanfaatan IG Technology Service Quality Index to Support the Management, Dissemination, and Utilization of Geospatial Information (GI)	9.2	9.78	Meningkatnya pengelolaan, penyebaran, dan teknologi pemanfaatan Informasi Geospasial Improved management, dissemination, and technology for geospatial information utilization	Indeks Kualitas Layanan Pengelolaan Data Informasi Geospasial Service Quality Index for Geospatial Data Information Management	9.1	9.43
				Indeks Kualitas Penyebarluasan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Service Quality Index for Geospatial Information Dissemination and Utilization	9.4	10
			Meningkatnya kualitas layanan data center Improved quality of data center services	Indeks Kualitas Layanan Data Center Data Center Service Quality Index	9.1	9.9
				Service Level Agreement (SLA) Ketersediaan layanan data center Service Level Agreement (SLA) for Data Center Service Availability	95%	95%
Jumlah Geoportal Terkoneksi Number of Connected Geoportals	20	44				

Simpul Jaringan yang Optimal

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, perneliharaan, pernutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu. Dalam sistem nasional, simpul jaringan berperan sebagai walidata tematik, menyediakan data yang sesuai standar, dan terhubung dengan sistem Informasi Geospasial nasional yang dikoordinasikan oleh BIG.

Pada tahun 2024, BIG terus memperkuat simpul jaringan melalui pembinaan teknis, pendampingan, dan monitoring. Hasilnya, telah terbentuk 26 simpul jaringan unggul yang berkontribusi aktif dalam integrasi data spasial nasional, mendukung kebijakan satu peta, serta memperkuat perencanaan pembangunan berbasis spasial di tingkat daerah dan nasional.

Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Informasi Geospasial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan menjelaskan bahwa instansi pembina bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan, dan selanjutnya dalam melaksanakan peran tersebut terdapat 19 tugas dari instansi pembina. Tugas instansi pembina terkait dengan fasilitasi dan pembinaan SDM adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi atau pendampingan teknis dengan *stakeholder* terkait (instansi pengguna) dalam rangka pembinaan karier;
2. Melakukan sosialisasi dalam rangka pembinaan;
3. Menyelenggarakan uji kompetensi; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan.

Optimal Network Nodes

Following Presidential Regulation (Perpres) No. 27 of 2014 on the National Geospatial Information Network, Network Nodes is an institution responsible for managing the collection, maintenance, updating, exchange, and dissemination of specific Geospatial Data and GI. Serving as thematic data custodians within the national system, this institution ensures the provision of standardized data and maintains connectivity with the national geospatial information system, which BIG coordinates.

In 2024, BIG strengthened network nodes through technical guidance, mentoring, and monitoring activities. As a result, 26 high-performing network nodes were established, each actively contributing to integrating national spatial data, supporting the One Map Policy, and enhancing spatially-based development planning at both regional and national levels.

Human Resource Development in the Geospatial Information Sector

Following Government Regulation No. 17 of 2020, which amends Government Regulation No. 11 of 2017 on Government Worker Management and the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform No. 27 of 2020 in conjunction with No. 61 of 2020 concerning the Functional Position of Mapping Surveyor, it is stipulated that the supervising agency is responsible for ensuring the achievement of quality standards and professionalism within the position. To fulfill this mandate, the supervising agency is assigned 19 specific tasks. Among these, the functions related to facilitating and developing human resources are as follows.

1. Coordinating and providing technical assistance to relevant stakeholders (user agencies) to support career development initiatives;
2. Conducting outreach and dissemination activities to promote development;
3. Organizing competency assessments; and
4. Monitoring and evaluating the implementation

Berdasarkan sinkronisasi data SIASN pada tahun 2024, terdapat sebanyak 1005 JF Surveyor Pemetaan. Adapun rincian jumlah pejabat fungsional surveyor pemetaan adalah sebagai berikut.

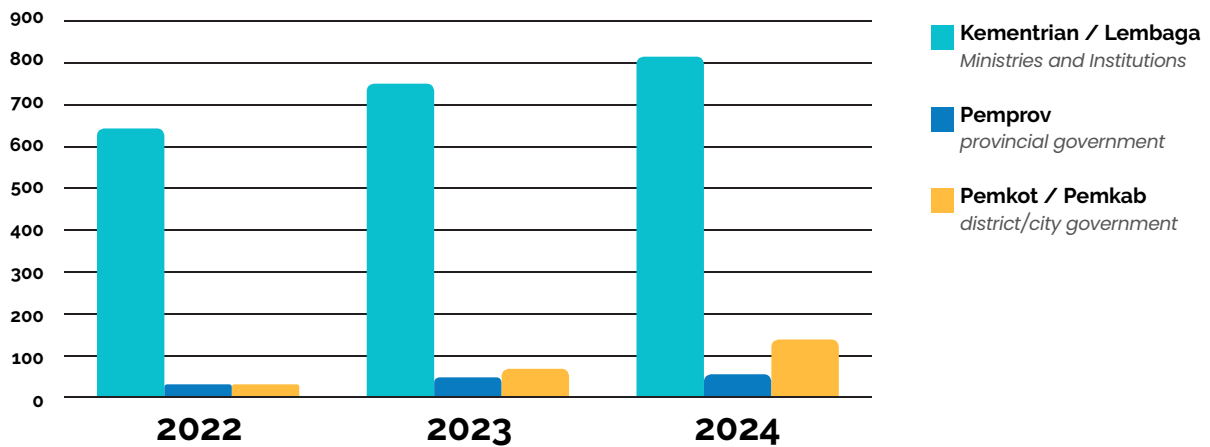
1. Jabatan fungsional surveyor pemetaan terdistribusi pada 9 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 67 pemerintah kabupaten/kota.
2. 812 surveyor pemetaan pada kementerian/lembaga, 56 surveyor pemetaan pada Pemerintah Provinsi, dan 137 surveyor pemetaan pada pemerintah kabupaten/kota.

Based on Civil Service Information System (SIASN) data synchronization in 2024, there were 1,005 functional mapping surveyors. The details of the number of functional mapping surveyors are as follows.

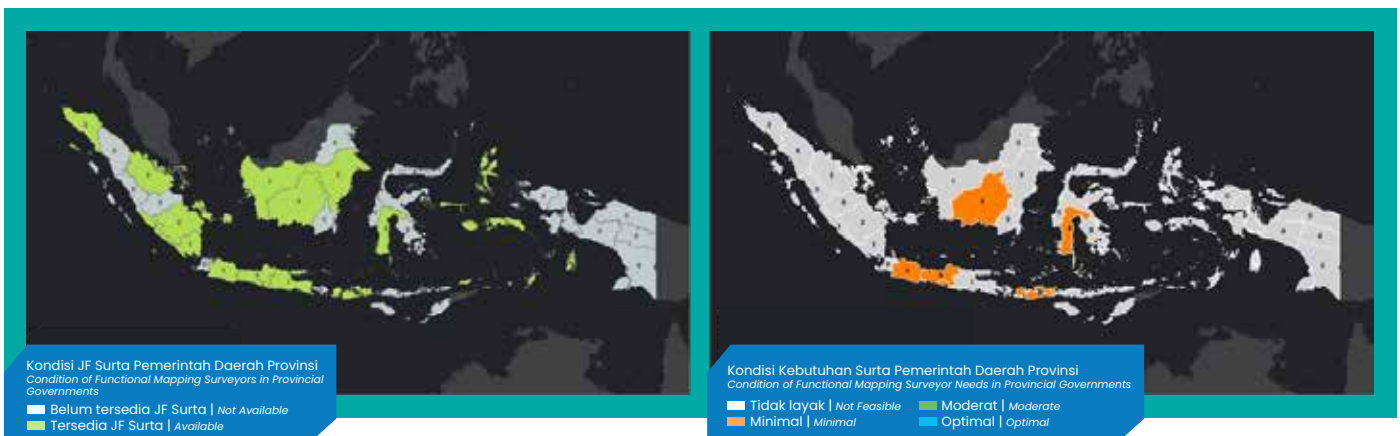
1. The functional mapping surveyors are spread across nine (9) ministries/institutions, 20 provincial governments, and 67 district/city governments.
2. Of the total, 812 mapping surveyors are assigned to ministries/institutions, 56 to provincial governments and 137 to district/city governments.

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Functional Mapping Surveyors



Distribusi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada K/L ▲
Distribution of Functional Mapping Surveyors Across Ministries and Institutions



Pemerintah Provinsi
Provincial Government**Belum memiliki JF Surta**

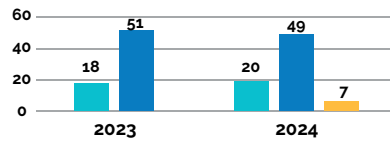
Without Functional Mapping Surveyors

Memiliki JF Surta

With Functional Mapping Surveyors

Kondisi JF Surta Pemerintah Daerah Provinsi

Condition of Functional Mapping Surveyors in Provincial Governments

**Provinsi**

Province

PNS

Government workers

PPPK

Civil Servant with Employment Agreement

Kondisi Ketersediaan di JF Surta Pemerintah Daerah Provinsi Berdasarkan Kebutuhan

Availability of Functional Mapping Surveyors in Provincial Government Based on Needs

**Minimal**

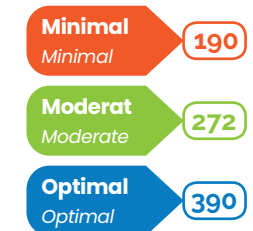
Minimal

Tidak Layak

Not Feasible

Proyeksi Kebutuhan JF Surta Pemerintah Daerah Provinsi

Projection of Functional Mapping Surveyor Needs for Provincial Governments

**Minimal**

Minimal

Moderat

Moderate

Optimal

Optimal

Distribusi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada Pemerintah Provinsi

Distribution of Functional Mapping Surveyors within Provincial Governments

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Uji kompetensi dilakukan untuk proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi dari SDM bidang IG atau pejabat fungsional dan calon pejabat fungsional surveyor pemetaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Pelaksanaan uji kompetensi diwajibkan dalam dalam rangka kenaikan jenjang, perpindahan dari jabatan lain, dan pengangkatan melalui promosi. Kegiatan uji kompetensi SDM bidang IG mulai dari koordinasi teknis, penyiapan skema dan perangkat uji, pelaksanaan uji kompetensi (asesmen), serta evaluasi dan monitoring.

Koordinasi teknis dilaksanakan secara internal dan eksternal. Koordinasi internal dilaksanakan dengan unit yang membidangi kepegawaian/SDM, tim penilai jabatan fungsional surveyor pemetaan, dan asesor kompetensi teknis di BIG. Koordinasi eksternal dilakukan dengan asesor kompetensi manajerial dan sosial kultural dari jabatan fungsional Assessor SDM

Competency Assessments of Functional Mapping Surveyors

The competency assessment is a measurement and assessment process for GI human resources, including current and prospective functional mapping surveyors, in performing their duties and responsibilities. This process is mandated under the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation No. 27 of 2020 in conjunction with No. 61 of 2020 concerning the Functional Mapping Surveyors. The competency assessment is mandatory for promotion, transfer from other functional roles, and appointment through career advancement. The competency assessment in GI involves several key stages, including technical coordination, preparation of assessment schemes and materials, execution of the competency assessments, as well as evaluation and monitoring activities.

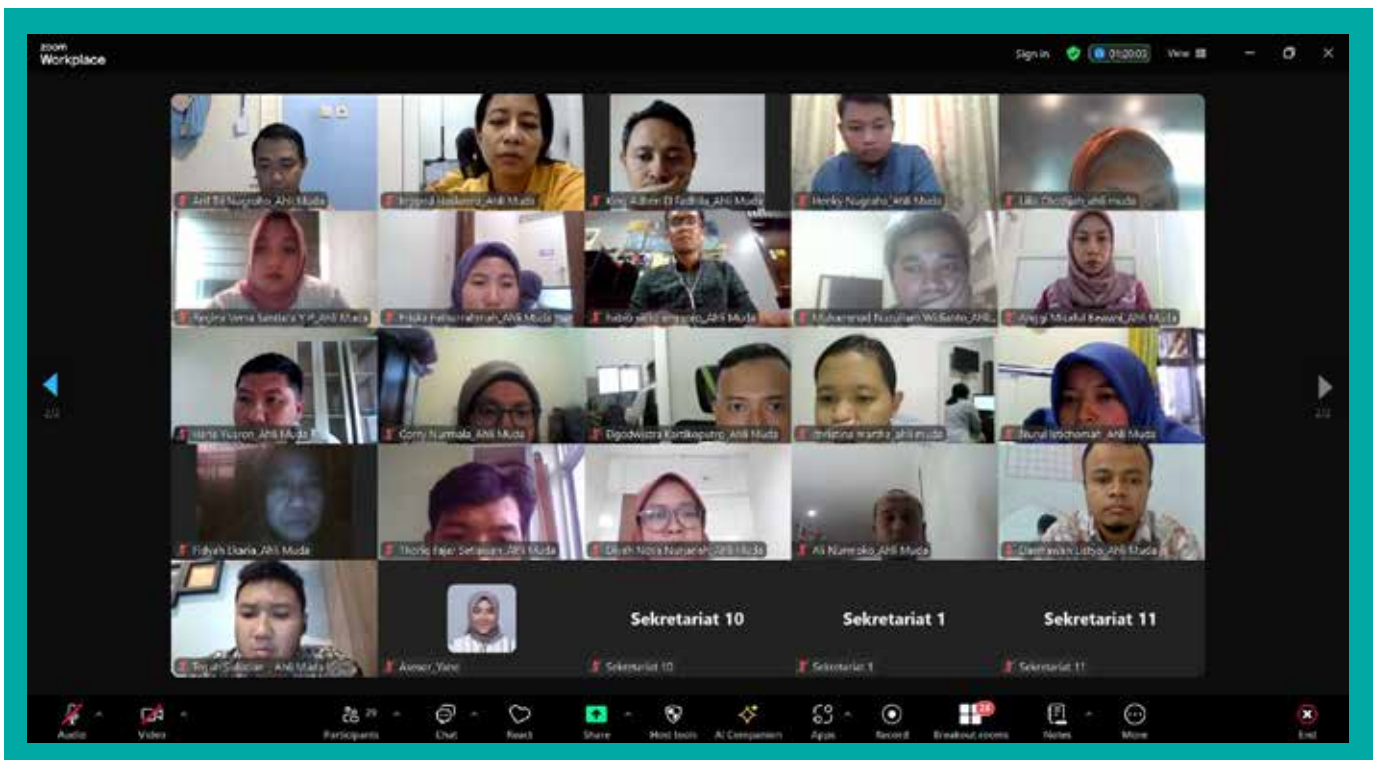
Technical coordination is carried out both internally and externally. Internal coordination is conducted with the personnel/HR unit, the Functional Mapping Surveyor Assessment Team, and the technical competency assessors at BIG. External coordination involves collaboration with managerial and socio-cultural competency assessors from

Aparatur di Asosiasi Assessor SDM Aparatur, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian ATR/BPN.

the Functional Position of Civil Servant Human Resources Assessors in the Association of Civil Servant Human Resources Assessors, the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), and the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN).

1. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional surveyor pemetaan periode I dilaksanakan pada 2 – 7 Februari 2024. Peserta uji kompetensi jabatan fungsional surveyor pemetaan periode ini sejumlah 47 peserta uji.
2. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional surveyor pemetaan periode II dilaksanakan pada tanggal 4 – 12 Juli 2024. Peserta uji kompetensi jabatan fungsional surveyor pemetaan periode ini sejumlah 37 peserta uji.
3. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional surveyor pemetaan periode III dilaksanakan pada periode bulan 7 – 13 November 2024. Uji kompetensi periode ini khusus untuk kenaikan jenjang pertama ke jenjang muda dan diikuti oleh 25 orang peserta uji.

1. *The functional competency assessment for mapping surveyors for Period I was conducted from February 2 to 7, 2024, with 47 participants.*
2. *The functional competency assessment for mapping surveyors for Period II was conducted from July 4 to 12, 2024, with 37 participants.*
3. *The functional competency assessment for mapping surveyors for Period III was conducted from November 7 to 13, 2024. This period's assessment was intended for 25 participants who were to be promoted from the First Level to the Junior Level.*



Persiapan Pelaksanaan Wawancara Manajerial dan Sosial
Preparation for the Managerial and Socio-Cultural Interviews



Pelaksanaan Uji Kompetensi Wawancara Teknis

Technical Competency Interview

Sosialisasi atau Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Sosialisasi atau bimbingan teknis Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dilakukan secara rutin setiap tahun. Kegiatan ini dilakukan secara luring dan daring. Hasil dari Pembinaan SDM Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan hingga tahun 2024 ini adalah 615 JF Surta terbina, yang terdiri atas:

Socialization or Technical Guidance for Functional Mapping Surveyors

Socialization or technical guidance for Functional Mapping Surveyors is conducted routinely each year through both offline and online platforms. As of 2024, human resources development efforts resulted in a total of 615 guided Functional Mapping Surveyor, consisting of:

120

JF Surta terbina tahun **2024** melalui **KOORDINASI TEKNIS PEMBINAAN, SOSIALISASI, DAN UJI KOMPETENSI**;

In 2024, 120 functional mapping surveyors were trained through technical coordination guidance, socialization, and competency assessment.

56

JF Surta terbina tahun **2023** melalui **KOORDINASI TEKNIS PEMBINAAN, SOSIALISASI, DAN UJI KOMPETENSI**;

In 2023, 56 functional mapping surveyors were trained through technical coordination guidance, socialization, and competency assessment.

109

JF Surta terbina capaian tahun **2022** (**15** orang melalui **KOORDINASI TEKNIS PEMBINAAN**, **30** orang melalui **SOSIALISASI**, dan **64** orang dari **UJI KOMPETENSI**); dan

In 2022, 109 functional mapping surveyors were trained, consisting of 15 through technical coordination guidance, 30 through socialization, and 64 through competency assessment.

285

JF Surta terbina tahun **2021** (**185** orang melalui **SOSIALISASI/ BIMTEK** dan **UJI KOMPETENSI** + **110** orang dari **DIKLAT TEKNIS PNB**).

In 2021, 285 functional mapping surveyors were trained, including 185 through socialization/technical guidance, and competency assessment, and 110 through technical training funded by non-tax state revenue.



Regulasi dan Kebijakan SDM IG

Standar teknis penyelenggaraan IG adalah persyaratan atau spesifikasi teknis, termasuk tata cara dan metode yang dibakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan IG (pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan dan pengamanan DG dan IG, penyebaran DG dan IG, dan penggunaan IG) termasuk regulasi/standar SDM pelaksana IG yang disusun berdasarkan konsensus/kesepakatan semua pihak.

Salah satu kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial adalah ketersediaan NSPK terkait SDM bidang IG. *Output* yang terkait dengan regulasi dan kebijakan SDM bidang IG pada 2024 adalah sebagai berikut:

1. SK Kepala BIG Nomor 171 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
2. SK Kepala BIG Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Penyelia dan Ahli Madya.
3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengesahan Hasil Sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan.
4. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor Ahu-0011096.Ah.01.07. Tahun 2024 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Persatuan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan Indonesia.

Selain pemenuhan regulasi, SDM bidang IG juga melakukan kajian terkait dinamika SDM bidang IG baik tingkat nasional maupun internasional dalam kerangka SDM IG Profesional.

1. Perumusan kebijakan pengembangan SDM IG dalam bentuk roadmap SDM IG Tahun 2025–2029.
2. Koordinasi Persyaratan Uji Sertifikasi Kompetensi bidang IG dengan Kementerian PUPR.
3. Penyusunan regulasi tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
4. Pembinaan Profesi Geografer dan Surveyor.

Regulation and Policy of IG HR

Technical standards for GI implementation refer to the technical requirements or specifications, including standardized procedures and methods, that ensure the smooth execution of GI activities. These activities encompass collecting, processing, storage, security, dissemination, and utilization of geospatial data and GI. The standards also cover regulations and criteria for GI human resources, which are developed through consensus/agreement among all relevant stakeholders.

One of the key technical policies in managing geospatial information is the availability of norms, standards, procedures, and criteria related to GI HR. The outputs associated with GI HR regulations and policies in 2024 are as follows.

1. *Head of BIG Decree No. 171 of 2024 concerning Guidelines for the Preparation of Functional Mapping Surveyor Needs*
2. *Head of BIG Decree No. 181 of 2024 concerning the Training Curriculum for Supervisory and Mid-Levels of Functional Mapping Surveyors*
3. *Decision of the Extraordinary National Conference No. 5 of 2024 concerning the Ratification of the Results of the Extraordinary National Conference of the Functional Mapping Surveyors*
4. *Decree of the Minister of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-0011096.AH.01.07. Year 2024 concerning the Ratification of the Establishment of the Association of Indonesian Functional Mapping Surveyors*

In addition to complying with regulations, GI HR conducts studies on its dynamics at both national and international levels to develop professional GI HR.

1. *Formulation of GI HR development policies as a GI HR roadmap for 2025–2029.*
2. *Coordination of GI competency certification requirements with the Ministry of Public Works and Housing (PUPR).*
3. *Development of regulations on risk-based business licensing (revision of Government Regulation No. 5 of 2021).*
4. *Development of geographer and surveyor professions.*



1



2



1 | DKT Penyusunan Roadmap SDM IG Tahun 2025-2029
FGD for Preparation of GI HR Roadmap 2025-2029

2 | Pertemuan ACACS ke-10 di Jakarta menjadi momentum penting diperkenalkannya laman ASEAN Surveyor yang dikembangkan AFLAG.

The 10th ACACS Meeting in Jakarta served as an important milestone for introducing the ASEAN Surveyor page developed by AFLAG

Sebagai langkah awal hilirisasi industri IG, Direktorat SDM IG mengadakan beberapa kegiatan strategis selama Agustus-Desember 2024. Kegiatan ini mencakup *sharing session* dengan Science Techno Park Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menggali informasi awal tentang pendampingan startup berbasis geospasial.

As an initial step in developing the downstream geospatial information industry, the Directorate of Geospatial Information HR organized several strategic activities between August and December 2024. These included sharing sessions with IPB Science Techno Park, the University of Indonesia (UI), and the National Research and Innovation Agency (BRIN) to explore preliminary insights on mentoring geospatial-based startups.

Selain itu, tim juga mempelajari model inkubasi bisnis melalui diskusi dengan Lokadata dan kunjungan ke Supermap untuk mengeksplorasi penerapan teknologi Sistem Informasi Geospasial (SIG) terkini, sebagai bagian dari adaptasi Informasi Geospasial ke berbagai sektor.

In addition, the team studied business incubation models through discussions with Lokadata and visited Supermap to explore the application of the latest Geospatial Information System (GIS) technologies as part of geospatial information adaptation across various sectors.

Pada tahun 2024, telah diselenggarakan tiga kali Pertemuan ASEAN Competent Authority Committee on Surveying (ACACS), yaitu di Bandung (26 Februari), Siem Reap (4 Juni), dan Jakarta (21 Oktober). ACACS merupakan forum resmi para otoritas kompeten di bidang jasa *surveying* dari negara-negara ASEAN. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) yang mendukung implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), khususnya terkait pengakuan dan mobilitas profesi surveyor di kawasan.

In 2024, three meetings of the ASEAN Competent Authority Committee on Surveying (ACACS) were convened in Bandung (February 26), Siem Reap (June 4), and Jakarta (October 21). ACACS is an official forum for competent authorities in surveying services across ASEAN member states. These meetings were part of the ongoing work of the ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS), which supports the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC), particularly in advancing the recognition and mobility of the surveying profession within the region.

Dalam pertemuan ACACS ke-8 di Bandung, dibahas penyusunan *Terms of Reference* (TOR) dan alur registrasi ASEAN Surveyor. Hasil

The 8th ACACS Meeting in Bandung focused on preparing the Terms of Reference (TOR) and the registration flow for ASEAN Surveyors.

ini ditindaklanjuti dalam pertemuan ke-9 di Siem Reap, yang menghasilkan kesepakatan final mengenai TOR dan alur registrasi tersebut, sekaligus penunjukan ASEAN Federation of Land Surveying and Geomatics (AFLAG) sebagai sekretariat ACACS yang akan mengelola proses registrasi.

Pertemuan ACACS ke-10 di Jakarta menjadi momentum penting dengan diperkenalkannya laman registrasi ASEAN Surveyor yang sedang dikembangkan oleh AFLAG. Selain itu, disepakati besaran biaya registrasi, serta dilaksanakan serah terima kepemimpinan ACACS dari Indonesia kepada Malaysia.

Pusat Pengembangan IIG untuk Mendukung Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)

BIG berperan sebagai Penghubung Simpul Jaringan yang mempunyai tugas mengintegrasikan Simpul Jaringan secara nasional; menyebarluaskan IGD kepada seluruh Simpul Jaringan melalui Jaringan IGD (JIGN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; membangun dan memelihara sistem akses JIGN pada Penghubung Simpul Jaringan; memfasilitasi penyebaran IG Simpul Jaringan melalui JIGN; melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan; dan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional di bidang JIGN. JIGN berfungsi sebagai sistem yang mengintegrasikan akses data dan Informasi Geospasial dari seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Namun, tantangan utama dalam pengelolaan JIGN adalah besarnya jumlah simpul jaringan yang tersebar luas, serta keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelolanya. Untuk menjawab tantangan tersebut, BIG menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra strategis melalui pembentukan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG).

Kerja sama ini diatur dalam Peraturan BIG Nomor 2 Tahun 2019 tentang PPIIG. Perguruan tinggi yang ditunjuk menjadi PPIIG bertugas membantu pembinaan simpul jaringan JIGN di wilayahnya masing-masing. Selama 2005–2023, telah terbentuk 28 PPIIG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, berlokasi di Perguruan Tinggi Negeri,

These discussions were followed up at the 9th Meeting in Siem Reap, concluding with a final agreement on the TOR and the registration flow. The meeting also formally appointed the ASEAN Federation of Land Surveying and Geomatics (AFLAG) as the ACACS Secretariat responsible for the registration process.

The 10th ACACS Meeting in Jakarta marked a key milestone with the introduction of the ASEAN Surveyor registration platform, which AFLAG has been developing. The meeting also resulted in an agreement on the registration fee structure and the formal handover of ACACS leadership from Indonesia to Malaysia.

Center for GI Infrastructure Development to Support the National Geospatial Information Network

BIG acts as a Network Node Connector to integrate Network Nodes nationally, disseminating BGI to all Network Nodes through the JIGN following laws and regulations. BIG is responsible for building and maintaining the JIGN access system on the Network Node Connector, facilitating the dissemination of IG Network Nodes through JIGN, providing guidance to Network Nodes, and holding national coordination meetings in the field of JIGN. JIGN functions as a system that integrates access to geospatial data and information from all government agencies at both central and regional levels.

However, the primary challenge in managing JIGN lies in the large number of widely dispersed network nodes and the limited human resources available to oversee them. BIG collaborates with universities as strategic partners to address these challenges by establishing the Center for Geospatial Information Infrastructure Development (PPIIG).

This cooperation is governed by BIG Regulation Number 2 of 2019 concerning the Center for Geospatial Information Infrastructure Development (PPIIG). Universities appointed as PPIIGs are responsible for assisting in developing JIGN network nodes within their respective regions. Between 2005–2023, 28 PPIIGs were established across Indonesia,

masing-masing terdiri dari 9 PPIIG wilayah Sumatera, 4 PPIIG wilayah Kalimantan, 5 PPIIG wilayah Sulawesi, 7 PPIIG wilayah Jawa, Bali, Nusa, dan 3 PPIIG wilayah Ambon dan Papua.

Sebagai bentuk evaluasi kinerja, pada tanggal 5 November 2024, BIG menyelenggarakan Forum Monitoring dan Evaluasi PPIIG secara *hybrid* di Jakarta. Sebanyak 18 PPIIG hadir langsung, sementara 10 lainnya mengikuti secara daring. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi kinerja, serta menyusun langkah strategis ke depan dalam mendukung pelaksanaan JIGN secara nasional.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelaksanaan IIG dan penguatan simpul jaringan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penguatan Sinergi Daerah dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Sepanjang tahun 2024, BIG menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) di lima wilayah regional: Sumatera, Papua-Maluku, Kalimantan, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Rakornas IG Nasional, dengan tema “Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Indonesia Emas dengan Informasi Geospasial yang Holistik, Integratif, dan Berkelanjutan”.

Rakor ini menjadi wadah kolaborasi antara BIG, pemerintah daerah, dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) untuk membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan IG. Beberapa isu utama yang diangkat antara lain pemenuhan peta dasar skala besar, penguatan kapasitas SDM, pengembangan simpul jaringan IG di daerah, serta hilirisasi dan pemanfaatan data geospasial untuk pembangunan wilayah.

all located within state universities. These include 9 PPIIGs in Sumatera, 4 in Kalimantan, 5 in Sulawesi, 7 in Java, Bali, and Nusa Tenggara, and 3 in Ambon and Papua.

As part of its performance evaluation efforts, BIG conducted a hybrid PPIIG Monitoring and Evaluation Forum in Jakarta on November 5, 2024. Representatives from 18 PPIIGs attended the forum in person, while 10 others participated virtually. This event strengthened coordination, assessed performance, and developed strategic plans to further support the nationwide implementation of JIGN.

Through this collaboration, the implementation of the Indonesian Geospatial Information (GI) Infrastructure and the strengthening of network nodes are expected to proceed more effectively, efficiently, and evenly across Indonesia.

Strengthening Regional Synergy in Organizing Geospatial Information

Throughout 2024, BIG conducted Coordination Meetings on Organizing Geospatial Information (GI) across five regional areas, namely Sumatera, Papua-Maluku, Kalimantan, Java-Bali-Nusa Tenggara, and Sulawesi. These meetings were part of a series leading up to the National GI Coordination Meeting, themed “The Role of Regional Governments in Realizing the Golden Indonesia through Holistic, Integrative, and Sustainable Geospatial Information.”

This coordination meeting is a collaborative platform among BIG, local governments, and the Center for Geospatial Information Infrastructure Development (PPIIG) to address key challenges in implementing Geospatial Information (GI). The main issues discussed include fulfilling large-scale base map requirements, enhancing HR capacity, developing IG network nodes at regional and downstream levels, and leveraging geospatial data for regional development.

Melalui forum ini, BIG menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur IG yang andal, serta perluasan akses dan pemanfaatan data geospasial untuk perencanaan, tata ruang, investasi, hingga pelayanan publik. Pemerintah daerah juga didorong untuk mempercepat penguatan jaringan Informasi Geospasial daerah (JIGD) guna mendukung integrasi data dan penerapan prinsip Satu Peta di tingkat lokal.

Pengelolaan, Penyebarluasan, dan Pemanfaatan Informasi Geospasial

BIG terus meningkatkan kapasitas dalam mengelola, menyebarluaskan, dan mendorong pemanfaatan Informasi Geospasial secara lebih luas dan inklusif. Melalui berbagai platform digital seperti Ina-Geoportal versi 3, aplikasi PetaKita, dan sistem layanan publik berbasis spasial lainnya, BIG menghadirkan data geospasial yang lebih mudah diakses, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna lintas sektor.

Pengembangan Ina-Geoportal versi 3 menjadi langkah signifikan dalam menghadirkan antarmuka yang lebih intuitif, kecepatan akses yang lebih baik, serta sistem *backend* yang mendukung integrasi data spasial dari berbagai instansi pusat dan daerah. Visualisasi peta tematik yang dinamis dan navigasi metadata yang lebih canggih turut meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus memperkuat dukungan BIG terhadap Kebijakan Satu Data dan Satu Peta.

BIG juga secara aktif melaksanakan kegiatan alih media dan digitalisasi Data Geospasial (DG) analog, dengan fokus pada wilayah Papua, guna memperluas arsip spasial nasional dan meningkatkan aksesibilitas data historis untuk kebutuhan riset, perencanaan, dan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, BIG menegaskan peran strategisnya sebagai penyedia data spasial yang terpercaya dan adaptif terhadap tuntutan era digital.

Peningkatan Kualitas dan Layanan Data Center

Pada tahun 2024, BIG berhasil mempertahankan dan memperluas cakupan sertifikasi ISO/IEC 27001 Transisi dan Resertifikasi ISO/IEC 27001:2013 ke ISO/IEC 27001:2022 untuk ruang lingkup meliputi

Through this forum, BIG emphasized the importance of providing reliable GI infrastructure and expanding access to and utilization of geospatial data for planning, spatial management, investment, and public services. Local governments were encouraged to strengthen Regional Geospatial Information Network (JIGD) to support data integration and the implementation of the One Map principle at the local level.

Management, Dissemination, and Utilization of Geospatial Information

BIG continues to enhance its capacity to manage, disseminate, and promote the broader use of geospatial information. Through various digital platforms, such as Ina-Geoportal version 3, the PetaKita application, and other spatial-based public service systems, BIG provides more accessible, relevant, and responsive geospatial data to users' needs across multiple sectors.

The development of Ina-Geoportal version 3 marks a significant advancement. It features a more intuitive interface, improved access speed, and a robust backend system that facilitates the integration of spatial data from various central and regional agencies. Enhanced dynamic thematic map visualizations and more sophisticated metadata navigation improve the user experience, reinforcing BIG's commitment to supporting the One Data and One Map Policy.

BIG is also actively transferring media and digitizing analog Geospatial Data, focusing on the Papua region. This effort aims to expand the national spatial archive and enhance the accessibility of historical geospatial data for research, planning, and public policy purposes. Through this initiative, BIG reinforces its strategic role as a trusted and adaptive provider of spatial data aligned with the demands of the digital era.

Data Center Quality and Service Improvement

In 2024, BIG successfully maintained and expanded the scope of its ISO/IEC 27001 certification, namely from ISO/IEC 27001:2013 for Transition and Recertification to ISO/IEC 27001:2022 for Data

Data Center dan Network. ISO/IEC 20000:2018 Surveillance audit ISO/IEC 20000:2018 untuk ruang lingkup Layanan Internet, Layanan Email dan Layanan Cloud Storage. Sertifikasi penambahan ruang lingkup ISO/IEC 20000:2018 untuk Layanan Map Service RBI.

Audit eksternal yang dilaksanakan pada Desember 2024 menunjukkan bahwa layanan BIG memenuhi standar internasional dalam aspek ketersediaan, keamanan, dan keberlanjutan sistem informasi. Pengakuan ini semakin diperkuat dengan pencapaian predikat “Implementasi Terkelola” dalam penilaian tingkat kematangan keamanan siber nasional.

Selain itu, BIG juga aktif dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan capaian indeks SPBE sebesar 3,88, lebih tinggi dari rata-rata LPNK. Peningkatan ini tercermin dari naiknya tingkat kematangan di tiga domain utama: kebijakan, tata kelola, dan manajemen layanan digital. Hal ini menunjukkan komitmen BIG dalam mewujudkan tata kelola Informasi Geospasial yang andal, aman, dan selaras dengan prinsip transparansi, serta pelayanan publik berbasis teknologi.

Penerapan Standar Teknis untuk Mendukung Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional berbasis data geospasial yang andal, BIG terus memastikan terpenuhinya standar teknis dalam seluruh proses penyelenggaraan Informasi Geospasial. Sepanjang tahun 2024, berbagai capaian penting telah diraih dalam aspek ini. Salah satunya, BIG berhasil masuk dalam lima besar nomine kategori Komisi Teknis (Komtek) Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) Berkinerja Terbaik dalam ajang bergengsi *Herudi Technical Committee Award (HTCA)* 2024. BIG telah berhasil mengembangkan tata kelola standarisasi Informasi Geospasial,

Centers and Networks. Additionally, BIG underwent a surveillance audit for ISO/IEC 20000:2018, covering Internet Services, Email Services, and Cloud Storage Services. The certification scope was also expanded to include Map Services of Indonesian Topographic Map under ISO/IEC 20000:2018.

An external audit conducted in December 2024 confirmed that BIG's services meet international standards for information system availability, security, and sustainability. Attaining the “Managed Implementation” predicate in the national cybersecurity maturity level assessment further reinforced this recognition.

In addition, BIG actively supports the implementation of the Electronic Government System (SPBE), achieving an SPBE index score of 3.88, which is above the average for Non-Ministerial Government Institutions. This improvement reflects a higher level of maturity in three key domains: policy, governance, and digital service management. The achievement demonstrates BIG's commitment to establishing reliable, secure, and transparent geospatial information governance and delivering technology-driven public services.

Implementation of Technical Standards to Support Geospatial Information Development

To support national development through reliable geospatial data, BIG remains committed to ensuring the implementation of technical standards across all aspects of geospatial information management. Significant progress was made in this area in 2024. Notably, BIG was named one of the top five nominees in the Best Performing Technical Committee category for the Formulation of Indonesian National Standards at the prestigious 2024 Herudi Technical Committee Awards. BIG also strengthened the governance framework for geospatial information standardization, provided critical support for

mendukung penuh pelaksanaan KSP dan SDI lewat program standar/spesifikasi data, serta berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar internasional terutama ISO TC211.

BIG juga berhasil meraih penghargaan tingkat maturitas keamanan siber dengan capaian "Implementasi Terkelola," serta menyelesaikan transisi dan resertifikasi standar ISO/IEC 27001:2022 (keamanan informasi) dan ISO/IEC 20000-1:2018 (manajemen layanan TI). Sebelumnya, BIG telah memulai implementasi ISO/IEC 20000-1 dan ISO/IEC 27001 sejak tahun 2016 dan telah mendapatkan sertifikat di tahun 2017 untuk ISO/IEC 20000-1 dan 2018 untuk ISO/IEC 27001. ISO/IEC 20000-1:2018 merupakan standar internasional yang menentukan persyaratan bagi penyedia layanan untuk merencanakan, menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, revidu, mempertahankan dan meningkatkan *service management system* yang mereka miliki. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan Informasi Geospasial telah memenuhi standar internasional baik dari sisi keamanan maupun layanan teknologi informasi.

Audit eksternal diselenggarakan pada tanggal 2-4 Desember 2024 untuk mempertahankan pencapaian Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO/IEC 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi

implementing the OMP and the National Spatial Data Infrastructure and actively participated in developing international standards, particularly ISO/TC 211.

BIG successfully received the Cybersecurity Maturity Award with a "Managed Implementation" rating and completed the transition and recertification for ISO/IEC 27001:2022 (Information Security) and ISO/IEC 20000-1:2018 (IT Service Management). The agency began implementing ISO/IEC 20000-1 and ISO/IEC 27001 in 2016 and achieved certification in 2017 and 2018, respectively. ISO/IEC 20000-1:2018 is an international standard that outlines the requirements for service providers to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain, and continually improve their service management systems. These accomplishments demonstrate that BIG's geospatial information management systems align with internationally recognized standards for both information security and IT service management.

An external audit was conducted on December 2-4, 2024, to ensure the continued certification of ISO/IEC 27001:2022 for Information Security Management Systems and ISO/IEC 20000-1:2018 for Information Technology Service Management Systems.



Dalam mendukung ketersediaan layanan geospasial digital, BIG juga telah mengembangkan dan merilis Ina-Geoportal versi 3 dan aplikasi PetaKita.

Ina-Geoportal versi 3 yang dapat diakses melalui laman: <https://tanahair.indonesia.go.id>. Beberapa peningkatan utama pada versi terbaru ini meliputi aspek *backend* dan *frontend*. Aspek *backend* mencakup akses data lebih cepat dan stabil, integrasi lintas platform data pusat-daerah, serta sistem keamanan yang lebih kuat. Sedangkan peningkatan pada *frontend* mencakup tampilan lebih modern dan ramah pengguna, fitur pencarian berbasis metadata dan lokasi lebih mudah, serta peta tematik dan visualisasi data yang lebih interaktif. Pembaruan ini dirancang untuk mendukung implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia, sekaligus mempermudah publik dan pemerintah dalam mengakses serta menggunakan data geospasial untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

Adapun pengembangan aplikasi PetaKita difokuskan pada peningkatan kualitas performa dan kemudahan penggunaan di perangkat *mobile*. Salah satu fitur baru yang ditambahkan adalah akses peta *offline*, sehingga pengguna tetap bisa melihat peta meski tanpa koneksi internet—fitur ini sangat membantu bagi masyarakat di daerah yang sulit jaringan. Aplikasi ini kini bisa diunduh melalui: PetaKita di Google Play Store.

BIG juga memperkuat pengelolaan arsip Informasi Geospasial melalui kegiatan penyimpanan dan pengamanan data geospasial analog, seperti foto udara, yang telah diproses secara sistematis dan aman hingga tahap autentikasi berbasis QR code. Pada tahun 2024, tahap penataan DG Analog dilaksanakan selama 16 minggu dimulai pada bulan April. Tahap penataan DG Analog bertujuan untuk melakukan penataan pada foto udara yang disimpan ke dalam *box* penyimpanan disesuaikan dengan wilayah, tahun pemotretan, skala foto dan jalur terbang. Penataan foto udara menghasilkan sejumlah 410 *box* foto udara.

To support the availability of digital geospatial services, BIG has developed and launched Ina-Geoportal Version 3, along with the PetaKita application.

Ina-Geoportal Version 3 is accessible at <https://tanahair.indonesia.go.id>. This latest version introduces significant enhancements to both backend and frontend components. Backend improvements include faster and more stable data access, cross-platform central and regional data integration, and a strengthened security system. The platform now features a more modern and user-friendly interface, improved metadata and location-based search functionality, and more interactive thematic maps and data visualizations. These updates are designed to support the implementation of Indonesia's One Data Policy and to facilitate easier access to geospatial data for both the public and government agencies in planning and decision-making processes.

The development of the PetaKita application has focused on enhancing performance and improving usability on mobile devices. One of the key new features is offline map access, enabling users to view maps without an Internet connection, which is particularly beneficial for those in areas with limited network coverage. The application is now available for download via Google Play Store under the name PetaKita.

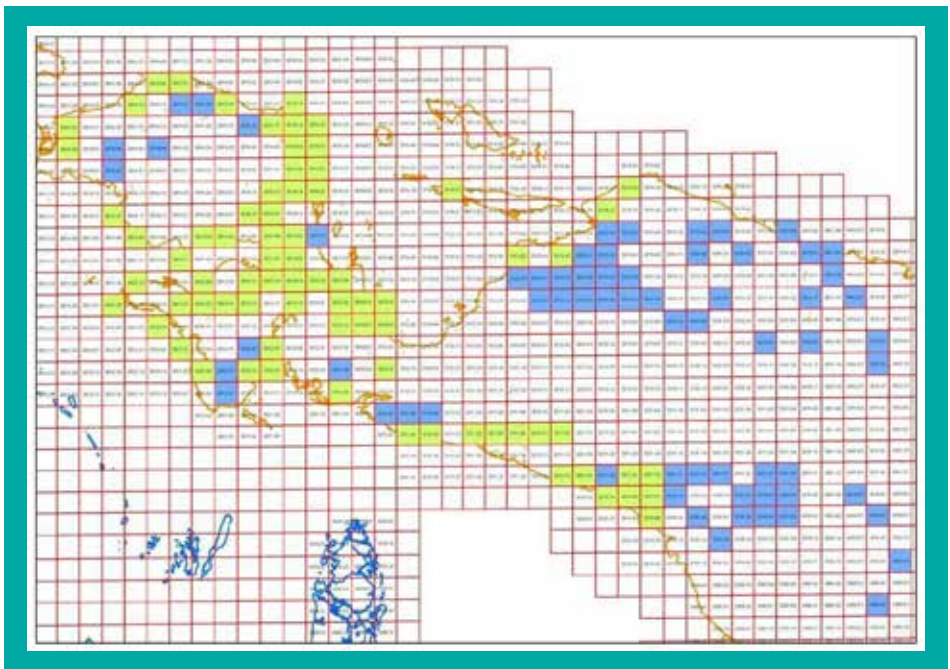
BIG has also strengthened the management of geospatial information archives by systematically storing and securing analog geospatial data, such as aerial photographs. This process includes QR code technology authentication to ensure data integrity and traceability. In 2024, the Analog Geospatial Data organization phase was carried out over 16 weeks starting in April. This phase aimed to categorize aerial photographs based on region, year of capture, scale, and flight path. As a result, 410 boxes of aerial photographs were successfully organized.

Tabel Rekapitulasi Penataan DG Analog Tahun 2024
2024 Recapitulation of Analog Geospatial Data Arrangements

No	Wilayah Region	Jumlah Box Box Number	Ruangan Room
1.	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	71	2
2.	Kalimantan Barat West Kalimantan	16	2
3.	Kalimantan Selatan South Kalimantan	1	2
4.	Kalimantan Timur East Kalimantan	81	2
5.	Irianjaya/PNG Irianjaya/PNG	101	2
6.	Sulawesi Utara North Sulawesi	2	2
7.	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	10	2
8.	Sumatera Sumatra	78	2
9.	Jawa Tengah Central Java	42	2
10.	Jawa Barat West Java	8	2
Jumlah Total		410	

Tahap alih media dilaksanakan pada foto udara *diapositive* Wilayah Papua sebanyak 9.112 scene foto udara atau 78 album NLP dan menyisakan 44 NLP Wilayah Papua yang belum dilakukan alih media dikarenakan telah memenuhi target alih media sebanyak 9.000 scene yang tercantum di dalam KAK. Sejumlah 9.112 scene foto udara hasil alih media kemudian menjadi input di dalam tahapan koreksi geometrik, tahap *cropping* foto udara, tahap mosaik foto udara, tahap *color balancing*, tahap pembuatan indeks spasial, tahap pembuatan *quicklook*, dan tahap autentikasi.

The media transfer stage was carried out on *diapositive* aerial photographs of the Papua Region, totaling 9,112 aerial photo scenes, equivalent to 78 Map Sheet Number (MSN) albums. This exceeded the media transfer target of 9,000 scenes as outlined in the ToR, leaving 44 MSN albums unprocessed. The 9,112 aerial photo scenes that underwent media transfer were subsequently processed through several stages, namely geometric correction, aerial photo cropping, mosaicking, color balancing, spatial index creation, quick-look generation, and final authentication.



KETERANGAN | REMARK

- Tidak ada foto udara diapositive
No diapositive aerial photo
- Sudah alih media tahun 2023
Media transferred in 2023
- Sudah alih media tahun 2024
Media transferred in 2024

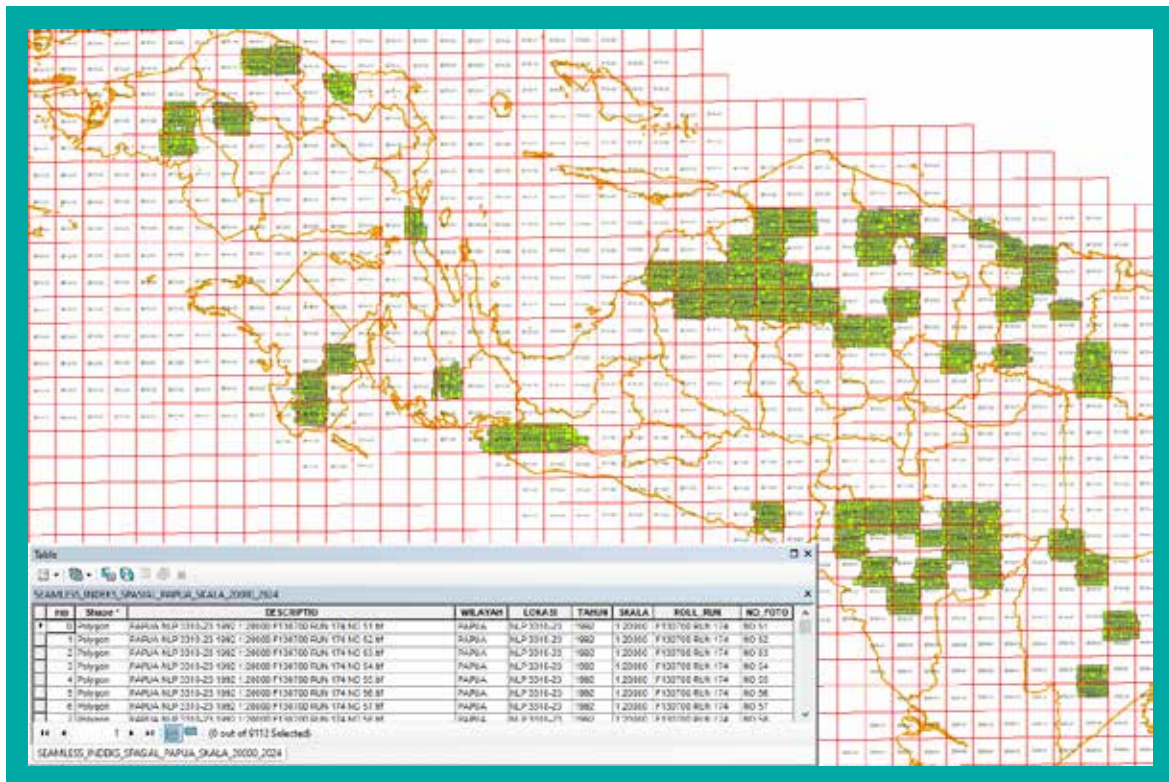
◀ Hasil alih media tahun 2024
Media Transfer Results in 2024

Adapun tahap koreksi geometrik dimulai pada minggu keempat bulan April. Pada tahap ini, dilakukan penyesuaian posisi foto udara agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, dengan bantuan data pendukung seperti jalur terbang, indeks foto, peta citra, dan *shapefile* peta dasar. Proses ini dilakukan pada 9.112 foto udara.

Setelah itu, foto-foto yang telah disesuaikan masuk ke tahap pemotongan (cropping), yaitu menghapus bagian pinggir foto yang tidak dibutuhkan agar lebih rapi sebelum digabungkan. Selanjutnya, foto-foto yang telah dipotong digabungkan dalam tahap mosaik, sehingga membentuk peta utuh dari wilayah yang dipetakan. Hasil akhirnya berupa 78 file mosaik dalam format *tiff, yang kemudian dilengkapi dengan data informasi (metadata) pada masing-masing file.

The geometric correction stage commenced in the fourth week of April. During this phase, positional adjustments were made to the aerial photographs to align them with actual ground conditions. The process utilized supporting data, including flight path records, photo indexes, image maps, and base map shapefiles. A total of 9,112 aerial photographs were processed during this stage.

*Following geometric correction, the adjusted aerial photographs proceeded to the cropping stage. In this phase, unwanted edges were removed to produce cleaner images. The cropped photos were then compiled during the mosaicking stage, resulting in a seamless map of the surveyed area. This process produced 78 mosaic files in *TIFF format, each accompanied by detailed metadata.*



Tahap berikutnya adalah pembuatan *quicklook*, yaitu gambar pratinjau cepat dari foto udara. Sebanyak 9.112 *quicklook* dalam format *png telah dihasilkan untuk

*The next step was to create a quicklook, which is a quick preview image of an aerial photo. A total of 9,112 quicklooks in *PNG format have been generated for the Papua region.*

wilayah Papua. *Quicklook* ini berfungsi untuk menampilkan isi foto secara cepat tanpa membuka file aslinya.

Tahapan terakhir dalam proses penyimpanan dan pengamanan Data Geospasial (DG) Analog adalah autentikasi, yaitu proses untuk memastikan keaslian dokumen. Autentikasi dilakukan menggunakan QR Code yang berisi informasi penting seperti deskripsi dan lokasi penyimpanan foto udara, serta terhubung dengan sistem e-catalog. QR Code ini ditempelkan pada masing-masing dari 9,112 foto udara untuk mempermudah proses identifikasi dan pengecekan keaslian. Seluruh proses penyimpanan dan pengamanan DG Analog selesai dilaksanakan pada tanggal 16 September 2024.

BIG juga menerbitkan SNI 9257:2024 tentang Neraca Spasial Habitat Pesisir dan Bentik Laut Dangkal, sebagai dukungan terhadap program Ocean Accounts nasional. Neraca Sumber Daya Laut atau Ocean Accounts merupakan program pengelolaan data terkait aset sumber daya laut, interaksi, dan perubahan antar waktu di wilayah tertentu. Salah satu metode untuk menghitung aset nilai kekayaan ekosistem pesisir dan laut yaitu melalui penyusunan neraca spasial habitat pesisir dan bentik laut dangkal. Neraca spasial dapat menggambarkan secara keruangan mengenai cadangan/aset sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diwujudkan dalam bentuk luas perubahannya.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa BIG tidak hanya menjaga standar teknis, tetapi juga aktif berkontribusi dalam menciptakan ekosistem Informasi Geospasial yang kuat dan dapat diandalkan dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Bhumandala Award 2024

Dalam rangka melaksanakan tugas dalam melaksanakan pembinaan terhadap pembangunan infrastruktur IG di Simpul Jaringan dan upaya untuk memperkuat penyediaan dan pemanfaatan IIG,, BIG kembali menyelenggarakan Bhumandala Award pada tahun 2024. Penghargaan ini diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah melakukan penyelenggaraann Simpul Jaringan IG dengan baik.

These quicklooks allow users to quickly view the contents of a photo without opening the original high-resolution file.

The final stage in storing and securing analog geospatial data was authentication, which ensures the authenticity of each document. Authentication was carried out using a QR code containing essential information, such as the description and storage location of the aerial photo, and was integrated with the e-catalog system. This QR code was attached to each of the 9,112 aerial images to facilitate identification and verification. The entire process of storing and securing analog geospatial data was completed on September 16, 2024.

BIG also issued SNI 9257:2024 on the Spatial Accounting of Coastal and Shallow Benthic Habitats to support the national Ocean Accounts program. Ocean Accounts is a data management initiative that tracks marine resource assets, interactions, and changes over time within specific areas. One method for calculating the asset value of coastal and marine ecosystems is through the preparation of spatial accounting for coastal habitats and shallow marine benthics. This spatial accounting provides a representation of natural resource and environmental reserves in terms of changes in area.

These various steps demonstrate that BIG not only maintains technical standards, but also actively contributes to the development of a robust and reliable geospatial information ecosystem to support sustainable national development.

The 2024 Bhumandala Award

As part of its mandate to guide the development of GI infrastructure at network nodes and to strengthen the provision and utilization of spatial data across sectors, BIG will once again hold the Bhumandala Award in 2024. This national recognition was awarded to ministries, government institutions, and regional administrations that successfully implemented and managed GI network nodes.



Fotografer | Photographer:
Adnan Aditya Putra

Lokasi | Location:
**Pelabuhan Tayando,
Kota Tual, Maluku**

Dengan tema “Tata Kelola Data Spasial Berkualitas untuk Indonesia yang Lebih Baik”, Bhumandala Award menjadi ajang apresiasi dan dorongan peningkatan kapasitas simpul jaringan, penyelenggaraan IG tematik, pembakuan nama rupabumi, serta penyusunan batas administrasi desa dan kelurahan.

Melalui penghargaan ini, BIG juga memperkuat peran strategis instansi pemerintah dalam menyediakan data spasial yang terbuka, terstandar, dan dapat digunakan lintas sektor guna mendukung pembangunan nasional berbasis data.

Penghargaan Bhumandala yang sudah berlangsung selama 1 dekade (sejak tahun 2014) dilaksanakan dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil menyelenggarakan dan menerapkan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2024 ini Penghargaan Bhumandala terdiri dari 4 (empat) tema utama, yaitu: Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial, Nama Rupabumi, Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan, dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik.

Carrying the theme “Quality Spatial Data Governance for a Better Indonesia,” the Bhumandala Award aimed to acknowledge and encourage improvements in node capacity, the management of TGI, the standardization of geographic names, and the delineation of village and sub-district administrative boundaries.

Through this initiative, BIG reaffirms the strategic role of government agencies in providing open, standardized, and interoperable geospatial data to support evidence-based national development.

First launched in 2014, the Bhumandala Award marked its 10th year in 2024. Over the past decade, it has served as a platform for recognizing ministries, institutions, and local governments that have integrated geospatial information into development planning. This year, the award highlighted four focus areas, namely performance of geospatial information network nodes, geographic name standardization, village and sub-district boundary data, and the implementation of thematic geospatial information.

PENERIMA BHUMANDALA AWARD 2024

2024 Bhumandala Award Recipients



1 BHUMANDALA KINERJA SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bhumandala Award for Geospatial
Information Network Node Performance

No	PENERIMA PENGHARGAAN Award Recipients	STATUS PENGHARGAAN Award Status
KATEGORI KEMENTERIAN/LEMBAGA MINISTRY/INSTITUTION CATEGORY		
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ministry of Public Works and Housing	Kanaka (Gold)
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ministry of Environment and Forestry	Kanaka (Gold)
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ministry of Marine Affairs and Fisheries	Kanaka (Gold)
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR)	Kanaka (Gold)
5	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Peatland and Mangrove Restoration Agency	Rajata (Silver)
6	Kementerian Pertanian (Kementan) Ministry of Agriculture	Ariti (Bronze)
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINCIAL GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat West Java Provincial Government	Kanaka (Gold)
2	Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta D.I. Yogyakarta Provincial Government	Kanaka (Gold)
3	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan South Sumatra Provincial Government	Kanaka (Gold)
4	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan South Kalimantan Provincial Government	Kanaka (Gold)
5	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Government	Kanaka (Gold)
6	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Lampung Provincial Government	Rajata (Silver)
7	Pemerintah Provinsi Daerah Kalimantan Timur East Kalimantan Provincial Government	Rajata (Silver)
8	Pemerintah Daerah Provinsi Riau Riau Provincial Government	Ariti (Bronze)
9	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Central Java Provincial Government	Ariti (Bronze)
10	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur East Java Provincial Government	Ariti (Bronze)

No	PENERIMA PENGHARGAAN Award Recipients	STATUS PENGHARGAAN Award Status
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REGENCY GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Government of Bantul Regency	Kanaka (Gold)
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Government of Sleman Regency	Kanaka (Gold)
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Government of Sragen Regency	Kanaka (Gold)
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Government of Tulungagung Regency	Rajata (Silver)
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Government of Kubu Raya Regency	Rajata (Silver)
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Government of Gunung Kidul Regency	Rajata (Silver)
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Government of Musi Banyuasin Regency	Rajata (Silver)
8	Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Government of Purbalingga Regency	Ariti (Bronze)
9	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Government of Banyumas Regency	Ariti (Bronze)
10	Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Government of East Kotawaringin Regency	Ariti (Bronze)
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KOTA CITY GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Kota Tangerang Government of Tangerang City	Kanaka (Gold)
2	Pemerintah Daerah Kota Bontang Government of Bontang City	Kanaka (Gold)
3	Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Government of Banjarbaru City	Kanaka (Gold)
4	Pemerintah Daerah Kota Manado Government of Manado City	Rajata (Silver)
5	Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Government of Banjarmasin City	Rajata (Silver)
6	Pemerintah Daerah Kota Magelang Government of Magelang City	Rajata (Silver)
7	Pemerintah Daerah Kota Palembang Government of Palembang City	Rajata (Silver)
8	Pemerintah Daerah Kota Bandung Government of Bandung City	Ariti (Bronze)
9	Pemerintah Daerah Kota Cimahi Government of Cimahi City	Ariti (Bronze)
10	Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Government of Mojokerto City	Ariti (Bronze)

2

BHUMANDALA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Bhumandala Award for Thematic
Geospatial Information Management



No	PENERIMA PENGHARGAAN Award Recipients	STATUS PENGHARGAAN Award Status
1	Peta Mangrove – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Mangrove Map – Ministry of Environment and Forestry	Kanaka (Gold)
2	Peta Rencana Detail Tata Ruang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Detailed Spatial Planning Map – Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency	Rajata (Silver)
3	Peta Kawasan Konservasi Perairan Skala 1:50.000 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 1:50,000-Scale Marine Conservation Area Map – Ministry of Marine Affairs and Fisheries	Ariti (Bronze)



3
BHUMANDALA
NAMA RUPABUMI
Bhumandala Award for
Geographical Names

No	PENERIMA PENGHARGAAN Award Recipients	STATUS PENGHARGAAN Award Status
KATEGORI KEMENTERIAN/LEMBAGA MINISTRY/INSTITUTION CATEGORY		
1	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Data and Information Technology Center, Ministry of Public Works and Public Housing	Kanaka (Gold)
2	Pusat Hidro-Oseanografi, TNI Angkatan Laut Hydro-Oceanography Center, Indonesian Navy	Rajata (Silver)
3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Lingkungan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Directorate General of Marine and Marine Spatial Environment Management, Ministry of Marine Affairs and Fisheries	Ariti (Bronze)
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINCIAL GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Government of East Java Province	Kanaka (Gold)
2	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Government of West Java Province	Rajata (Silver)
3	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Government of Central Java Province	Rajata (Silver)
4	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Government of West Kalimantan Province	Ariti (Bronze)
5	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Government of South Sumatra Province	Ariti (Bronze)
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REGENCY GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Government of Cianjur Regency	Kanaka (Gold)
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Government of Lebak Regency	Kanaka (Gold)
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Government of Kudus Regency	Rajata (Silver)
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Government of Magelang Regency	Rajata (Silver)
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Government of Sumedang Regency	Ariti (Bronze)
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KOTA CITY GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Kota Semarang Government of Semarang City	Kanaka (Gold)
2	Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Government of Banjarmasin City	Rajata (Silver)
3	Pemerintah Daerah Kota Cimahi Government of Cimahi City	Rajata (Silver)
4	Pemerintah Daerah Kota Banjar Government of Banjar City	Ariti (Bronze)
5	Pemerintah Daerah Kota Samarinda Government of Samarinda City	Ariti (Bronze)

No	PENERIMA PENGHARGAAN Award Recipients	STATUS PENGHARGAAN Award Status
KATEGORI PIHAK LAIN (ORGANISASI/PERORANGAN) CATEGORY OF EXTERNAL PARTIES (ORGANIZATIONS/INDIVIDUALS)		
1	Komunitas Jelajah Gunung Bandung Bandung Mountain Explorers	Kanaka (Gold)
2	Prof. Dr. RMT. Multamia Lauder	Kanaka (Gold)
3	Universitas Muhammadiyah Malang – Fakultas Ekonomi dan Bisnis University of Muhammadiyah Malang – Faculty of Economics and Business	Rajata (Silver)
4	Dr. Fajar Erikha, S.Psi., M.Hum	Rajata (Silver)
5	Dr. Nani Darheni, S.S., M.Pd.	Ariti (Bronze)

4

BHUMANDALA INFORMASI GEOSPASIAL BATAS DESA/ KELURAHAN

Bhumandala: Geospatial Information on Village and Sub-district Boundaries



No	PENERIMA PENGHARGAAN Award Recipients	STATUS PENGHARGAAN Award Status
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINCIAL GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Government of West Java Province	Kanaka (Gold)
2	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Government of South Kalimantan Province	Kanaka (Gold)
3	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Government of the Special Region of Yogyakarta	Rajata (Silver)
4	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Government of East Java Province	Rajata (Silver)
5	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Government of Bangka Belitung Islands Province	Ariti (Bronze)
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REGENCY GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Government of Bandung Regency	Kanaka (Gold)
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Government of Barito Kuala Regency	Kanaka (Gold)
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Government of Sukoharjo Regency	Rajata (Silver)
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Government of West Bangka Regency	Ariti (Bronze)
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Government of Kebumen Regency	Ariti (Bronze)

No	PENERIMA PENGHARGAAN Award Recipients	STATUS PENGHARGAAN Award Status
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KOTA CITY GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Kota Semarang Government of Semarang City	Kanaka (Gold)
2	Pemerintah Daerah Kota Surabaya Government of Surabaya City	Kanaka (Gold)
3	Pemerintah Daerah Kota Cirebon Government of Cirebon City	Rajata (Silver)
4	Pemerintah Daerah Kota Banjar Government of Banjar City	Ariti (Bronze)
5	Pemerintah Daerah Kota Metro Government of Metro City	Ariti (Bronze)



5
BHUMANDALA
NAWASENA – PENDATANG
BARU TERBAIK
Bhumandala Nawasena
Award for Best Newcomer

No	PENERIMA PENGHARGAAN Award Recipients	STATUS PENGHARGAAN Award Status
KATEGORI KEMENTERIAN/LEMBAGA MINISTRY/INSTITUTION CATEGORY		
1	Peta Rencana Rinci Wilayah Pertahanan Skala 1:50.000 – Kementerian Pertahanan Detailed Defense Area Planning Map at 1:50,000 Scale – Ministry of Defense	Nawasena IGT Nawasena TGI
2	Peta Lahan Peternakan Skala 1:50.000 – Kementerian Pertanian Farmland Map at 1:50,000 Scale – Ministry of Agriculture	Nawasena IGT Nawasena TGI
3	Kementerian Agama Ministry of Religious Affairs	Nawasena Simpul Jaringan Nawasena Network Node
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINCIAL GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Government of Central Sulawesi Province	Nawasena Simpul Jaringan Nawasena Network Node
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REGENCY GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Government of Batang Regency	Nawasena Simpul Jaringan Nawasena Network Node
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Government of Berau Regency	Nawasena Simpul Jaringan Nawasena Network Node
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Government of Ogan Ilir Regency	Nawasena Simpul Jaringan Nawasena Network Node
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KOTA CITY GOVERNMENT CATEGORY		
1	Pemerintah Daerah Kota Malang Government of Malang City	Nawasena Simpul Jaringan Nawasena Network Node
2	Pemerintah Daerah Kota Cirebon Government of Cirebon City	Nawasena Simpul Jaringan Nawasena Network Node

PENYELENGGARAAN JASA DAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL

Produk Informasi Geospasial mencakup peta dasar, dan jaring kontrol geodesi (JKG). Peta Dasar meliputi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang menggambarkan kondisi permukaan bumi, mencakup wilayah laut hingga daratan. Sedangkan Jaring Kontrol Geodesi (JKG) terdiri dari Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN), Jaring Kontrol Vertikal Nasional (JKVN), dan Jaring Kontrol Gaya Berat Nasional (JKBN). BIG juga menyediakan data Continuously Operating Reference Station (CORS), data Pengamatan Pasang Surut (PPS), dan data Digital Elevation Model (DEM).

Selain produk, BIG juga menawarkan layanan jasa antara lain penyelenggaraan Informasi Geospasial, pelatihan geospasial, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan geospasial, dan penyediaan alat pengumpulan data geospasial.

Untuk meningkatkan efektivitas layanan, BIG membentuk Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, sebuah unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pelayanan jasa dan produk geospasial. Pembentukan dan tata kerja balai ini diatur dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2024.

PROVISION OF GEOSPATIAL INFORMATION SERVICES AND PRODUCTS

Providing geospatial information products encompasses base maps and geodetic control networks (GCN). Base maps include the Indonesian Topographic Map, which illustrates surface features across both terrestrial and marine environments. The Geodetic Control Network (GCN) comprises the National Horizontal Control Network (NHCN), the National Vertical Control Network (NVCN), and the National Gravity Control Network (NGCN). In addition, BIG provides access to data from Continuous Operating Reference Stations (CORS), tidal observation stations, and Digital Elevation Models (DEM).

In addition to its geospatial products, BIG provides a range of services, including dissemination of geospatial information, training programs, educational facilities and infrastructure, and access to geospatial data collection tools.

To enhance service effectiveness, BIG established the Geospatial Products and Services Office, a technical implementation unit responsible for delivering geospatial services and products. Geospatial Information Agency Regulation No. 2 of 2024 governs this office's establishment and operational procedures.



Perbandingan target dan kinerja penyelenggaraan jasa dan produk informasi Geospasial

Comparison of Targets and Achievements in the Provision of Geospatial Information Services and Products

SASARAN UTAMA Key objective	INDIKATOR Indicator	SATUAN Unit	TARGET Target	CAPAIAN Achievement
Terselenggaranya PNBP Fungsional Layanan Pendidikan dan Pelatihan Implementation of Functional Non-Tax Revenue from Education and Training Services	-Persentase (%) realisasi pendapatan PNBP Fungsional Layanan Pendidikan dan Pelatihan dibandingkan dengan target Pendapatan PNBP Fungsional Layanan Pendidikan dan Pelatihan – Percentage (%) of realized functional non-tax revenue from education and training services compared to the targeted amount			
Terselenggaranya layanan jasa/produk bidang Informasi Implementation of Services and Products in the Field of Geospatial Information Geospasial	Customer Engagement Index atas layanan BIG Customer Engagement Index for BIG Services	Skala Likert (1–5) Likert Scale (1–5)	3	3,07
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan BIG Public Satisfaction Index for BIG Services	Skala Likert (1–4) Likert Scale (1–4)		
	Indeks Pelayanan Publik Public Service Index	Skala Likert (1–5) Likert Scale (1–5)	4,3	4,5
Terselenggaranya PNBP Fungsional Layanan Jasa Survey Pemetaan Implementation of Functional Non-Tax Revenue from Mapping Survey Services	Persentase (%) Realisasi Pendapatan PNBP Fungsional Layanan Jasa Survey Pemetaan dibandingkan dengan target Pendapatan PNBP Fungsional Layanan Jasa Survey Pemetaan Percentage (%) of realized functional non-tax revenue from mapping survey services compared to the targeted amount			
Terselenggaranya PNBP Fungsional Layanan Hasil Survey Pemetaan Implementation of Functional Non-Tax Revenue from Mapping Survey Results Services	-Persentase (%) Realisasi Pendapatan PNBP Fungsional Hasil Survey Pemetaan dibandingkan dengan target Pendapatan PNBP Fungsional Hasil Survey Pemetaan – Percentage (%) of realized functional non-tax revenue from mapping survey results services compared to the targeted revenue	%	30	72,8





Fotografer | Photographer:
Gin Gin Gustiar
Lokasi | Location:
**Jalan Layang Kelok 9,
Sumatera Barat**

Layanan Pendidikan dan Pelatihan

BIG melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial (PPKIG) terus memperkuat upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang geospasial. Kegiatan pengembangan kompetensi ini mengacu pada Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023 tentang Uraian Fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama.

Selama 2024, BIG telah menyelenggarakan total 26 kelas pelatihan, terdiri dari 8 pelatihan menggunakan anggaran Rupiah Murni dan 18 pelatihan dari PNBP. Jumlah peserta mencapai 384 orang, meliputi 234 peserta dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, dan 150 peserta dari internal BIG. Jumlah jam pelajaran yang tercapai sebanyak 2.280 jam dengan didukung oleh 49 fasilitator yang berasal dari internal dan eksternal BIG.

Pelatihan eksternal sepanjang tahun 2024 berhasil menjangkau 36 instansi, meliputi 6 kementerian/lembaga dan 30 pemerintah daerah. Program ini mencakup berbagai topik pelatihan penting, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar, SIG Tingkat Lanjut, Operator SIG, Penginderaan Jauh Tingkat Dasar, Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang, Desktop GIS *Open Source*, hingga Penataan Batas Wilayah. Di antara program SIG Tingkat Dasar dan Desktop GIS *Open Source* dirancang khusus untuk memberikan pengenalan komprehensif tentang pengelolaan SIG. Pelatihan ini menjadi kebutuhan esensial bagi instansi yang menangani data geospasial, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis, memvisualisasikan, dan mengelola data spasial.

Education and Training Services

Through the Center for Geospatial Information Competence Development, BIG continues to enhance its efforts to build human resource capacity in the geospatial sector. BIG Regulation No. 7 of 2023 guides these competency development initiatives concerning the Functional Description of the Senior Primary Leadership Work Unit.

In 2024, BIG conducted 26 training classes, comprising eight (8) classes funded by the Pure Rupiah budget and 18 classes financed through Functional Non-Tax Revenue. These trainings were attended by 384 participants—234 from ministries, government institutions, and local governments, and 150 from within BIG. A total of 2,280 teaching hours were delivered, supported by 49 facilitators from both internal and external sources.

External training throughout 2024 reached 36 agencies, including six (6) ministries/agencies and 30 local governments. This program covered important training topics, including Basic Geographic Information Systems (GIS), Advanced GIS, GIS Operators, Basic Remote Sensing, Spatial Planning Map Preparation, Desktop GIS *Open Source*, and Regional Boundary Arrangement. The Basic GIS and Desktop GIS *Open Source* programs were designed to provide a comprehensive introduction to GIS management. This training was essential for agencies that handle geospatial data to improve their ability to analyze, visualize, and manage spatial data.

PELATIHAN UNTUK PESERTA EXTERNAL

Training Programs for External Participants

Capaian Jumlah Peserta Instansi/Lembaga Eksternal

Number of Participants from External Institutions/Agencies

14
Peserta
Participants



SIG Tingkat Dasar
GIS Basic Level



15 Jan – 7 Feb 2024
Jan 15 – Feb 7, 2024

23
Peserta
Participants



SIG Tingkat Dasar
GIS Basic Level



18–28 Maret 2024
Mar 18–28, 2024

10
Peserta
Participants



Desktop GIS Open Source
Desktop GIS
(Open Source)



27–31 Mei 2024
May 27–31, 2024

14
Peserta
Participants



Desktop GIS Open Source
Desktop GIS
(Open Source)



19–23 Feb 2024
Feb 19–23, 2024

10
Peserta
Participants



Penginderaan Jauh Tingkat Dasar
Remote Sensing –
Basic Level



13 – 17 Mei 2024
May 13–17, 2024

12
Peserta
Participants



Peta Rencana Tata Ruang
Spatial Planning
Mapping



27 – 31 Mei 2024
May 27–31, 2024

11
Peserta
Participants



Desktop GIS Open Source
Desktop GIS
(Open Source)



26 Feb – 1 Mar 2024
Feb 26 – Mar 1, 2024

7
Peserta
Participants



SIG Tingkat Dasar
GIS Basic Level



13–22 Mei 2024
May 13–22, 2024

11
Peserta
Participants



SIG Tingkat Dasar
GIS Basic Level



3–14 Juni 2024
Jun 3–14, 2024

11
Peserta
Participants



Fungsurta Tingkat Ahli
Expert-Level
Mapping Surveyor
(Functional Position)



3 – 14 Juni 2024
Jun 3–14, 2024

10
Peserta
Participants



Fungsurta Tingkat Ahli
Expert-Level
Mapping Surveyor
(Functional Position)



5–16 Agu 2024
Aug 5–16, 2024

12
Peserta
Participants



Desktop GIS Open Source
Desktop GIS
(Open Source)



9–13 Sep 2024
Sep 9–13, 2024

15
Peserta
Participants



SIG Tingkat Dasar (Kelas A)
GIS Basic Level
(Class A)



22 Jul – 2 Agu 2024
Jul 22 – Aug 2, 2024

17
Peserta
Participants



Penataan Batas Wilayah
Boundary Delineation



26–30 Agu 2024
Aug 26–30, 2024

22
Peserta
Participants



SIG Tingkat Lanjut
Advanced GIS



23 Sep – 4 Okt 2024
Sep 23 – Oct 4, 2024

11
Peserta
Participants



SIG Tingkat Dasar (Kelas B)
GIS Basic Level
(Class B)



22 Jul – 2 Agu 2024
Jul 22 – Aug 2, 2024

12
Peserta
Participants



Operator SIG
GIS Operator



26–30 Agu 2024
Aug 26–30, 2024

12
Peserta
Participants



SIG Tingkat Lanjut
Advanced GIS



21 Okt – 1 Nov 2024
Oct 21 – Nov 1, 2024

TOTAL PESERTA
Total Participants

234

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, BIG merealisasikan PNPB layanan pendidikan dan pelatihan tahun 2024 sebesar Rp1,82 miliar, naik 27,59% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,43 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan jumlah pelatihan terselenggara lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pelatihan pada periode yang sama di tahun 2023.

Layanan Jasa/Produk Bidang Informasi Geospasial

BIG melalui Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial menyediakan dua jenis layanan utama: layanan jasa konsultasi (nondata) dan layanan produk. Layanan jasa meliputi konsultasi penyelenggaraan Informasi Geospasial serta konsultasi dalam rangka kerja sama dengan BIG. Sementara itu, layanan produk mencakup penyediaan data dan Informasi Geospasial, baik dalam bentuk digital maupun cetak.

Layanan ini dapat diperoleh dengan tarif tertentu atau gratis (Rp0,00), sesuai ketentuan dalam PP Nomor 49 Tahun 2019, PMK Nomor 13 Tahun 2024, dan Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2021. Masyarakat atau institusi yang memenuhi syarat tertentu berhak mendapatkan layanan tanpa dikenakan biaya. Sebagai pelaksana Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial (PTIG), balai ini menangani berbagai permohonan layanan.

Pada tahun 2024, PTIG menerima total 722 layanan tanpa tarif, terdiri dari 513 layanan produk/data dan 209 layanan jasa nondata. Dari total tersebut, 99,03% layanan berhasil dipenuhi, melebihi target sebesar 93%. Terdapat 7 permohonan layanan yang tidak dapat dipenuhi karena data yang diminta tidak tersedia atau bukan kewenangan BIG. Contohnya termasuk Peta Tata Ruang Kabupaten Garut, arsip kartografi Pulau Galang (1970–2000), serta citra satelit resolusi sangat tinggi untuk wilayah tertentu.

Dari seluruh yang masuk, produk yang paling banyak dimohonkan adalah citra satelit (208 permohonan), diikuti oleh Peta Rupabumi Indonesia (RBI) sebanyak 183 permohonan, data pasang surut (76), dan data CORS (58). Selain data spasial, terdapat juga permintaan terhadap data non-spasial, seperti dokumen batas wilayah dan pilar batas negara.

Through these activities, BIG realized non-tax state revenue for education and training services amounting to IDR1.82 billion in 2024, an increase of 27.59% compared to IDR1.43 billion in 2023. A higher number of training programs primarily drove this growth compared to the same period in the previous year.

Geospatial Information Services/Products

Through the Geospatial Products and Services Office, BIG offers two primary service categories: consulting services (non-data) and product-based services. The consulting services include guidance on implementing geospatial information and advisory support for collaborations with BIG. The product services encompass providing geospatial data and information in digital and printed formats.

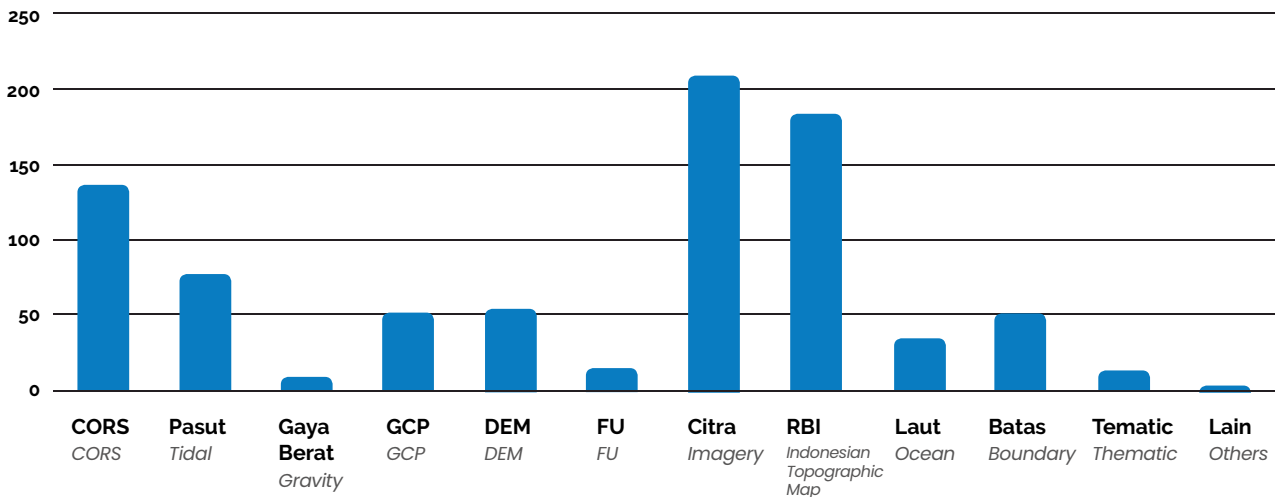
These services are available at a specified rate or free of charge (IDR0.00), per Government Regulation Number 49 of 2019, Minister of Finance Regulation Number 13 of 2024, and BIG Regulation Number 8 of 2021. Communities or institutions that meet specific eligibility criteria are entitled to free services. As the designated implementer of the Geospatial Information Integrated Service (PTIG), the office manages many service requests.

In 2024, PTIG received 722 free services, consisting of 513 product/data services and 209 non-data services. Of the total, 99.03% of services were successfully fulfilled, exceeding the target of 93%. Seven (7) service requests could not be fulfilled because the requested data was not available or was not within BIG's authority. Examples include the Garut Regency Spatial Map, the cartographic archive of Galang Island (1970–2000), and very high-resolution satellite imagery for certain areas.

Among all service entries, the most requested products were satellite imagery, with 208 requests, followed by the Indonesian Topographic Map, with 183 requests. Other frequently requested products included tidal data (76 requests) and CORS data (58 requests). In addition to spatial data, there were requests for non-spatial data, such as boundary documents and records of national boundary markers.

Daftar Permohonan Layanan Jasa/Produk

List of Requested Services and Product



Kinerja layanan jasa dan produk geospasial diukur melalui sejumlah cara. Sebagai penyelenggara layanan publik, BIG wajib menjalani evaluasi kinerja pelayanan. Evaluasi ini dilakukan secara nasional oleh Kementerian PANRB dan menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP), yang juga menjadi bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2024, unit yang dievaluasi adalah Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, dengan hasil IPP sebesar 4,51 atau kategori A (Pelayanan Prima). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 4,3.

Pada tahun 2024, Customer Engagement Index (CEI) BIG mencapai 61,4%, setara dengan skor 3,07 dari skala 1–5, dan masuk dalam kategori tinggi. Capaian ini menunjukkan peningkatan keterikatan pengguna terhadap produk dan layanan BIG, naik 0,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebanyak 61,4% pengguna tergolong *engaged*, yaitu mereka yang loyal, puas, aktif menggunakan, dan secara sukarela merekomendasikan layanan BIG. Sebaliknya, 37,8% pengguna masuk dalam kategori *not engaged*, yang meski puas, cenderung pasif dalam mendukung layanan. Sementara itu, hanya 0,8% pengguna yang tergolong *actively disengaged*, atau tidak puas dan berpotensi memberi penilaian negatif.

The performance of geospatial services and products is assessed through several mechanisms. As a public service provider, BIG is subject to service performance evaluations conducted by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) at the national level. These evaluations result in the Public Service Index (IPP), contributing to the overall Bureaucratic Reform assessment.

In 2024, the Geospatial Products and Services Office was the evaluated unit, achieving an IPP score of 4.51, which falls under Category A (Excellent Service). This result surpassed the previously established target of 4.3.

In 2024, BIG's Customer Engagement Index (CEI) reached 61.4%, equivalent to a score of 3.07 on a 1–5 scale, placing it in the high category. This result reflects increased user engagement with BIG's products and services, marking an improvement of 0.06 points compared to the previous year.

A total of 61.4% of users were classified as engaged—those who are loyal, satisfied, actively use, and voluntarily recommend BIG's services. In contrast, 37.8% of users fell into the disengaged category, characterized by passive support despite being generally satisfied. Meanwhile, only 0.8% of users were identified as actively disengaged or dissatisfied, with the potential to provide negative feedback.

Secara keseluruhan, tingkat keterikatan ini banyak dipengaruhi oleh pertimbangan rasional, terutama pada aspek penggunaan kembali dan rekomendasi layanan. CEI menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelayanan publik BIG.

Pada aspek Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), BIG meraih indeks sebesar sebesar 3,65 dari skala 1–4 atau setara 91,39%, yang dikategorikan “sangat baik” berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017. Survei ini melibatkan 403 responden dari berbagai latar belakang, termasuk K/L, pemerintah daerah, TNI/Polri, akademisi, swasta, dan masyarakat umum.

Dari sembilan atribut layanan yang dinilai, kecepatan waktu layanan menjadi perhatian karena mencatat nilai terendah dibanding atribut lainnya. Hasil IKM ini menjadi acuan penting bagi BIG dalam terus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang Informasi Geospasial.

PNBP Fungsional Layanan Jasa Survei Pemetaan

BIG memiliki kewenangan untuk memungut tarif atas layanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan BIG. Selain itu, mulai awal 2024, telah diberlakukan pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur tarif PNBP untuk layanan yang bersifat mendesak.

Pada tahun 2024, target pendapatan dari layanan jasa survei dan pemetaan ditetapkan sebesar Rp2 miliar, dengan capaian realisasi sebesar Rp294 juta atau 14,63% dari target yang ditetapkan. Salah satu kontribusi terbesar terhadap pendapatan ini berasal dari kerja sama antara BIG dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk verifikasi benchmark sistem referensi vertikal. Selain itu, pendapatan juga diperoleh dari layanan penyewaan alat gravimeter dan jasa transformasi koordinat. Rincian lebih lanjut mengenai pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Overall, this level of engagement is primarily driven by rational factors, particularly data reuse and service recommendations. The Customer Experience Index (CEI) serves as a key indicator in evaluating the effectiveness of BIG's public services.

Regarding the Community Satisfaction Index, BIG scored 3.65 on a scale of 1 to 4, equivalent to 91.39%. This result falls under the “very good” category, as defined by Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No. 14 of 2017. The survey was conducted with 403 respondents from diverse backgrounds, including ministries/agencies, local governments, the Indonesian Armed Forces and National Police, academia, the private sector, and the public.

Service speed received the lowest rating of the nine service attributes assessed, making it a key area of concern. The Community Satisfaction Index results serve as an essential reference for BIG in improving the quality of public services in geospatial information.

Functional Non-Tax Revenue from Mapping and Survey Services

BIG is authorized to collect service fees from the public, as stipulated in Government Regulation No. 49 of 2019 concerning the types and tariffs of non-tax state revenue applicable within BIG. Furthermore, starting in early 2024, the implementation of Minister of Finance Regulation No. 13 of 2024 introduced updated PNBP tariffs for urgent services.

In 2024, the revenue target from survey and mapping services was set at IDR2 billion, with actual revenue reaching IDR294 million or 14.63% of the target. A significant portion of this revenue was generated through collaboration between BIG and the Provincial Government of DKI Jakarta to verify the vertical reference system benchmark. Additional revenue was obtained from gravimeter rental services and coordinate transformation services. Further details on this revenue are presented in the following table.

Pendapatan PNPB dari Layanan Jasa Survey dan Pemetaan

Non-Tax Revenue from Surveying and Mapping Services

NO	JENIS LAYANAN Service Type	KEGIATAN Activity	PENDAPATAN Revenue (IDR)
1	Pendapatan Layanan Survey Pemetaan Revenue from Mapping and Survey Services	Layanan Jasa Verifikasi Benchmark untuk Sistem Referensi Vertikal di Provinsi DKI Jakarta Benchmark Verification for the Vertical Reference System – DKI Jakarta Province	179.020. 000
2		Jasa Penyelenggaraan Informasi Geospasial – Transformasi Koordinat Geospatial Information Services – Coordinate Transformation	4.706.000
3	Pendapatan Penelitian / Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya Research Income – Research, Survey, Mapping, and Other Science and Technology Development Services	Layanan Jasa Penggunaan Alat Pengumpulan Data Geospasial – Gravity Meter (Gravimeter) dan Operator Geospatial Data Collection Tool Usage – Gravimeter and Operator Services	110.600.000
Jumlah Total			294.326.000

PNPB Fungsional Layanan Hasil Survei Pemetaan

Target pendapatan dari layanan hasil survei, pemetaan, atau produk geospasial BIG untuk PNPB tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp100 juta. Hingga akhir tahun, realisasi pendapatan mencapai Rp72,8 juta atau 72,8% dari target. Pendapatan ini berasal dari 182 layanan penjualan data pasang surut dan 176 layanan pencetakan peta, dengan total 358 layanan yang telah diberikan.

Functional Non-Tax Revenue from Survey and Mapping Services

In 2024, the revenue target for non-tax revenue generated from BIG’s survey, mapping, and geospatial product services was set at IDR100 million. By year-end, revenue reached IDR72.8 million, achieving 72.8% of the target. This income was derived from 358 services, comprising 182 tidal data sales and 176 map printing services.



Fotografer | Photographer:
Usman
Lokasi | Location:
**Tanjung Papuma,
Jember, Jawa Timur**



Fotografer | Photographer:
Ganjar Mustika
Lokasi | Location:
**Gunung Tangkuban Perahu,
Jawa Barat**

Tinjauan Pengelolaan Keuangan

Financial Management Review

Pengelolaan keuangan BIG ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional. BIG mengelola keuangan berlandaskan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Seluruh aspek keuangan dilaporkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem ini mencakup prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga. SAI merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

BIG's financial management is designed to support the institution's duties and functions in delivering national geospatial information. Financial operations are conducted based on accountability, transparency, and efficiency principles. All financial activities are recorded and reported through the Agency Accounting System (SAI), which encompasses both manual and computerized procedures—from data collection and recording to the summarization and reporting of financial positions and operations of the ministry/agency. SAI is integral to the Central Government Accounting and Financial Reporting System.

Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, seluruh pembiayaan BIG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut ini, tinjauan pengelolaan keuangan BIG selama periode pelaporan 1 Januari hingga 31 Desember 2024 berdasarkan laporan keuangan (*audited*).

As a non-ministerial government institution, BIG is fully funded by the State Budget. Based on the audited financial statements, the following is a review of BIG's financial management for the reporting period from January 1 to December 31, 2024.

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA INCOME AND EXPENDITURE REALIZATION

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
Budget Realization Report for the Years Ended December 31, 2024 and 2023

URAIAN DESCRIPTION	CATATAN NOTES	31 DESEMBER 2024 DECEMBER 31, 2024		% THD ANGG % OF BUDGET REALIZED	TA 2023 FY 2023 REALISASI ACTUAL
		ANGGARAN BUDGET	REALISASI ACTUAL		
PENDAPATAN REVENUE	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Tax State Revenue		4,666,712,000.00	3,628,822,885.00	77.76	5,755,004,884.00
JUMLAH PENDAPATAN Total Revenue		4,666,712,000.00	3,628,822,885.00	77.76	5,755,004,884.00
BELANJA EXPENDITURES	B.2				
Belanja Pegawai Personnel Expenditures	B.3	102,960,901,000.00	101,167,663,957.00	98.26	85,066,995,693.00
Belanja Barang Goods and Services Expenditures	B.4	212,092,489,000.00	178,536,897,242.00	84.18	177,611,534,202.00
Belanja Modal Capital Expenditures	B.5	520,712,683,000.00	489,946,798,004.00	94.09	159,801,931,363.00
JUMLAH BELANJA Total Expenditures		835,766,073,000.00	769,651,359,203.00	92.09	422,480,461,258.00

Selama periode pelaporan 1 Januari - 31 Desember 2024, BIG telah merealisasikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,63 miliar, atau 77,76% dari target pendapatan sebesar Rp4,67 miliar. Pada sisi belanja, BIG telah telah membelanjakan Rp769,65 miliar, atau 92,09% dari pagu anggaran sebesar Rp835,77 miliar.

During the reporting period from January 1 to December 31, 2024, BIG realized non-tax state revenue amounting to IDR3.63 billion, representing 77.76% of the revenue target of IDR4.67 billion. On the expenditure side, BIG disbursed IDR769.65 billion, or 92.09% of the allocated budget ceiling of IDR835.77 billion.

KODE AKUN ACCOUNT CODE	URAIAN DESCRIPTION	31 DESEMBER 2024 DECEMBER 31, 2024	31 DESEMBER 2023 DECEMBER 31, 2023	RP NAIK (TURUN) INCREASE (DECREASE) IN IDR
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin <i>Income from Sale of Equipment and Machinery</i>	324,152,000.00	709,061,992.00	(384,909,992.00)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya <i>Income from Transfer of Other State-Owned Assets</i>	2,020,000.00	-	2,020,000.00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan <i>Income from Rental of Land, Buildings, and Facilities</i>	71,514,000.00	-	71,514,000.00
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi <i>Income from Use of Facilities and Infrastructure in Accordance with Institutional Duties</i>	309,325,000.00	251,975,000.00	57,350,000.00
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan <i>Income from Education and/or Training Services</i>	1,824,600,000.00	1,430,100,000.00	394,500,000.00
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan <i>Income from Survey and Mapping Services</i>	183,726,000.00	1,865,000,000.00	(1,681,274,000.00)
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan <i>Income from Sale of Survey and Mapping Data/Results</i>	72,800,000.00	33,100,000.00	39,700,000.00
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan <i>Income from Research, Surveys, Mapping, and Development Activities</i>	110,600,000.00	-	110,600,000.00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti kerugian Negara Terhadap Pegawai <i>Income from Settlement of Employee State Compensation</i>	34,967,260.00	453,601,547.00	(418,634,287.00)
425811	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah <i>Income from Fines Due to Late Completion of Government Projects</i>	383,560,271.00	487,570,895.00	(104,010,624.00)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL <i>Refund of Personnel Expenditures (Non-Litigated)</i>	51,694,815.00	292,210,400.00	(240,515,585.00)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL <i>Refund of Goods Expenditures (Non-Litigated)</i>	218,833,979.00	83,091,131.00	135,742,848.00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL <i>Refund of Capital Expenditures (Non-Litigated)</i>	41,029,560.00	144,082,619.00	(103,053,059.00)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR/Pensiunan PNS <i>Income from Repayment of Non-Treasury/Compensation Claims/Retired Civil Servant Debt</i>	-	5,211,300.00	(5,211,300.00)
Jumlah Total		3,628,822,885.00	5,755,004,884.00	(2,126,181,999.00)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pendapatan tahun 2024 turun sebesar 36,94% atau Rp2,13 miliar. Penurunan paling signifikan terlihat pada pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan yang turun sebesar Rp1,68 miliar atau 90,14%. Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan merupakan pendapatan atas jasa survei atau hasil survei. Secara umum, pendapatan ini sebagian besar diperoleh dari kerja sama dengan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial. Penurunan pendapatan pada tahun 2024 terjadi karena banyaknya kerjasama terkait layanan survei dan pemetaan dengan pemerintah daerah yang batal dilaksanakan karena terdapat kebijakan *refocusing* anggaran terkait persiapan pelaksanaan pemilu. Selain itu, jadwal yang diinginkan oleh pemerintah daerah tidak dapat disepakati karena terbatasnya SDM teknis di BIG.

Adapun realisasi pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk periode tahun 2024 meningkat Rp394,5 juta atau 27,59% dibandingkan tahun 2023. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan berasal dari pembayaran pelatihan/diklat yang dilaksanakan oleh BIG. Kenaikan tersebut terjadi karena pada periode 2024 terdapat lebih banyak jumlah pelatihan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah pelatihan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan untuk periode tahun 2024 mencapai Rp72,8 juta, meningkat sebesar Rp39,7 juta atau 119,94% dibandingkan dengan tahun 2023. Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan berasal dari hasil penjualan produk Informasi Geospasial. Kenaikan tersebut terjadi karena pada periode TA 2024 penjualan produk Informasi Geospasial lebih banyak dibandingkan dengan penjualan pada periode yang sama di TA 2023.

Sementara realisasi Pendapatan Penelitian/Riset, Survei, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya untuk periode tahun 2024 mencapai Rp110,6 juta. Pada tahun sebelumnya, layanan ini belum menghasilkan pendapatan. Peningkatan ini terjadi berkat strategi promosi yang lebih intensif terhadap layanan jasa yang ditawarkan, sehingga pendapatan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023.

Based on the table above, revenue realization in 2024 decreased by 36.94%, or IDR2.13 billion, compared to the previous year. The most significant decline occurred in Survey and Mapping Services, which fell by IDR1.68 billion or 90.14%. This category refers to revenue generated from survey services or the results of surveying activities, typically obtained through cooperation with local governments to implement geospatial information. The decline in revenue in 2024 was primarily due to the cancellation of several planned collaborations with local governments. These cancellations resulted from a budget-refocusing policy related to preparations for the national elections. In addition, scheduling conflicts arose, as the timelines proposed by local governments could not be accommodated due to the limited technical human resources available at BIG.

Meanwhile, the realization of Education and/or Training Services revenue in 2024 increased by IDR394.5 million, or 27.59%, compared to 2023. This revenue is derived from fees paid for education and training programs organized by BIG. The increase was primarily due to more training sessions conducted during the 2024 reporting period than in the previous year.

Survey and Mapping Revenue realization in 2024 reached IDR72.8 million, marking an increase of IDR39.7 million, or 119.94%, compared to 2023. This revenue is generated from the sale of geospatial information products. The increase was driven by a higher sales volume of these products during the 2024 FY compared to the same period in the 2023 FY.

Meanwhile, the realization of Research, Survey, Mapping, and Other Science and Technology Development Revenue in 2024 reached IDR110.6 million. In the previous year, this service did not generate any revenue. The significant increase in 2024 was attributed to a more intensive promotional strategy for the services offered, which successfully boosted revenue compared to 2023.

BELANJA

Realisasi Belanja (Neto) tahun 2024 adalah sebesar Rp769,65 miliar atau mencapai 92,09% dari anggaran belanja sebesar Rp835,77 miliar. Berikut ini rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2024.

SPENDING

The net spending realization in 2024 amounted to IDR769.65 billion, or 92.09% of the allocated budget of IDR835.77 billion. The following is a detailed breakdown of the 2024 spending budget and its realization.

RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA (NETO) TA 2024

Budget and Actual Expenditures (Net) – FY 2024

URAIAN DESCRIPTION	31 DESEMBER 2024 DECEMBER 31, 2024		
	ANGGARAN BUDGET	REALISASI ACTUAL	% REAL ANGG. % OF BUDGET REALIZED
Belanja Pegawai Personnel Expenditures	102,960,901,000.00	101,167,663,957.00	98.26
Belanja Barang Goods and Services Expenditures	212,092,489,000.00	178,536,897,242.00	84.18
Belanja Modal Capital Expenditures	520,712,683,000.00	489,946,798,004.00	94.09
Total Belanja Total Expenditures	835,766,073,000.00	769,651,359,203.00	92.09

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA (NETO) TA 2024 & TA2023

Comparison of Net Expenditure Realization for FY 2024 and FY 2023

URAIAN DESCRIPTION	31 DESEMBER 2024 DECEMBER 31, 2024	31 DESEMBER 2023 DECEMBER 31, 2023	% NAIK/ (TURUN) % CHANGE
Belanja Pegawai Personnel Expenditures	101,167,663,957.00	85,066,995,693.00	18.93
Belanja Barang Goods and Services Expenditures	178,536,897,242.00	177,611,534,202.00	0.52
Belanja Modal Capital Expenditures	489,946,798,004.00	159,801,931,363.00	206.60
Total Belanja Total Expenditures	769,651,359,203.00	422,480,461,258.00	82.17

Peningkatan belanja pegawai disebabkan karena terdapat penambahan jumlah pegawai baru sebanyak 97 pegawai yang berasal dari penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023. Sementara belanja barang untuk mendukung pencapaian rencana strategis BIG meningkat sedikit, dan belanja modal naik lebih dari dua kali lipat disebabkan adanya kegiatan pemetaan skala besar 1:5.000 wilayah darat Sulawesi untuk mendukung program pembangunan nasional dan landasan penerapan program *Online Single Submission* (OSS). OSS bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, salah satunya dengan menjadikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan pemberian izin usaha

The increase in employee spending in 2024 was driven by the addition of 97 new personnel recruited through the Civil Servant with Employment Agreement program in 2023. Meanwhile, spending on goods saw a modest increase in supporting BIG's strategic objectives. Capital spending, on the other hand, more than doubled compared to the previous year. This increase was primarily due to the implementation of large-scale 1:5,000 mapping across the Sulawesi land area. These efforts were part of the national development program and were a foundational input for implementing the Online Single Submission (OSS) system. The OSS aims to streamline the business licensing process by using the Detailed Spatial Plan as a reference for issuing permits.

NERACA

BALANCE SHEET

Dalam Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	CATATAN NOTES	31 DESEMBER 2024 DECEMBER 31, 2024	31 DESEMBER 2023 DECEMBER 31, 2023
ASET ASSETS			
ASET LANCAR CURRENT ASSETS			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Prepaid Expenses	C.1	9,425,601,657.00	11,860,038,072.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Revenues	C.2	3,305,164,745.00	114,241,101.00
Piutang Bukan Pajak Non-Tax Receivables	C.3	40,000,000.00	48,800,000.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Allowance for Doubtful Accounts – Non-Tax Receivables	C.4	(40,000,000.00)	(48,800,000.00)
Bagian Lancar TP/TGR Current Portion of Treasury/Compensation Claims	C.5	70,585,595.00	24,338,640.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR Allowance for Doubtful Accounts – Current Portion of Treasury/ Compensation Claims	C.6	(352,478.00)	(121,693.00)
Persediaan Inventories	C.7	9,297,365,932.00	9,606,297,151.00
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets		22,098,365,451.00	21,604,793,271.00
ASET TETAP FIXED ASSETS			
Tanah Land	C.8	195,151,853,800.00	195,151,853,800.00
Peralatan dan Mesin Equipment and Machinery	C.9	1,418,798,953,369.00	1,370,490,626,123.00
Gedung dan Bangunan Buildings and Structures	C.10	100,526,727,431.00	95,004,668,620.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan Roads, Irrigation, and Networks	C.11	67,823,641,522.00	67,942,564,522.00
Aset Tetap Lainnya Other Fixed Assets	C.12	14,141,052,902.00	14,141,052,902.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Construction in Progress	C.13	5,196,043,819.00	99,522,184.00
Akumulasi Penyusutan Less: Accumulated Depreciation	C.14	(1,254,891,635,149.00)	(1,192,156,734,835.00)
Jumlah Aset Tetap Total Fixed Assets		546,746,637,694.00	550,673,553,316.00
PIUTANG JANGKA PANJANG LONG-TERM RECEIVABLES			
Piutang Tagihan TP/TGR Treasury/Compensation Claims Receivables	C.15	6,991,714,735.00	6,962,775,511.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR Allowance for Doubtful Accounts – Treasury/Compensation Claims Receivables	C.16	(6,811,170,227.00)	(6,910,040,511.00)
Jumlah Piutang Jangka Panjang Total Long-Term Receivables		180,544,508.00	52,735,000.00
ASET LAINNYA OTHER ASSETS			
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	C.17	3,168,724,913,784.00	3,130,946,309,321.00
Aset Tak berwujud Dalam Pengerjaan Intangible Assets Under Development	C.18	230,817,617,621.00	330,840,200.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Funds	C.19	181,584,145,153.00	10,339,245,176.00
Aset Lain-lain Miscellaneous Other Assets	C.20	6,618,207,106.00	56,719,342,976.00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Less: Accumulated Amortization and Depreciation – Other Assets	C.21	(2,889,422,796,703.00)	(2,827,509,929,864.00)
Jumlah Aset Lainnya Total Other Assets		698,322,086,961.00	370,825,807,809.00
JUMLAH ASET Total Assets		1,267,347,634,614.00	943,156,889,396.00

Dalam Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	CATATAN NOTES	31 DESEMBER 2024 DECEMBER 31, 2024	31 DESEMBER 2023 DECEMBER 31, 2023
KEWAJIBAN LIABILITIES			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES			
Utang kepada Pihak Ketiga Payables to Third Parties	C.22	47,208,400,912.00	14,489,403,524.00
Pendapatan Diterima Di Muka Unearned Revenue	C.23	64,264,636.00	9,626,078.00
JUMLAH KEWAJIBAN Total Liabilities		47,272,665,548.00	14,499,029,602.00
EKUITAS EQUITY			
Ekuitas Equity	C.24	1,220,074,969,066.00	928,657,859,794.00
JUMLAH EKUITAS Total Equity		1,220,074,969,066.00	928,657,859,794.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Total Liabilities and Equity		1,267,347,634,614.00	943,156,889,396.00

Neraca BIG per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan lembaga, yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Total aset tercatat sebesar Rp1,27 triliun, mencakup aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya. Adapun kewajiban tercatat sebesar Rp47,27 miliar dan ekuitas sebesar Rp1,22 triliun. Data ini menunjukkan struktur keuangan BIG yang solid dalam mendukung operasional dan pencapaian kinerja lembaga selama tahun 2024.

As of December 31, 2024, BIG's balance sheet reflected the institution's financial position, comprising assets, liabilities, and equity. Total assets amounted to IDR1.27 trillion, consisting of current, fixed, long-term receivables, and other assets. Total liabilities were recorded at IDR47.27 billion, while equity stood at IDR1.22 trillion. These figures highlight BIG's strong financial foundation supporting its operations and achieving institutional performance targets throughout 2024.



LAPORAN OPERASIONAL

STATEMENT OF OPERATIONS

Dalam Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	CATATAN NOTES	31 DESEMBER 2024 DECEMBER 31, 2024	31 DESEMBER 2023 DECEMBER 31, 2023
KEGIATAN OPERASIONAL OPERATIONAL ACTIVITIES			
PENDAPATAN REVENUE	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Tax State Revenue		6,206,303,258.00	4,074,328,954.00
JUMLAH PENDAPATAN Total Revenue		6,206,303,258.00	4,074,328,954.00
BEBAN EXPENSES	D.2		
Beban Pegawai Personnel Expenses	D.2.1	101,438,473,100.00	84,987,754,761.00
Beban Persediaan Inventory Expenses	D.2.2	2,740,735,918.00	3,258,514,286.00
Beban Barang dan Jasa Goods and Services Expenses	D.2.3	106,685,719,966.00	105,216,348,226.00
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	D.2.4	14,868,153,329.00	10,298,414,017.00
Beban Perjalanan Dinas Travel Expenses	D.2.5	56,376,200,137.00	56,694,954,379.00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Expenses for Goods Distributed to the Public or Local Government	D.2.6	101,299,577.00	211,599,720.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization	D.2.7	209,437,999,646.00	298,374,187,699.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Provision for Doubtful Accounts	D.2.8	(107,439,499.00)	(1,593,312,826.00)
JUMLAH BEBAN Total Expenses		491,541,142,174.00	557,448,460,262.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL Surplus/(Deficit) from Operating Activities		(485,334,838,916.00)	(553,374,131,308.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL NON-OPERATING ACTIVITIES			
D.3			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Gain / (Loss) on Disposal of Assets		(672,180,045.00)	(2,885,841,512.00)
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus/(Deficit) from Other Non-Operating Activities		65,948,500.00	11,257,525,690.00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus/(Deficit) from Non-Operating Activities		(606,231,545.00)	8,371,684,178.00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA Surplus/(Deficit) Before Extraordinary Items		(485,941,070,461.00)	(545,002,447,130.00)
POS LUAR BIASA EXTRAORDINARY ITEMS			
Beban Luar Biasa Extraordinary Expenses		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO Net Surplus/(Deficit)		(485,941,070,461.00)	(545,002,447,130.00)

Laporan Operasional BIG Tahun 2024 menggambarkan aktivitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di bidang Informasi Geospasial. Sebagian besar pembiayaan operasional BIG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun pendapatan yang diperoleh, termasuk dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah direncanakan.

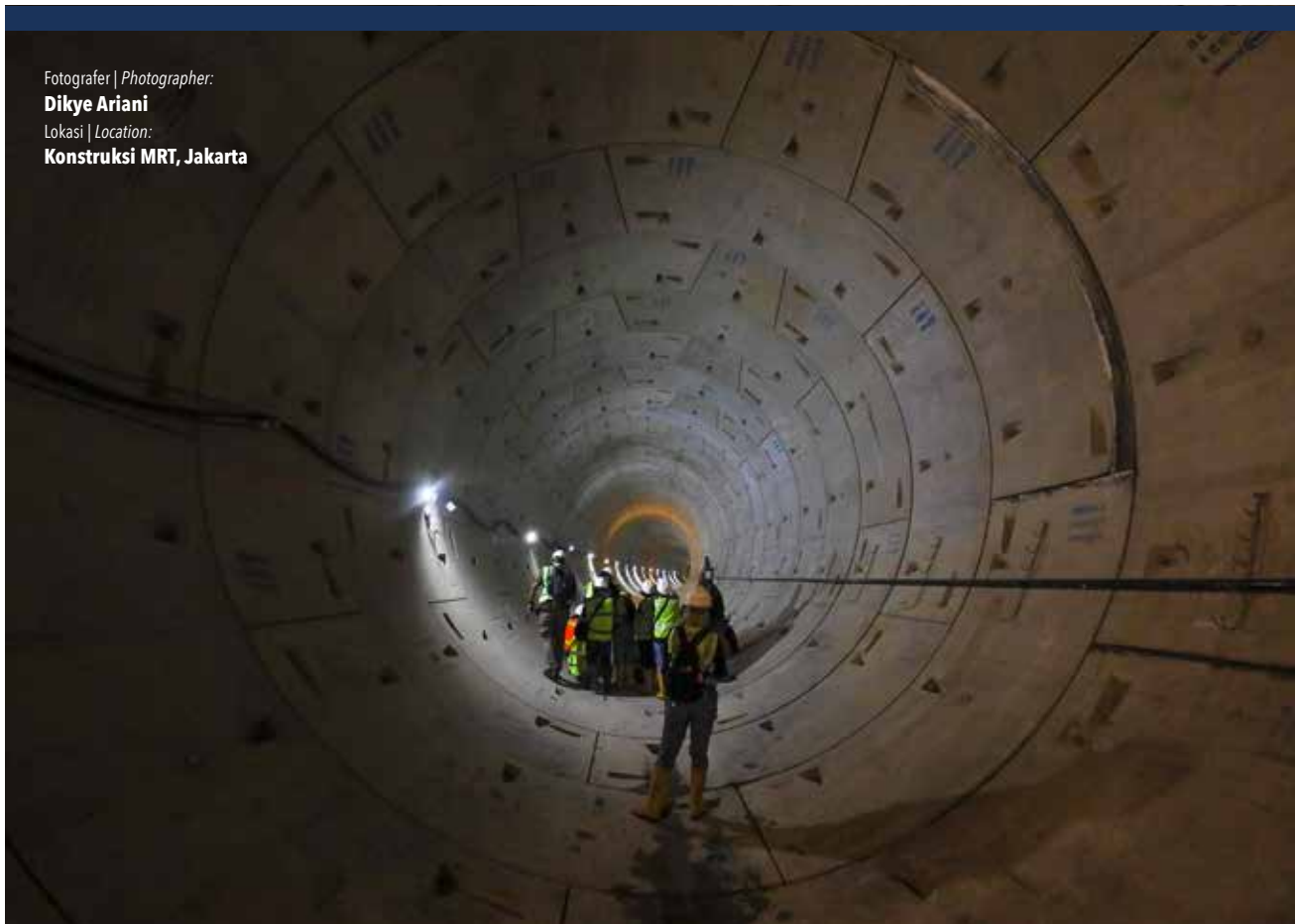
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024, pendapatan-LO tercatat sebesar Rp6,21 miliar dengan total beban mencapai Rp491,54 miliar. Dengan demikian BIG mengalami defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp485,33 miliar dan defisit dari kegiatan non-operasional tercatat sebesar Rp606 juta. Tidak terdapat pos luar biasa pada periode ini. Secara keseluruhan, BIG membukukan Defisit-LO sebesar Rp485,94 miliar.

Defisit operasional yang tercatat merupakan kondisi yang sesuai dengan karakteristik lembaga pemerintah nonkementerian. Defisit ini mencerminkan penggunaan sumber daya untuk memenuhi mandat penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional secara efektif dan bertanggung jawab.

The 2024 Statement of Operations overviews BIG's institutional activities in fulfilling its public service responsibilities in geospatial information. A substantial portion of operational funding was sourced from the State Budget, including non-tax state revenue, which was instrumental in supporting the implementation of BIG's strategic programs and planned activities throughout the year.

For the period ending December 31, 2024, operational revenue was recorded at IDR6.21 billion, while total expenses amounted to IDR491.54 billion. As a result, BIG recorded an operational deficit of IDR485.33 billion. In addition, a non-operational deficit of IDR606 million was reported. There were no extraordinary items during the reporting period. BIG posted a Statement of Operations deficit of IDR485.94 billion.

The recorded operational deficit is consistent with the financial characteristics of a non-ministerial government institution. This deficit reflects the utilization of resources effectively and accountable to support national geospatial information services delivery.



Fotografer | Photographer:
Dikye Ariani
Lokasi | Location:
Konstruksi MRT, Jakarta

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 & 31 DESEMBER 2023
Statement of Changes in Equity For the Years Ended December 31, 2024 and 2023

Dalam Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	CATATAN NOTES	31 DESEMBER 2024 DECEMBER 31, 2024	31 DESEMBER 2023 DECEMBER 31, 2023
EKUITAS AWAL <i>Beginning Balance of Equity</i>	E.1	928,657,859,794.00	1,085,587,371,513.00
SURPLUS/DEFISIT LO <i>Surplus / (Deficit) for the Year</i>	E.2	(485,941,070,461.00)	(545,002,447,130.00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS <i>Adjustments Increasing / Decreasing Equity</i>		11,335,643,415.00	(28,652,520,963.00)
PENYESUAIAN NILAI ASET <i>Asset Value Adjustments</i>			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN <i>Inventory Adjustments</i>		-	187,530,778.00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI <i>Reclassification Adjustments</i>		-	-
SELISIH REVALUASI ASET <i>Asset Revaluation Differences</i>		-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI <i>Non-Revaluation Asset Adjustments</i>	E.3	11,344,114,340.00	(27,840,885,985.00)
LAIN – LAIN <i>Other Adjustments</i>	E.4	(8,470,925.00)	(999,165,756.00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS <i>Inter-Entity Transactions</i>	E.5	766,022,536,318.00	416,725,456,374.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS <i>Net Increase/(Decrease) in Equity</i>		291,417,109,272.00	(156,929,511,719.00)
EKUITAS AKHIR <i>Ending Balance of Equity</i>	E.6	1,220,074,969,066.00	928,657,859,794.00

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan posisi ekuitas BIG sepanjang tahun berjalan, yang dipengaruhi oleh hasil operasional lembaga serta transaksi terkait lainnya. Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, perubahan ekuitas BIG bukan bersumber dari aktivitas komersial, melainkan dari transaksi pendanaan negara, koreksi akuntansi, serta surplus atau defisit operasional yang terkait pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.

Pada 1 Januari 2024, ekuitas BIG tercatat sebesar Rp928,66 miliar. Selama tahun tersebut, ekuitas mengalami penurunan akibat Defisit Laporan Operasional (Defisit-LO) sebesar Rp485,94 miliar. Namun demikian, terdapat koreksi pencatatan sebesar Rp11,33 miliar, serta transaksi antar entitas pemerintah sebesar Rp766,02 miliar yang berkontribusi meningkatkan ekuitas. Dengan seluruh perubahan tersebut, nilai ekuitas BIG per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1,22 triliun.

The Statement of Changes in Equity presents the changes in BIG's equity position over the year, influenced by operational results and other related transactions. As a non-ministerial government institution, changes in BIG's equity do not arise from commercial activities but rather from state budget transactions, accounting adjustments, and operational surpluses or deficits associated with executing government duties in geospatial information.

As of January 1, 2024, BIG's equity was recorded at IDR928.66 billion. During the year, equity decreased due to a Statement of Operations deficit of IDR485.94 billion. However, this was offset by a recording adjustment of IDR11.33 billion and inter-entity government transactions totaling IDR766.02 billion, contributing to an overall equity increase. As a result of these changes, BIG's equity, as of December 31, 2024, was recorded at IDR1.22 trillion.



PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI INFORMASI GEOSPASIAL

BIG memproyeksikan bahwa industri geospasial di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dalam mendukung berbagai sektor pembangunan. Teknologi informasi berbasis lokasi seperti sistem informasi geografis (SIG), citra satelit, drone, GPS, serta analisis spasial telah menjadi kebutuhan penting dalam pengambilan keputusan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Kebutuhan terhadap jasa dan produk geospasial terus meningkat, antara lain untuk keperluan navigasi, transportasi, logistik, perencanaan kota, pertanian presisi, kehutanan, pertambangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) dan program Satu Data Indonesia juga membuka ruang yang luas bagi pemanfaatan Informasi Geospasial lintas sektor.

Peluang industri hilir Informasi Geospasial ini harus dimanfaatkan dengan mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha baru serta memperkuat kapasitas industri yang telah ada. Untuk itu, diperlukan program inkubasi bisnis dan peningkatan kapasitas industri geospasial nasional agar mampu menjawab permintaan pasar yang terus berkembang.

Di sisi lain, tantangan yang harus diantisipasi adalah kebutuhan tenaga profesional di bidang IG yang masih terbatas. Saat ini, jumlah tenaga IG yang tersertifikasi baru sekitar 3.400 orang dari estimasi kebutuhan sebanyak 20.000. Oleh karena itu, pengembangan SDM geospasial yang kompeten menjadi bagian penting dalam strategi jangka menengah dan panjang BIG untuk mendukung tumbuhnya ekosistem industri geospasial nasional yang berdaya saing.

GEOSPATIAL INFORMATION INDUSTRY DEVELOPMENT PROSPECTS

BIG projects strong growth potential for Indonesia's geospatial information industry, particularly supporting various development sectors. Location-based technologies such as Geographic Information Systems (GIS), satellite imagery, drones, GPS, and spatial analysis have become increasingly critical in informed decision-making across both government and private sectors.

The demand for geospatial services and products continues to grow in navigation, transportation, logistics, urban planning, precision agriculture, forestry, mining, and natural resource management. Implementing the One Map Policy (OMP) and the One Data Indonesia initiative has further expanded opportunities for integrating geospatial information across sectors.

Opportunities within the geospatial information downstream industry must be strategically harnessed by fostering the emergence of new business actors and enhancing the capacity of existing industry players. To meet the growing market demand, it is essential to implement business incubation programs and strengthen the overall capacity of the national geospatial sector.

On the other hand, a key challenge must be addressed: the limited availability of professional personnel in GI. There are only around 3,400 certified GI professionals, far below the estimated national demand of 20,000. Developing competent geospatial human resources is a critical component of BIG's medium- and long-term strategy to support the growth of a competitive national geospatial industry ecosystem.

Aspek Diseminasi Informasi dan Pemasaran

Information Dissemination and Marketing Aspects

DISEMINASI DAN EDUKASI PUBLIK

Sebagai bagian dari strategi diseminasi Informasi Geospasial kepada masyarakat, BIG mengembangkan kegiatan literasi publik salah satunya melalui Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (BGPGP). Balai ini dibentuk berdasarkan Peraturan BIG Nomor 4 Tahun 2024 dan menjadi pusat edukasi geospasial berbasis kawasan pesisir dan gumuk pasir di Parangtritis, Yogyakarta.

Sepanjang tahun 2024, BGPGP menerima 4.579 pengunjung yang berasal dari beragam latar belakang sosial ekonomi. Melalui kunjungan ke Museum Gumuk Pasir, masyarakat diperkenalkan pada konsep dan penerapan Informasi Geospasial dalam kehidupan sehari-hari, serta fenomena alam langka berupa Gumuk Pasir Barchan Parangtritis—satu-satunya di Indonesia. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai warisan geologi nasional melalui Peraturan Gubernur DIY No. 115 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri ESDM No. 13.K/HK.01/MEM.G/2021.

Sebagai bagian dari kegiatan edukatif dan pelestarian kawasan, BGPGP juga melakukan monitoring kondisi gumuk pasir secara berkala melalui kolaborasi dengan Pemda DIY, Pemkab Bantul, BP Geopark, Universitas Gadjah Mada, dan Keraton Yogyakarta. Hasil pemantauan disampaikan kembali kepada pengunjung, sehingga balai ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi sains kepada publik.

DISSEMINATION AND PUBLIC EDUCATION

BIG has implemented educational outreach initiatives, one of which through the Coastal and Sand Dune Geospatial Office to enhance public literacy and awareness of geospatial information. Established under BIG Regulation Number 4 of 2024, this office serves as a geospatial education hub focused on coastal and dune ecosystems in Parangtritis, Yogyakarta.

Throughout 2024, the Coastal and Sand Dune Geospatial Office welcomed 4,579 visitors from diverse socio-economic backgrounds. Through the visits to the Gumuk Pasir Museum, the public was introduced to the concepts and applications of geospatial information in everyday life and the unique natural phenomenon of the Barchan Parangtritis Sand Dunes—the only formation of its kind in Indonesia. This area has been officially designated as a national geological heritage site through DIY Governor Regulation No. 115 of 2015 and the MEMR Decree No. 13.K/HK.01/MEM.G/2021.

As part of its educational and conservation efforts, BGPGP also conducts regular monitoring of the dune ecosystem in collaboration with the Government of Yogyakarta Special Region, Government of Bantul Regency, BP Geopark, Gadjah Mada University, and the Yogyakarta Palace. The results of these monitoring activities are shared with visitors, positioning the office not only as an educational facility but also as a public platform for science communication.



Beberapa kunjungan yang ada di BGPGP/museum gumuk pasir

Some visits to the Coastal and Sand Dune Geospatial Office

Tak hanya itu, kantor pusat BIG yang berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor juga membuka kegiatan kunjungan bagi para civitas akademika yang dirasa sangat efektif dan tepat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UU No. 4 Tahun 2011 tentang IG, dimana BIG berkewajiban untuk mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan menerima kunjungan, BIG dapat sekaligus mensosialisasikan UU IG, sekaligus mempromosikan manfaat dan produk-produk yang dihasilkan BIG. Selama tahun 2024, kantor pusat BIG telah menerima pengunjung sebanyak 1.456 orang.

Selain itu, di tahun 2024 BIG juga menggelar Seminar Nasional Geomatika VII Tahun 2024 yang diikuti oleh 485 peserta yang hadir secara luring dan daring dari berbagai afiliasi seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, universitas, LSM, swasta, dan masyarakat umum.

In addition, BIG's head office in Cibinong, Bogor Regency, facilitates educational visits for academic institutions, which have proven to be an effective means of fulfilling the mandate of Law No. 4 of 2011 on GI. Under this law, BIG is responsible for promoting the GI usage in government administration and across various sectors of society. Through these visits, BIG disseminates GI Law while promoting the benefits and products it develops. Throughout 2024, the head office welcomed 1,456 visitors.

In 2024, BIG also organized the 7th National Geomatics Seminar, which brought together 485 participants offline and online. Attendees represented various affiliations, including ministries and government agencies, regional governments, universities, NGOs, the private sector, and the public.



FORUM KONSULTASI PUBLIK

Tahun 2024, BIG menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Yogyakarta untuk menjangkau aspirasi pengguna layanan geospasial. Tema yang diangkat adalah “Standar Pelayanan Pembinaan Simpul Jaringan dan Kunjungan Edukasi Geospasial Parangtritis”. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Hasilnya berupa kesepakatan perbaikan pelayanan yang disesuaikan dengan masukan peserta dan kemampuan implementasi BIG. Bila menyangkut kebijakan, BIG wajib menyesuaikan dokumen kebijakan terkait.

Selain itu, BIG juga melaksanakan Pelayanan Geospasial Proaktif di 6 daerah: Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan layanan dan produk geospasial kepada masyarakat, menyerap aspirasi, serta menjajaki potensi kerja sama dengan pemerintah daerah. Produk seperti Atlas Taktual juga didistribusikan, termasuk kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) disabilitas netra.

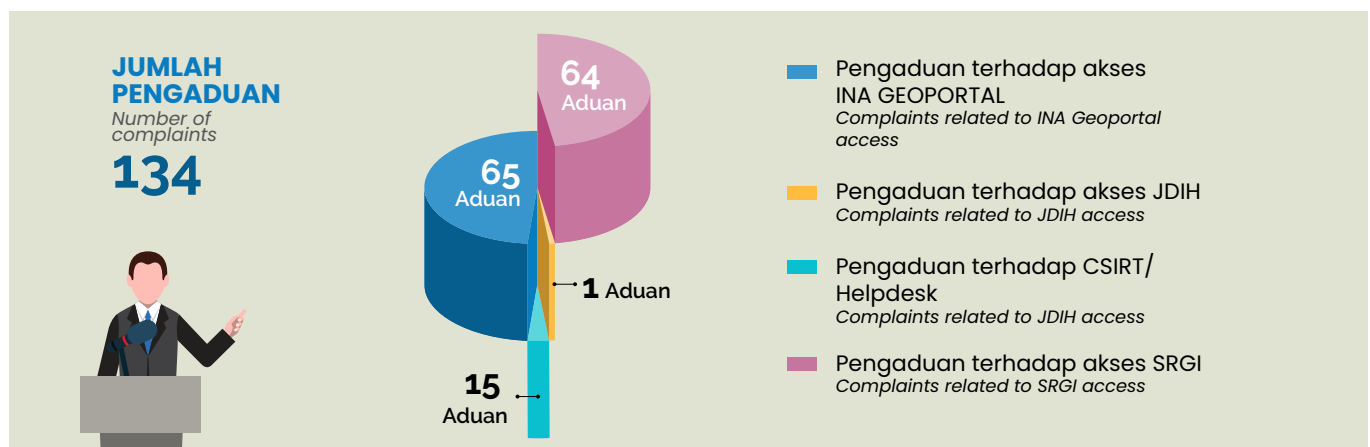
Sepanjang 2024, BIG menerima 134 pengaduan masyarakat melalui email dan WhatsApp layanan. Mayoritas aduan berkaitan dengan akses Geoportal dan situs SRGI, akibat gangguan teknis atau pemeliharaan sistem. Beberapa aduan juga menyangkut keamanan situs dan layanan data. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti 100% oleh unit pelayanan BIG.

PUBLIC CONSULTATION FORUM

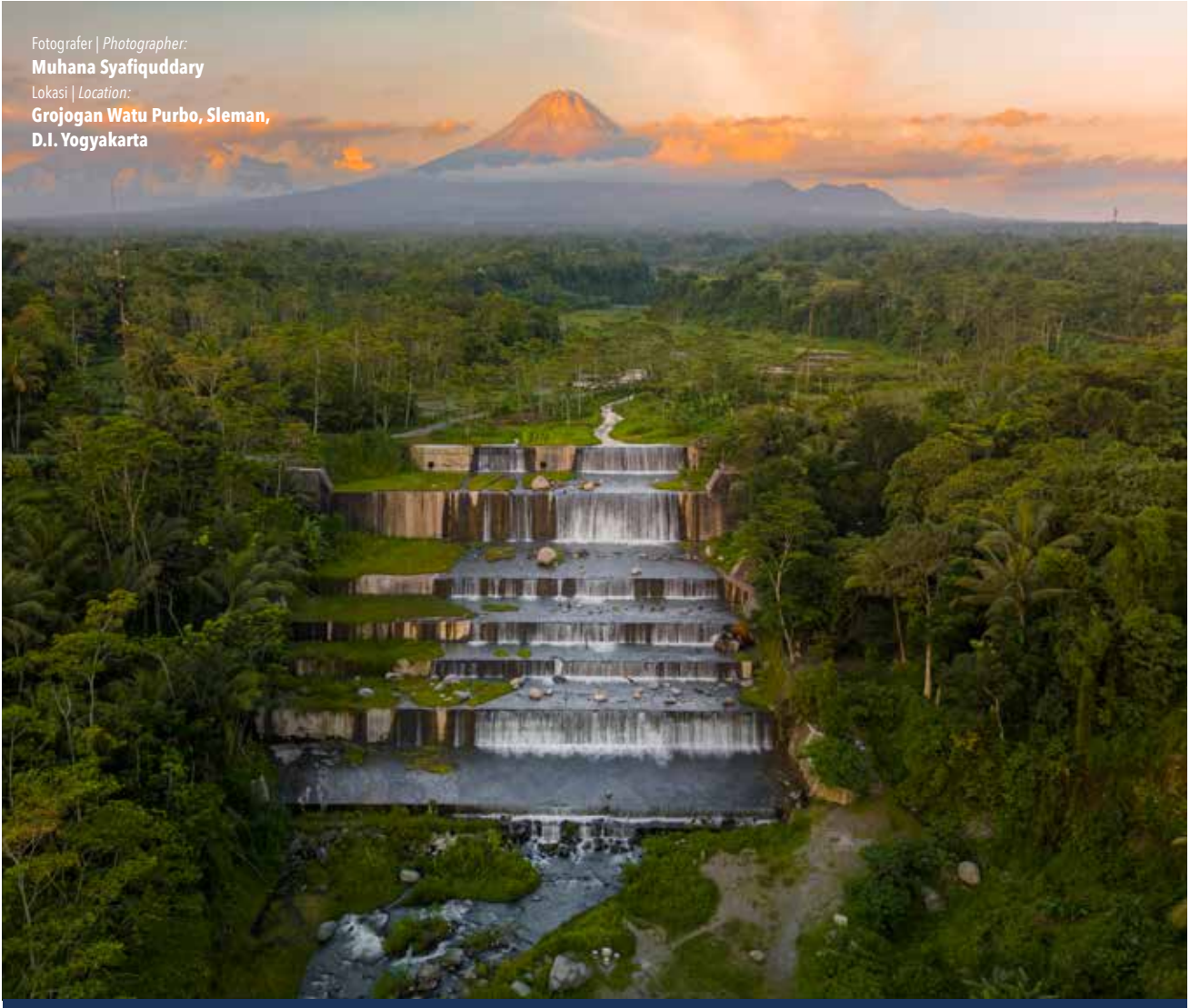
In 2024, BIG conducted a Public Consultation Forum in Yogyakarta to gather input and feedback from users of geospatial services. The forum carried the theme “Service Standards for Network Node Development and Geospatial Educational Visits in Parangtritis.” The event engaged diverse stakeholders, including the government, the private sector, academia, and the community. The forum resulted in a shared commitment to improve service standards, considering participant feedback and BIG’s operational capacity. Regarding policies, BIG must adjust its related policy documents.

In addition, BIG implemented Proactive Geospatial Services in six (6) regions: Aceh, West Sumatra, Central Kalimantan, South Kalimantan, West Java, and Yogyakarta. This initiative aimed to promote geospatial services and products to the public, gathered community input, and explored potential collaborations with local governments. Products like the tactile atlas were also distributed to Schools for the Blind.

Throughout 2024, BIG received 134 public complaints through email and WhatsApp services. Most of these complaints pertained to access issues involving the Geoportal and SRGI websites, primarily due to technical disruptions or system maintenance. Additional concerns included website security and data service accessibility. BIG’s service units addressed and resolved all complaints, achieving a 100% response rate.



Fotografer | Photographer:
Muhana Syafiquddary
Lokasi | Location:
**Grojogan Watu Purbo, Sleman,
D.I. Yogyakarta**



KOMUNIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL

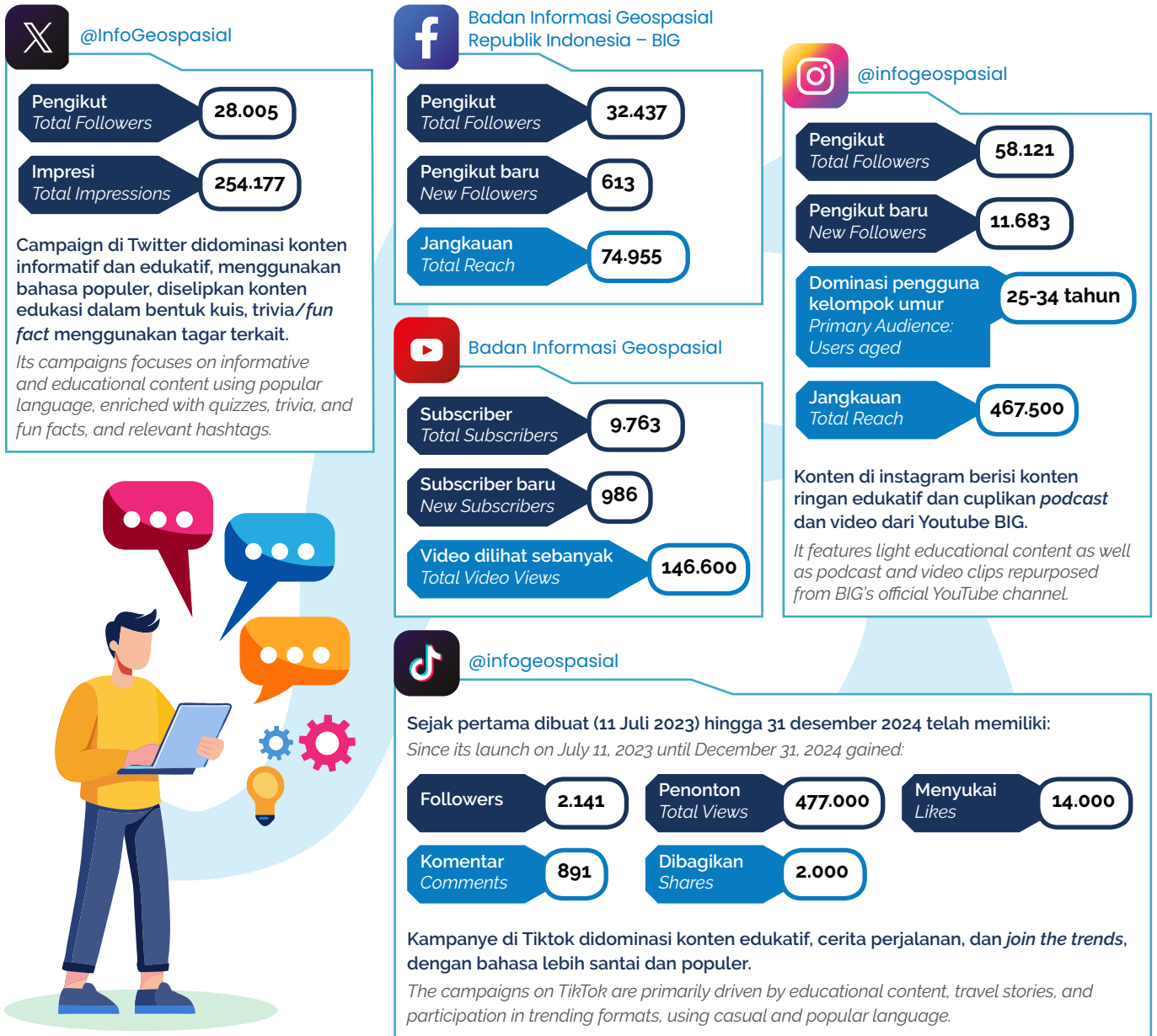
Sebagai lembaga yang bertugas menyediakan dan menyebarluaskan Informasi Geospasial, BIG aktif memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Sepanjang tahun 2024, berbagai kanal media sosial digunakan untuk menyampaikan edukasi, kampanye informasi, dan promosi layanan geospasial dengan pendekatan yang ramah, populer, dan mudah dipahami.

Melalui Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, hingga TikTok, BIG menyajikan konten yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna masing-masing platform. Penyajian informasi yang ringan dan interaktif terbukti mampu meningkatkan keterlibatan publik dan memperluas jangkauan audiens, khususnya kelompok usia produktif.

COMMUNICATION THROUGH SOCIAL MEDIA

As the national institution responsible for providing and disseminating geospatial information, BIG actively leverages social media and digital platforms to engage with the broader public. Throughout 2024, various social media channels were utilized to deliver educational content, public information campaigns, and promotional materials on geospatial services, employing a friendly, accessible, and easy-to-understand communication style.

Through Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, and TikTok, BIG delivers content tailored to each platform's unique characteristics and user behavior. By presenting light and interactive information, BIG has successfully increased public engagement and broadened its audience reach, particularly among individuals in the productive age group.



SURVEI BRAND AWARENESS

Sebagai upaya untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi publik, BIG juga melaksanakan *Survei Brand Awareness* guna mengukur persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap program dan layanan BIG. Hasil survei menunjukkan bahwa opini publik terhadap BIG tergolong **baik**, dengan indeks kepuasan 85,76 (kategori B), menandakan bahwa komunikasi yang dibangun telah berjalan secara positif.

Melalui strategi komunikasi digital yang terus diperkuat dan berbasis data, BIG berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi geospasial masyarakat dan memperkuat kehadirannya sebagai sumber terpercaya Informasi Geospasial nasional.

BRAND AWARENESS SURVEY

To assess the effectiveness of its public communication efforts, BIG conducted a Brand Awareness Survey to measure public perception and awareness of its programs and services. The results indicated a generally favorable public opinion, with a satisfaction index score of 85.76, classified under Category B. This suggests that the communication strategies have been positively.

Through a continuously reinforced, data-driven digital communication strategy, BIG remains committed to enhancing public geospatial literacy and solidifying its role as a trusted national source of geospatial information.

05

TATA KELOLA LEMBAGA

*Institutional
Governance*



Fotografer | Photographer:

Afrinaldi Zulhen

Lokasi | Location:

**Desa Babat di Kabupaten PALI,
Sumatera Selatan**





Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial. Struktur organisasi dan tata kelolanya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022, serta Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023. Dalam menjalankan fungsinya, BIG berkomitmen pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan secara rutin menjalani evaluasi kinerja kelembagaan. Dalam hal ini, BIG menjadi bagian dari implementasi reformasi birokrasi pemerintah.

The Geospatial Information Agency (BIG) is a non-ministerial government institution responsible for managing state affairs related to geospatial information. Presidential Regulation No. 128 of 2022 and BIG Regulation No. 7 of 2023 define its organizational structure and governance. In fulfilling its mandate, BIG upholds the principles of good governance and regularly undergoes institutional performance evaluations. Through these efforts, BIG actively contributes to the implementation of government bureaucratic reform.

Kinerja Tata kelola dan Reformasi Birokrasi

Performance in Governance and Bureaucratic Reform

5.1 REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transformasi kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia (SDM). Dalam Kerangka Desain Besar Reformasi Birokrasi, tahun 2024 berada pada periode penguatan (2020–2024), yaitu tahap ketiga dari proses reformasi birokrasi nasional. Pada tahap ini, diharapkan birokrasi Indonesia dapat bertransformasi menjadi birokrasi berkelas dunia, yang bersih, akuntabel, kapabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

5.1 BUREAUCRATIC REFORM

Bureaucratic Reform is the government's strategic initiative to achieve good governance by transforming institutional systems, governance, and human resources. According to the Grand Design of Bureaucratic Reform, 2024 marks the strengthening phase of the third five-year period (2020–2024). At this stage, the Indonesian bureaucracy is expected to evolve into a world-class institution characterized by integrity, accountability, competence, and the capacity to deliver high-quality public services.

Perubahan yang diharapkan dari reformasi birokrasi mencakup perbaikan menyeluruh terhadap struktur organisasi, regulasi, pengelolaan SDM, kewenangan, pelayanan publik, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024 dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Proses evaluasi dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan sejak tahap perencanaan (*ex-ante*) hingga pelaksanaan (*on-going*), oleh Tim Evaluator Internal yang dibentuk melalui Keputusan Kepala BIG Nomor 136.1 Tahun 2024.

Sementara itu, evaluasi eksternal dilakukan setelah pelaksanaan (*ex-post*) oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif atas kemajuan dan dampak reformasi birokrasi di BIG, dengan mengukur pencapaian terhadap indikator-indikator reformasi birokrasi secara umum (*general*) maupun tematik.

Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Pada tahun 2024, telah dilakukan penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) sebagai bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi bagi seluruh kementerian, lembaga, dan daerah (K/L/D). Penilaian IPPN bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun instansi pemerintah berorientasi pada dampak (*outcome*) dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Penilaian tersebut mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Edaran Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran IPPN. Hasil penilaian disampaikan melalui Surat Kementerian PPN/Bappenas Nomor B-23679/SES/PP.01/11/2024 tanggal 26 November 2024.

The changes envisioned through the Bureaucratic Reform include overall improvement in organizational structure, regulatory frameworks, human resources, institutional authority, public service delivery, mindset, and work culture.

*The evaluation of bureaucratic reform in 2024 follows the Minister of PANRB Regulation No. 9 of 2023 on the Evaluation of Bureaucratic Reform. The assessment consists of two components, internal and external assessments. The internal assessment is carried out from the planning stage (*ex-ante*) to implementation (*on-going*) by an Internal Evaluator Unit, established under the Decree of the Head of BIG No. 136.1 of 2024.*

*On the other hand, an external assessment is conducted after the implementation (*ex-post*) and is administered by the Meso Evaluator and the National Evaluator. This evaluation aims to objectively assess the progress and impact of bureaucratic reform within BIG by measuring the overall and thematic achievement of reform indicators.*

Assessment of the National Development Planning Index

In 2024, the National Development Planning Index (IPPN) was assessed as part of the Bureaucratic Reform evaluation for all ministries, institutions, and regions. The goal of the IPPN assessment is to ensure that development planning by government agencies is outcome-oriented and delivers tangible benefits to the community and all stakeholders.

The assessment is based on the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform No. 182 of 2024, which provides Technical Instructions for the Evaluation of Bureaucratic Reform, and the Circular Letter of the Minister of National Development Planning/ National Development Planning Agency No. 3 of 2023, which outlines the Guidelines for the Measurement of National Development Planning Index. The assessment results were submitted via the Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency's Letter No. B-23679/SES/PP.01/11/2024, dated November 26, 2024.



BIG sebagai instansi Pengampu Major Project, Pengampu Prioritas Nasional (*Non-Leading Sector*) memperoleh nilai penyesuaian IPPN sebesar **96,28**, dengan indeks 5,81 dari nilai maksimumnya sebesar 6,00.

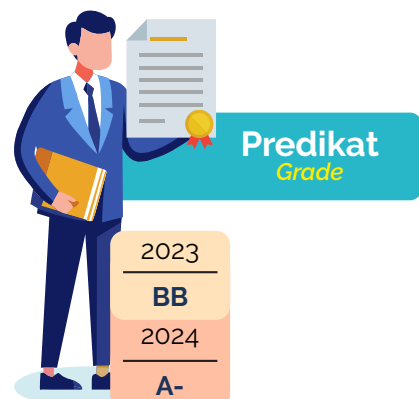
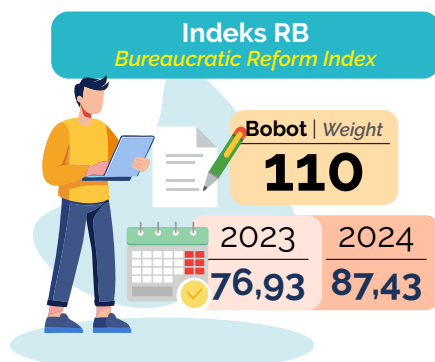
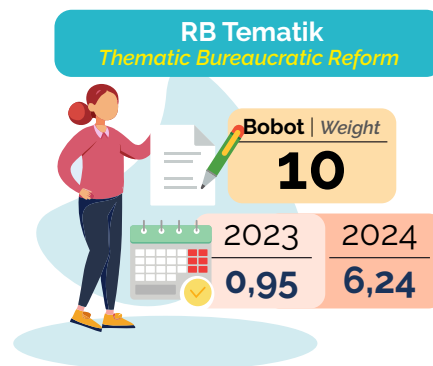
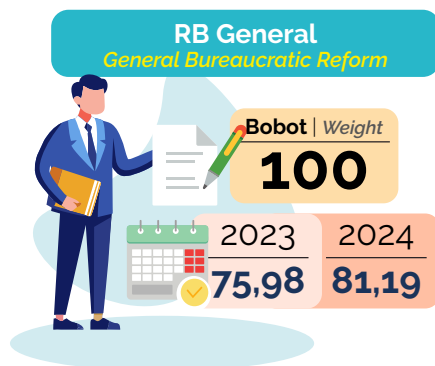
As the Major Project Supporting Agency and National Priority Supporting Agency (Non-Leading Sector), BIG achieved an IPPN adjustment value of 96.28, with an index score of 5.81 out of 6.00.

BIG, yang berperan sebagai pengampu Major Project dan Prioritas Nasional (*Non-Leading Sector*), berhasil meraih nilai penyesuaian IPPN sebesar 96,28, dengan capaian indeks 5,81 dari total nilai maksimum 6,00. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikategorikan bahwa BIG “Sangat Baik” dalam konsistensi antara Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan dalam Rencana Kerja K/L.

BIG, as the sponsor of Major Project Supporting Agency and National Priority Supporting Agency (Non-Leading Sector), recorded an IPPN adjustment score of 96.28, with an index score of 5.81 out of a maximum of 6.00. Based on these results, BIG is categorized as “Very Good” regarding the alignment between strategic targets, programs, and activities in the Ministry/Institution’s Work Plan.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BIG pada tahun 2024 adalah 87,42 dengan kategori “A-” lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

The BIG Bureaucratic Reform Index for 2024 stood at 87.42, earning an “A-” rating, an improvement over 2023. The details of the evaluation results are as follows.





Badan Informasi Geospasial (BIG) setiap tahunnya menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BIG.

Each year, the Geospatial Information Agency (BIG) prepares a Performance Agreement, which all high-ranking officials within BIG sign.

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

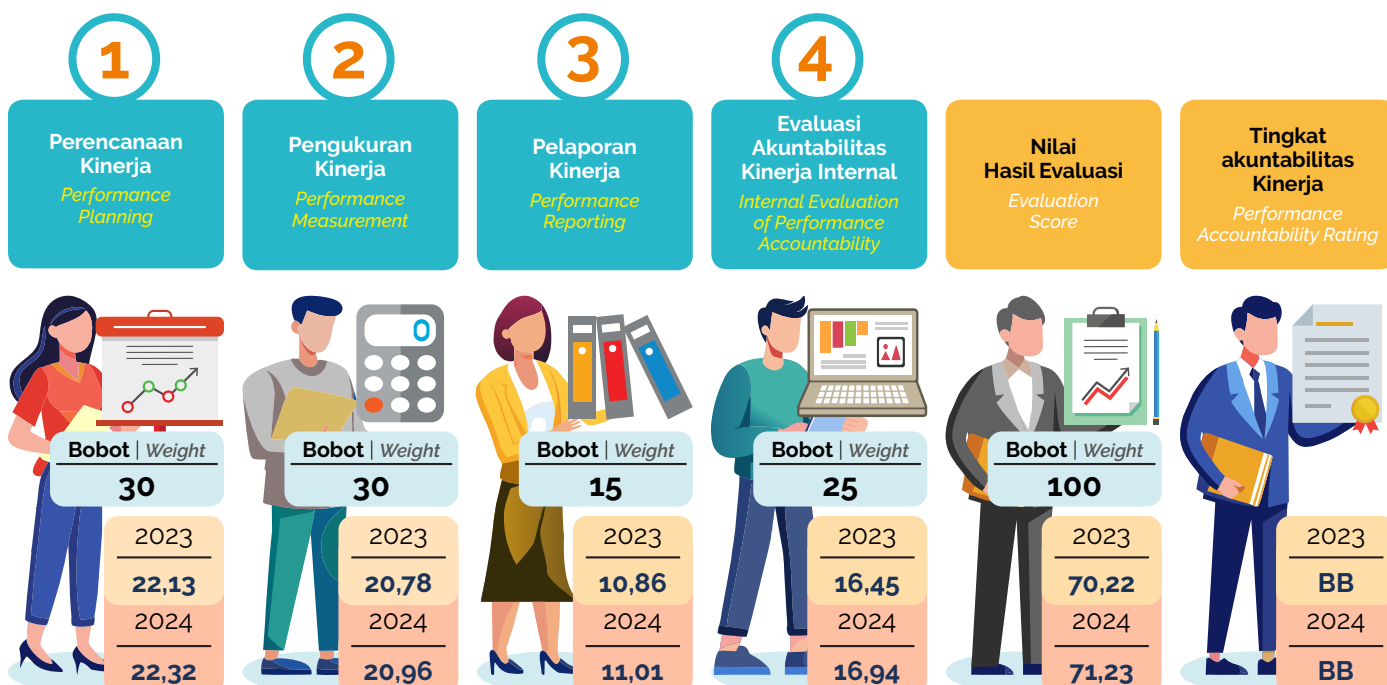
Sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, BIG terus memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem terpadu yang mencakup proses penetapan, pengukuran, pengumpulan, serta pelaporan kinerja secara sistematis untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah.

Untuk itu, BIG telah melakukan penyesuaian indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis agar sejalan dengan Perjanjian Kerja yang telah ditetapkan. Penyesuaian ini merujuk pada Peraturan BIG Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIG, dan diharapkan dapat memperkuat pencapaian kinerja yang lebih terukur dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Evaluation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP)

As part of its commitment to accountable and results-driven governance, BIG continues strengthening the implementation of Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/the Government Agency Performance Accountability System). SAKIP is an integrated system designed to systematically define, measure, collect, and report performance data to promote greater effectiveness and efficiency across government agencies.

Accordingly, BIG revised the performance indicators in its Strategic Plan to ensure alignment with the established Work Agreement. This revision is guided by the 2023 BIG Regulation concerning BIG's Organization and Work Procedures. It is intended to enhance the achievement of more measurable performance outcomes following national development priorities.



Pada tahun 2024, BIG kembali menjalani evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (Nomor B/645/AA.05/2024, tanggal 19 Desember 2024), BIG memperoleh skor 71,23 dengan predikat “BB” atau “Sangat Baik”.

Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di BIG telah berjalan sangat baik, ditandai dengan efisiensi penggunaan anggaran, sistem manajemen kinerja yang andal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja. Penilaian ini juga mencerminkan komitmen BIG dalam membangun birokrasi yang bersih dan berkinerja tinggi.

Indeks Reformasi Hukum

Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, nilai Indeks Reformasi Hukum BIG pada tahun 2024 yaitu 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua delapan) sebagaimana tercantum dalam surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-OT.03.03-80 tanggal 11 November 2024 perihal Hasil Penilaian atas indeks Reformasi Hukum Tahun 2024.

In 2024, BIG again underwent a performance accountability evaluation conducted by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (Kemenpan-RB). According to the results conveyed in an official letter from the Deputy for Bureaucratic Reform, State Apparatus Accountability, and Supervision (No. B/645/AA.05/2024, dated December 19, 2024), BIG received a score of 71.23 and was awarded the ‘BB’ or ‘Very Good’ rating.

This achievement demonstrates that the SAKIP implementation within BIG has been proceeding effectively, as evidenced by efficient budget utilization, a robust performance management system, and information technology integration in performance management. The assessment also reflects BIG’s commitment to fostering a clean and high-performing bureaucracy.

Legal Reform Index

According to the Ministry of Law and Human Rights assessment, the Legal Reform Index for BIG in 2024 was 99.28, as stated in the official letter from the Head of the Strategic Body for Legal Policy and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights, Number PPH-OT.03.03-80, dated November 11, 2024, regarding the 2024 Legal Reform Index Assessment Results.



Dokumen hasil penilaian atas indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Assessment Results of the 2024 Legal Reform Index

5.2 SUSUNAN ORGANISASI BIG

Berdasarkan Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BIG, susunan organisasi BIG terdiri atas:

- a. Kepala BIG;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar;
- d. Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik;
- e. Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
- f. Inspektorat; dan
- g. Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial.

a. Kepala BIG

Kepala BIG bertanggung jawab memimpin Badan Informasi Geospasial dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya, Kepala BIG wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan kinerja yang efektif dan efisien.

Kepala BIG wajib menyusun proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja antar-unit secara jelas dan terstruktur. Selain itu, Kepala BIG juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang informasi geospasial kepada Presiden, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

b. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan BIG;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BIG;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

5.2 BIG'S ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In accordance with BIG Regulation No. 7 of 2023 concerning BIG's Organization and Work Procedures, the agency's organizational structure comprises the following components.

- a. Head of BIG;
- b. Principal Secretariat;
- c. Deputy of Base Geospatial Information;
- d. Deputy of Thematic Geospatial Information;
- e. Deputy of Geospatial Information Infrastructure;
- f. Inspectorate; and
- g. Center for Geospatial Information Competence Development.

a. Head of BIG

The Head of BIG is responsible for leading the Geospatial Information Agency in its duties and functions. In fulfilling this role, the Head must also implement the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) to ensure effective and efficient performance.

The Head of BIG is required to establish a business process that clearly and systematically outlines the working relationships among organizational units. In addition, the Head is responsible for reporting on the implementation of geospatial information-related duties to the President, both regularly and as needed.

b. Principal Secretariat

The Principal Secretariat operates under the authority of the Head of BIG and is led by the Principal Secretary. It is responsible for coordinating the implementation of tasks, overseeing organizational development, and providing administrative support to all units within BIG.

In performing its duties, the Principal Secretariat undertakes the following functions.

- a. Coordinating BIG's activities;
- b. Coordinating and preparing BIG's plans, programs, and budgets;
- c. Providing guidance and administrative support, including management of administration, personnel, finance, facilities, cooperation, public relations, archives, and documentation;
- d. Overseeing organizational development and procedural structuring;

- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
- b. Biro Umum dan Keuangan; dan
- c. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

b.1 Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro. Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penataan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya kerja; penyusunan perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan kompetensi pegawai;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan karier pegawai;
- e. pengelolaan manajemen talenta;
- f. layanan kesejahteraan, penegakan disiplin dan perlindungan pegawai;
- g. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, dan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- h. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan manajemen kinerja pegawai; dan
- i. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Coordinating and preparing legislation and regulations, as well as implementing legal advocacy;
- f. Managing state property/assets and procuring goods and services; and
- g. Performing other functions as assigned by the Head of BIG.

Principal Secretariat consists of:

- a. Bureau of Planning, Human Resources, and Organization;
- b. Bureau of General Affairs and Finance; and
- c. Bureau of Legal Affairs, Public Relations, and Cooperation.

b.1 Bureau of Planning, Human Resources, and Organization

The Bureau of Planning, Human Resources, and Organization is under and responsible to the Principal Secretary. A Head of Bureau leads the bureau and it has duties of coordinating and preparing plans, programs and budgets, managing human resources, and administering the organization and governance.

In implementing its duties, the Bureau of Planning, Human Resources, and Organization implements the functions:

- a. preparation for coordination and formulation of program and budget plans;
- b. preparation for coordination and formulation of evaluation and performance reporting;
- c. preparation for coordination and facilitation of the implementation of bureaucratic reform and work culture; preparation for employee planning, recruitment, and competencies development;
- d. preparation for and implementation of employee career development;
- e. talent management;
- f. beneficiary services, discipline enforcement, and protection of employees;
- g. implementation of employee administration, employee data management, and employee information systems development;
- h. preparation for coordination and implementation of employee performance management; and
- i. preparation for coordination and implementation of organizational management and governance

The Bureau of Planning, Human Resources, and Organization consists of the Functional Position Group.

b.2 Biro Umum dan Keuangan

Biro Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro. Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, tata usaha, protokol, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, serta layanan pengadaan barang/jasa di BIG.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, kearsipan, persandian dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan protokol;
- d. pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
- e. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Layanan Pengadaan;
- b. Bagian Tata Usaha dan Protokol; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

b.2.1 Bagian Umum dan Layanan Pengadaan

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan. Bagian Umum dan Layanan Pengadaan dipimpin oleh Kepala Bagian, dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dan layanan pengadaan barang/jasa di BIG.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

b.2 Bureau of General Affairs and Finance

The Bureau of General Affairs and Finance is under and responsible to the Principal Secretary and is led by a Head of the Bureau. It manages state-owned properties/assets, correspondence, archiving, administration, protocol, equipment, household, finance, and procurement of goods/services at BIG.

In implementing its duties, the Bureau of General Affairs and Finance implements the functions:

- a. management of state-owned properties/assets;*
- b. implementation of household affairs, equipment, correspondence, archiving, encryption, and documentation;*
- c. implementation of administrative and protocol affairs;*
- d. implementation of verification and treasury, accounting, and financial reporting; and*
- e. implementation of goods/services procurement services.*

The Bureau of General and Finance consists of:

- a. Division of General Affairs and Procurement Services;*
- b. Division of Administration Management and Protocol; and*
- c. Functional Position Group.*

b.2.1 Division of General Affairs and Procurement Services

The Division of General Affairs and Procurement Services is under and responsible to the Head of the Bureau of General Affairs and Finance. A Head of Division leads the division and it has duties of managing state-owned properties/assets, implementation of equipment and household affairs, and procurement of goods/services at BIG.

In implementing the duties, the Division of General Affairs and Procurement Services implements the functions:

- a. management of state-owned properties/assets;*
- b. implementation of equipment and household affairs; and*
- c. implementation of goods/services procurement services management.*

The Division of General Affairs and Procurement Services consists of the Functional Position Group.

b.2.2 Bagian Tata Usaha dan Protokol

Bagian Tata Usaha dan Protokol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan. Bagian Tata Usaha dan Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian, dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi dan keprotokolan dan melaksanakan penyusunan agenda kegiatan dan risalah rapat Kepala BIG.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan administrasi ketatausahaan pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan persandian, dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
- d. pelaksanaan penyusunan agenda kegiatan dan risalah rapat Kepala BIG.

Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Sekretariat Utama.

b.2.2 Division of Administration Management and Protocol

The Division of Administration Management and Protocol is under and responsible to the Head of the Bureau of General Affairs and Finance. It is led by a Head of Division and has duties of providing administrative affairs services, correspondence, archiving, encryption, documentation and protocol, and preparation of activity agenda and minutes of meetings of the Head of BIG.

In implementing the duties, the Division of Administration Management and Protocol implements the functions:

- a. administrative services for the leadership administration;*
- b. implementation of correspondence, archiving, and encryption, and documentation;*
- c. implementation of protocol affairs; and*
- d. implementation of the preparation of the agenda of activities and minutes of meetings of the Head of BIG.*

The Division of Administration Management and Protocol consists of:

- a. Subdivision of Principal Secretariat Administration Management;*
- b. Subdivision of Deputy of Base Geospatial Information Administration Management;*
- c. Subdivision of Deputy of Thematic Geospatial Information Administration Management;*
- d. Subdivision of Deputy of Geospatial Information Infrastructure Administration Management; and*
- e. Functional Position Groups.*

The Subdivision of Principal Secretariat Administration Management has duties of carrying out correspondence, archiving, encryption, documentation, compiling activity agenda and compiling minutes of meeting, implementing coordination of program and budget planning administration of the Principal Secretariat.

Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar.

Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik.

Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.

b.3 Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama

Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan;

The Subdivision of Deputy of Base Geospatial Information Administration Management has a duty of carrying out correspondence, archiving, encryption, documentation, compiling activity agenda and compiling minutes of meeting, implementing coordination of program and budget planning administration of the Deputy for Base Geospatial Information.

The Subdivision of Deputy of Thematic Geospatial Information Administration Management has the duty of carrying out correspondence, archiving, encryption, documentation, compiling activity agendas and minutes of meetings, and implementing administrative coordination of program and budget planning of the Deputy of Thematic Geospatial Information.

The Administration Management Subdivision of the Deputy of Geospatial Information Infrastructure has the duty of carrying out correspondence, archiving, encryption, documentation, compiling activity agendas and minutes of meetings, and implementing administrative coordination of program and budget planning of the Deputy of Geospatial Information Infrastructure.

b.3 Bureau of Legal Affairs, Public Relations, and Cooperation

The Bureau of Legal Affairs, Public Relations, and Cooperation is under and responsible to the Principal Secretary. The Bureau is led by a Head of Bureau and it has duties of coordinating and making legislation, preparing legal products, implementing legal advocacy, managing legal documentation and information networks, organizing public relations, and coordinating the implementation of cooperation.

In implementing the duties, the Bureau of Legal Affairs, Public Relations, and Cooperation implements the functions:

- a. *preparation for coordination, implementation, and evaluation for the establishment of legislation;*

- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen hukum selain peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum;
- d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- g. koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan administrasi kerja sama; dan
- h. pelaksanaan promosi dan publikasi.

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. preparation for coordination and implementation for formulation of legal documents other than legislation;
- c. preparation for coordination and implementation of legal advocacy;
- d. legal documentation and information networks management;
- e. public relations implementation;
- f. preparation for coordination and implementation of interinstitutional relations;
- g. coordination and management of the administrative cooperation management; and
- h. implementation of promotion and publication.

The Bureau of Legal Affairs, Public Relations, and Cooperation consists of the Functional Position Group.

c. Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG. Deputi Bidang IGD dipimpin oleh Deputi, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang IGD.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang IGD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran IGD;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran IGD;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran IGD;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran IGD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran IGD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Deputi Bidang IGD terdiri dari:

- a. Direktorat Sistem Referensi Geospasial;
- b. Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat;
- c. Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai; dan
- d. Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi.

c. Deputy of Base Geospatial Information

The Deputy of Base Geospatial Information (BGI) operates under the authority of the Head of BIG and is responsible for leading the BGI division. The deputy is tasked with formulating and implementing technical policies in Deputy of base geospatial information.

In performing its duties, the Deputy of Base Geospatial Information (BGI) performs the following functions.

- a. Formulating and overseeing technical policies related to Base Geospatial Information (BGI) management and updating;
- b. Implementing technical policies in BGI management and updating;
- c. Developing norms, standards, procedures, and criteria of BGI management and updating;
- d. Providing technical guidance and supervision in the BGI organization and updating;
- e. Conducting evaluations and reporting on BGI-related activities; and
- f. Performing other functions as assigned by the Head of BIG.

The Deputy of BGI consists of:

- a. Directorate of Geospatial Reference Systems;
- b. Directorate of Land Topographic Mapping;
- c. Directorate of Marine and Coastal Topographic Mapping;
- d. Directorate of Boundary Mapping and Geographical Names.

d. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG. Deputi Bidang IGT dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang IGT mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang IGT.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang IGT menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan IGT;
- pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan IGT;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan penyelenggaraan IGT;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan penyelenggaraan IGT;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan IGT; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik terdiri atas:

- Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT;
- Direktorat Pemetaan Tematik; dan
- Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial.
 - Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir;
 - Balai Layanan Jasa dan Produk

e. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

d. Deputy of Thematic Geospatial Information

The Deputy of Thematic Geospatial Information (TGI) operates under the authority of the Head of BIG and is led by a Deputy. The Deputy is responsible for formulating, implementing, and overseeing the execution of technical policies in the field of Thematic Geospatial Information.

To complete its duties, the Deputy of TGI performs the following functions.

- Formulating and overseeing technical policies related to the TGI development and implementation;
- Implementing technical policies in the TGI development and implementation;
- Developing norms, standards, procedures, and criteria in the field of TGI development and implementation;
- Providing technical guidance and supervision in the TGI development and implementation;
- Conducting evaluations and reporting on TGI-related activities; and
- Completing other functions as assigned by the Head of BIG.

The Deputy of Thematic Geospatial Information consists of:

- Directorate of TGI Integration and Synchronization;
- Directorate of Thematic Mapping; and
- Directorate of Atlas and Utilization of Geospatial Information.
 - Coastal and Sand Dune Geospatial Office;
 - Geospatial Products and Services Office

e. Deputy of Geospatial Information Infrastructure

The Deputy of Geospatial Information Infrastructure operates under the authority of the Head of BIG. This position is headed by a Deputy, who is responsible for formulating and implementing technical policies related to geospatial information infrastructure.

In completing its duties, the Deputy of Geospatial Information Infrastructure performs the following functions.

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial terdiri atas:

- a. Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial;
- b. Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial; dan
- c. Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial.

f. Inspektorat

Inspektorat berkedudukan di bawah Kepala BIG dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG melalui Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BIG.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BIG;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala BIG.

- a. *Formulating and overseeing technical policies in the facilitation and implementation of geospatial information infrastructure;*
- b. *Implementing technical policies related to the facilitation and implementation of geospatial information infrastructure;*
- c. *Developing norms, standards, procedures, and criteria in the field of geospatial information infrastructure;*
- d. *Providing technical guidance and supervision in the facilitation and implementation of geospatial information infrastructure;*
- e. *Conducting evaluation and reporting activities related to facilitating and implementing geospatial information infrastructure; and*
- f. *Performing other functions as assigned by the Head of BIG*

The Deputy of Geospatial Information Infrastructure consists of:

- a. *Directorate of Geospatial Information Human Resources;*
- b. *Directorate of Geospatial Information Institutional Affairs and Networks; and*
- c. *Directorate of Geospatial Information Standards and Technology.*

f. Inspectorate

The Inspectorate operates under the authority of the Head of BIG and reports to the Head through the Principal Secretary. An Inspector leads it and is responsible for internal supervision within the BIG organization.

In carrying out its duties, the Inspectorate performs the following functions.

- a. *Preparing technical policies for internal supervision;*
- b. *Conducting internal supervision of performance and financial activities through audits, reviews, evaluations, monitoring, and other supervisory measures;*
- c. *Conducting special-purpose supervision as assigned by the Head of BIG;*
- d. *Preparing reports on the supervision;*
- e. *Managing the administrative affairs of the Inspectorate; and*
- f. *Performing other functions as assigned by the Head of BIG*



g. Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial

Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial (PPKIG) merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG melalui Sekretaris Utama. PPKIG dipimpin oleh Kepala Pusat. PPKIG mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

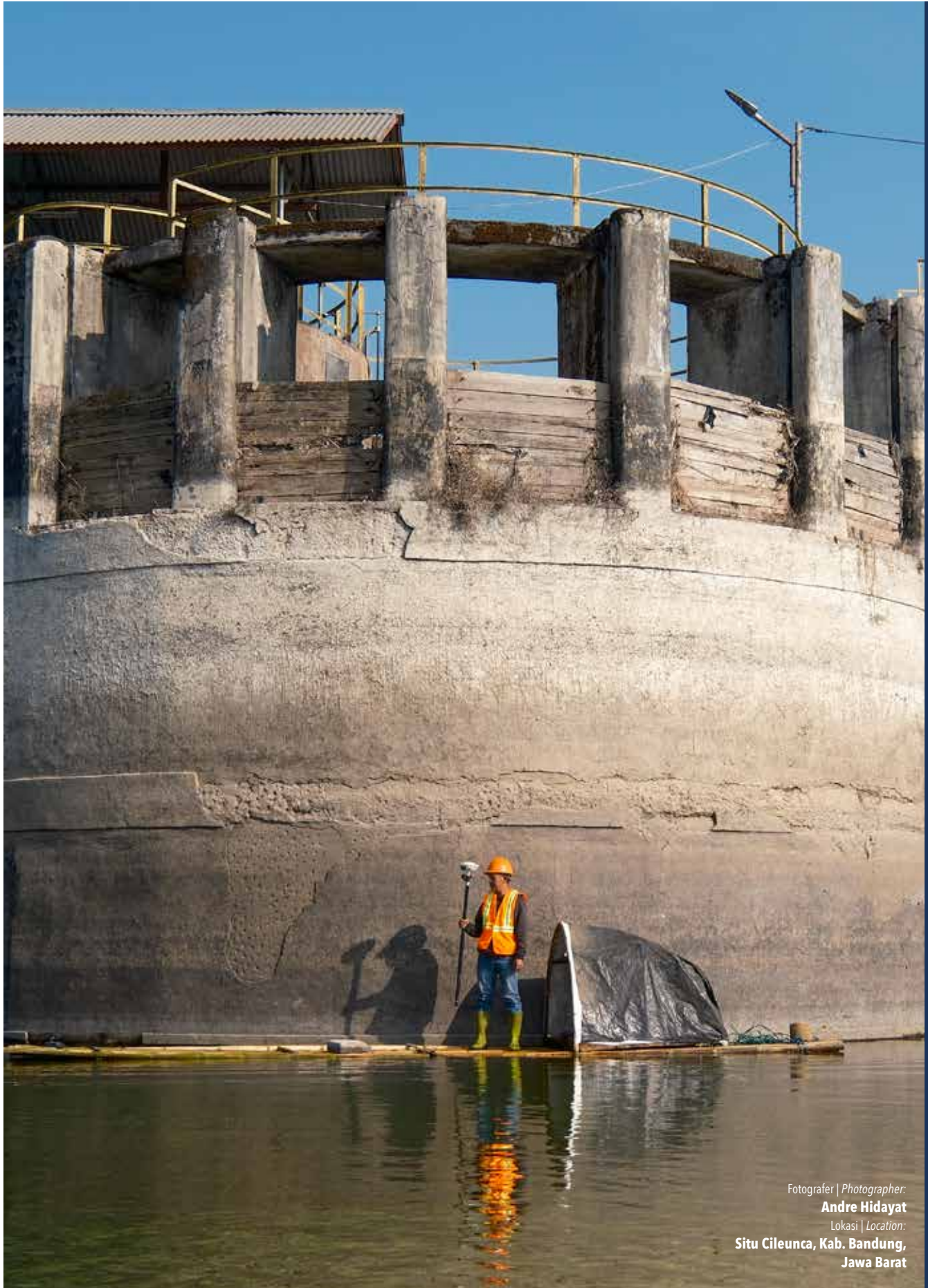
- perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial;
- pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial; dan
- pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi informasi geospasial.

g. Center for Geospatial Information Competence Development

The Center for Geospatial Information Competence Development (PPKIG) serves as a supporting unit under the authority of the Head of BIG and reports to the Head through the Principal Secretary. The Head of the Center leads it and is responsible for formulating and implementing technical policies related to developing competencies in geospatial information.

In carrying out its duties, the Center for Geospatial Information Competence Development performs the following functions.

- Formulating and overseeing technical policies related to the development of geospatial information competencies;*
- Implementing technical policies in the field of geospatial information competency development;*
- Developing norms, standards, procedures, and criteria for geospatial information competency development;*
- Providing technical guidance and supervision in the development of geospatial information competencies; and*
- Conducting monitoring, evaluation, and reporting related to geospatial information competency development.*



Fotografer | Photographer:

Andre Hidayat

Lokasi | Location:

**Situ Cileunca, Kab. Bandung,
Jawa Barat**

5.3 PENGENDALIAN INTERNAL

Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Informasi Geospasial (BIG) wajib melaksanakan penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna memastikan organisasi berjalan sesuai tujuan, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Kewajiban ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, khususnya Pasal 47 Ayat 1.

Sejak diberlakukannya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 pada 12 April 2021, evaluasi internal lembaga pemerintah dilakukan secara mandiri dan terintegrasi, mencakup tiga aspek: SPIP, manajemen risiko, dan efektivitas pengendalian korupsi.

Mengacu pada ketentuan tersebut, BIG melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada tahun 2024. Penilaian dilakukan secara internal, kemudian diverifikasi melalui proses penjaminan kualitas oleh Inspektorat BIG. Hasil akhir dievaluasi oleh BPKP sebagai lembaga pengampu. Hasil evaluasi menunjukkan skor SPIP sebesar 3,274, dengan Indeks Manajemen Risiko: 2,913 dan Indeks Pengendalian Korupsi: 3,082.

Skor SPIP di level 3 (terdefinisi) menandakan BIG telah memiliki sistem pengendalian yang terstruktur, strategi pencapaian kinerja yang relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian yang berjalan meskipun belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan evaluasi tersebut, BIG dapat meningkatkan maturitas SPIP dengan cara menyempurnakan perencanaan kinerja, menerapkan dan memperkuat manajemen risiko, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan pelaksanaannya, menyusun serta mengimplementasikan kebijakan anti korupsi, serta menindaklanjuti berbagai *Area of Improvement (Aoi)* yang telah diidentifikasi.

5.4 HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN TINDAK LANJUTNYA

Sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan tata kelola yang baik, BIG telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sampai dengan semester II tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, dari jumlah rekomendasi

5.3 INTERNAL CONTROL

As a non-ministerial government institution, the Geospatial Information Agency (BIG) must evaluate its Government Internal Control System (SPIP) to ensure that the organization operates in alignment with its objectives and is managed transparently and accountably. This obligation is under Government Regulation No. 60 of 2008, specifically Article 47, Paragraph 1.

Since the enactment of the BPKP Regulation No. 5 of 2021 on April 12, 2021, internal evaluations within government institutions have been conducted in an integrated and independent manner, encompassing three (3) aspects, namely SPIP, risk management, and the effectiveness of anti-corruption controls.

By these provisions, the Geospatial Information Agency (BIG) conducted an Integrated SPIP Implementation Maturity Self-Assessment in 2024. The assessment was administered internally and underwent a quality assurance process by the BIG Inspectorate. The final results were subsequently evaluated BPKP as the supervising authority. The evaluation yielded an SPIP score of 3.274, a Risk Management Index of 2.913, and a Corruption Control Index of 3.082.

The SPIP score at Level 3 (Defined) indicates that BIG has established a structured internal control system and a relevant and integrated performance achievement strategy, and has implemented control activities, despite not yet being fully effective.

Based on the evaluation, BIG can enhance the maturity level of SPIP by improving performance planning, implementing and strengthening risk management, conducting regular assessments of policies and their implementation, formulating and enforcing anti-corruption policies, and addressing the various Areas of Improvement (Aols) that have been identified.

5.4 AUDIT RESULTS FROM BPK AND THEIR FOLLOW-UP

As part of its commitment to implementing good governance, BIG has actively followed up on the recommendations from audits conducted by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI). According to the Monitoring Report on the Follow-up of BPK Audit Recommendations through the second semester of 2024, out of a total of 511

sebanyak 511 rekomendasi, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi mencapai 89,63%.

Progres status tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI adalah:

- Sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 456 rekomendasi.
- Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut, sebanyak 53 rekomendasi.
- Belum ditindaklanjuti, sebanyak 0 rekomendasi.
- Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, sebanyak 2 rekomendasi.

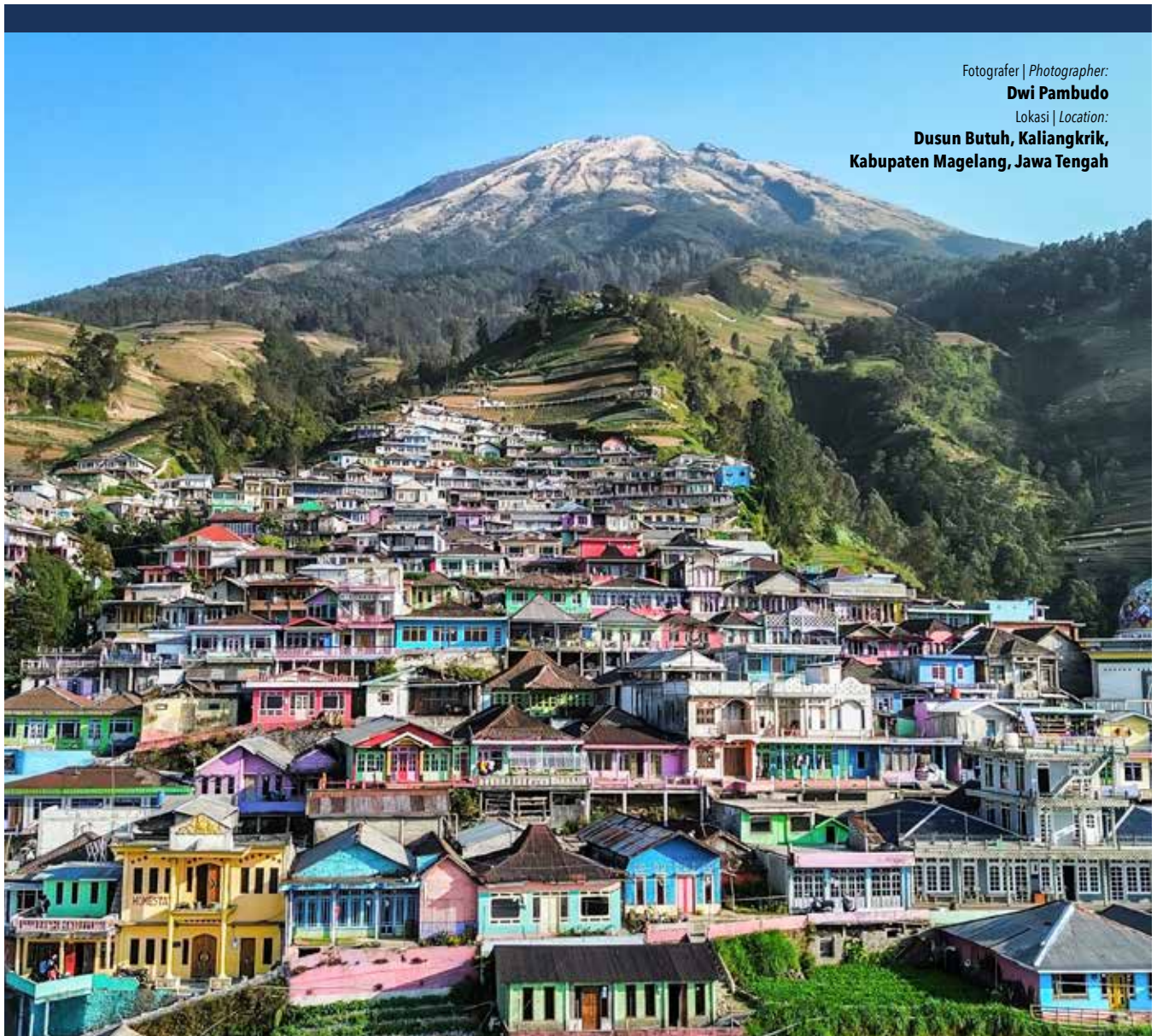
Sampai dengan semester II tahun 2024, BIG terus berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK agar penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di BIG terus meningkat.

recommendations, 89,63% was resolved

The progress of the follow-up on the recommendations from the BPK RI audit results is as follows.

- Complied with and completed: 456 recommendations*
- Currently under follow-up: 53 recommendations*
- Not yet followed up: 0 recommendations*
- Unable to follow up due to valid reasons: 2 recommendations*

As of the second semester of 2024, BIG has continued to follow up on recommendations from the BPK audit results to ensure ongoing improvement in completing these follow-up actions.



Fotografer | Photographer:

Dwi Pambudo

Lokasi | Location:

**Dusun Butuh, Kaliangkrik,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah**

5.5 KINERJA BIDANG HUKUM

Produk Hukum

Pada tahun 2024, BIG telah menghasilkan sejumlah produk hukum yang mencerminkan komitmen terhadap kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Produk-produk hukum tersebut meliputi berbagai peraturan, pedoman, dan dokumen legal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Rincian lengkap produk hukum tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

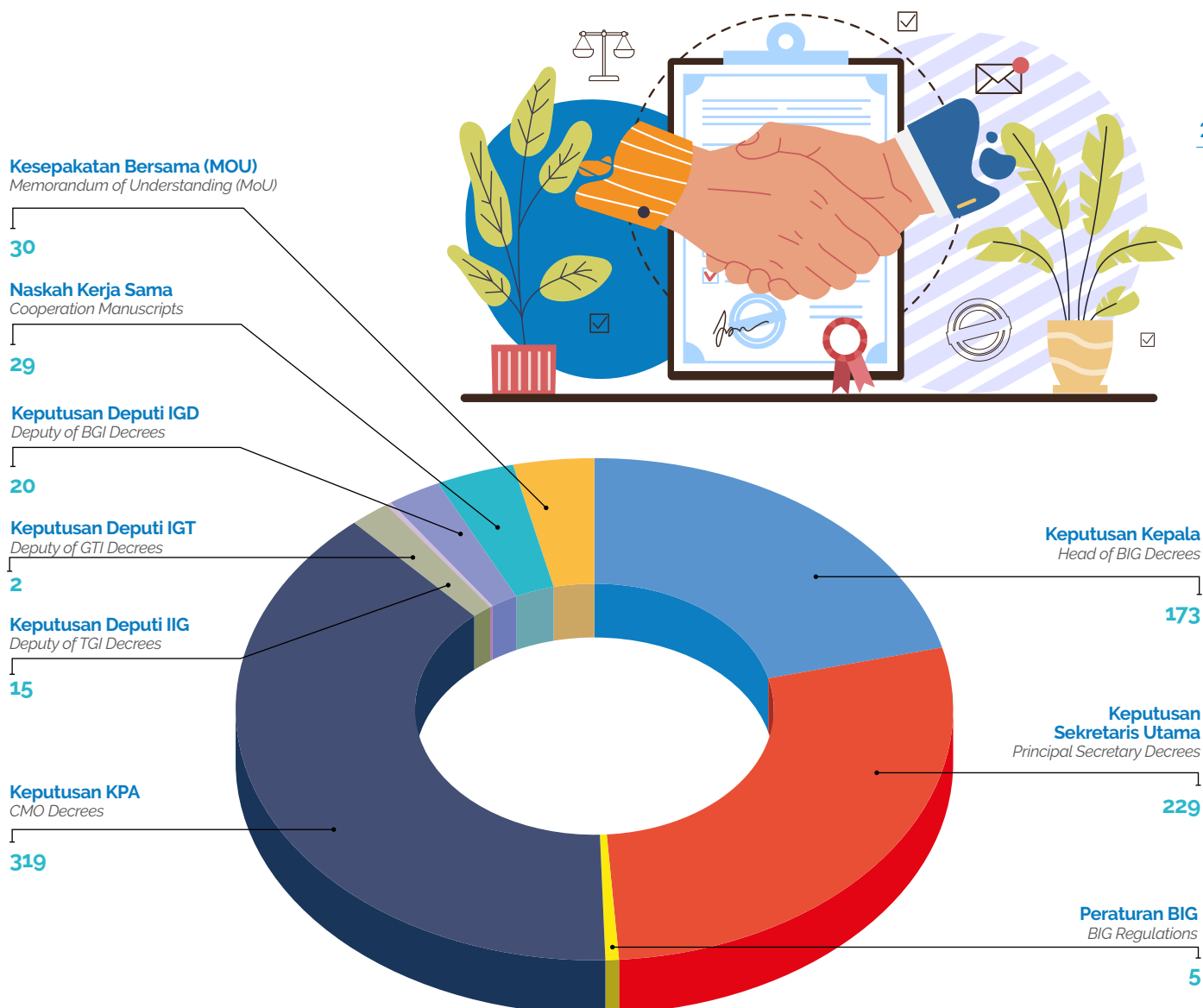
5.5 LEGAL SECTOR PERFORMANCE

Legal Products

In 2024, BIG issued several legal products demonstrating its commitment to legal certainty, accountability, and good governance. These legal instruments include a range of regulations, guidelines, and other legal documents that support the agency's duties and functions. A detailed list of these legal products is provided in the following table.

JUMLAH PRODUK HUKUM DI TAHUN 2024

Number of Legal Products in 2024



Sosialisasi Hukum

Sepanjang 2024, sosialisasi hukum dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu:

- a. Forum Pemahaman Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pasca-terbitnya Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial, yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 di Novotel Balikpapan yang mengundang Sekretaris Daerah, Kepala Badan/Dinas dari instansi terkait di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara. Di samping itu juga diundang perwakilan dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial, di antaranya: Universitas Mulawarman, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Palangka Raya, Universitas Tanjung Pura dan perwakilan dari unit kerja di BIG.

Legal Socialization

Legal socialization activities were conducted three times throughout 2024.

- a. The Understanding Forum of Geospatial Information Implementation was held on April 25, 2024, at Novotel Balikpapan, following the issuance of Geospatial Information Agency Regulation Number 1 of 2024 concerning the Development of Geospatial Information Infrastructure at Geospatial Information Network Nodes. The forum was attended by Regional Secretaries and Heads of Agencies or Departments from relevant institutions across the provinces of East Kalimantan, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, and North Kalimantan. Representatives from the Center for Spatial Data Infrastructure Development were also present, including delegates from Mulawarman University, Lambung Mangkurat University, Palangka Raya University, and Tanjungpura University, as well as representatives from BIG's work units.



- b. Forum Pemahaman Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pasca-terbitnya Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial, yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Juni 2024 di Swiss Belhotel Makassar. Peserta kegiatan

- b. The Understanding Forum of Geospatial Information Implementation was held on June 4–5, 2024, at Swiss-Belhotel Makassar, following the issuance of Geospatial Information Agency Regulation Number 14 of 2021 concerning Certified Professionals in the Geospatial Information Field. Participants in this legal socialization activity

sosialisasi hukum terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistika, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (unit kerja terkait penataan ruang) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (unit kerja terkait perencanaan, pembangunan, dan penelitian) yang berada di provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi. Di samping itu juga diundang Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Universitas Hasanuddin, Universitas Halu Oleo, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Tadulako.

included Regional Secretaries; Heads of the Communication, Informatics, Cryptography, and Statistics Offices; Heads of the Public Works and Spatial Planning Offices/Highways and Spatial Planning Offices (work units related to spatial planning); and Heads of the Regional Development Planning, Research, and Development Agencies (work units related to planning, development, and research) from provincial and regency/municipal governments across Sulawesi. Additionally, representatives from the Center for Geospatial Information Infrastructure Development at Hasanuddin University, Halu Oleo University, Sam Ratulangi University, Gorontalo State University, and Tadulako University were invited.



c. Forum Pemahaman Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pasca-terbitnya Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial Kebijakan Satu Peta yang dilaksanakan pada tanggal 14–16 Oktober 2024 di Fourstar Hotel Bali.

c. The Understanding Forum of Geospatial Information Implementation was held on October 14–16, 2024, at the Fourstar Hotel, Bali, following the issuance of Geospatial Information Agency Regulation Number 3 of 2024 concerning the Mechanism and Work Procedures for Sharing Geospatial Data and Information for the One

Peserta kegiatan terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistika, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Bali.

Map Policy. Participants in this activity included Regional Secretaries; Heads of the Communication, Informatics, Cryptography, and Statistics Offices; Heads of the Public Works and Spatial Planning Offices/Highways and Spatial Planning Offices; and Heads of the Regional Development Planning, Research, and Development Agencies from the East Nusa Tenggara and Bali regions.



Perkara Hukum

Melalui penerapan tata kelola lembaga yang baik, sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan lembaga maupun pegawai yang berdampak material terhadap Badan Informasi Geospasial.

Lawsuit

Through the implementation of sound institutional governance, throughout 2024, there were no legal cases involving the institution or its employees that had a material impact on the Geospatial Information Agency.

Pendampingan Hukum

Pendampingan Hukum terdiri dari:

1. Litigasi, sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pendampingan hukum Litigasi.
2. Non-Litigasi, di antaranya:
 - a. Pada tanggal 4 November 2024 telah terbit laporan akhir pendampingan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan bantuan hukum BIG pada kerusakan stasiun Pasang Surut dan stasiun CORS yang berlokasi di Susoh – Aceh Barat Daya.
 - b. Pada tanggal 12 Agustus terdapat pendampingan hukum kepada saksi ahli surat pemanggilan kepolisian Polda Sulawesi Selatan terhadap pegawai BIG untuk dimintai keterangan di Jakarta.

Legal Assistance

Legal assistance is categorized as follows

1. Litigation: No litigation-related legal assistance was provided throughout 2024.
2. Non-Litigation, among others:
 - a. On November 4, 2024, the Central Jakarta District Attorney's Office issued the final report on the legal assistance provided at BIG's request concerning damage to request concerning damage to the tide gauge and CORS stations in Susoh, Southwest Aceh.
 - b. On August 12, legal assistance was provided to expert witnesses in connection with a summons issued by the South Sulawesi Regional Police for the examination of BIG employees in Jakarta.

- c. Konsultasi hukum untuk pegawai BIG terkait perceraian, perkawinan, waris dan perjanjian serta hal-hal keperdataan lainnya, baik yang berhubungan bidang pekerjaan maupun kepentingan pribadi.

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pengelola JDIH BIG telah mengikuti pelatihan JDIH sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Validasi Dokumen Hukum pada JDIHN, pada tanggal 20 Juni 2024 di Batam dengan penyelenggara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham; dan
2. Pelatihan Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan dan Teknis Pengisian Metadata dalam Sistem JDIH, pada tanggal 20 Oktober 2024 di Bogor dengan penyelenggara BIG.

Berikut data Peraturan BIG yang telah didokumentasikan selama tahun 2024 melalui JDIH BIG:

- a. Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial, untuk abstrak peraturan dapat diakses di laman situs web jdih.big.go.id. (Unit kerja pengusul PPIG).
- b. Peraturan BIG Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, untuk abstrak peraturan dapat diakses di laman situs web jdih.big.go.id. (Unit kerja pengusul PSDMO).
- c. Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2024 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan Informasi Kebijakan Satu Peta, untuk abstrak peraturan dapat diakses di laman situs web jdih.big.go.id. (Unit kerja pengusul STIG).
- d. Peraturan BIG Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir, untuk abstrak peraturan dapat diakses di laman situs web jdih.big.go.id. (Unit kerja pengusul PSDMO).
- e. Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Informasi Geospasial, juga disusun terjemahan Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, untuk peraturan dapat diakses di <https://jdih.big.id> (Unit kerja pengusul HHMK).

- c. Legal consultations were also provided to BIG employees on matters related to divorce, marriage, inheritance, agreements, and other civil issues concerning both professional and personal interests.

Legal Documentation and Information Network Management

BIG's JDIH manager participated in the following JDIH training programs.

1. Technical Guidance on the Validation of Legal Documents in the JDIHN System, held on June 20, 2024, in Batam from National Legal Development Agency, Ministry of Law and Human Rights.
2. Training on Drafting Abstracts of Legislation and Technical Entry of Metadata into the JDIH System, held on October 20, 2024, in Bogor. BIG organized this training.

The following is a list of BIG regulations documented through the BIG JDIH during 2024.

- a. BIG Regulation Number 1 of 2024 concerning the Development of Geospatial Information Infrastructure. The abstract of this regulation is available at jdih.big.go.id. PPIG proposed this regulation.
- b. BIG Regulation Number 2 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Center for Geospatial Services and Products. The abstract of this regulation is available at jdih.big.go.id. The PSDMO proposed this regulation.
- c. BIG Regulation Number 3 of 2024 concerning the Mechanism and Work Procedures for Sharing Geospatial Data and Information for the One Map Policy. The abstract of this regulation is available at jdih.big.go.id. STIG proposed this regulation.
- d. BIG Regulation Number 4 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Center for Geospatial Coastal and Sand Dune. The abstract of this regulation is available at jdih.big.go.id. PSDMO proposed this regulation.
- e. BIG Regulation Number 5 of 2024 concerning the Geospatial Information Agency's Legal Documentation and Information Network, as well as the translation of BIG Regulation Number 7 of 2023 concerning the Organization and Work Procedures of the Geospatial Information Agency, can be accessed at <https://jdih.big.id>.



5.6 SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/WHISTLEBLOWING

Whistleblowing system, atau sistem pelaporan pelanggaran, merupakan mekanisme penting dalam sebuah lembaga yang memberikan saluran untuk anggota organisasi atau pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran etika, hukum, atau kebijakan yang terjadi di dalam organisasi.

BIG telah memperkenalkan *Whistle Blowing System* (WBS) yang dikenal sebagai Pengaduan Masyarakat (Dumas). Sistem ini memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk menyampaikan laporan, saran, atau informasi mengenai dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh ASN di lingkungan BIG yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Penyelesaian pengaduan masyarakat (dumas) sehubungan dengan pengawasan atau *whistleblowing* system diatur dalam Peraturan Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System di lingkungan BIG.

Sesuai Peraturan Kepala BIG, pelapor selaku *whistle-blower* mempunyai hak dijaga kerahasiaan identitasnya dan mendapat perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dumas dapat disampaikan secara tertulis melalui berbagai saluran, baik elektronik maupun non-elektronik, seperti pos, kurir, faksimili, email ke [info.inspektorat@big.go.id](mailto:inspektorat@big.go.id), atau media lainnya, yang ditujukan kepada Inspektur. Setiap pelaporan wajib mencantumkan uraian permasalahan yang jelas dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumen, foto, atau bentuk bukti lainnya.

5.6 WHISTLEBLOWING SYSTEM

A *whistleblowing* or violation reporting system is a vital mechanism within an institution that enables internal and external parties to report breaches of ethics, laws, or organizational policies.

BIG has established a *Whistleblowing System* (WBS) known as *Pengaduan Masyarakat* (Dumas/Public Complaints). This system provides a channel for the Government Civil Servants and the public to submit reports, suggestions, or information regarding suspected irregularities or abuse of authority by Civil Servants within the BIG environment that may cause harm to the public or the state. Public complaints and whistleblower reports are handled by the Regulation of the Head of BIG No. 6 of 2016 concerning the Management of Public Complaints and the Whistleblowing System within the BIG environment.

According to the Head of BIG Regulation, the reporter, as a whistleblower, has the right to have their identity kept confidential and to receive protection under applicable laws and regulations.

Public complaints can be submitted in writing through various electronic and non-electronic channels, including postal mail, courier, facsimile, email to info.inspektorat@big.go.id, or other available media, and should be addressed to the Inspector. Each report must include a clear and detailed description of the issue and be supported by accountable evidence, such as documents, photographs, or other relevant materials.

Adapun pengaduan yang masuk diklasifikasikan menjadi dua. **Pertama**, dumas tidak berkadar pengawasan yang berisi keluhan, kritik, atau saran yang bertujuan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. **Kedua**, dumas berkadar pengawasan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh ASN yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara yang diselesaikan melalui mekanisme whistleblowing system. Untuk dumas berkadar pengawasan akan ditindaklanjuti oleh inspektorat sebagai unit pengelola dumas di lingkungan BIG, dengan melakukan penelaahan awal, yang mencakup perumusan masalah dan proses klarifikasi terhadap substansi laporan. Setiap terlapor yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tahun 2024 ada 1 laporan dumas yg mekanisme penyelesaiannya melalui whistleblowing system.

5.7 KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BIG telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi. Setiap tahun, UPG aktif menggelar berbagai kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya menolak gratifikasi, seperti sosialisasi, kampanye publik, dan upaya pengendalian lainnya. Sesuai Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, pada tahun 2024 UPG melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

a. Melaksanakan sosialisasi gratifikasi dalam kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024

Dalam rangkaian kegiatan orientasi PPPK BIG Tahun 2024 dilakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada pegawai baru di lingkungan BIG terkait dengan pengertian gratifikasi dan apa yang harus dilakukan saat menerima gratifikasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan. Kegiatan dilaksanakan pada 4 Maret 2024 bertempat di Aula Utama BIG. Pada kegiatan ini disampaikan materi terkait dengan pengertian dan bentuk gratifikasi, UPG, mekanisme pelaporan gratifikasi, penetapan status gratifikasi, serta gratifikasi dalam perspektif hukum.

Complaints received are classified into two categories. The first is non-supervisory complaints, which include input, criticisms, or suggestions intended to improve the delivery of government and public services. The second is supervisory complaints, which contain information or indications of irregularities or abuse of authority by the Government Civil Servants that may harm the public or the state. As the unit responsible for managing public complaints within BIG, the Inspectorate follows up on supervisory complaints by conducting an initial review, including identifying the core issues and clarifying the report's substance. Any party found to have committed a violation will be subject to sanctions following applicable regulations. In 2024, one public complaint was resolved through the whistleblowing system.

5.7 GRATIFICATION CONTROL POLICY

BIG has established the Gratification Control Unit (UPG) to carry out its gratification control function. Each year, the UPG actively conducts various activities, including socialization efforts, public campaigns, and other control initiatives, to promote awareness and foster a culture of rejecting gratification. In line with BIG Regulation No. 3 of 2020 concerning Guidelines for Gratification Control, the UPG carried out the following activities in 2024.

a The UPG conducted a socialization session on gratification during the 2024 onboarding program for Contract-Based Government Employees.

As part of the 2024 Onboarding program for Contract-Based Government Employee (PPPK), BIG conducted a socialization session on gratification control. This initiative aimed to provide new employees within the BIG environment with a comprehensive understanding of gratification, including how to respond appropriately when offered gratification that may create a conflict of interest in executing their duties and responsibilities. The session was held on March 4, 2024, at the BIG's Main Hall. The materials presented covered the definition and types of gratification, UPG, the mechanisms for reporting gratification, the process of determining gratification status,

b. Mengikuti Bimbingan Teknis Pengisian Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2024

Perwakilan UPG telah mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan bimbingan teknis ditujukan untuk seluruh pengurus/petugas/admin UPG. Dengan adanya kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan UPG dapat mengisi realisasi kinerja UPG melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

c. Melaksanakan Sosialisasi Penguatan Integritas menuju Budaya Anti Korupsi

Sebagai salah satu implementasi program pengendalian gratifikasi dan salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Informasi Geospasial, dilaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tema Penguatan Integritas menuju Budaya Anti Korupsi. Target peserta sosialisasi yaitu seluruh pegawai di BIG, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan BIG.

d. Mendorong Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dan Pengisian Survei oleh Responden Internal dan Eksternal BIG

BIG senantiasa berpartisipasi dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh KPK setiap tahunnya. Upaya untuk mendorong pelaksanaan SPI di BIG dilakukan dengan cara menyampaikan informasi pelaksanaan SPI tahun 2024 bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi Penguatan Integritas menuju Budaya Anti Korupsi, dan mendorong responden eksternal, khususnya pihak vendor/penyedia barang/jasa BIG untuk mengikuti SPI.

e. Mengelola dan Menindaklanjuti Pelaporan Gratifikasi

UPG BIG mengelola pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi melalui laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL. Implementasi dari pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan BIG dapat dilihat dari keberadaan laporan gratifikasi pada tahun 2024. Dalam menindaklanjuti pelaporan gratifikasi, UPG

and legal perspectives related to gratification

b. Representatives from the UPG participated in the Technical Guidance for Completing the Monitoring and Evaluation of the 2024.

Gratification Control Program, which was conducted online. This guidance is intended for all UPG administrators and officers. Through this activity, UPG personnel are expected to be better equipped to report their performance achievements accurately using the application of Online Gratification (GOL) of the Corruption Eradication Commission (KPK).

c. Implementation of Integrity Awareness Programs to Promote an Anti-Corruption Culture

As part of the gratification control program and in celebration of Geospatial Information Day, a socialization activity was held under the theme "Strengthening Integrity towards an Anti-Corruption Culture." The session was aimed at all BIG employees, focusing on Senior and Primary High-Level Officials, Commitment-Making Officials, Procurement Officers, and members of the Government Internal Control System Task Force within BIG.

d. The UPG encouraged the administration of the Integrity Assessment Survey and facilitated its completion by both internal BIG personnel and external respondents.

BIG consistently participates in the Integrity Assessment Survey (SPI) conducted annually by the Corruption Eradication Commission (KPK). To promote the successful implementation of the 2024 SPI, BIG disseminated information about the survey alongside the socialization on Strengthening Integrity towards an Anti-Corruption Culture. Additionally, efforts were made to encourage external respondents, particularly BIG's vendors and service providers, to actively participate in the survey.

e. The UPG managed and followed up on gratification reports.

BIG's UPG manages reports on the receipt and/or rejection of gratification, handling these internally before forwarding them to the KPK through the GOL application. The gratification control within BIG can be observed from the gratification reports in 2024. In addressing these reports, UPG coordinated with the KPK to determine the status of each gratification



Fotografer | *Photographer:*
Muhammad Misbah Afif
Lokasi | *Location:*
**Gunung Semeru, Lumajang,
Jawa Timur**

berkoordinasi dengan KPK dalam menetapkan status barang gratifikasi. Berdasarkan Laporan Pengendalian Gratifikasi yang disusun oleh UPG BIG, jumlah laporan gratifikasi di tahun 2024 sebanyak 1 (satu) laporan yang telah ditetapkan statusnya untuk dikelola UPG.

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

1. Pelapor menyampaikan pelaporan gratifikasi ke UPG;
2. UPG memeriksa kelengkapan laporan gratifikasi;
3. UPG meneruskan pelaporan ke KPK melalui aplikasi GOL;
4. UPG reviu pelaporan gratifikasi di aplikasi GOL, untuk menentukan tindak lanjut dilakukan oleh KPK atau UPG;
5. KPK melakukan reviu lebih lanjut dan mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi;
6. UPG melakukan penatausahaan dokumen pelaporan gratifikasi.

case. According to the Gratification Control Report prepared by BIG's UPG, there was one (1) gratification report in 2024, the status of which has been managed by UPG.

Gratification Reporting Mechanism

1. The reporter submits a gratification report to the UPG.
2. The UPG verifies the completeness of the report.
3. The UPG forwards the report to the KPK via the GOL application.
4. The UPG reviews the report within the GOL application to determine the appropriate follow-up actions by either the KPK or UPG.
5. The KPK will conduct a further review and issue a clarification report.
6. The UPG maintains and manages all documentation related to the gratification reports.

5.8 ZONA INTEGRITAS

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan wujud nyata strategi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Per 31 Desember 2023, BIG memiliki 4 unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial di 2020, Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) di 2021, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) di 2022, dan Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) pada 2023.

Pada Juli 2024, BIG mulai menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru sesuai Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023. Perubahan ini berdampak pada susunan dan status unit kerja, termasuk yang sebelumnya telah meraih predikat Menuju WBK. Berdasarkan arahan Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB atas perubahan tersebut, hanya dua unit kerja di BIG yang dapat mempertahankan predikat Menuju WBK dan dapat diajukan menuju predikat WBBM, yaitu Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, dan Direktorat Sistem Referensi Geospasial. Adapun unit kerja lainnya perlu melalui proses pengajuan ulang sebagai calon unit kerja Menuju WBK.

5.8 INTEGRITY ZONE

The development of integrity zones toward Corruption-Free Zones (WBK) and Clean and Serving Bureaucracy Zones (WBBM) is a tangible action of the government's strategy in preventing and eradicating corruption, collusion, and nepotism. By December 31, 2023, BIG had four (4) work units that are predicated as Moving Towards Corruption-Free Zones (WBK), namely the Center for Geospatial Services and Products in 2020, the Center for Geospatial Information Standardization and Institutional Affairs (PSKIG) in 2021, the Center for Geodetic Control Network and Geodynamics (PJKGG) in 2022, and the Center for Thematic Mapping and Thematic Integration (PPIT) in 2023.

In July 2024, BIG began implementing a new Organizational Structure and Governance (SOTK) following BIG Regulation No. 7 of 2023. This structural change has affected the composition and status of various work units, including those previously designated as "Toward WBK" units. Following guidance from the Deputy for Bureaucratic Reform, Apparatus Accountability, and Supervision (RB Kunwas) at PANRB, only two (2) work units at BIG could retain their "Toward WBK" status. They might be proposed for the WBBM predicate. These units are the Geospatial Products and Services Office and the Directorate of Geospatial Reference System. Other work units had to undergo the submission process again as candidate units for the "Toward WBK" designation.

Mengingat adanya penyesuaian organisasi, BIG tidak mengusulkan unit kerja ke KemenPAN RB pada tahun ini. Namun demikian, semangat untuk membangun zona integritas tetap tinggi. Hal ini tercermin dari antusiasme unit kerja yang secara aktif menyatakan kesiapan untuk diusulkan kembali sebagai calon unit kerja Menuju WBK dan Menuju WBBM pada tahun 2025.

Due to organizational adjustments, BIG did not nominate any work units to the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform this year. However, the commitment to building an integrity zone remains strong. This is evident in the work units' enthusiasm, which has expressed their readiness to be nominated again as candidates for WBK and WBBM status in 2025.

5.9 PEDOMAN PERILAKU DAN KODE ETIK

Kode etik adalah seperangkat prinsip, nilai, dan standar perilaku yang digunakan oleh suatu lembaga untuk mengatur tindakan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatannya. Kode etik ini berlaku bagi pengurus, pegawai, serta pihak eksternal yang berinteraksi dengan lembaga, ditujukan agar setiap individu bertindak dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Penerapan kode etik membantu lembaga menjaga reputasi, membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, dan mengurangi risiko terjadinya perilaku tidak etis atau pelanggaran hukum.

Kode etik yang dijalankan secara konsisten merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola yang efektif. Pemahaman atas keterkaitan antara kode etik dan prinsip *good governance* mendorong terciptanya budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan menumbuhkan tanggung jawab individu dalam mematuhi standar yang berlaku. Penerapan kode etik juga menjadi langkah strategis untuk memastikan lembaga beroperasi secara efisien, etis, dan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Di BIG, pedoman etika dan perilaku merupakan tanggung jawab seluruh pegawai dan pimpinan untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya lembaga sehingga terwujud perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dipercaya dalam melakukan hubungan dengan rekan kerja, maupun *stakeholder* lainnya. Sosialisasi pedoman etika dan perilaku telah dilakukan kepada seluruh level organisasi BIG.

Pelanggaran terhadap pedoman etika dan perilaku di lingkungan BIG diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan sanksi, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan, sanksi disiplin, hingga tindakan hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan internal yang berlaku.

5.9 CODE OF CONDUCT

A code of ethics is a set of principles, values, and standards of behavior used by an institution to regulate the actions of all parties involved in its activities. This code of ethics applies to administrators, employees, and external parties who interact with the organization, encouraging each individual to act with integrity, honesty, and professionalism. By implementing a code of ethics, an institution can protect its reputation, build trust with stakeholders, and minimize the risk of unethical conduct or legal violations.

A consistently applied code of ethics is vital to building effective governance. Recognizing the connection between ethical standards and the principles of good governance helps foster an organizational culture rooted in integrity and individual accountability in complying with applicable standards. Implementing a code of ethics is also a strategic move to ensure the institution operates efficiently, ethically, and in alignment with sound governance principles.

At BIG, all employees and leaders are responsible for upholding ethical and behavioral guidelines that align with the institution's values. This ensures that interactions with colleagues and stakeholders are conducted professionally, responsibly, respectfully, appropriately, and trustworthily. These guidelines have been communicated and socialized across all levels of the organization.

Violations of ethical and behavioral guidelines within the BIG environment are subject to a range of sanctions, including verbal warnings, written warnings, formal reprimands, disciplinary measures, or legal action, depending on the severity of the violation and the relevant internal policies.

Selain itu, sanksi juga dapat berupa pembatasan pengembangan karier atau penangguhan tugas. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar etika, membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab, serta menjaga reputasi dan integritas lembaga.

In addition, sanctions may include career development restrictions or temporary suspension from duties. These sanctions promote adherence to ethical standards, foster a professional and accountable work culture, and uphold the institution's reputation and integrity.

5.10 AKSES INFORMASI DAN DATA LEMBAGA

Akses terhadap informasi dan data lembaga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas. Sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik, BIG bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BIG dengan menyediakan informasi yang relevan secara transparan dan mudah diakses oleh publik.

Upaya ini dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti situs web resmi, media sosial, siaran pers, serta publikasi dokumen secara berkala. Beberapa kanal informasi yang dapat diakses oleh masyarakat antara lain:

5.10 ACCESS TO INSTITUTIONAL INFORMATION AND DATA

Access to institutional information and data is fundamental to ensuring transparency and accountability. As part of its commitment to good governance, BIG is responsible for fulfilling the Public Information Disclosure Act mandate through its Information and Documentation Management Officer (PPID) by providing relevant information to the public in a transparent and easily accessible manner.

These efforts are carried out through various communication channels, including the official website, social media platforms, press releases, and regular publication of official documents. The following information channels are available for public access.



Fotografer | *Photographer:*

Yuli Kusworo

Lokasi | *Location:*

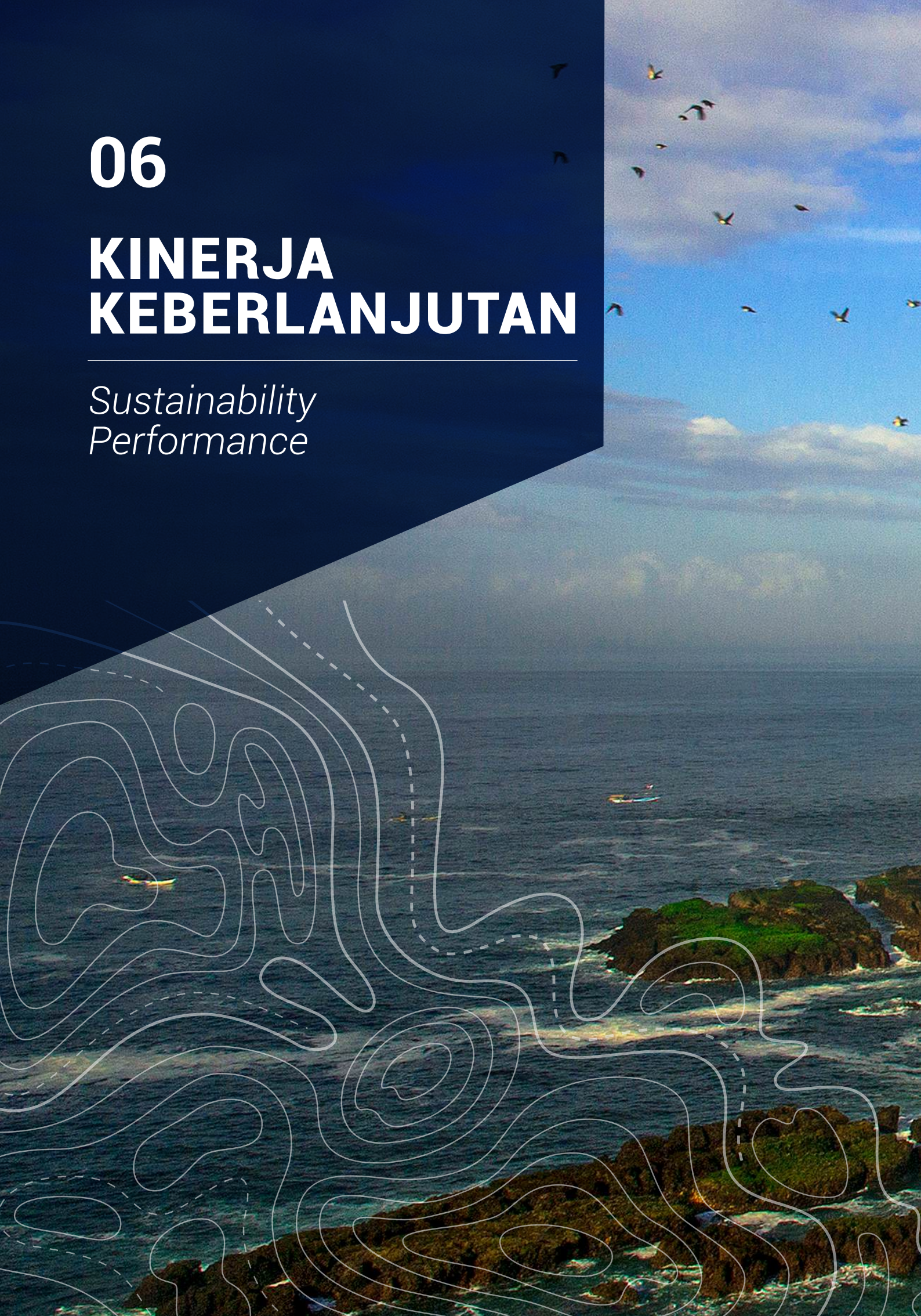
**Pantai Glagah Kulonprogo,
D.I. Yogyakarta**



06

KINERJA KEBERLANJUTAN

*Sustainability
Performance*



Fotografer | Photographer:

Heru Putranto

Lokasi | Location:

**Tanjung Papuma,
Jember, Jawa Timur**



Komitmen Keberlanjutan

Sustainability Commitment

Komitmen keberlanjutan Badan Informasi Geospasial (BIG) tercermin melalui strategi yang disusun berdasarkan visi, misi, dan nilai-nilai kelembagaan, serta penguatan budaya keberlanjutan yang terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

The Geospatial Information Agency (BIG) demonstrates its commitment to sustainability through strategies formulated in alignment with its vision, mission, and institutional values. This commitment is further reinforced by cultivating a culture of sustainability that is integrated into the execution of the agency's duties and functions.

STRATEGI KEBERLANJUTAN

Strategi keberlanjutan BIG disusun dengan mengacu pada kerangka pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. Dasar utama perumusan strategi ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, dan secara khusus diterjemahkan ke dalam RPJMN 2020–2024, yang merupakan periode penting dalam mewujudkan visi “Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Visi BIG sebagai “Penggerak utama penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berhasil guna dan berdaya guna”, secara langsung mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 pada Lampiran I–Narasi RPJMN 2020–2024. Berdasarkan RPJMN tersebut, BIG menetapkan empat misi, yaitu:

1. meningkatkan ketersediaan Informasi Geospasial nasional yang lengkap dan akurat dalam rangka mendukung pembangunan nasional;
2. mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial nasional yang berhasil guna dan berdaya guna melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
3. mewujudkan infrastruktur Informasi Geospasial nasional yang berkualitas mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, dan standar; dan

SUSTAINABILITY STRATEGY

BIG's sustainability strategy is formulated with reference to the national long-term and medium-term development frameworks. The strategy is primarily based on the 2005–2025 National Long-Term Development Plan (RPJPN) and is explicitly translated into the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), which is an essential phase in realizing the vision of “a Prosperous, Sovereign, Independent, and Culturally Distinct Indonesia Based on Mutual Cooperation.”

BIG's vision, which is “to serve as the leading force in delivering effective and impactful geospatial information services,” directly supports the vision of the President and Vice President, as articulated through nine (9) missions known as the Second Nawacita. These are outlined in Presidential Regulation Number 18 of 2020 concerning the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), specifically in Attachment I: Narrative of the 2020–2024 RPJMN. In alignment with this plan, BIG has established four institutional missions, namely:

1. enhancing the availability of comprehensive and accurate national geospatial information to support national development;
2. realizing the effective and efficient provision of national geospatial information through coordination, integration, and synchronization;
3. establishing a high-quality national geospatial information infrastructure encompassing policies, institutions, human resources, technology, and standards; and

4. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional.

Berlandaskan visi dan misi tersebut, BIG merancang strategi keberlanjutan untuk mencapai tujuan organisasi.

TUJUAN

Tujuan 1

Tersedianya Informasi Geospasial Dasar yang lengkap dan akurat

Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang lengkap dan akurat merupakan ujung tombak penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional yang andal. IGD menjadi acuan dan basis bagi penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) di hampir seluruh sektor.

Tujuan 2

Tersedianya Informasi Geospasial yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai pembangunan nasional.

Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang efektif dan efisien, serta tepat guna, dan tepat sasaran akan mempermudah proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga akan memberikan hasil yang lebih berkualitas dengan nilai tambah yang berpihak pada karakteristik lokal wilayah.

Tujuan 3

Terselenggaranya Infrastruktur Informasi Geospasial nasional yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan Informasi Geospasial nasional.

Infrastruktur Informasi Geospasial dimaksud terdiri atas kebijakan (termasuk regulasi), kelembagaan, SDM, teknologi, dan standar yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional.

4. implementing clean, effective, and reliable governance to support the management and delivery of national geospatial information.

Grounded in its vision and mission, BIG has formulated a sustainability strategy to support the achievement of its organizational objectives.

OBJECTIVE

Objective 1

Availability of complete and accurate Base Geospatial Information

Complete and accurate Base Geospatial Information (BGI) is the cornerstone for implementing reliable national geospatial information. It provides a fundamental reference and foundation for developing Thematic Geospatial Information (TGI) across nearly all sectors.

Objective 2

Availability of effective and efficient geospatial information aligned with national development

The timely and targeted provision of effective and efficient geospatial information facilitates policy formulation and decision-making in national development. Furthermore, it delivers high-quality geospatial data with added value that supports the distinct characteristics of each region.

Objective 3

Implementation of quality national geospatial information infrastructure to support the availability, access, and utilization of national geospatial information

The national geospatial information infrastructure encompasses policies (including regulations), institutions, human resources, technology, and standards designed to smoothly provide national geospatial information.

Tujuan 4

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional.

Tata kelola Informasi Geospasial yang baik dapat mencakup aspek-aspek penyelenggaraan Informasi Geospasial yang akuntabel, efisien dan efektif, responsif, serta berorientasi pada pelayanan

STRATEGI

Adapun strategi keberlanjutan yang dilakukan BIG dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan percepatan pemetaan dasar skala besar (termasuk peta skala 1:5.000), dimulai dari wilayah prioritas pembangunan nasional.
- Mengembangkan metode akuisisi data modern seperti *LiDAR*, *Synthetic Aperture Radar*, dan penginderaan jauh satelit resolusi tinggi.
- Memastikan kualitas data melalui mekanisme validasi dan pemutakhiran berkelanjutan.
- Mendorong pendanaan berkelanjutan, termasuk pembiayaan melalui APBN dan skema PHLN untuk memperluas cakupan wilayah pemetaan.
- Mengintegrasikan IGD dengan IGT lintas sektor untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis spasial di berbagai bidang pembangunan (mitigasi bencana, ketahanan pangan, pemantauan lingkungan).
- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan walidata tematik untuk meningkatkan kualitas dan sinkronisasi IGT.
- Mengembangkan atlas geospasial tematik (seperti Atlas Indikator TPB, Atlas Gunung Api, Atlas Lingkungan, dll) sebagai produk *knowledge-based* yang mudah digunakan publik dan pembuat kebijakan.
- Memperkuat kelembagaan simpul jaringan IG di pusat dan daerah melalui koordinasi, monitoring, dan peningkatan kapasitas.

Objective 4

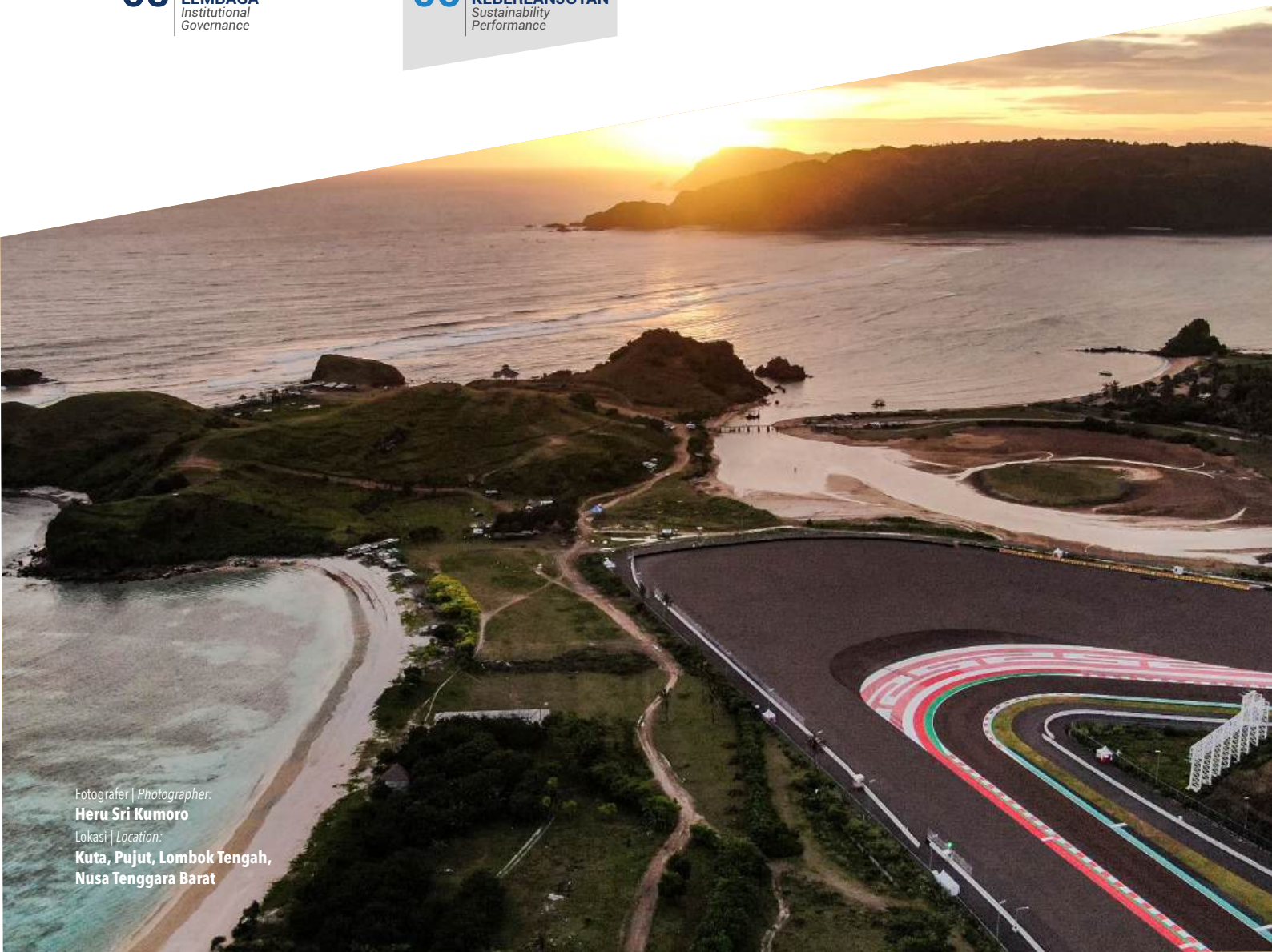
Establish clean, effective, and reliable governance to support the provision of national geospatial information.

Strong governance of geospatial information should encompass principles of accountability, efficiency, effectiveness, responsiveness, and a service-oriented approach.

STRATEGY

The sustainability strategies implemented by BIG to achieve its organizational goals are outlined as follows.

- *Accelerate the implementation of large-scale base mapping (including maps at a 1:5,000 scale), beginning with priority areas for national development.*
- *Develop modern data acquisition methods like LiDAR, Synthetic Aperture Radar (SAR), and high-resolution satellite remote sensing.*
- *Ensure data quality through continuous validation and regular updating mechanisms.*
- *Promote sustainable funding, including through the State Budget and Foreign Loans and Grants (PHLN) schemes to broaden the scope of mapping coverage.*
- *Integrate BGI with cross-sectoral TGI to support spatially based policy-making across various development sectors (disaster mitigation, food security, and environmental monitoring).*
- *Provide coaching and mentoring to thematic data custodians to enhance TGI quality and synchronization.*
- *Develop thematic geospatial atlases, such as the Atlas of SDG Indicators, Volcano Atlas, and Environmental Atlas, as knowledge-based products designed for easy use by both the public and policymakers.*
- *Strengthen the institutional network of GI nodes at both the central and regional levels through coordination, monitoring, and capacity building.*



Fotografer | Photographer:

Heru Sri Kumoro

Lokasi | Location:

**Kuta, Pujut, Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat**

- Menyempurnakan kebijakan, standar, dan regulasi terkait interoperabilitas data, metadata, dan layanan berbasis geospasial.
- Mengembangkan dan menjaga performa layanan *data center*, *Ina-Geoportal*, dan sistem berbagi data spasial yang terbuka, aman, dan andal.
- Memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam satu kerangka integrasi data spasial nasional.
- Menerapkan prinsip *good governance* dan meritokrasi dalam manajemen SDM, serta mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.
- Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten melalui Roadmap RB BIG dan evaluasi kinerja berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
- *Improve policies, standards, and regulations related to data interoperability, metadata, and geospatial-based services.*
- *Develop and maintain the performance of data center services, the Ina-Geoportal, and spatial data-sharing systems that are open, secure, and reliable.*
- *Facilitate cross-sectoral and stakeholder collaboration within a nationally integrated spatial data framework.*
- *Uphold the principles of good governance and meritocracy in human resource management while integrating the values of equality and non-discrimination.*
- *Consistently implement bureaucratic reform in line with BIG's Bureaucratic Reform Roadmap and evaluate performance based on the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) framework.*

- Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik melalui layanan konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan aduan, serta layanan data terbuka.
- Menanamkan budaya keberlanjutan di internal organisasi melalui edukasi, internalisasi nilai, dan pelibatan pegawai dalam pembangunan berkelanjutan.

Strategi keberlanjutan BIG ditujukan untuk memastikan bahwa kinerja dan kontribusi BIG tidak hanya memenuhi mandat regulasi, tetapi juga berdampak langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN

Dalam menjalankan strategi keberlanjutan, BIG memahami bahwa sumber daya manusia merupakan penggerak utama. Untuk itu, budaya keberlanjutan dibangun melalui internalisasi nilai, pelibatan seluruh pemangku kepentingan, serta integrasi praktik-praktik keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja.

Budaya keberlanjutan BIG mengadopsi nilai-nilai BerAKHLAK dan budaya kerja internal BIG yang menekankan adaptivitas, berorientasi pelayanan, profesionalisme, kolaborasi, kerja cerdas, serta integritas. Nilai-nilai ini menjadi panduan perilaku pegawai dan menjadi dasar dalam menciptakan organisasi yang responsif terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Praktik keberlanjutan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk kolaborasi dukungan untuk SDGs.

Budaya keberlanjutan di BIG juga ditunjukkan melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Melalui pelatihan, penataan jabatan, dan manajemen talenta, BIG memastikan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan sosial.

- Enhance transparency and public participation through public consultation services, customer satisfaction surveys, complaint management systems, and open data initiatives.

- Foster a culture of sustainability within the organization through education, internalization of core values, and active employee engagement in sustainable development efforts.

BIG's sustainability strategy is designed to ensure that its performance and contributions not only comply with regulatory requirements, but also actively support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

BUILDING A CULTURE OF SUSTAINABILITY

BIG recognizes that human resources are the key drivers in successfully implementing sustainability strategies. To that end, a culture of sustainability is cultivated through internalizing core values, active engagement of all stakeholders, and integrating sustainable practices into work planning and execution.

BIG's sustainability culture adopts the values of BerAKHLAK and the agency's internal work culture, which emphasizes adaptability, service orientation, professionalism, collaboration, smart work, and integrity. These values serve as a foundation for guiding employee behavior and shaping an organization that is responsive to social, economic, and environmental challenges. Sustainability practices also involve various stakeholders as a form of collaborative support for achieving the SDGs.

BIG's sustainability culture is further reflected in its commitment to sustainable human resource development. Through training programs, job structuring, and talent management, BIG ensures that everyone has the capacity to contribute to national development with a strong awareness of environmental and social responsibilities.

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Overview of Sustainability Performance

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIG TAHUN 2024

Achievement of BIG's Key Performance Indicators (KPIs) in 2024

Sasaran Strategis Strategic Objective	IKU KPI	Target Target	Realisasi Realization	Nilai Kinerja Performance Score	NPSS Strategic Objective Assessment Score
1. Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional Enhancing the availability of high-quality and ready-to-use base geospatial information in alignment with national development priorities	1.1. Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional Percentage of high-quality and ready-to-use Base Geospatial Information available across Indonesia, following national development priorities	47%	45,47%	96,75%	108,37%
	1.2. Persentase (%) Pertumbuhan penggunaan IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional Percentage growth in the BGI utilization to support national development objectives	7%	40.92%	120%	
2. Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional Enhancing the availability of high-quality thematic geospatial information in support of national development priorities.	2.1. Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional Percentage of available high-quality Thematic Geospatial Information in alignment with national development priorities	83%	84,15%	101,39%	102,08%
	2.2. Persentase (%) IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P Percentage of strategic Thematic Geospatial Information (IGT) utilized by Ministries, Institutions, and Governments K/L/P	95%	95,25%	100,26%	
	2.3. Persentase (%) jumlah pemerintah daerah yang telah memanfaatkan IG Percentage of local governments that have utilized GI	43%	44,98%	104,60%	

Sasaran Strategis <i>Strategic Objective</i>	IKU <i>KPI</i>	Target <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	Nilai Kinerja <i>Performance Score</i>	NPSS <i>Strategic Objective Assessment Score</i>
3. Terselenggaranya Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan Informasi Geospasial nasional <i>Providing high-quality geospatial information infrastructure to support the availability, accessibility, and utilization of national geospatial information</i>	3.1. Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas <i>Index of Geospatial Information Infrastructure Quality</i>	8,9 indeks (skala 1–10) <i>Index score of 8.9 (scale of 1 to 10)</i>	9,38 indeks (skala 1–10) <i>Index score of 9.38 (scale of 1 to 10)</i>	105,39%	105,39%
4. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya <i>Achieving a clean, efficient, and trustworthy bureaucracy</i>	4.1 Nilai Reformasi Birokrasi BIG <i>BIG's Bureaucratic Reform Values</i>	77 (Nilai RB) <i>Bureaucratic Reform Score)</i>	76,93 (Nilai RB) <i>Bureaucratic Reform Score)</i>	99,91%	99,91%
Nilai Kinerja Organisasi <i>Organizational Performance Score</i>					103,94%

Kontribusi BIG untuk Keberlanjutan

BIG's Contribution to Sustainability

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional, BIG memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan teknis dan perencanaan tata ruang, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Salah satu kontribusi nyata BIG untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah penyusunan Atlas SDGs yang menyajikan gambaran dan analisis spasial terhadap berbagai indikator SDGs hingga tingkat desa (by name by address). Atlas ini memetakan isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, akses terhadap layanan dasar, hingga kondisi kesejahteraan sosial secara lebih presisi dan berbasis data.

As the government agency responsible for managing national geospatial information, BIG strategically supports technical advancements and spatial planning while reinforcing the foundation for inclusive, equitable, and sustainable development.

One of BIG's key contributions to the Sustainable Development Goals (SDGs) is the development of the SDGs Atlas, which provides a spatial overview and detailed analysis of various SDG indicators down to the village level, including specific names and addresses. This atlas enables precise mapping of issues such as economic inequality, access to basic services, and social welfare conditions, all grounded in accurate data.

Sejalan dengan peran tersebut, BIG terus mendorong efisiensi operasional dan inovasi kelembagaan melalui penguatan kapasitas pegawai, tata kelola layanan publik, dan pengembangan infrastruktur Informasi Geospasial. Komitmen terhadap keberlanjutan tercermin dalam berbagai program, layanan, dan inisiatif yang dijalankan sepanjang tahun 2024, yang memberikan dampak nyata pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana dijelaskan berikut ini.

KONTRIBUSI PADA ASPEK EKONOMI

Sebagai lembaga pemerintah yang didanai melalui APBN, kinerja ekonomi BIG tidak diukur melalui laba atau aset, melainkan melalui kontribusinya dalam menciptakan efisiensi, nilai tambah, dan manfaat bagi pembangunan berkelanjutan.

Pada aspek ekonomi, produk Informasi Geospasial mendukung efisiensi pembangunan dan investasi. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar dapat mempercepat perencanaan dan realisasi investasi sektor infrastruktur, energi, dan tata ruang. Sedangkan integrasi Informasi Geospasial dalam Kebijakan Satu Peta dapat mengurangi tumpang tindih penggunaan lahan serta mempercepat proses perizinan investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Selain itu, BIG juga mendukung pengembangan industri geospasial nasional, termasuk hilirisasi industri geospasial, guna meningkatkan pemanfaatan data spasial dalam sektor swasta dan memperkuat industri lokal berbasis geospasial. Pemetaan wilayah pesisir dan potensi kelautan dapat mendukung pemanfaatan sumber daya maritim secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Produk geospasial BIG bisa didapatkan tanpa biaya sesuai kriteria tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019, layanan dengan mekanisme tarif Rp0,00 (nol rupiah) tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan teknis dalam Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2021. Sepanjang tahun 2024, total nilai kebermanfaatan produk geospasial yang diberikan melalui mekanisme nol rupiah mencapai Rp339,5 miliar, meliputi produk seperti Data Pasang Surut, Data CORS, serta Peta Rupabumi Indonesia (RBI) dalam bentuk digital dan cetak. Seluruh pembiayaan layanan ini didukung oleh dana APBN, mencerminkan kontribusi BIG dalam menyediakan layanan publik yang inklusif dan mendorong pemanfaatan data spasial secara lebih luas di berbagai sektor pembangunan.

In line with this role, BIG continues to enhance operational efficiency and foster institutional innovation by strengthening employee capacity, improving public service governance, and advancing geospatial information infrastructure. Its commitment to sustainability is demonstrated through various programs, services, and initiatives implemented throughout 2024, which have made a measurable impact on economic, social, and environmental dimensions, as outlined below.

CONTRIBUTION TO ECONOMIC ASPECTS

As a government institution funded by the State Budget, BIG's economic performance is not measured by profit or asset accumulation, but by its contribution to promoting efficiency, generating added value, and delivering tangible benefits in support of sustainable development.

In the economic domain, geospatial information products supported development and enhanced investment efficiency. The provision of large-scale base maps accelerated planning and implementation in key sectors, such as infrastructure, energy, and spatial development. Additionally, integrating geospatial information within the One Map Policy has helped minimize overlapping land use and expedited the investment licensing process through the Online Single Submission (OSS) system.

In addition, BIG has supported the development of the national geospatial industry, including efforts to advance downstream activities, increase spatial data utilization within the private sector, and strengthen local geospatial-based industries. Mapping coastal areas and marine potential has further contributed to the more productive and sustainable use of maritime resources.

BIG's geospatial products are available free of charge under specific conditions. By Government Regulation Number 49 of 2019, services may be provided at a zero-rupiah tariff, as governed by the technical provisions outlined in BIG Regulation Number 8 of 2021. In 2024, the total value of geospatial products delivered under this zero-rupiah mechanism reached IDR339.5 billion. These included products, such as tidal data, CORS data, and the Indonesian Topographic Map (RBI) in both digital and printed formats. Fully funded by the State Budget, these products have reflected BIG's commitment to inclusive public service delivery and promoted the broader use of spatial data across various development sectors.

Penggunaan Data Pasang Surut

Access to Tidal Data

Dengan Mekanisme Nol Rupiah Tahun 2024

via Zero Rupiah Mechanism (2024)

74 Pemohon Layanan
Service Applicants

Pemohon layanan mayoritas berasal dari instansi pendidikan, serta dari instansi pemerintah lainnya baik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga TNI/Polri

Primarily from educational institutions and government agencies, including ministries, local governments, and the Indonesian Armed Forces and Police

1 M+ Rupiah
1 B+

Total penggunaan data pasang surut dengan mekanisme nol rupiah selama tahun 2024 yaitu senilai Rp1.006.900.000 dengan tarif per stasiun per bulan senilai Rp100.000*

Tidal data access valued at IDR1,006,900,000 was provided through the zero-rupiah mechanism. (*Rate: IDR100,000 per station per month)

231 Stasiun
Stations

Secara total, terdapat permohonan data pasang surut sejumlah 231 stasiun dengan total bulan 10.069

Tidal data requests covered 231 tidal stations for a combined total of 10,069 months.

Penggunaan Data CORS

Access to CORS Data

Dengan Mekanisme Nol Rupiah Tahun 2024

via Zero Rupiah Mechanism (2024)

13.675 Pengguna
Users

Pengguna layanan berasal dari berbagai stakeholders seperti instansi pemerintah, pendidikan, swasta, BUMN, maupun perorangan

Service user came from government agencies, educational institutions, the private sector, state-owned enterprises (SOEs), and individuals

300 M+ Rupiah
300 B+

Total penggunaan data CORS dengan mekanisme nol rupiah yaitu senilai Rp318.113.200.000 dengan tarif per titik senilai Rp200.000*

CORS data access valued at IDR318,113,200,000 was provided through the zero-rupiah mechanism. (*Rate: IDR200,000 per point)

1 Juta+ Titik CORS
1 Million+ CORS Points Used

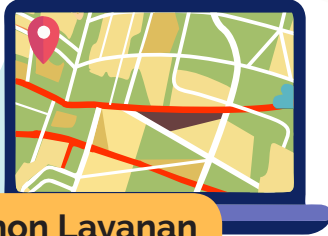
Secara total, jumlah titik CORS yang digunakan oleh pengguna layanan yaitu 1.590.566 titik

Users accessed a total of 1,590,566 points.

Penggunaan Peta RBI Digital

Access to Digital RBI Maps

Dengan Mekanisme Nol
Rupiah Tahun 2024
via Zero Rupiah
Mechanism (2024)



153 Pemohon Layanan
Service Applicants

Pemohon layanan berasal dari instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri dan instansi pendidikan

Applicants were government institutions, including ministries, regional governments, the Indonesian Armed Forces and Police, and educational institutions

47 rb+
47 B+

NLP
Map Sheets Requested

Secara total, terdapat permohonan peta RBI digital sejumlah 47.554 nomor lembar peta (NLP) dengan rincian:
1. 1:5.000 = 7.492 NLP
2. 1:25.000 = 21.127 NLP
3. 1:50.000 = 18.874 NLP

A total of 47,554 digital RBI map sheets were accessed, broken down by scale:
• 1:5,000 = 7,492 sheets
• 1:25,000 = 21,127 sheets
• 1:50,000 = 18,874 sheets

20 M+
20 B+

Rupiah

Total penggunaan peta RBI digital dengan mekanisme nol rupiah yaitu senilai Rp20.413.205.000 dengan rincian:

*Total usage valued at IDR20,413,205,000, based on official unit prices**

Skala Scale	Harga Satuan(Rp) Unit Price (IDR)	Total Pemanfaatan(Rp) Total Value (IDR)
1:5.000	400.000	2.996.800.000
1:25.000	475.000	10.035.325.000
1:50.000	390.000	7.360.820.000
1:100.000	390.000	3.900.000

*Harga satuan peta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial

**Based on Government Regulation No. 49 of 2019 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue applicable to the Geospatial Information Agency*

Penggunaan Peta RBI Cetak

Use of Printed RBI Maps

Dengan Mekanisme Nol
Rupiah Tahun 2024
With Zero Rupiah
Mechanism (2024)



9 Pemohon Layanan
Service Applicants

Pemohon layanan berasal dari instansi pemerintah, yaitu instansi pendidikan, TNI, pemerintah daerah, komunitas, dan kedutaan besar

Service applicants came from government agencies, namely educational institutions, the Indonesian Armed Forces, regional government, communities, and embassies

100+
100+

NLP
Map Sheets Requested

Secara total, terdapat permohonan peta RBI cetak sejumlah 131 NLP peta dengan rincian:
1. RBI 1:10.000 = 5 NLP
2. RBI 1:25.000 = 54 NLP
3. RBI 1:50.000 = 37 NLP
4. RBI 1:250.000 = 31 NLP
5. NKRI 1:5.000.000 = 4 NLP

sheets were requested, with the following breakdown.
1. RBI 1:10,000 = 5 sheets
2. RBI 1:25,000 = 54 sheets
3. RBI 1:50,000 = 37 sheets
4. RBI 1:250,000 = 31 sheets
5. NKRI 1:5,000,000 = 4 sheets

In total, 131 printed RBI map

10 jt+
10 M+

Rupiah

Total penggunaan peta RBI cetak dengan mekanisme nol rupiah yaitu senilai Rp13.100.000 dengan tarif per NLP senilai Rp100.000*

*The total use of printed RBI maps with a zero-rupiah mechanism is worth IDR13,100,000 with a rate per map sheet of IDR100,000.**

*Harga satuan peta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial

**The unit price of the map refers to Government Regulation Number 49 of 2019 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue applicable to the Geospatial Information Agency.*

KONTRIBUSI PADA ASPEK LINGKUNGAN

BIG turut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan, baik melalui penyediaan data spasial yang mendukung kebijakan konservasi dan mitigasi bencana, maupun melalui penerapan praktik ramah lingkungan di lingkungan kerja. Komitmen ini sejalan dengan peran BIG dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang peduli terhadap keberlanjutan sumber daya alam, dan kualitas hidup masyarakat.

Efisiensi Energi dan Penghematan Sumber Daya

Di lingkungan internal, BIG berkomitmen terhadap efisiensi energi dan konservasi sumber daya. Praktik hemat listrik diterapkan melalui pemadaman lampu pukul 19.00 WIB di seluruh gedung kantor serta pemasangan poster kampanye penghematan air dan listrik, kecuali pusat data. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi konsumsi energi, tetapi juga membangun budaya kerja yang peduli terhadap lingkungan.

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Kantor BIG terletak di lingkungan Kawasan Sains dan Teknologi Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno yang ditetapkan sebagai *green area*, serta berdekatan dengan area konservasi Kebun Raya Cibinong. Namun, aktivitas operasional BIG yang bersifat non-ekstraktif tidak menimbulkan dampak langsung terhadap keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Melalui produk dan layanannya, BIG turut berperan aktif dalam mendukung konservasi sumber daya alam melalui penyediaan data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang digunakan dalam berbagai kebijakan pelestarian lingkungan. Produk seperti neraca spasial mangrove, terumbu karang, dan lamun, serta Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi dan IGT Pulau-pulau Kecil, telah menjadi referensi penting dalam pelestarian wilayah pesisir, ekosistem laut Indonesia, dan bentang lahan Indonesia.

Selain itu, Atlas Indikator TPB hasil pengembangan BIG juga menjadi instrumen penting dalam memantau capaian pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup secara nasional.

CONTRIBUTION TO ENVIRONMENTAL ASPECTS

BIG contributes to environmental conservation by providing spatial data that supports conservation efforts and disaster mitigation policies. In addition, BIG promotes environmentally friendly practices within its operations. This commitment reflects BIG's role in advancing sustainable development and fostering organizational governance that prioritizes the preservation of natural resources and the well-being of communities.

Energy Efficiency and Resource Conservation

BIG is committed to improving energy efficiency and conserving resources within its operations. Energy-saving measures include turning off lights in all office buildings at 19:00 WIB (excluding the data center) and promoting awareness through posters encouraging water and electricity conservation. These efforts aim not only to reduce consumption, but also to foster an environmentally conscious workplace culture.

Conservation of Natural Resources and Ecosystems

BIG's office is in the Soekarno Science and Technology Park (STP), a designated green zone adjacent to the conservation area of the Cibinong Botanical Gardens. As BIG's operations are non-extractive in nature, they do not have a direct impact on the area's biodiversity.

Through its products and services, BIG actively contributes to the conservation of natural resources by providing thematic geospatial data and information (TGI) that support a wide range of environmental conservation policies. Key products, such as spatial inventories of mangroves, coral reefs, and seagrasses; the Atlas of Volcanic Landscape Resources; and TGI for small islands, serve as vital references for the preservation of coastal areas, marine ecosystems, and Indonesia's diverse landscapes.

In addition, BIG's Atlas of SDG Indicators is a key tool for monitoring national development progress, with a strong emphasis on environmental sustainability.

Pengelolaan Lingkungan untuk Mitigasi Bencana

BIG menyediakan berbagai peta tematik untuk mitigasi dan peringatan dini bencana, seperti IGT Multi Rawan Bencana hingga Peta Reaksi Cepat Kebencanaan. Informasi ini digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk perencanaan wilayah yang lebih tangguh terhadap risiko bencana. Dengan pendekatan spasial yang akurat, penyusunan kebijakan mitigasi bencana menjadi lebih terarah dan efektif.

BIG juga berkontribusi dalam InaTEWS (*Indonesia Tsunami Early Warning System*) bekerjasama dengan BMKG. InaTEWS adalah sistem peringatan dini tsunami nasional yang dikembangkan untuk memberikan informasi cepat dan akurat kepada masyarakat pesisir Indonesia. BIG mengelola jaringan stasiun pasang surut realtime yang tersebar di berbagai lokasi pesisir Indonesia. Data dari stasiun pasang surut digunakan untuk memantau perubahan permukaan laut secara *real-time*, yang menjadi alat bantu dalam pendeteksian potensi tsunami.

Pengelolaan Limbah dan Green Office

Kawasan kantor BIG berada di lingkungan Cibinong Science Center yang ditetapkan sebagai *green area*, dengan lebih dari 30% areanya berupa ruang hijau. Dalam pengelolaan limbah, BIG menyediakan tempat sampah terpilah dan membangun lubang biopori.

Selain itu, BIG juga melakukan edukasi kepada pegawai melalui Workshop Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh DWP dan KORPRI BIG, untuk mendorong praktik ramah lingkungan dimulai dari rumah tangga pegawai.

KONTRIBUSI PADA ASPEK SOSIAL

Komitmen BIG pada aspek sosial difokuskan pada pentingnya hubungan dengan pegawai, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan di bidang Informasi Geospasial. Sepanjang tahun 2024, kontribusi BIG pada aspek sosial tercermin dari sisi pegawai, masyarakat, dan pengguna produk/jasa sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Environmental Management for Disaster Mitigation

BIG supports disaster mitigation and early warning efforts by providing a range of thematic maps, from Multi-Hazard Risk Area Maps to Disaster Rapid Response Maps. These geospatial products are widely used by ministries, government agencies, and local governments to develop more resilient regional planning. By leveraging accurate spatial data, disaster mitigation policies can be formulated with greater focus and effectiveness.

BIG actively supports InaTEWS (*Indonesia Tsunami Early Warning System*) in collaboration with the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG). InaTEWS is a national system designed to deliver fast and accurate tsunami warnings to coastal communities across Indonesia. BIG operates a network of real-time tidal stations throughout the country's coastal areas as part of this effort. The sea level data collected from these stations are used to monitor real-time changes and supports the early detection of potential tsunamis.

Waste Management and Green Office Practices

Located within the Cibinong Science Center, a designated green zone, BIG's office complex maintains over 30% of its area as green space. To support sustainable waste management, BIG provides separate waste bins for sorting and has implemented biopore infiltration holes.

In addition, BIG promotes environmental awareness among its employees through the Household Waste Utilization Workshop, organized by DWP and KORPRI BIG. This initiative encourages staff to adopt environmentally friendly practices at home.

CONTRIBUTION TO SOCIAL ASPECTS

BIG's commitment to social responsibility emphasizes strong relationships with employees, communities, and stakeholders in the geospatial information sector. In 2024, this commitment was reflected through various initiatives and engagements involving staff, the public, and users of BIG's products and services, as outlined below.

Sumber Daya Manusia

BIG memandang pegawai sebagai aset strategis sekaligus penggerak utama dalam menjalankan mandat kelembagaan. Untuk itu, BIG tidak hanya berfokus pada upaya pengembangan kapasitas teknis pegawai saja, melainkan juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi, profesionalisme, dan pertumbuhan personal. Pendekatan ini sejalan dengan arah pembangunan aparatur sipil negara dan mendukung terciptanya organisasi pemerintahan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Diharapkan, pendekatan tersebut dapat mendorong pegawai berkontribusi optimal sesuai potensi dan peran strategisnya

Kesempatan yang Setara

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, BIG berkomitmen untuk menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. BIG mengadopsi prinsip meritokrasi, yakni pengelolaan ASN yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas, tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status pernikahan, usia, atau kondisi disabilitas.

Prinsip meritokrasi ini diterapkan sejak proses rekrutmen pegawai. Sebagai lembaga pemerintah, BIG tunduk pada peraturan ketenagakerjaan yang melarang pekerja anak dan praktik kerja paksa, dan seluruh pegawai BIG adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direkrut melalui mekanisme resmi.

BIG memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, mendapatkan promosi, dan berpartisipasi dalam pelatihan atau pengembangan karier. Proses rekrutmen, rotasi, dan promosi jabatan dilakukan secara terbuka dan berdasarkan sistem penilaian yang objektif dan terukur. Hal ini juga tercermin dalam peningkatan skor Indeks Sistem Merit BIG yang terus mengalami kemajuan setiap tahunnya sejak 2022.

Berikut ini penilaian indeks pada 8 aspek sistem merit tahun 2023 dan tahun 2024.

Human Resources

BIG recognizes its employees as strategic assets and key drivers in fulfilling its institutional mission. As such, BIG not only prioritizes the development of technical competencies, but also fosters a work environment that promotes collaboration, professionalism, and personal growth. This approach aligns with government civil servant development goals and supports the creation of a resilient, adaptive, and sustainable government institution. Through this commitment, BIG aims to empower employees to contribute optimally in line with their potential and strategic roles.

Equal Opportunity

In managing its human resources, BIG is committed to upholding the principles of equality and fairness, which align with Law Number 20 of 2023 on Government Civil Servants. BIG applies the principle of meritocracy in which civil servant management is based on qualifications, competence, potential, performance, integrity, and ethics without discrimination based on ethnicity, race, religion, gender, marital status, age, or disability.

This meritocratic principle is reflected in BIG's employee recruitment process. As a government institution, BIG adheres to labor regulations prohibiting child and forced labor. All BIG employees are part of the Government Civil Servant (ASN), consisting of Government Workers (PNS) and Contract-based Government Employees (PPPK), and are recruited through official mechanisms.

BIG is committed to providing every employee equal opportunities for growth, promotion, and participation in training or career development programs. Recruitment, rotation, and promotion processes are conducted transparently and based on an objective, measurable evaluation system. This commitment is reflected in the consistent improvement of BIG's Merit System Index score, which has shown steady progress since 2022.

The following is the assessment of the Merit System Index across eight (8) key aspects in 2023 and 2024.



Remunerasi dan Penghargaan Pegawai BIG

BIG Employee Remuneration and Awards

Mekanisme penentuan dan pemberian remunerasi serta apresiasi di BIG telah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini tercermin dari salah satu aspek meritokrasi yang dievaluasi, yakni pengelolaan penggajian dan penghargaan, yang mendapatkan skor 37,5 dari 40, menunjukkan kualitas pelaksanaan aspek remunerasi baik.

BIG's process for determining and providing employee remuneration and recognition fully complies with applicable laws and regulations. This commitment is reflected in the meritocracy assessment, where the salary and awards management aspect scored 37.5 out of 40, demonstrating good performance in remuneration practices.

Pemberian penghargaan pegawai di Badan Informasi Geospasial diatur dalam Keputusan Kepala BIG Nomor 117.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Informasi Geospasial. Ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian pegawai ASN dalam menjalankan tugasnya. Tujuan lain pemberian penghargaan bagi pegawai ASN adalah sebagai motivasi untuk bekerja secara profesional dengan kinerja di atas ekspektasi. Jenis penghargaan pegawai ASN BIG yang diberikan tahun 2024 antara lain Penghargaan Satyalancana Karyasatya sebanyak 90 PNS dan penetapan 1 (satu) orang pegawai inspiratif Tahun 2024.

Penghargaan pegawai inspiratif adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN yang memiliki kemampuan disiplin yang tinggi, kinerja yang baik, dapat memberikan motivasi kepada orang lain, serta memiliki inovasi yang berdampak bagi organisasi dan masyarakat sehingga dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi pegawai lainnya. Penentuan pegawai inspiratif dilakukan berdasarkan gabungan nilai pada seleksi presentasi dan wawancara, penilaian kinerja, dan juga disiplin pegawai. Keseluruhan peserta seleksi diurutkan berdasarkan peringkat untuk kemudian hanya dipilih 1 (satu) orang Pegawai Inspiratif Tahun 2024. Selanjutnya, pegawai inspiratif terpilih ditetapkan pada Surat Keputusan Kepala BIG berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Pegawai Inspiratif Tahun 2024, yaitu Teguh Sulistian dari Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai.

Selain gaji, tersedia berbagai tunjangan antara lain tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja, sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial. Setiap pegawai juga berhak atas cuti tahunan, hingga cuti melahirkan sesuai dengan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara; dan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021.

The employee awards at the geospatial information Agency are governed by the Head of BIG Decree Number 117.1 of 2023 on the Guidelines for Awarding Government Civil Servants (ASN). These awards serve as an appreciation for the dedication and commitment of ASNs to completing their duties. Additionally, they aim to motivate employees to maintain high professional standards and exceed performance expectations. In 2024, BIG's ASN awards include the Satyalancana Karyasatya Award, presented to 90 civil servants, and the selection of one (1) Inspirational Employee of the Year.

The Inspirational Employee Award recognizes a civil servant who demonstrated high discipline, strong performance, the ability to motivate others, and innovations that positively impacted the organization and society. This employee served as a role model and inspiration for their colleagues. The recipient was selected based on various factors, including presentation skills, interview performance, work achievements, and discipline. All candidates were ranked according to these criteria, with only the top performer receiving the award. The final selection of Inspirational Employees was formalized through the Head of BIG Decree, based on the official Minutes from the 2024 Inspirational Employee Selection process. He was Teguh Sulistian from Directorate of Marine and Coastal Topographic Mapping

In addition to salary, employees receive various allowances, including performance-based allowances following Presidential Regulation Number 36 of 2019 on Employee Performance Allowances within the Geospatial Information Agency. Employees are also entitled to annual leave and maternity leave, as regulated by applicable laws and regulations, namely Law Number 5 of 2014 on Government Civil Servants; Government Regulation Number 11 of 2017 on Government Worker Management (as amended by Government Regulation Number 17 of 2020); Presidential Regulation Number 58 of 2013 on the National Civil Service Agency; and National Civil Service Agency Regulation Number 24 of 2017 on Government Worker's Leave Procedures (as amended by National Civil Service Agency Regulation Number 7 of 2021).

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman

Decent and Safe Working Environment

BIG berkomitmen menyediakan lingkungan bekerja yang layak dan aman kepada seluruh pegawai.

Dalam aspek sosial, BIG berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan keadilan spasial melalui pemetaan wilayah rentan bencana, penyediaan data geospasial untuk perencanaan wilayah tertinggal dan perbatasan, serta edukasi dan peningkatan kapasitas SDM di tingkat lokal untuk mendukung inklusivitas dalam pemanfaatan informasi spasial. Kami juga menjalankan program-program tanggung jawab sosial untuk komunitas karyawan dan masyarakat di sekitar kantor.

BIG is dedicated to ensuring all employees have a safe, healthy, and respectful workplace.

In the social domain, BIG supports equitable development and spatial justice by mapping disaster-prone areas, providing geospatial data for planning underdeveloped and border regions, and offering education and capacity-building programs to strengthen local human resource capabilities. These efforts help promote inclusivity in the use of spatial information. BIG also carries out social responsibility initiatives for employees and surrounding communities.

Pengembangan Kapasitas

Capacity Development

BIG secara rutin meningkatkan kapasitas pegawai melalui berbagai workshop dan seminar, baik untuk penguatan kompetensi teknis maupun soft skill yang mendukung kinerja.

Untuk pengembangan kompetensi teknis di bidang Informasi Geospasial, BIG memiliki Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial (PPKIG). Unit ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis terkait pengembangan kompetensi Informasi Geospasial. Salah satu bentuk implementasinya adalah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, terbuka untuk pegawai BIG dan pegawai dari instansi/lembaga pemerintah lainnya.

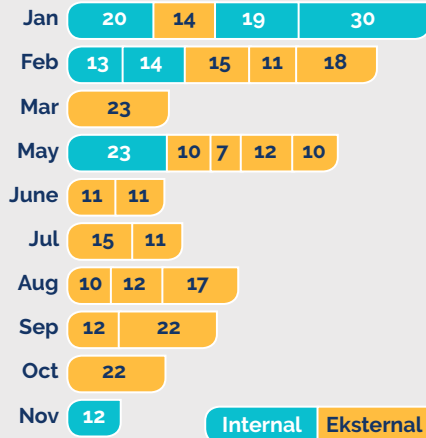
BIG regularly enhances employee capacity through workshops and seminars, strengthening both technical expertise and soft skills to support improved performance.

To support the development of technical competencies in geospatial information, BIG established the Center for Geospatial Information Competence Development (PPKIG). This unit is responsible for formulating and implementing technical policies related to geospatial competency development. One of its key initiatives is the delivery of capacity-building training programs, which are open not only to BIG employees, but also to personnel from other government agencies and institutions.



PENGEMBANGAN KAPASITAS INFORMASI GEOSPASIAL

Geospatial Information Capacity Development



Referensi/Source: BIG

KETERANGAN:

Angka pada tiap bulan menunjukkan jumlah peserta pada tiap kelas.
Contoh pada bulan Januari, ada 4 kelas/pelatihan. Pelatihan A diikuti 20 peserta, Pelatihan B diikuti 14, Pelatihan C diikuti 19, dst

DESCRIPTION

The figures shown for each month represent the number of participants in individual classes or training sessions. For example, in January, each training session had four (4) classes. Training A had 20 participants, Training B had 14, Training C had 19, and so on.

PELATIHAN UNTUK PEGAWAI BIG

Training Programs for BIG Employees

Capaian Jumlah Peserta Internal BIG
Internal BIG Participants in 2024PELATIHAN
DESKTOP SIG
(OPENSOURCE)DESKTOP GIS TRAINING
(OPEN SOURCE)15-19 Januari 2024
January 15-19, 2024PENGUMPULAN
NAMA
RUPA BUMIGEOGRAPHIC NAME
COLLECTION16-18 Januari 2024
January 16-18, 2024PELATIHAN
COACHING DAN
MENTORINGCOACHING & MENTORING
TRAINING22-26 Januari 2024
January 22-26, 2024PELATIHAN UAV
KAMERA
NON-METRIKUAV NON-METRIC CAMERA
TRAINING19-23 Februari 2024
February 19-23, 2024



**PENGEMBANGAN
KAPASITAS
FASILITATOR IG**

GI FACILITATOR CAPACITY
DEVELOPMENT



26 Feb – 1 Mar 2024
February 26 – March 1, 2024



**PELATIHAN DASAR
PEMROGRAMAN
PYTHON**

BASIC PYTHON PROGRAMMING
TRAINING



4–8 Maret 2024
March 4–8, 2024



**PEMANFAATAN
BASIS DATA
NOSQL**

NOSQL DATABASE
UTILIZATION



6–8 Mei 2024
May 6–8, 2024



**PEMETAAN 3D
DENGAN
DRONE LIDAR**

3D MAPPING WITH
LIDAR DRONE



13–15 November 2024
November 13–15, 2024

TOTAL PESERTA
Total Participants **741**

PELATIHAN UNTUK PESERTA EXTERNAL
Training Programs for External Participants

Capaian Jumlah Peserta Instansi/Lembaga Eksternal
Number of Participants from External Institutions/Agencies



SIG Tingkat Dasar
GIS Basic Level



15 Jan–7 Feb 2024
Jan 15 – Feb 7, 2024



SIG Tingkat Dasar
GIS Basic Level



18–28 Maret 2024
Mar 18–28, 2024



**Desktop GIS
Open Source**
Desktop GIS
(Open Source)



27–31 Mei 2024
May 27–31, 2024



**Desktop GIS
Open Source**
Desktop GIS
(Open Source)



19–23 Feb 2024
Feb 19–23, 2024



**Penginderaan
Jauh Tingkat
Dasar**
Remote Sensing –
Basic Level



13 – 17 Mei 2024
May 13–17, 2024



**Peta Rencana Tata
Ruang**
Spatial Planning
Mapping



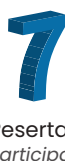
27 – 31 Mei 2024
May 27–31, 2024



**Desktop GIS
Open Source**
Desktop GIS
(Open Source)



26 Feb – 1 Mar 2024
Feb 26 – Mar 1, 2024



SIG Tingkat Dasar
GIS Basic Level



13–22 Mei 2024
May 13–22, 2024



SIG Tingkat Dasar
GIS Basic Level



3–14 Juni 2024
Jun 3–14, 2024

11

Peserta
Participants**Fungsurta
Tingkat Ahli**
Expert-Level
Mapping Surveyor
(Functional Position)**3 – 14 Juni 2024**
Jun 3–14, 2024

10

Peserta
Participants**Fungsurta
Tingkat Ahli**
Expert-Level
Mapping Surveyor
(Functional Position)**5–16 Agu 2024**
Aug 5–16, 2024

12

Peserta
Participants**Desktop GIS
Open Source**
Desktop GIS
(Open Source)**9–13 Sep 2024**
Sep 9–13, 2024

15

Peserta
Participants**SIG Tingkat Dasar
(Kelas A)**
GIS Basic Level
(Class A)**22 Jul – 2 Agu 2024**
Jul 22 – Aug 2, 2024

17

Peserta
Participants**Penataan
Batas Wilayah**
Boundary Delineation**26–30 Agu 2024**
Aug 26–30, 2024

22

Peserta
Participants**SIG Tingkat
Lanjut**
Advanced GIS**23 Sep – 4 Okt 2024**
Sep 23 – Oct 4, 2024

11

Peserta
Participants**SIG Tingkat Dasar
(Kelas B)**
GIS Basic Level
(Class B)**22 Jul – 2 Agu 2024**
Jul 22 – Aug 2, 2024

12

Peserta
Participants**Operator SIG**
GIS Operator**26–30 Agu 2024**
Aug 26–30, 2024

12

Peserta
Participants**SIG Tingkat Lanjut**
Advanced GIS**21 Okt – 1 Nov 2024**
Oct 21 – Nov 1, 2024**TOTAL PESERTA**
Total Participants**234**

BIG juga menjalankan pengembangan SDM IG yang kompeten melalui pelatihan terintegrasi dengan *Corporate University* (BIG CORPU), dengan dukungan reformasi birokrasi. BIG CORPU diluncurkan pada Desember 2023, bertujuan untuk mewujudkan SDM bidang Informasi Geospasial kelas dunia. Strategi pembelajaran BIG-CORPU untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi dan memastikan tercapainya Program Strategis Organisasi. Metode pembelajaran meliputi 70% *learning from experiences*, 20% *learning from others*, dan 10% *structured learning* dan memastikan tercapainya Program Strategis Organisasi. Selama tahun 2024, internalisasi tata kelola BIG-CORPU dan forum pembelajaran telah dijalankan.

To develop competent Human Resources in Geospatial Information, BIG has implemented an integrated training approach through its Corporate University, BIG CORPU, supported by bureaucratic reform. Launched in December 2023, BIG CORPU is designed to cultivate world-class GI professionals. BIG CORPU adopts a strategic learning framework to enhance organizational performance and support the implementation of BIG's Strategic Programs. The learning model covers 70% experiential learning, 20% learning from others, and 10% structured learning. Throughout 2024, BIG focused on internalizing BIG CORPU governance and holding learning forums.

Kontribusi untuk Masyarakat

Contributions to Society

BIG berkomitmen memberikan kontribusi yang berdampak pada masyarakat luas melalui produk dan layanannya, serta kepada masyarakat sekitar melalui kegiatan tanggung jawab sosial lembaga.

BIG remains committed to making meaningful contributions to society through its geospatial products and services, as well as corporate social responsibility initiatives.

Bagi masyarakat luas, BIG senantiasa berupaya mendorong keterlibatan mereka dalam layanan geospasial, antara lain melalui Pelayanan Geospasial Proaktif dan Forum Konsultasi Publik. Melalui pendekatan tersebut, BIG menjangkau kelompok masyarakat, termasuk sekolah, daerah tertinggal, dan penyandang disabilitas, memastikan bahwa data geospasial tidak hanya memenuhi kepentingan sejumlah pihak, tetapi menjadi sarana pemberdayaan dan edukasi masyarakat luas.

Sebagai bentuk kepedulian sosial untuk komunitas lokal, BIG mendukung penyediaan data spasial dalam monitoring dan konservasi sumber daya alam melalui IGT strategis. Selain itu, BIG juga mendukung pelestarian situs budaya nusantara melalui penyediaan data spasial/peta dan atlas sosial budaya, misalnya Atlas Budaya Indonesia, Atlas Pariwisata Borobudur, Labuan Bajo, Bali, dan Mandalika, hingga penyusunan Atlas Geospasial Indonesia edisi Sejarah, Suku, dan Budaya Bangsa.

Disamping itu, BIG juga meningkatkan penggunaan Informasi Geospasial oleh masyarakat. Salah satu bentuk kegiatannya adalah Literasi Geospasial dimana masyarakat melakukan kunjungan ke Museum Gumuk Pasir yang ada di Parangtritis Kabupaten Bantul Yogyakarta. Literasi Geospasial disini dimaksudkan kemampuan seseorang untuk memahami, dan menggunakan Informasi Geospasial melalui kunjungan ke Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir. Kelompok masyarakat yang telah mendapatkan literasi geospasial adalah kelompok masyarakat yang memperoleh pengetahuan tentang Informasi Geospasial dan kemaritiman di kawasan pesisir dan gumuk pasir.

Sedangkan bagi masyarakat sekitar, BIG menyelenggarakan berbagai program sosial yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Pada tahun 2024, program sosial BIG diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Informasi Geospasial yang jatuh setiap 17 Oktober, sekaligus bertepatan dengan hari jadi BIG ke-55. Mengusung tema "Satu Peta Satu Data Menuju Indonesia Emas", rangkaian acara diselenggarakan selama periode Agustus-November 2024, meliputi lomba gambar peta, lomba foto geospasial, lomba kebersihan, seminar & workshop, open house, pemberian penghargaan dan kegiatan olahraga berupa jalan santai, pertandingan futsal dan pertandingan tenis meja untuk pegawai.

For the broader public, BIG continues to promote active community engagement in geospatial services through initiatives, such as Proactive Geospatial Services and Public Consultation Forums. These efforts aim to reach diverse community groups—including schools, underdeveloped regions, and persons with disabilities—ensuring that geospatial data not only serves specific stakeholder interests, but also functions as a tool for empowerment and education across society.

As part of its commitment to social responsibility, BIG supports local communities by providing spatial data to aid in the monitoring and conserving natural resources through strategic TGI initiatives. In addition, BIG contributes to the preservation of cultural heritage across the archipelago by supplying spatial data/maps and socio-cultural atlases, for example, the Indonesian Cultural Atlas, the Borobudur, Labuan Bajo, Bali, and Mandalika Tourism Atlases, as well as the development of the Indonesian Geospatial Atlas editions on History, Ethnic Groups, and National Culture.

In addition, BIG continues to promote public utilization of Geospatial Information through initiatives such as Literasi Geospasial (Geospatial Literacy). In this program, the community visited the Gumuk Pasir Museum in Parangtritis, Bantul Regency, Yogyakarta. In this context, geospatial literacy refers to the ability to understand and apply geospatial information facilitated through engagement at the Coastal and Sand Dune Geospatial Office Participants in this program were community groups who gained knowledge on geospatial and maritime information relevant to coastal and dune environments.

BIG also implements various social programs to support the surrounding communities' health, education, and welfare. In 2024, these efforts were highlighted through activities commemorating Geospatial Information Day, observed annually on October 17, marking BIG's 55th anniversary. Under the theme "One Map, One Data Towards a Golden Indonesia," a range of events were held from August to November 2024. These included a map-drawing competition, a geospatial photography contest, a cleanliness competition, seminars and workshops, an open house, an awards ceremony, a fun walk, a futsal match, and a table tennis tournament for employees.

Kegiatan Sosial untuk Masyarakat

Community Engagement Activities

Donor Darah

Blood Donation Drive

80 orang

80 participants



16 Oktober 2024

October 16, 2024



Gedung I Balai Layanan BIG

Building I, BIG Service Center



Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan umum dan gigi, terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, dan dilanjutkan dengan konsultasi kesehatan. Sedangkan pemeriksaan gigi meliputi pengobatan dan konsultasi kesehatan gigi.

Health screening services, including general and dental check-ups. General screenings cover blood pressure, blood sugar, uric acid, and cholesterol levels, followed by health consultations. Dental services include examinations, treatment, and oral health consultations.



16 Oktober 2024

October 16, 2024



Gedung I Balai Layanan Ruang VIP

Building I, VIP Room in the Service Center



jumlah peserta pemeriksaan kesehatan umum adalah 103 orang dengan rincian 80 orang dewasa, 19 lansia, dan 4 anak-anak. Sedangkan jumlah peserta pemeriksaan kesehatan gigi sebanyak 58 orang dengan rincian 50 orang dewasa, 4 lansia, dan 4 anak-anak. Sementara itu jumlah peserta dari kalangan BIG berjumlah 55 orang yang terdiri dari 50 orang dewasa dan 5 pensiunan BIG.

A total of 103 individuals participated in the general health check-up, comprising 80 adults, 19 elderly, and four (4) children. The dental health check-up served 58 participants, including 50 adults, four (4) elderly, and four (4) children. Of the total, 55 participants were from the internal BIG, consisting of 50 active employees and five retirees.

Khitanan massal bekerja sama dengan Klinik Anda Rosmala, Cibinong, Kabupaten Bogor. Selain dikhitan, para peserta juga diberikan bingkisan berupa tas ransel, sarung, tumbler set, snack dan makan siang, serta uang saku.

A mass circumcision program was conducted in collaboration with Anda Rosmala Clinic, Cibinong, Bogor Regency. In addition to the medical procedure, participants received gift packages, including backpacks, sarongs, tumblers, snacks, lunch, and pocket money.



21 Oktober 2024

October 21, 2024



Gedung I lantai 1

First floor in the Building I



20 anak-anak pegawai BIG dan masyarakat umum.

Twenty (20) children, comprising those of BIG employees and members of the public



Jumat Berkah *Blessed Friday*



4 Oktober 2024
October 4, 2024



**Sekolah Luar Biasa
(SLB) Cahaya Quran
Ciampea, Kabupaten
Bogor.**
*SLB Cahaya Quran,
Ciampea, Bogor Regency*

**Yayasan Tabungan Surga yang
mengelola SLB Cahaya Quran, menerima
santunan berupa sembako, seperti
beras, gula, minyak goreng, dan mie
instan.**

*Yayasan Tabungan Surga, which manages SLB
Cahaya Quran, received donations for packages
of necessary goods, including rice, sugar, cooking
oil, and instant noodles.*



11 Oktober 2024
October 11, 2024



**Wisma Tuna Ganda
Palsigunung, Jakarta
Timur.**
*Wisma Tuna Ganda
Palsigunung, East Jakarta*

**Penghuni Wisma Tuna Ganda
Palsigunung, Jakarta Timur
mendapatkan sembako.**

*Wisma Tuna Ganda Palsigunung residents in
East Jakarta were provided with packages of
necessary goods.*



18 Oktober 2024
October 18, 2024



**Panti Asuhan Karena
Doa, Kota Depok.**
*Karena Doa Orphanage,
Depok City*

**Anak-anak Panti Asuhan Karena Doa,
Kota Depok menerima sembako.**

*Children from Karena Doa Orphanage, Depok
City, received packages of necessary goods.*

Santunan Pendidikan *Educational Assistance*

**Diberikan kepada 30 siswa tingkat SD,
21 tingkat SMP, dan 16 tingkat SMA yang
merupakan putra-putri pegawai non ASN
BIG seperti sopir, petugas kebersihan,
dan petugas keamanan.**

*Awarded to 30 elementary, 21 junior high,
and 16 senior high school students, all
children of non-ASN BIG employees, such
as drivers, cleaners, and security officers*



Kegiatan Sosial untuk Masyarakat

Community Engagement Activities



Donor Darah
Blood Donation Drive



Pemeriksaan Kesehatan
Health Screening Services





Jumat Berkah
Blessed Friday



Santunan Pendidikan
Educational Assistance





**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

TIM PENYUSUN

Editorial Team

Pengarah | Advisor

Muh Aris Marfai
Belinda Arunarwati Margono
Mohamad Arief Syafi'i
Antonius Bambang Wijanarto
Ibnu Sofian

Penanggungjawab | Coordinator

Mone Iye Cornelia Marschiavelli

Penyunting | Editor

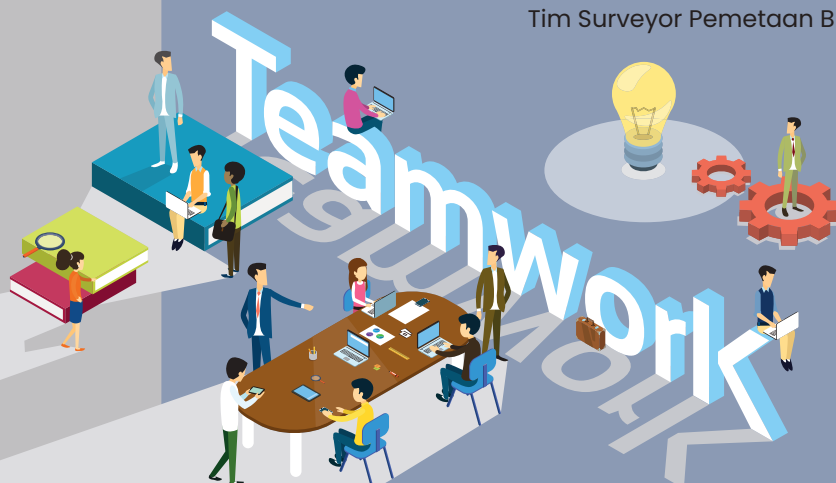
Tia Rizka Nuzula Rachma
Luciana Retno Prastiwi
Ellen Suryanegara
Achmad Faisal Nurghani
Intan Pujawati
Kesturi Haryunani Pendari

Fotografer | Photographer

Risa Krisadhi
Muhammad Afif
Ivan Setiawan
Edwin Rico
Huswanto Anggit
Muchamad Wildan Burhani
Tim Surveyor Pemetaan BIG

Kontributor | Contributor

Al-Iqbal Fatiha Bhinar Jaya
Irba Zahra Salsabila
Danan Setyo Nugroho
Gin Gin Gustiar
Rizal Nafis Elfahdi
Fachmi Zain
Erna Kusumawati
Ninuk Christina Anggraeni
Dimas Prawira Dwi Saputra
Fatichatus Istighfarini
Dhiyaulhaq Al Majid
Evita Rahayu
Suarlan
Reza Esa Suci Saputra
Tri Raharjo
Andika Mauradhia
Alkindi Gifty Ramadhan
Diyah Nova Nurjanah
Harris Yuson
Henky Nugraha
Agri Kristal
Indres Deswita
Utsri Yustina Purwanto
Bondan Vitorini
Desi Afrina
Tommy Nautico
Maya Scoryna Purwidyanti
Abdi Maulana Arizali
Agung Teguh Mandira
Bramanto Apriandi
Farrah Leovita Pangestu
Luthfia Nuraini
Nurmitha Atmia
Sri Mardia Ningsih





**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Our Office

Jalan Raya Bogor KM 46, Kawasan Sains dan Teknologi
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911

Telp: (021) 8753155, (021) 8752062

Ext. 3608/3611/3103

E-mail: info@big.go.id

Geoportal: tanahair.indonesia.go.id